



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah APBD disahkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan APBD. Pemerintah Daerah harus bisa merealisasikan target-target pendapatan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap. Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada DPRD. Sebelum Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Dumai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

**1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**2. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

**3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

**4. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 60 Seri E);



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 5 Seri A); dan
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 7 Seri A)

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

**2. Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Kinerja APBD**

1. Kebijakan Fiskal/Keuangan
2. Ekonomi makro

**3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan
2. Ikhtisar Realisasi Belanja
3. Ikhtisar Pembiayaan
4. Bidang-bidang organisasi Pemerintah Kota Dumai
5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

**4. Kebijakan Akuntansi**

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

**5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**6. Pengungkapan atas Informasi Lainnya**

**7. Penutup**



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**BAB II**

**KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO,  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan**

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka memastikan kebijakan dan tujuan nasional menggunakan instrumen kebijakan fiskal di APBN tetap sinkron dengan yang dilakukan pemerintah daerah. APBN dan APBD bekerja sama secara sinergis, harmonis, dan selaras untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

Ada tiga tugas utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bidang ekonomi sebagai prioritas pembangunan, yaitu Pertama, merumuskan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus fungsi penyediaan kesempatan kerja. Kedua, mencermati karakter pertumbuhan ekonomi di tiap daerah agar bisa mencetak model pembangunan ekonomi regional. Ketiga, pemetaan potensi daerah dari segala sisi untuk menajamkan fokus pembangunan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu Tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah kebijakan bagi perencanaan pembangunan Kota Dumai dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMD adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”. Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2021-2026, adalah " Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ". RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, Renstra dan Renja OPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

Tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi. Selanjutnya, prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas Kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic yang terjadi.

Perkembangan ekonomi global di tahun 2021 diproyeksikan mengalami sedikit pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 meski masih diwarnai ketidakpastian, terutama diakibatkan oleh pandemic covid-19. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan tetap akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2021. Kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perkembangan teknologi informasi dan meluasnya jasa layanan pasar modal diperkirakan masih memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, konsistensi belanja pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Namun perlu juga diwaspadai dampak pandemic covid-19 yang diperkirakan akan membawa dampak perekonomian bagi Indonesia umumnya dan Kota Dumai pada khususnya, terutama pada sektor pariwisata dan jasa.

Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah terkait mitigasi dampak Covid 19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat wabah Covid 19 juga menjadi hal penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dengan kejadian Wabah Covid 19 yang merupakan bencana non alam, tentunya hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah kota Dumai dalam merencanakan pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan kejadian bencana baik yang



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

disebabkan oleh alam maupun non alam. Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembalimelakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi exclusion dan inclusion error, terutama kelompok miskin dan rentan baru pascapandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turundi masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Kota Dumai TA 2021 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengaktifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan T.A. 2020.

Hal lain yang juga mempengaruhi kebijakan umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 khususnya untuk penyesuaian belanja daerah adalah pertimbangan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja



## **PEMERINTAH KOTA DUMAI**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dan/atau stabilitas sistem keuangan, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2021 untuk mengakomodir target janji politik walikota terpilih, khususnya pencapaian target 100 hari dan target semester pertama jabatan

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

2. **Disiplin Anggaran**

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. **Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Kebijakan terhadap struktur APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



## PEMERINTAH KOTA DUMAI

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan Kota Dumai yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
  - b. Transfer Antar Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan dampaknya;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KM.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/pmk.07/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021;
5. Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai 13 Desember 2021, PPJ tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan dihasilkan sumber lain selain PLN. Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut, Pemda hanya dapat memungut PPJ atas listrik yang dihasilkan PLN kepada masyarakat.
6. Realisasi Pendapatan tahun 2020.

Peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan usaha, baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kota Dumai melalui berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan dan keberhasilan penggalan potensi pendapatan daerah Kota Dumai, telah diupayakan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi, diantaranya diarahkan pada:



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- a. Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan memperbaiki program kegiatan yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- c. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah untuk tercapainya peningkatan PAD;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya;
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah;
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2021 didasarkan pada alokasi dana perimbangan tahun 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2020.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Melakukan Intensifikasi maupun ekstensifikasi di Bidang Pendapatan;
2. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
3. Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah
4. Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
5. Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap PAD;
6. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
7. Peningkatan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik
8. Koordinasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan PAD
9. Peningkat kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan daerah.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

10. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD.
11. Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain
12. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan dana transfer
13. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah
14. Sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah
15. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah
16. Penyederhanaan dan modernisasi sistem Pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparat.
17. Updating Basis Data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah
18. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan retribusi daerah
19. Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan Retribusi daerah.
20. Pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang Pendapatan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit perbendaharaan.

Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Kota Dumai, diarahkan pada:

- a. Mengutamakan pemanfaatan belanja yang menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Dumai; dan
- d. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja daerah Tahun 2021 dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut azas proporsional, efisien dan efektif dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Penentuan alokasi anggaran belanja sejalan dengan prioritas pembangunan sebagai langkah berkelanjutan dalam upaya pencapaian dengan visi Kota Dumai;
2. Penerapan alokasi belanja berbasis output/outcomes.
3. Penerapan standar harga dan biaya dilakukan secara optimal agar terjadi efisiensi anggaran.
4. Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta honorarium kegiatan dengan menerapkan asas efisiensi dan ekonomis serta efektif dalam pengertian seluruh program kerja dapat dituntaskan tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan unit kerja dan masyarakat.
5. Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan-kegiatan ditujukan untuk operasional rutin kegiatan, menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menambah atau mengganti inventaris yang sudah tidak layak pakai.
6. Belanja Modal diarahkan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, serta pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat menambah aset bagi Pemerintah Kota Dumai.
7. Belanja Tidak Terduga diprioritaskan untuk penanganan pasca bencana alam, bencana sosial dan penanganan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
8. Bantuan Keuangan disalurkan kepada kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara transparan dan tepat sasaran, termasuk didalamnya block grant yang penggunaannya didasarkan atas permintaan masyarakat pada kelurahan sehingga terjadi sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Dumai dengan masyarakat melalui kelurahan.
9. Perbaikan penghasilan Pegawai Non-PNS.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: SiLPA Tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Adapun Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sehingga dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang/pinjaman.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah deviden (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

## 2.2 Ekonomi Makro

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kota Dumai. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi ekonomi Kota Dumai Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”.

a. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB dengan jenis ini isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap Tahun. Dengan menggunakan harga berlaku, kita bisa melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu, bisa juga untuk melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada Tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

b. PDRB atas dasar harga konstan

PDRB dengan jenis ini, isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai dasar. Biasanya, Tahun yang dijadikan harga dasar ini diubah setiap sepuluh Tahun sekali, dengan tujuan untuk pembaruan. Selain itu juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah daerah dari Tahun ke Tahun. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari Tahun ke Tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor. Indeks implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (producer price index). Indeks implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga produsen dari barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi di sisi produsen.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Bila kita lihat angka PDRB tahun 2020-2021 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 36.326,79 miliar rupiah pada tahun 2020 meningkat menjadi 39.999,41 miliar rupiah di tahun 2021. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 24.597,99 miliar rupiah pada tahun 2020 meningkat menjadi 26.068,58 miliar rupiah pada tahun 2021. Indeks implisit di Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 153,44 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 53,44 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada tahun 2021 sebesar 3,90 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 3,90 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 6,55 persen.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan inflasi. Selain menjadi indikator ekonomi, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi indikator kemakmuran suatu daerah Laju pertumbuhan PDRB Kota Dumai tahun 2021 sebesar 5,98%, sementara Provinsi Riau sebesar 3,36%.

**Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Di kota Dumai Tahun 2017 - 2021**

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.190,35	1.223,32	1.247,92	1.299,76	1.351,37
B.	Pertambangan & penggalian	79,73	76,74	78,51	77,47	77,97
C.	Industri pengolahan		13.605,10	14.581,61	15.020,31	16.006,34
D.	Pengadaan listrik dan gas.		17,84	19,14	45,61	57,81
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,68	3,72	3,95	4,11	4,43
F.	Konstruksi	2.300,70	2.360,06	2.458,03	2.383,80	2.384,99
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.967,11	4.042,84	4.158,87	3.730,30	4.066,73
H.	Transportasi dan pergudangan	650,89	675,94	712,13	465,48	467,44



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	163,77	174,35	180,83	145,58	173,38
J.	Informasi dan komunikasi	271,85	287,48	308,20	336,68	350,59
K.	Jasa keuangan dan asuransi	264,91	270,44	270,75	280,07	292,58
L.	Real estat	99,41	103,20	108,66	110,43	113,30
M,N	Jasa perusahaan	1,14	1,25	1,34	1,05	1,06
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	431,15	432,38	442,43	432,88	442,18
P.	Jasa pendidikan	97,72	101,57	107,28	108,79	111,57
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	34,38	36,29	40,22	46,10	50,86
R.,S,T,U	Jasa lainnya	115,97	125,95	137,02	109,57	115,97
<b>PDRB</b>		<b>22.344,84</b>	<b>23.538,47</b>	<b>24.856,90</b>	<b>24.597,99</b>	<b>26.068,58</b>

**Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha kota Dumai  
Tahun 2017 - 2021**

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.806,63	1.875,18	1.923,59	2.079,11	2.303,17
B.	Pertambangan & penggalian	116,79	120,04	128,17	129,55	132,99
C.	Industri pengolahan	16.611,66	18.660,48	20.867,98	21.785,57	24.346,07
D.	Pengadaan listrik dan gas.	27,10	28,10	31,77	73,72	92,98
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,74	4,88	5,33	5,60	6,04
F.	Konstruksi	3.533,02	3.786,76	4.049,17	3.941,63	3.995,66
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.250,80	5.413,96	5.736,01	5.258,19	5.873,68
H.	Transportasi dan pergudangan	918,54	973,79	1.055,62	726,94	759,02



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	280,82	303,73	319,40	260,31	314,99
J.	Informasi dan komunikasi	333,68	380,26	418,39	457,24	478,07
K.	Jasa keuangan dan asuransi	375,46	390,06	397,13	409,20	449,22
L.	Real estate	143,28	153,05	161,76	164,08	168,40
M.N	Jasa perusahaan	1,66	1,84	2,06	1,63	1,65
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	553,24	568,68	587,76	590,24	605,35
P.	Jasa pendidikan	155,05	161,94	177,13	185,34	192,27
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan social	53,47	56,82	65,84	77,38	86,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	176,90	196,64	220,03	181,04	193,57
<b>PDRB</b>		<b>30.342,84</b>	<b>33.076,21</b>	<b>36.147,15</b>	<b>36.326,79</b>	<b>39.999,41</b>

**Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kota Dumai Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha**

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,31	2,77	1,99	4,18	3,97
B.	Pertambangan dan Penggalian	-4,95	-3,75	2,30	-1,30	0,65
C.	Industri Pengolahan	5,17	7,51	7,17	3,01	6,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	1,04	3,21	7,29	138,28	26,75
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	1,13	6,24	3,90	7,78
F.	Konstruksi / Bangunan	5,34	2,58	4,15	-3,02	0,05
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,84	1,91	2,89	-10,30	9,02
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,82	3,85	5,35	-34,64	0,42
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,30	6,46	3,79	-20,01	19,10



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
J.	Informasi dan Komunikasi	6,25	5,75	7,21	9,24	4,13
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,74	2,09	0,12	3,44	4,47
L.	Real Estate	3,43	3,81	5,24	1,65	2,60
M, N	Jasa Perusahaan	6,91	9,07	7,74	-22,06	1,65
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	0,28	2,33	-2,16	2,15
P.	Jasa Pendidikan	2,70	3,94	5,62	1,41	2,55
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,49	5,57	10,83	14,62	10,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,99	8,61	8,79	-20,03	5,84
<b>PERTUMBUHAN EKONOMI</b>		<b>4,46</b>	<b>5,34</b>	<b>5,60</b>	<b>-1,05</b>	<b>5,98</b>

## 2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi terbesar yang terjadi selama tahun 2021 di Kota Dumai adalah pada bulan Mei yaitu sebesar 0,65 persen, yang mana kelompok pakaian dan alas kaki memberikan kontribusi terbesar terjadinya inflasi pada bulan tersebut. Sementara pada Februari, Maret, Agustus dan Desember 2021 terjadi deflasi, yang berarti bahwa di Kota Dumai pada bulan-bulan tersebut umumnya terjadi penurunan harga barang/jasa konsumen, yang mana kelompok bahan makanan memberikan andil terbesar pada penurunan harga tersebut. Deflasi terbesar selama tahun 2021 terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 0,38 persen.

**Tabel 2.4 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2017 – 2021**

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,58	0,36	-0,04	0,54	0,4
Februari	1,12	-0,24	-0,32	0,21	-0,38

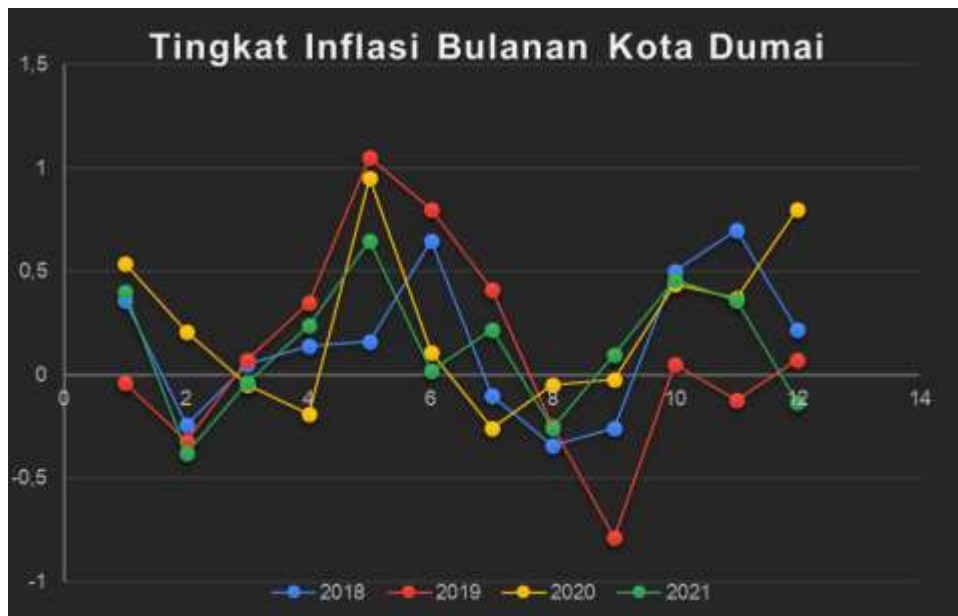


**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Maret	-0,19	0,05	0,07	-0,05	-0,04
April	-0,21	0,14	0,35	-0,19	0,24
Mei	0,11	0,16	1,05	0,95	0,65
Juni	0,90	0,65	0,80	0,11	0,02
Juli	0,05	-0,10	0,41	-0,26	0,22
Agustus	0,14	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26
September	0,05	-0,26	-0,79	-0,02	0,1
Oktober	0,08	0,50	0,05	0,44	0,46
November	0,62	0,70	-0,12	0,37	0,36
Desember	0,53	0,22	0,07	0,80	-0,13

Catatan: Tahun 2020 menghitung inflasi dengan menggunakan Tahun Dasar 2018 dan terdiri dari 11 kelompok pengeluaran

**Gambar 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 – 2021**





**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
  - a. Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan.
  - b. Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif.
  - c. Sinergi TPID dengan produsen dan retailer.
2. Aspek Program
  - a. Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
  - b. Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyesuaian asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
3. Aspek Komitmen dan Komunikasi
  - a. Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID.
  - b. Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.

3. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam pembangunan suatu daerah, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Sejak Tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya.

Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut di Kota Dumai cenderung meningkat selama Tahun 2015-2019.

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 7,12%. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kota Dumai memiliki 3,42% penduduk miskin di tahun 2021. Dari aspek pembangunan manusia, nilai IPM Kota Dumai adalah sebesar 74,75. Nilai ini berada diatas nilai IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 72,94.

**Tabel 2.5 Indikator IPM Kota Dumai**

Uraian	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	70,55	70,82	70,93	70,98
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,98	13,10	13,12	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,84	9,85	10,07	10,14
Pengeluaran PerKapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	12.063	12.453	11.751	11.818

**Tabel 2.6 Indikator IPM Provinsi Riau dan Kota Dumai**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75
Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94



Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai



#### 4. Energi

Energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksible artinya dapat berpindah dan berubah.

Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya pembangkit tenaga listrik yang terpasang serta perluasan jaringan distribusi agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, PLN membeli/menerima listrik sebesar 864.621.898 KWh dengan kapasitas yang terjual sebesar 863.302.793 KWh. Jumlah pelanggan PLN Kota Dumai tahun 2021 sebanyak 102.126, dengan 86,54 persen merupakan pelanggan rumah tangga.

Pada tahun 2021, pelanggan PDAM Kota Dumai adalah 426.072 pelanggan. Air yang didistribusikan ke jenis pelanggan sosial sebanyak 31.851m<sup>3</sup>, ke instansi pemerintah 3.686 m<sup>3</sup>, ke pelanggan rumah tangga 215.699,49m<sup>3</sup>, ke pelanggan niaga 43.456 m<sup>3</sup> dan ke pelanggan industri sebanyak 281.298 m<sup>3</sup>.

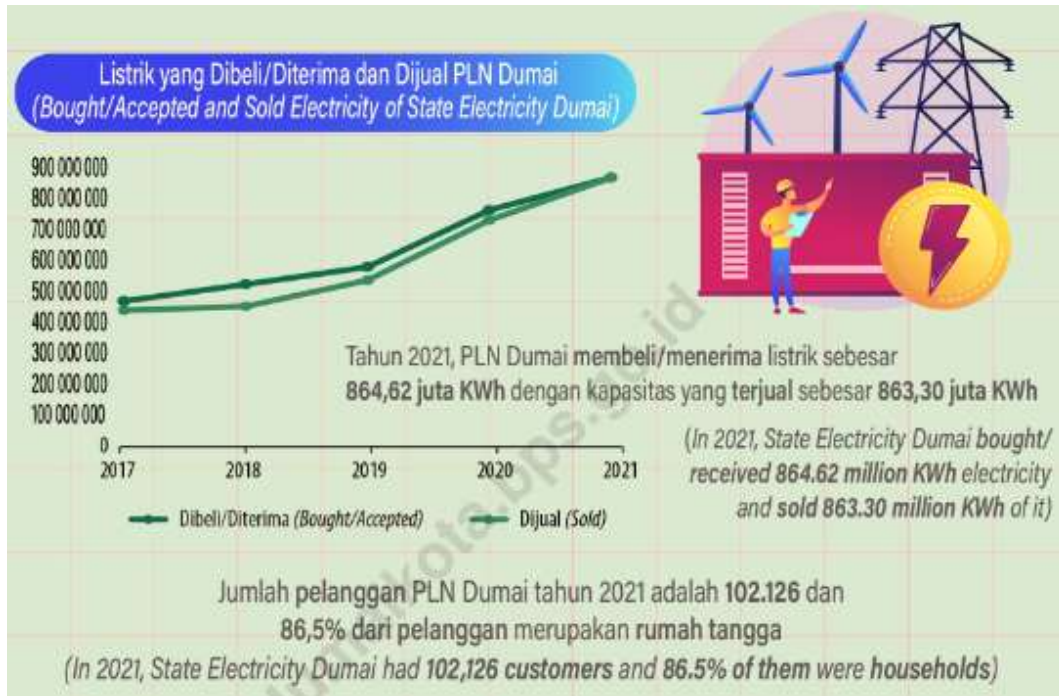


**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**Tabel 2.7 Banyaknya Penggunaan dan Distribusi Tenaga Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kota Dumai**

Jenis Pelanggan	2020		2021	
	Jumlah Pelanggan	Jumlah Distribusi Listrik (KWH)	Jumlah Pelanggan	Jumlah Distribusi Listrik (KWH)
Rumah Tangga	84.082	167.833.096	88.384	170.666.449
Bisnis	10.353	109.690.209	11.270	71.204.945
Industri	31	384.699.999	38	440.319.384
Sosial (Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah)	1.291	10.305.039	1.405	7.784.478
Publik (Penerangan Jalan)	719	5.872.659	729	5.308.683
Kantor Pemerintahan	297	8.504.584	300	7.169.820
<b>Dumai</b>	<b>96.773</b>	<b>686.905.586</b>	<b>102.126</b>	<b>702.453.759</b>

**Gambar 3 Listrik yang Dibeli/Diterima dan Dijual PLN Dumai**





**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kota Dumai Tahun 2021**

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan (m <sup>3</sup> )
Sosial Umum	4.776	11.965,00
Sosial Khusus	708	19.886,00
Instansi Pemerintah	2.054	3.686,00
Rumah Tangga Tingkat 1	179	47,00
Rumah Tangga Tingkat 2	57.311	203.298,00
Rumah Tangga Tingkat 3	13.268	12.354,49
Niaga Tingkat 1	27.058	41.625,00
Niaga Tingkat 2	1.700	1.831,00
Industri	319.018	281.298,00
<b>Dumai</b>	<b>426.072</b>	<b>575.990,49</b>

**Gambar 4 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan PDAM Dumai Tahun 2021**



5. Perdagangan

Barang-barang yang dikirim ke luar negeri untuk diolah dicatat sebagai ekspor, sedangkan hasil olahan yang dikembalikan ke Indonesia dicatat sebagai impor. Barang-barang luar negeri yang diolah di dalam negeri dicatat sebagai barang



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

impor meskipun barang olahan tersebut akan kembali ke luar negeri. Barang-barang yang tidak dicakup dalam pencatatan:

- a. Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang.
- b. Barang-barang bawaan penumpang dari/ke luar negeri untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat televisi, dan sebagainya.
- c. Barang-barang untuk keperluan perwakilan kedutaan suatu negara.
- d. Barang-barang ekspedisi dan ekshibisi atau pameran.
- e. Barang-barang untuk militer yang diimpor langsung oleh angkatan bersenjata
- f. Pembungkus/peti kemas untuk diisi kembali.
- g. Uang dan surat-surat berharga.
- h. Barang-barang contoh

Statistik perdagangan luar negeri meliputi barang yang di ekspor ke luar negeri dan yang di impor dari luar negeri melalui wilayah Kota Dumai. Salah satu sumber alam yang cukup berperan menunjang ekspor Kota Dumai adalah minyak bumi dan hasil tambang lainnya. Nilai ekspor Dumai pada Tahun 2021 adalah sebesar USD 15.446.321.562,76. Komoditi dengan nilai ekspor terbesar adalah Liquid fractions of refined palm oil, with iodine value 55 or more but less than 60 yaitu sebesar USD 4.305.803.774,66. Nilai impor Dumai pada Tahun 2021 adalah sebesar USD 614.021637,00 Komoditi dengan nilai impor terbesar adalah Potassium chloride yaitu sebesar USD 265.052.504,00. Negara tujuan ekspor melalui Kota Dumai dengan nilai terbesar pada tahun 2021 adalah India dengan nilai sebesar USD 2.195.832.540,72. Sementara itu negara asal impor terbesar melalui Kota Dumai adalah Singapura dengan nilai sebesar USD 49.081.275,00.

6. Hotel dan Pariwisata

Pada tahun 2021, di Kota Dumai tersedia 9 hotel berbintang (1 bintang satu, 3 bintang dua, 3 bintang tiga dan 2 bintang empat) dengan 748 kamar dan 1.134 tempat tidur serta 28 hotel melati dengan 747 kamar dan 1.108 tempat tidur. Selama tahun 2021 di Kota Dumai tercatat tidak terdapat kedatangan dan keberangkatan warga negara asing.

**Tabel 2.9 Statistik Hotel di Kota Dumai**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Akomodasi</b>					
Hotel Berbintang	7	7	8	9	9
Akomodasi lainnya	28	28	28	28	31
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>40</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jumlah Kamar</b>					
Hotel berbintang	501	524	635	748	748
Hotel Non Bintang	726	657	657	723	808
<b>Total</b>	<b>1.227</b>	<b>1.181</b>	<b>1.292</b>	<b>1.471</b>	<b>1.556</b>
<b>Jumlah Tempat Tidur</b>					
Hotel berbintang	754	729	905	1.134	1.134
Hotel Non Bintang	1.091	1.020	1.020	1.078	1.182
<b>Total</b>	<b>1.845</b>	<b>1.749</b>	<b>1.925</b>	<b>2.212</b>	<b>2.316</b>

**Tabel 2.10 Tempat-tempat Pariwisata di Kota Dumai**

Jenis	Lokasi
<b>A. WISATA ALAM</b>	
1. Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei - Pakning (Kel. Teluk Makmur)
2. Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
3. Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
4. Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
5. Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
6. Pantai Koneng	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
7. Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
8. Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
9. Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
10. Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
11. Pantai Salam Lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
12. Pantai Kampung Mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
13. Pantai Pesona Batu Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
14. Hutan Wisata	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
15. Danau Bunga Tujuh	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
16. Hutan Bakau UNRI	Jl. Raja Ali Haji Kel. Purnama
17. Wisata Sungai Mesjid	Jl. Dr. Wahidin Purnama
18. Kuala Sungai Dumai	Jl. Syekh Umar



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<b>Jenis</b>	<b>Lokasi</b>
19. Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
20. Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai
21. Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
22. Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
23. Kampung Lamo Pulai Bungk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
24. Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana)
25. Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
26. Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. HR Soebrantas
27. Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan
28. Embung Bukit Cahaya	Kel. Bumi Ayu
29. Sungai Dumai (Wisata Air)	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
30. Telaga Tirta Bukit Datuk	Komplek PERTAMINA - Bukit Datuk
<b>B. WISATA SEJARAH</b>	
1. Makan Pawang Lion	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
2. Perigi Tuk Kurus	Komplek Pertamina Bukit Datuk
3. Batu Telapak Harimau Sakti	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
4. Keramat Cengal Sakti	Jl. Teduh (Pangkalan Sesai)
5. Makan Tuk Kedondong	Komplek Patra Dock
6. Makam Tuk Syech Umar	Jl. Syech Umar
7. Pesanggarahan Putri Tujuh	Jl. Putri Tujuh (Kilang Pertamina)
<b>C. WISATA AGAMA</b>	
1. Dumai Islamic Center (DIC)	Jl. HR Soebrantas
2. Klenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Ratu Sima - Kelakap Tujuh
3. Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
4. Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
5. Wisata Religi Rumah Suluk	Kec. Sungai Sembilan - Basilam Baru
6. Masjid Terapung Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai- Sei. Pakning (Kel. Teluk Makmur)
<b>D. WISATA OLAH RAGA</b>	



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<b>Jenis</b>	<b>Lokasi</b>
1. Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk ( Komplek Pertamina RU II Dumai)
2. Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk ( Komplek Pertamina RU II Dumai)
3. Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk ( Komplek Pertamina RU II Dumai)
4. Wisata Mancing Wak Ngah Kampung Mundam	Mundam
<b>E. WISATA KULINER</b>	
1. DEKRANASDA Kota Dumai (BKemojo, Dodol, Keripik, dll)	Jl. Jend Sudirman No.55 (Samping Ramayana Plaza)
2. Wisata Kuliner Ombak (Menyediakan Berbagai Jenis Kuliner)	Jl. Sultan Hasanuddin / Jl. Ombak
3. Oleh - Oleh Khas Dumai (Kerupuk Cabe)	Jl. Pulau Mampu (Dekat Pasar P. Payung)
4. Dendeng Pucuk Ubi Fatmawa	Jl. Jeruk Jayamukti
5. Restoran Dan Rumah Makan	Jl. Tenaga - Sultan Syarif Kasim
6. Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	Jl. Kelakap Tujuh
7. Wisata Kuliner Dock Yard	Jl. Dock Yard
8. Kuliner Janur Kuning Jayamukti	Jl. Janur Kuning – Jaya Mukti
9. Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	Jl. Jend. Sudirman
<b>F. WISATA BELANJA</b>	
1. Ramayana Plaza	Jl. Jend. Sudirman
2. Citimall	Jl. Raya Bukit Datuk
3. Pasar Bunda Sei Mersing/ PPulau Payung	Jl. Diponegoro
4. Pasar Senggol	Jl. Jend. Sudirman
5. Pasar Lepin	Jl. Jend. Sudirman

7. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kependudukan

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015.

Jumlah penduduk Kota Dumai menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 253.803 jiwa dan luas wilayah seluas 1.727,38 km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk di Kota Dumai tahun 2010 adalah 147 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar 2,17 persen, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2020 bertambah menjadi 316.782 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 166.049 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 157.403 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 183 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan penduduk terbanyak tahun 2021 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 70.339 jiwa (21,76 persen), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 17.592 jiwa (5,44 persen). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun keatas, dengan jumlah masing-masing sebesar 34.249 jiwa dan 2.597 jiwa.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

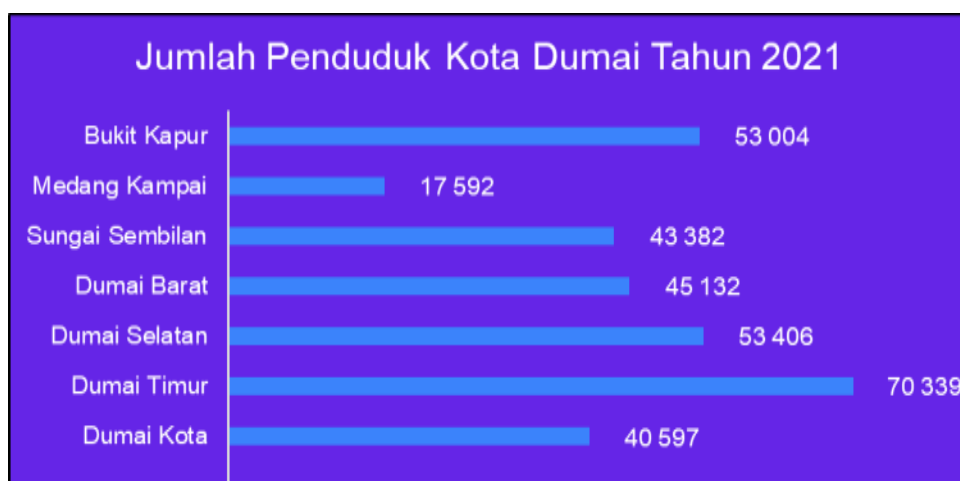
**Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2021 Kota Dumai**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-laki (Jiwa)	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049
Perempuan(Jiwa)	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403
Total (Jiwa)	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452
Sex Ratio	105,40	105,41	105,16	105,69	105,49
Pertumbuhan (%)	1,96	1,90	2,15	2,17	0,19
Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )	172	176	178,77	183	187

**Gambar 5 - Penduduk Kota Dumai Tahun 2021**



**Gambar 6 - Statistik Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2021 berdasrakan Kecamatan**





**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021, BPS mencatat dari 144.465 orang Angkatan Kerja (penduduk 15 tahun ke atas), 135.381 orang adalah Pekerja dan 9.084 orang adalah Penganggur. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Dumai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 4.878 orang dan terjadi penurunan sebesar 12,37 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan antar jenis kelamin, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang mana pada tahun 2021 terdaftar 3.832 laki-laki dan 1.046 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 2021 adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 84,32 persen (4.113 orang).

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai telah melaksanakan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai, yakni:

- Meningkatkan kesempatan kerja, khususnya bagi laki-laki kelompok umur dan pendidikan kejuruan;
- Meningkatkan pelatihan bagi pengangguran khususnya pendidikan menengah; dan
- Mendorong perluasan kesempatan kerja baru melalui kegiatan padat kerja produktif.

Sehingga diharapkan dengan kebijakan yang telah diterapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai.

**Tabel 2.12 Statistik Ketenagakerjaan Kota Dumai**

Uraian	2018	2019	2020	2021
Penduduk 15 Tahun Keatas	212.128	216.983	218.283	222.553
Angkatan Kerja	136.112	150.323	146.586	144.465
1. Bekerja	127.897	140.600	134.581	135.381
2. Pengangguran Terbuka	8.215	9.723	12.005	9.084
Bukan Angkatan Kerja	76.016	66.660	71.697	78.088
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	64,17	69,28	67,15	64,91
Tingkat Pengangguran (TPT) (%)	6,04	6,47	8,19	6,29



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 disajikan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan**

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.296.269.073.350,00</b>	<b>1.287.005.084.625,14</b>	<b>99,29</b>	<b>1.464.271.934.984,33</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>374.465.303.311,00</b>	<b>366.696.884.199,75</b>	<b>97,93</b>	<b>378.803.807.144,72</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	177.480.200.000,00	185.979.625.987,00	104,79	165.259.957.085,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	39.981.180.100,00	23.776.863.396,46	59,47	32.672.832.980,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.414.194.590,00	1.415.125.255,00	100,07	1.242.457.348,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.589.728.621,00	155.525.269.561,29	99,96	179.628.559.731,72
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>880.924.310.039,00</b>	<b>879.612.437.425,39</b>	<b>99,85</b>	<b>1.044.567.327.839,61</b>
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	772.049.363.425,00	763.025.612.681,00	98,83	871.455.522.631,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	62.673.426.709,00	61.856.297.144,00	98,70	47.181.306.000,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	74.635.036.911,00	83.612.659.443,00	112,03	196.815.267.029,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	429.427.931.000,00	429.427.931.000,00	100,00	424.090.440.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	173.709.723.805,00	156.525.480.094,00	90,11	203.368.509.602,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31.603.245.000	31.603.245.000	100,00	45.719.565.000,00
4.2.2.1	Dana Penyesuaian	31.603.245.000	31.603.245.000	100,00	45.719.565.000,00
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	95.223.946.614,00	108.598.824.744,39	114,05	88.124.940.208,61
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.223.946.614,00	108.598.824.744,39	114,05	88.124.940.208,61
4.2.4	Bantuan Keuangan	13.651.000.000,00	7.988.000.000,00	58,52	39.267.300.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	13.651.000.000,00	7.988.000.000,00	58,52	39.267.300.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>40.879.460.000,00</b>	<b>40.695.763.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>40.900.800.000,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55	40.900.800.000,00

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021 tercatat senilai Rp1.287.005.084.625,14 atau sebesar 99,29% dari target APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan senilai Rp1.296.269.079.350,00 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terdapat penurunan senilai Rp177.266.850.359,19 atau turun sebesar 12,11% dari



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

realisasi tahun sebelumnya senilai Rp1.464.271.934.984,33. Secara garis besar, komposisi pendapatan terbagi dalam:

**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp374.465.303.311,00 dengan realisasi senilai Rp366.696.884.199,75 atau sebesar 97,93%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp12.106.922.944,97 atau turun sebesar 3,20% dari realisasi tahun lalu senilai Rp378.803.807.144,72.

**2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer Pemerintah yang mencakup Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp880.924.310.039,00 dengan realisasi senilai Rp879.612.437.425,39 atau sebesar 99,85%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp164.954.890.414,22 atau turun sebesar 15,79% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.044.567.327.839,61.

**3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp40.879.460.000,00 dengan realisasi senilai Rp40.695.763.000,00 atau sebesar 99,55%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020, terdapat penurunan senilai Rp205.037.000,00 atau turun sebesar 0,50% dari realisasi tahun lalu.

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, salah satunya adalah melihat pada rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi Rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dan untuk Rasio kemandirian daerah Kota Dumai pada tahun 2020, tergambar sebagai berikut:

**a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan**

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp366.696.884.199,75 sedangkan Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2021 adalah senilai Rp1.287.005.084.625,14. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 28,49%.

**b. Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp366.696.884.199,75 dari total tersebut jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2021 adalah senilai Rp185.979.625.987,00.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Rasio Pendapatan Pajak terhadap PAD Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 50,72%.

c. Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp366.696.884.199,75 dari total tersebut jumlah Pendapatan Retribusi daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2021 adalah senilai Rp23.776.863.396,46. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 6,48%.

d. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp366.696.884.199,75 dari total tersebut jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2021 adalah senilai Rp1.415.125.255,00. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 0,39%.

e. Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp366.696.884.199,75 dari total tersebut jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dapat dicapai pada Tahun 2021 adalah senilai Rp155.525.269.561,29 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 42,41%.

f. Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.287.005.084.625,14 sedangkan Pendapatan Transfer Kota Dumai pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp879.612.437.425,39. Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 68,35%.

g. Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.287.005.084.625,14 sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Dumai pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp83.612.659.443,00. Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 6,50%.

h. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.287.005.084.625,14 sedangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp429.427.931.000,00. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 33,37%.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

i. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2021 tercatat senilai Rp429.427.931.000,00. Sedangkan jumlah Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2021 yaitu senilai Rp587.860.841.072,00. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2021 sebesar 73,05%.

j. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.287.005.084.625,14 sedangkan realisasi jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Dumai pada Tahun 2021 tercatat senilai Rp40.695.763.000,00. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 3,16%.

Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada tahun 2021, dihitung berdasarkan PAD terhadap jumlah antara Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Sehingga Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada tahun 2021 yaitu sebesar 41,69%. Kota Dumai masih memiliki Rasio PAD terhadap total pendapatan di bawah 50% yang artinya masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat atau memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah.

Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan, dimana jika makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah, ini dapat dilihat dari besarnya Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2021 yaitu sebesar 68,35%.

## 2. Ikhtisar Realisasi Belanja

Berikut disajikan realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 setelah di konversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.454.362.356.872,00</b>	<b>1.314.289.659.257,23</b>	<b>90,37</b>	<b>1.423.234.916.633,85</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.208.461.786.509,00</b>	<b>1.105.414.852.748,84</b>	<b>91,47</b>	<b>1.061.632.401.624,52</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	640.785.007.944,00	587.860.841.072,00	91,74	516.330.812.752,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.591.009.121,00	481.698.811.775,84	91,13	505.749.913.372,52
5.1.5	Belanja Hibah	39.085.769.444,00	35.855.199.901,00	91,73	35.706.875.500,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	0		3.844.800.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>234.465.493.304,00</b>	<b>199.818.329.751,39</b>	<b>85,22</b>	<b>244.706.629.874,33</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	19.418.340,00	17.000.000,00	87,55	417.533.120,94
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.935.417.395,00	84.487.469.177,00	80,51	79.237.744.886,87



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.160.640.419,00	52.685.031.521,31	92,17	70.743.218.181,13
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.768.399.633,00	56.397.085.845,08	89,85	78.745.131.364,39
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.581.617.517,00	6.231.743.208,00	65,04	15.563.002.321,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>11.435.077.059,00</b>	<b>9.056.476.757,00</b>	<b>79,20</b>	<b>116.895.885.135,00</b>
5.3.1	Belanja Tak Terduga	11.435.077.059,00	9.056.476.757,00	79,20	116.895.885.135,00
6.	<b>TRANSFER</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0			0,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0			0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(158.093.283.522,00)</b>	<b>(27.284.574.632,09)</b>	<b>17,26</b>	<b>41.037.018.350,48</b>

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp1.454.362.356.872,00 dengan realisasi senilai Rp1.314.289.659.257,23 atau sebesar 90,37%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp108.945.257.376,62 atau turun 7,65% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.423.234.916.633,85 dengan rincian sebagai berikut:

**1. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan senilai Rp1.105.414.852.748,84 atau sebesar 91,47% dari yang dianggarkan.

**2. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan senilai Rp199.818.329.751,39 atau sebesar 85,22 % dari anggaran.

**3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya senilai Rp11.435.077.059,00 pada tahun 2021 dan realisasi senilai Rp9.056.476.757,00 atau 79,20% dari anggaran.

Berikut ini akan beberapa jenis rasio yang terkait dalam pos belanja yaitu:

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.314.289.659.257,23 dari total tersebut jumlah Belanja Operasi yang dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah senilai Rp1.105.414.852.748,84. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2021 sebesar 84,11%

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.314.289.659.257,23 dari total tersebut jumlah Belanja Modal yang dapat direalisasikan pada Tahun 2021 adalah senilai



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Rp199.818.329.751,39. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 15,20%

c. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.314.289.659.257,23 dari total tersebut jumlah Belanja Tak Terduga yang dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah senilai Rp9.056.476.757,00. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 0,69%

d. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.314.289.659.257,23 dari total tersebut jumlah Belanja Transfer yang dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah senilai Rp0,00. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 0,00%

e. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.314.289.659.257,23 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah senilai Rp587.860.841.072,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 44,73%

f. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi

Realisasi Total Belanja Operasi Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.105.414.852.748,84 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada tahun 2021 adalah senilai Rp587.860.841.072,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 53,18%

g. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.314.289.659.257,23 dari total tersebut, tidak terdapat alokasi pada Belanja Bantuan Sosial. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 0,00%.

### **3. Ikhtisar Pembiayaan**

Berikut disajikan realisasi target kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
7	<b>PEMBIAYAAN</b>				
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>195.481.309.973,17</b>	<b>195.481.309.973,34</b>	<b>100,00</b>	<b>154.444.291.622,69</b>
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	195.481.309.973,17	195.481.309.973,34	100,00	154.444.291.622,69
7.1.2	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0,00
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank	0	0	0	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>195.481.309.973,17</b>	<b>195.481.309.973,34</b>	<b>100,00</b>	<b>154.444.291.622,69</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>37.388.026.451,17</b>	<b>168.196.735.341,25</b>	<b>449,87</b>	<b>195.481.309.973,17</b>

Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**1. Pembiayaan Penerimaan Daerah**

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp195.481.309.973,34 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan.

**2. Pembiayaan Pengeluaran Daerah**

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp0,00.

**3. Pembiayaan Netto**

Pembiayaan Netto senilai Rp195.481.309.973,34 atau 100,02% dari yang dianggarkan, merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

**4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 senilai Rp168.196.735.341,25 atau sebesar 449,87% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan jumlah dari surplus belanja senilai Rp37.388.026.451,17 dengan Pembiayaan Netto senilai Rp195.481.309.973,34.

**4. Bidang-bidang Organisasi Pemerintah Kota Dumai**

Format Susunan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**I. URUSAN WAJIB**

Pada Tahun Anggaran 2021 urusan wajib mendapat alokasi dana senilai Rp1.115.147.121.920,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp1.029.652.553.271,47 atau sebesar 92,33% dari anggaran.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

**1. PENDIDIKAN**

**1) Dinas Pendidikan**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp354.232.885.850,00 sampai akhir tahun anggaran unit kerja ini terealisasi senilai Rp340.006.084.615,09 atau sebesar 95,98% dari anggaran.

**2. KESEHATAN**

**1) Dinas Kesehatan**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp404.098.749.505,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp375.278.936.545,78 atau sebesar 92,87% dari anggaran. Dinas Kesehatan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp135.605.166.666,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp138.966.457.061,10 atau sebesar 102,49% dari anggaran.

**3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp129.976.228.390,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp119.699.196.459,22 atau 92,09% dari anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp130.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp133.000.000,00 atau 102,31% dari anggaran.

**4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

**1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp16.515.317.970,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.521.974.443,00 atau 57,66% dari anggaran.

**5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**1) Satuan Polisi Pamong Praja**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.813.070.133,00 sampai akhir tahun anggaran



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

bidang ini terealisasi senilai Rp8.404.985.965,00 atau 95,37% dari anggaran.

2) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp22.490.060.964,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.154.393.435,76 atau 45,15% dari anggaran.

3) **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.089.426.813,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.600.385.660,00 atau 93,95% dari anggaran.

6. **SOSIAL**

1) **Dinas Sosial**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.505.392.718,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp5.921.648.656,00 atau 91,03% dari anggaran.

B. **URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

1. **TENAGA KERJA**

1) **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp5.208.000.949,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp4.721.646.855,00 atau 90,66% dari anggaran.

2. **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1) **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.204.807.963,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.238.535.621,00 atau 88,22% dari anggaran.

3. **PANGAN**

1) **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.**

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp22.775.714.491,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp21.574.240.901,00 atau 94,72% dari anggaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Rp24.480.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp24.680.000,00 atau 100,82% dari anggaran.

4. LINGKUNGAN HIDUP

1) Dinas Lingkungan Hidup.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp21.292.553.399,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp20.691.265.932,00 atau 97,18% dari anggaran. Dinas Lingkungan Hidup juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp750.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp775.275.000,00 atau 103,37% dari anggaran.

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.310.024.228,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.890.531.667,00 atau 94,95% dari anggaran.

6. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.350.824.211,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.860.585.997,00 atau 82,15% dari anggaran.

7. PERHUBUNGAN

1) Dinas Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp47.672.766.364,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp44.782.140.930,00 atau 93,94% dari anggaran. Dinas Perhubungan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp26.056.350.100,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp18.445.280.296,46 atau 70,79% dari anggaran.

8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.942.532.217,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.518.032.590,00 atau 96,45% dari anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika juga



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp530.400.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp556.449.100,00 atau 104,91% dari anggaran.

9. **PENANAMAN MODAL**

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.837.720.928,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.337.404.185,00 atau 83,02% dari anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp13.000.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp3.357.225.000,00 atau 25,83% dari anggaran.

10. **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp15.714.973.701,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp14.709.394.736,62 atau 93,60% dari anggaran.

11. **PERPUSTAKAAN**

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.116.071.126,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp5.741.168.077,00 atau 93,87% dari anggaran.

**II. URUSAN PILIHAN**

Pada Tahun Anggaran 2021 urusan pilihan mendapat alokasi dana senilai Rp22.676.749.837,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp19.868.991.063,00 atau 87,62% dari anggaran.

1. **KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1) Dinas Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.757.656.244,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.020.642.459,00 atau 90,50% dari anggaran. Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp25.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp7.885.000,00 atau 31,54% dari anggaran.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. PERDAGANGAN

1) Dinas Perdagangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.222.893.943,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.995.608.397,00 atau 85,07% dari anggaran. Dinas Perdagangan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp544.950.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp571.789.000,00 atau 104,93% dari anggaran.

3. PERINDUSTRIAN

1) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.696.199.650,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp5.852.740.207,00 atau 87,40%

**III. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENDUKUNG DAN PENUNJANG**

Pada Tahun Anggaran 2021 urusan pemerintahan fungsi penunjang mendapat alokasi dana senilai Rp316.538.485.115,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp264.768.114.922,76 atau 83,64% dari anggaran.

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1) Sekretariat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp54.344.146.399,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp47.610.904.074,00 atau sebesar 87,61% dari anggaran. Sekretariat Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp50.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp38.250.000,00 atau sebesar 76,50% dari anggaran.

2) Sekretariat DPRD

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp54.261.314.057,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp36.780.442.292,00 atau sebesar 67,78% dari anggaran.

3) Kecamatan Dumai Barat

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.698.428.121,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.978.508.026,00 atau sebesar 93,85% dari anggaran.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

4) Kecamatan Dumai Timur

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja Rp13.858.513.834,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.710.746.398,00 atau sebesar 84,50% dari anggaran.

5) Kecamatan Bukit Kapur

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp16.435.118.406,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp14.633.772.536,00 atau sebesar 89,04% dari anggaran.

6) Kecamatan Medang Kampai

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.241.434.284,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.429.502.216,00 atau sebesar 92,78% dari anggaran.

7) Kecamatan Sungai Sembilan

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp14.882.374.618,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.284.434.800,00 atau sebesar 75,82% dari anggaran.

8) Kecamatan Dumai Kota

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp15.205.612.963,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.378.893.608,00 atau sebesar 81,41% dari anggaran.

9) Kecamatan Dumai Selatan

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp14.378.127.451,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.865.085.937,00 atau sebesar 89,48% dari anggaran.

2. PENGAWASAN

1) Inspektorat

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp12.846.805.910,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.034.713.580,00 atau sebesar 93,68% dari anggaran.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

3. PERENCANAAN

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.158.940.433,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.821.209.909,00 atau sebesar 79,05% dari anggaran.

4. KEUANGAN

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp53.363.667.303,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp45.816.626.617,00 atau sebesar 85,86% dari anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp937.921.379.500,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp937.530.255.658,58 atau sebesar 99,96% dari anggaran

2) Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp23.893.711.788,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp21.292.079.979,00 atau sebesar 89,11% dari anggaran. Badan Pendapatan Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp181.631.347.084,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp186.598.508.509,00 atau sebesar 102,73% dari anggaran.

5. KEPEGAWAIAN

1) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.970.289.548,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.131.194.950,00 atau sebesar 90,65% dari anggaran.

**5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.**

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan potensi keuangan daerah belum tergalai secara optimal;



## **PEMERINTAH KOTA DUMAI**

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- b. Sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum tergarap secara optimal akibat data potensi usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik;
- c. Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.
- d. Kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya belum sebagaimana yang kita harapkan.
- e. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah belum optimal;
- f. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- g. Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran. Serta Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

**a. Entitas Pelaporan**

- 1) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Dumai dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 2) Pemerintah Kota Dumai sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

**b. Entitas Akuntansi**

- 1) Setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- 2) Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu, seperti badan layanan umum daerah (BLUD), yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kota Dumai ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

**2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Dumai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Dumai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

**3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Pemerintah Kota Dumai mulai Tahun 2015 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrual dan Buletin Teknis yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Basis akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan - LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

**Ruang Lingkup**

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Dumai, sedangkan entitas akuntansi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam lingkup Pemerintah Kota Dumai, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

**TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
  - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
  - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
  - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
  - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
  - a. Aset;
  - b. Kewajiban;
  - c. Ekuitas;
  - d. Pendapatan-LRA;
  - e. Belanja;
  - f. Transfer;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Saldo Anggaran Lebih;
  - i. Pendapatan-LO;
  - j. Beban; dan
  - k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

**KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat OPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi LRA ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh OPD/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), PPKD, dan Pemda.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintahan Kota Dumai).

**STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
  - a. Nama SKPD/PPKD/Pemda;
  - b. Periode yang dicakup;  
Mmata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
  - c. Satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**Tujuan**

1. Tujuan pernyataan standar LO adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LO Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

**STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL**

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
  - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
  - b. Cakupan entitas pelaporan;
  - c. Periode yang dicakup;
  - d. Mata uang pelaporan; dan
  - e. Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan - LO;
  - b. Beban;
  - c. Surplus/Defisit dari Operasi;
  - d. Kegiatan Non Operasional;
  - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
  - f. Pos Luar Biasa; dan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

g. Surplus/Defisit - LO.

#### **4. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA**

##### **Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

##### **Ruang Lingkup**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### **Klasifikasi**

1. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
  - a. Kas dan setara kas;
  - b. Investasi jangka pendek;
  - c. Piutang;
  - d. Persediaan;
  - e. Investasi jangka panjang;
  - f. Aset tetap;
  - g. Kewajiban jangka pendek;
  - h. Kewajiban jangka panjang; dan
  - i. Ekuitas.

#### **5. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS**

##### **Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**Ruang Lingkup**

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**KAS DAN SETARA KAS**

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

**PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

**6. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan OPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian BLUD pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

**KETENTUAN UMUM**

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA**

**Tujuan**

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LRA Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

**PENGAKUAN**

Pendapatan - LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

**PENGUKURAN**

1. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang biaya terhadap Pendapatan - LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LRA adalah:
  - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

**8. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

**Tujuan**

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

**PENGAKUAN**

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - GU atau SP2D Nihil.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

**PENGUKURAN**

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi
  - b. Belanja Modal
  - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

**9. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER**

**Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**PENGAKUAN**

**Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. apabila pada saat proses penyusunan laporan keuangan tahun berkenaan terjadi transfer atas pendapatan tahun berkenaan dan tahun tahun sebelumnya, yang penerimaan kasnya setelah tanggal 31 Desember tahun berkenaan sampai saat penerbitan laporan keuangan, maka pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan – LO tahun berkenaan.

**Transfer Keluar dan Beban Transfer**

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

**PENGUKURAN**

**Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

**Transfer Keluar dan Beban Transfer**

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas belanja anggaran transfer keluar.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **PENILAIAN**

#### **Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

### **PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **10. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

### **Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.

### **PENGAKUAN**

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

### **PENGUKURAN**

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### **AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

### **AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR**

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

**PENGUNGKAPAN**

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

**11. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO**

**Tujuan**

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LO yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

**PENGAKUAN**

Pendapatan - LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan atau;
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**PENGUKURAN**

1. Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, dan sebagainya.
4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat senilai nilai nominal kas yang diterima pemda.
5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat senilai estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Pendapatan - LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:
  - a. Penerimaan Pendapatan - LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. Penjelasan mengenai Pendapatan - LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**12. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

**Tujuan**

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya.

**PENGAKUAN**

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

**Beban Pegawai**

1. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan atau disebut belanja tidak langsung (seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, dan sebagainya) dan belanja pegawai yang terkait dengan kegiatan atau disebut belanja langsung (seperti belanja honor).
2. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
3. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

**Beban Barang dan Jasa**



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

1. Beban barang dan jasa termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
2. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA
3. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
4. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima pemda.
5. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
6. Belanja persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.
7. Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. Pengungkapan beban persediaan dalam CaLK meliputi beban persediaan yang merupakan konsumsi persediaan selama periode akuntansi dan persediaan dalam kondisi rusak atau usang pada periode akuntansi.
9. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
  - a. Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.
  - b. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir.
  - c. Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.

10. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
11. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
12. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
13. Beban penyusutan atas pengeluaran setelah tanggal perolehan (rehab/pemeliharaan) yang terjadi sebelum tahun 2016 dihitung sesuai perhitungan beban penyusutan aset induk. Untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan yang terjadi mulai tahun 2016, maka beban penyusutannya dihitung berdasarkan tabel tambahan masa manfaat.
14. Semua aset tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum dapat ditentukan masa manfaatnya sebagaimana diatur di dalam kebijakan akuntansi aset tetap.
15. Aset tetap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakompabel, yaitu aset tetap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi, tidak dilaporkan di dalam neraca.
16. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).
17. Tabel masa manfaat aset tetap yang disusutkan diatur di dalam Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap.
18. Masa manfaat aset diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan harus dilakukan koreksi penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.
19. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

20. Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
21. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
22. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca.
23. Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.
24. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
25. Beban Bunga terkait dengan penarikan pinjaman oleh pemda kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga keuangan/non keuangan, masyarakat). Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan basis akrual tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan belanja bunga yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.
26. Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya
27. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.
28. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.
29. Beban Subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
30. Beban bantuan sosial yang dibayar dengan uang persediaan diakui pada saat SPJ Belanja Bantuan Sosial telah disahkan oleh PPKD.
31. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

32. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang tidak memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
33. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun setelah dikurangi dengan jumlah agunan. Apabila jumlah agunan lebih besar dari pada jumlah tagihan dana bergulir terkait, penyisihan dana bergulir tak tertagih tidak dihitung.
34. Besarnya penyisihan dana bergulir yang tidak dapat diterima kembali, dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Periode 1 s.d 2 Tahun Setelah Jatuh Tempo	25%
2	Periode 2 s.d 3 Tahun Setelah Jatuh Tempo	50%
3	Periode 3 s.d 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	75%
4	Periode Diatas 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	100%

**PENGUKURAN**

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - b. Beban Transfer
  - c. Beban Non Operasional
  - d. Beban Luar Biasa



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
  - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
  - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**13. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO DAN POS LUAR BIASA**

**Tujuan**

Kebijakan akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa mengatur perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi surplus/defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang meliputi definisi, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

**PENGUKURAN**

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
4. Selisih dari Pendapatan - LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
5. Yang termasuk ke dalam Pendapatan - LO/beban dari kegiatan non operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

6. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
7. Surplus/Defisit - LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Surplus/defisit LO merupakan bottom line item atau item bads terakhir dari LO.
2. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.
3. Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
  - c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
5. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam CaLK.

**14. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

**Tujuan**

Kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas mengatur perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam menyusun laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

**Definisi**

1. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
  3. Kas meliputi:
    - a. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
    - b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
    - c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
    - d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.
  4. **Kas terdiri** dari:
    - a. Kas di Kas Daerah;
    - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
    - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
    - d. Kas di BLUD;
    - e. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
    - f. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  5. Setara **kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
  6. Setara **kas** meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
  7. Setara **kas** terdiri dari:
    - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
    - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
  8. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
  9. **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).

10. **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
11. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. **Kas di Bendahara BOS** adalah merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan yang tidak melalui RKUD.
13. **Kas di Bendahara JKN** merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan yang tidak melalui RKUD.
14. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### **PENGAKUAN**

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan maupun Bendahara umum Daerah.

#### **PENGUKURAN**

Kas dan setara kas diukur dan dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. **Saldo** kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
  - a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

c. Kebijakan manajemen setara kas.

## **15. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG**

### **Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Dumai tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

### **Definisi**

1. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Piutang pendapatan;
  - b. Piutang Lainnya.
5. Piutang Pendapatan terdiri dari:
  - a. Piutang Pajak Daerah;
  - b. Piutang Retribusi;
  - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
  - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
  - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
  - h. Piutang Pendapatan Lainnya.
6. Piutang lainnya terdiri dari:
- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
  - b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
  - c. Uang Muka.
7. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

**PENGAKUAN**

Piutang pendapatan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

**PENGUKURAN**

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - c. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d. Kualitas Piutang Macet.
4. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
    - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
    - 3) Wajib Pajak kooperatif;
    - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari tiga tahun;
    - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
    - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun;
    - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
    - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lima tahun keatas;
    - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
    - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
6. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- 1) Umur piutang kurang dari satu tahun;
  - 2) Wajib Pajak kooperatif;
  - 3) Wajib Pajak likuid; dan
  - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari tiga tahun;
  - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun;
  - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lima tahun keatas;
  - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
  - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari satu tahun;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu tahun sampai kurang dari tiga tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan kurang dari lima tahun; dan
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lima tahun keatas.
8. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

9. Wajib pajak/retribusi dinyatakan bangkrut, tidak ditemukan dan meninggal dunia harus didukung oleh bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH**

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:
  - a. Kualitas Lancar senilai 0%;
  - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:
  - a. Kualitas Lancar senilai 0 %;
  - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Kualitas Diragukan senilai 50 % (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:
  - a. Nol persen (0%) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. Sepuluh persen (10%) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Lima puluh (50%) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Seratus persen (100%) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

**PENGUNGKAPAN**

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
  - b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - c. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - d. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
  - e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

**16. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN**

**Tujuan**

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

**Definisi**

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
6. Persediaan meliputi:
  - a. Barang konsumsi;
  - b. Barang pakai habis;
  - c. Barang cetakan;
  - d. Perangko dan materai;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f. Amunisi;
- g. Bahan untuk pemeliharaan;
- h. Suku cadang;
- i. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
- j. Pita cukai dan leges;
- k. Bahan baku ;
- l. Barang dalam proses/setengah jadi;
- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

**PENGAKUAN PERSEDIAAN**

- 1. Persediaan diakui:
  - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
- 3. Persediaan diakui sebagai:
  - a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan/terus-menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
  - b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

**PENGUKURAN PERSEDIAAN**

- 1. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

2. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
3. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
4. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
5. Untuk persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi, persediaan disajikan senilai:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
6. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN**

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:
  - a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan
  - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

## **17. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI INVESTASI**

### **Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Dumai, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

### **Definisi**

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

### **Klasifikasi**

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### **PENGAKUAN**

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

#### **PENGUKURAN DAN PENILAIAN**

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- a. Pengukuran investasi jangka pendek
  - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
  - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
    - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur senilai nilai perolehannya.
    - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

**a. Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode di atas 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

6. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
  - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
  - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
  - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
7. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
  - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
  - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### **PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

## **18. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

### **Tujuan**

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*nonregenerative natural resources*).

2.

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

### **Definisi**

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. **Jumlah** produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

**Klasifikasi**

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- e. Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
  8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

**PENGAKUAN ASET TETAP**

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah nilai minimum pengeluaran atas pengadaan baru suatu aset tetap yang dihitung sesuai nilai aset tetap per satuan/unit untuk dikapitalisir menjadi aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal (pengadaan baru) berlaku hanya untuk aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai per unitnya  $\geq$  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah ke atas).
3. Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dikecualikan dari batasan jumlah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal, sehingga berapapun nilai perolehan awal tersebut yang berasal dari belanja modal seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap.
4. Belanja pengadaan yang memenuhi kriteria aset tetap, dengan nilai perolehan dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dan pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja modal maka dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*) dan **tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.**

**PENGUKURAN ASET TETAP**

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada Poin 1 diatas, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri,



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

**Komponen Biaya**

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya perencanaan;
  - b. biaya lelang;
  - c. biaya persiapan tempat;
  - d. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
  - e. biaya pemasangan (instalation cost);
  - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

**Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

**Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

**Aset Tetap Digunakan Bersama**

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

**Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

**Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang **tidak serupa** atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

**Aset Donasi**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

**Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi setelah perolehan adalah batasan nilai minimum yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, renovasi, atau restorasi yang memenuhi kriteria tertentu.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk penambahan fungsi, peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah **pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**

**Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi **akumulasi** penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

**Penyusutan**

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap, terlampir pada bagian akhir kebijakan akuntansi ini.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

**Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

**Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

**Pengungkapan Aset Tetap**

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan;
    - 2) Pelepasan;
    - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
    - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi:
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

**Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

**Kontrak Konstruksi**

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan/atau
  - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

**Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
  - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
    - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
  3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
    - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
    - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

**Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

**Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
3. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
  - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
4. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

**Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **19. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN**

### **Tujuan**

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### **PENGAKUAN**

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenis nya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

### **PENGUKURAN**

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur senilai nilai nominal yang diterima.

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
  - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
  - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
  - e. Sumber Dana Cadangan; dan
  - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
  6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
  7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
  8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

**20. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA**

**Tujuan**

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

**Definisi**

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
  - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
  - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - d. Aset Tidak Berwujud; dan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- e. Aset Lain-lain.
- 3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat namun masih memiliki nilai buku maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap dan atas penyusutan tersebut disajikan ke dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.

**PENGAKUAN**

- 1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PENGUKURAN DAN PENILAIAN**

- 1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- 5. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
  - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

6. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi.

#### **Amortisasi**

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
3. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurnagi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi"

#### **PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, Build Operate Transfer/BOT dan Build Transfer Operate/BTO); dan
- d. Informasi lainnya yang penting.

#### **21. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

##### **Tujuan**

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

##### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
  - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
  - b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

**Definisi**

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. **Kewajiban** muncul antara lain karena:
  - c. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
  - d. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
  - e. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
  - f. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

**Klasifikasi**

1. Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:
  - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
  - b. Kewajiban Jangka Panjang.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
  - c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - d. Utang Bunga (Accrued Interest);
  - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
  - f. Pendapatan Diterima Dimuka;
  - g. Utang Beban; dan
  - h. Utang Jangka Pendek Lainnya
4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potong PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Asuran Kesehatan (Askes), Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen), dan Tabungan Perumahan (Taperum).
5. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya
  6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
  7. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
  8. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  9. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
  10. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:
    - a. Utang Dalam Negeri;
    - b. Utang Luar Negeri; dan
    - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.
  11. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
  12. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
  13. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
  14. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah,



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Kelola (BSK).

15. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

**PENGAKUAN**

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK
  - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
  - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*) diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
  - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*) diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
3. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
4. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

6. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
7. Utang Beban, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
8. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
10. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
14. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
15. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

**PENGUKURAN**

1. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui senilai nilai kekurangan transfer

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

## **22. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS**

### **Tujuan**

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

### **Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### **Definisi**

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dalam



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.

5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Organisasi Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

**PENGAKUAN EKUITAS**

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

**PENGUKURAN EKUITAS**

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

**PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS**

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

**23. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

**Tujuan**

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

**Ruang Lingkup**

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai.

**Definisi**

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

**KOREKSI KESALAHAN**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
  - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
  - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.

7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:
  - a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
  - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
  - b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LRA:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
    - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
    - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
    - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.
19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
  - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
  - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

**PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

**OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
  - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  - b. Fungsi tersebut tetap ada.
  - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
  - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

**24. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tujuan**

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**Definisi**

1. BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi (entitas akuntansi OPD dan entitas akuntansi PPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LPE, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
2. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh PPKD.
4. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD.
5. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
6. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari OPD dan PPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.
7. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
8. Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

1. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
2. Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.

**PROSEDUR KONSOLIDASI**

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi ( OPD dan PPKD), dan mengeliminasi Akun Resiprokal (jika ada).
2. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 1 sampai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 5.

**PENGUNGKAPAN**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

**TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP**

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat ( Tahun )
1	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
	<b>ALAT BESAR</b>	
	ALAT BESAR DARAT	10
	ALAT BESAR APUNG	8
	ALAT BANTU	7
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat ( Tahun )
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	
	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
	ALAT UKUR	5
	<b>ALAT PERTANIAN</b>	
	ALAT PENGOLAHAN	4
	<b>ALAT KANTOR &amp; RUMAH TANGGA</b>	
	ALAT KANTOR	5
	ALAT RUMAH TANGGA	5
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	
	ALAT STUDIO	5
	ALAT KOMUNIKASI	5
	PERALATAN PEMANCAR	10
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	
	ALAT KEDOKTERAN	5
	ALAT KESEHATAN UMUM	5
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	
	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIK	15
	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN	10
	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat ( Tahun )
	SENJATA API	10
	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
	SENJATA SINAR	5
	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
	<b>KOMPUTER</b>	
	KOMPUTER UNIT	4
	PERALATAN KOMPUTER	4
	<b>ALAT EKSPLORASI</b>	
	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
	<b>ALAT PENGEBORAN</b>	
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
	<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	
	PERALATAN SUMUR	10
	PERALATAN PRODUKSI	10
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
	<b>ALAT BANTU EKSPLORASI</b>	
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
	ALAT BANTU PRODUKSI	10
	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	
	ALAT DETEKSI	5
	ALAT PELINDUNG	5
	ALAT SAR	2
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
	<b>ALAT PERAGA</b>	
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
	<b>PERALATAN PROSES/PRODUKSI</b>	
	UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSI	8
	<b>RAMBU-RAMBU</b>	
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat ( Tahun )
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
	<b>PERALATAN OLAHRAGA</b>	
	PERALATAN OLAHRAGA	3
<b>2</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
	<b>BANGUNAN MONUMEN</b>	
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
	BANGUNAN MENARA	
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	
	TUGU/TANDA BATAS	50
<b>3</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
	JALAN	10
	JEMBATAN	50
	<b>BANGUNAN AIR</b>	
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
	BANGUNAN AIR KOTOR	40
	<b>INSTALASI</b>	
	INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	30
	INSTALASI AIR KOTOR	30
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat ( Tahun )
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
	INSTALASI PERTAHANAN	30
	INSTALASI GAS	30
	INSTALASI PENGAMAN	20
	INSTALASI LAIN	5
	<b>JARINGAN</b>	
	JARINGAN AIR MINUM	30
	JARINGAN LISTRIK	40
	JARINGAN TELEPON	20
	JARINGAN GAS	30

**TABEL KAPITALISASI, BATASAN DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET  
TETAP SETELAH PEROLEHAN AWAL**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
1	<b>TANAH</b>	Tidak dikapitalisasi	-	-
2	<b>PERALATAN DAN MESIN :</b>	Tidak dikapitalisasi	-	-
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN :</b>			
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL</b>			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>MONUMEN</b>			
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan	2



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>50% s.d 75%		7
		>75% s.d 100%		10
	<b>BANGUNAN MENARA</b>			
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>			
	TUGU/TANDA BATAS	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, <b>Bukan Pemeliharaan Rutin.</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
4	<b>JALAN IRIGASI DAN JARINGAN</b>			
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>			
	JALAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang <b>Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JEMBATAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang <b>Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	<b>BANGUNAN AIR</b>			
	BANGUNAN AIR IRIGASI	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang <b>Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang <b>Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang	5



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	<b>INSTALASI</b>			
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GARDU LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI PERTAHANAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI PENGAMAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI LAIN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	<b>JARINGAN</b>			
	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	15
	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	JARINGAN GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin <b>dikapitalisasi</b>	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
4	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	-	-	-
<p><b>Penambahan masa manfaat paling tinggi sebesar masa manfaat aset bersangkutan dan tidak melebihi masa manfaat aset tersebut.</b></p>				

**MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD**

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Hak Paten	10
4	Hak Cipta	10
5	Waralaba	20
6	Hasil Kajian / Pengembangan	20



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1 PENDAPATAN**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.296.269.073.350,00	1.287.005.084.625,14	99,29	1.464.271.934.984,33

Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Peraturan Daerah Kota Dumai mengalami perubahan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun Anggaran 2021 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.296.269.073.350,00 dengan realisasi senilai Rp1.287.005.084.625,14 atau sebesar 99,29%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp117.266.850.359,19 atau sebesar 13,77% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.464.271.934.984,33.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, berikut rinciannya:

**Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	374.465.303.311,00	366.696.884.199,75	97,93	378.803.807.144,72
Pendapatan Transfer	880.924.310.039,00	879.612.437.425,39	99,85	1.044.567.327.839,61
Lain-lain Pendapatan yang sah	40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55	40.900.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.296.269.073.350,00</b>	<b>1.287.005.084.625,14</b>	<b>99,29</b>	<b>1.464.271.934.984,33</b>

**5.1.a Pendapatan Asli Daerah**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
374.465.303.311,00	366.696.884.199,75	97,93	378.803.807.144,72

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp374.465.303.311,00 dengan realisasi senilai Rp366.696.884.199,75 atau sebesar 97,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 terjadi penurunan senilai Rp12.106.922.944,97 atau sebesar 3,20% dari realisasi tahun lalu senilai Rp378.803.807.144,72.

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

**Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	177.480.200.000,00	185.979.625.987,00	104,79	165.259.957.085,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.981.180.100,00	23.776.863.396,46	59,47	32.672.832.980,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.414.194.590,00	1.415.125.255,00	100,07	1.242.457.348,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.589.728.621,00	155.525.269.561,29	99,96	179.628.559.731,72
<b>Jumlah</b>	<b>374.465.303.311,00</b>	<b>366.696.884.199,75</b>	<b>97,93</b>	<b>378.803.807.144,72</b>

**5.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>177.480.200.000,00</b>	<b>185.979.625.987,00</b>	104,79	<b>165.259.957.085,00</b>

Pendapatan Pajak Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp177.480.200.000,00 dengan realisasi senilai Rp185.979.625.987,00 atau sebesar 104,79 %, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan senilai Rp20.719.668.902,00 atau sebesar 12,54% dari realisasi tahun lalu senilai Rp165.259.957.085,00.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan Pajak Daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2021 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak atau Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT/SPTD)/Dokumen Pemberitahuan/Pemesanan diketahui bahwa pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak atau pajak yang telah dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan terjadinya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Restitusi ini dapat terjadi pada periode yang sama ataupun tidak sama antara tahun pajak dengan tahun anggarannya. Hal ini terjadi terus menerus setiap tahun sehingga transaksi ini merupakan transaksi yang berulang. Oleh karena itu transaksi pengembalian penerimaan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian, tanpa memperhatikan tahun penerimaan pajak yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2021 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2021 senilai Rp185.979.625.987,00 tersebut, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel	4.547.815.532,00	4.361.663.283,00	95,91	3.760.131.872,00
Pajak Restoran	7.743.000.000,00	9.048.442.070,00	116,86	7.247.204.044,00
Pajak Hiburan	760.760.000,00	798.429.705,00	104,95	840.857.427,00
Pajak Reklame	2.400.000.000,00	2.564.739.618,00	106,86	2.335.416.443,00
Pajak Penerangan Jalan	43.400.000.000,00	49.460.966.966,00	113,97	39.670.860.528,00
Pajak Parkir	728.747.468,00	696.543.612,00	95,58	556.831.948,00
Pajak Air Tanah	877.977.000,00	1.092.931.785,00	124,48	1.187.986.946,00
Pajak Sarang Burung Walet	115.200.000,00	91.147.560,00	79,12	69.851.660,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.806.700.000,00	0,00	0,00	2.550.555.480,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	96.500.000.000,00	97.362.170.939,00	100,89	91.404.616.934,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.600.000.000,00	20.502.590.449,00	110,23	15.635.643.803,00
<b>Jumlah</b>	<b>177.480.200.000,00</b>	<b>185.979.625.987,00</b>	<b>104,79</b>	<b>165.259.957.085,00</b>

Pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Daftar jenis pungutan dan dasar hukum pungutan serta SKPD pemungutan terlampir.

Rincian Pajak Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

**a. Pajak Hotel**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	4.547.815.532,00	4.361.663.283,00	95,91	3.760.131.872,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.547.815.532,00</b>	<b>4.361.663.283,00</b>	<b>95,91</b>	<b>3.760.131.872,00</b>

**b. Pajak Restoran**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	7.743.000.000,00	9.048.442.070,00	116,86	7.247.204.044,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.743.000.000,00</b>	<b>9.048.442.070,00</b>	<b>116,86</b>	<b>7.247.204.044,00</b>

**c. Pajak Hiburan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	760.760.000,00	798.429.705,00	104,95	840.857.427,00
<b>Jumlah</b>	<b>760.760.000,00</b>	<b>798.429.705,00</b>	<b>104,95</b>	<b>840.857.427,00</b>

**d. Pajak Reklame**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2.400.000.000,00	2.564.739.618,00	106,86	2.335.416.443,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.400.000.000,00</b>	<b>2.564.739.618,00</b>	<b>106,86</b>	<b>2.335.416.443,00</b>

**e. Pajak Penerangan Jalan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	43.400.000.000,00	49.460.966.966,00	113,97	39.670.860.528,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.400.000.000,00</b>	<b>49.460.966.966,00</b>	<b>113,97</b>	<b>39.670.860.528,00</b>

**f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1.806.700.000,00	0,00	0,00	2.550.555.480,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.806.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.555.480,00</b>

**g. Pajak Parkir**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	728.747.468,00	696.543.612,00	95,58	556.831.948,00
<b>Jumlah</b>	<b>728.747.468,00</b>	<b>696.543.612,00</b>	<b>95,58</b>	<b>556.831.948,00</b>

**h. Pajak Air Bawah Tanah**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	877.977.000,00	1.092.931.785,00	124,48	1.187.986.946,00
<b>Jumlah</b>	<b>877.977.000,00</b>	<b>1.092.931.785,00</b>	<b>124,48</b>	<b>1.187.986.946,00</b>

**i. Pajak Sarang Burung Walet**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	115.200.000,00	91.147.560,00	79,12	69.851.660,00
<b>Jumlah</b>	<b>115.200.000,00</b>	<b>91.147.560,00</b>	<b>79,12</b>	<b>69.851.660,00</b>

**j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	96.500.000.000,00	97.362.170.939,00	100,89	91.404.616.934,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.500.000.000,00</b>	<b>97.362.170.939,00</b>	<b>100,89</b>	<b>91.404.616.934,00</b>

**k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	18.600.000.000,00	20.502.590.449,00	110,23	15.635.643.803,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.600.000.000,00</b>	<b>20.502.590.449,00</b>	<b>110,23</b>	<b>15.635.643.803,00</b>

**5.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>39.981.180.100,00</b>	<b>23.776.863.396,46</b>	<b>59,47</b>	<b>32.672.832.980,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp39.981.180.100,00 dengan realisasi senilai Rp23.776.863.396,46 atau sebesar 59,47%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp8.895.969.583,54 atau sebesar 27,23%.

Penerimaan Retribusi Daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2021 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun 2021 senilai Rp32.776.863.396,46 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Umum	3.652.150.500,00	2.119.372.650,00	58,03	2.162.426.650,00
Jasa Usaha	23.329.029.600,00	18.300.235.746,46	78,44	18.639.946.050,00
Perizinan Tertentu	13.000.000.000,00	3.357.255.000,00	25,83	11.870.460.280,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.981.180.100,00</b>	<b>23.776.863.396,46</b>	<b>59,47</b>	<b>32.672.832.980,00</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dirincikan sebagai berikut:

**a. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	750.000.000,00	775.275.000,00	103,37	666.100.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	144.779.000,00	14,48	130.220.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	84.000.000,00	71.147.000,00	84,70	184.103.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Los	262.800.000,00	263.410.000,00	100,23	213.640.000,00

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	14.400.000,00	33.630.000,00	233,54	30.090.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	826.800.500,00	71.080.550,00	8,60	240.796.650,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi	183.750.000,00	203.602.000,00	110,80	187.377.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	530.400.000,00	556.449.100,00	104,91	501.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.652.150.500,00</b>	<b>2.119.372.650,00</b>	<b>58,03</b>	<b>2.162.426.650,00</b>

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Umum per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	750.000.000,00	775.275.000,00	103,37	666.100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>775.275.000,00</b>	<b>103,37</b>	<b>666.100.000,00</b>

**(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	1.000.000.000,00	144.779.000,00	14,48	130.220.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>144.779.000,00</b>	<b>14,48</b>	<b>130.220.000,00</b>

**(3) Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	84.000.000,00	71.147.000,00	84,70	184.103.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>71.147.000,00</b>	<b>84,70</b>	<b>184.103.000,00</b>

**(4) Retribusi Pelayanan Pasar - Los**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	262.800.000,00	263.410.000,00	100,23	213.640.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>262.800.000,00</b>	<b>263.410.000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>213.640.000,00</b>

**(5) Retribusi Pelayanan Pasar - Kios**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	14.400.000,00	33.630.000,00	233,54	30.090.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>33.630.000,00</b>	<b>233,54</b>	<b>30.090.000,00</b>

**(6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	826.800.500,00	71.080.550,00	8,60	240.796.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>826.800.500,00</b>	<b>71.080.550,00</b>	<b>8,60</b>	<b>240.796.650,00</b>

**(7) Retribusi Pelayanan Pasar - Kamar Mandi atau WC**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>

**(8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	183.750.000,00	203.602.000,00	110,80	187.377.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>183.750.000,00</b>	<b>203.602.000,00</b>	<b>110,80</b>	<b>187.377.000,00</b>

**(9) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika	530.400.000,00	556.449.100,00	104,91	501.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>530.400.000,00</b>	<b>556.449.100,00</b>	<b>104,91</b>	<b>501.800.000,00</b>

**b. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	50.000.000,00	38.250.000,00	76,50	53.700.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	125.400.000,00
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	74.722.500,00	106.910.000,00	143,08	18.327.255.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir	22.869.827.100,00	18.090.824.546,46	79,10	26.708.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000,00	7.885.000,00	31,54	23.904.000,00
Retribusi Rumah potong Hewan	24.480.000,00	24.680.000,00	100,82	18.420.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	285.000.000,00	31.686.200,00	11,12	58.709.050,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.329.029.600,00</b>	<b>18.300.235.746,46</b>	<b>78,44</b>	<b>18.639.946.050,00</b>

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>

**(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Sekretariat Daerah	50.000.000,00	38.250.000,00	76,50	47.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>76,50</b>	<b>53.700.000,00</b>

**(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	125.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.400.000,00</b>

**(4) Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	74.722.500,00	106.910.000,00	143,08	18.327.255.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.722.500,00</b>	<b>106.910.000,00</b>	<b>143,08</b>	<b>18.327.255.000,00</b>

**(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	22.869.827.100,00	18.090.824.546,46	79,10	26.708.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.869.827.100,00</b>	<b>18.090.824.546,46</b>	<b>79,10</b>	<b>26.708.000,00</b>

**(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	25.000.000,00	7.885.000,00	31,54	23.904.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>7.885.000,00</b>	<b>31,54</b>	<b>23.904.000,00</b>

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan dianggarkan senilai Rp25.000.0000,00 terealisasi senilai Rp7.885.000,00 merupakan hasil penjualan bibit ikan yang pembibitannya dilakukan oleh Dinas Perikanan.

**(7) Retribusi Rumah Potong Hewan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.480.000,00	24.680.000,00	100,82	18.420.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.480.000,00</b>	<b>24.680.000,00</b>	<b>100,82</b>	<b>18.420.000,00</b>

**(8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-Pelayanan Jasa ke Pelabuhan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	285.000.000,00	31.686.200,00	11,12	58.709.050,00
<b>Jumlah</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>31.686.200,00</b>	<b>11,12</b>	<b>58.709.050,00</b>

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.1.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.990.050.000,00	3.348.255.000,00	25,78	11.819.726.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.950.000,00	9.000.000,00	90,45	5.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00	0,00	0,00	45.694.280,00
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.000.000.000,00</b>	<b>3.357.255.000,00</b>	<b>25,83</b>	<b>11.870.460.280,00</b>

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.990.050.000,00	3.348.255.000,00	25,78	11.819.726.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.990.050.000,00</b>	<b>3.348.255.000,00</b>	<b>25,78</b>	<b>11.819.726.000,00</b>

**(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.950.000,00	9.000.000,00	90,45	5.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>90,45</b>	<b>5.000.000,00</b>

**(3) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	45.694.280,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.694.280,00</b>

**(4) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**5.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>1.414.194.590,00</b>	<b>1.415.125.255,00</b>	<b>100,07</b>	<b>1.242.457.348,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.414.194.590,00 dengan realisasi senilai Rp1.415.125.255,00 atau sebesar 100,07%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan senilai Rp172.667,907,00 atau sebesar 13,90% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.242.457.348,00.

**Tabel 5.1.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
PT Bank Riau	1.316.194.590,00	1.316.194.590,00	100,00	895.097.348,00
PT Pembangunan Dumai	98.000.000,00	98.930.665,00	100,95	0,00
PT Pelabuhan Dumai Berseri	0,00	0,00	0,00	347.360.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.414.194.590,00</b>	<b>1.415.125.255,00</b>	<b>100,07</b>	<b>1.242.457.348,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp1.316.194.590,00 dari anggaran senilai Rp1.316.194.590,00 atau sebesar 100,00% yang dibagikan oleh PT. Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2021 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri tanggal 18 Juni 2021.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT Pembangunan Dumai merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp98.930.665,00 dari anggaran senilai Rp98.000.000,00 atau sebesar 100,95% yang dibagikan oleh PT Pembangunan Dumai atas 50% laba bersih yang dihasilkan perusahaan senilai Rp197.861.337. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2021 sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Umum (RUPS) PT Pembangunan Dumai Nomor 25 tanggal 29 Maret 2021 yang disahkan dengan akta notaris Firman, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kota Dumai.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen KAP Purbaluddin dan Rekan Jakarta terhadap Laporan Keuangan PT Pelabuhan Dumai Berseri Tahun 2020, PT Pelabuhan Dumai Berseri mengalami kerugian senilai minus Rp3.469.909.891,00 sehingga pada Tahun 2021 tidak dianggarkan pendapatan deviden dari PT Pelabuhan Dumai Berseri.

#### 5.1.a.4) Lain-lain PAD yang sah

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
155.589.728.621,00	155.525.269.561,29	99,96	179.628.559.731,72

Realisasi Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.000.000.000,00	2.432.359.773,03	48,65	1.442.130.715,00
Hasil Kerja Sama Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	3.200.000.000,00	4.697.811.210,09	146,81	4.779.844.580,95
Penerimaan Bunga Deposito	1.300.000.000,00	1.135.241.649,19	87,33	4.147.699.169,33
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.988.896.330,00	6.901.321.180,88	138,33	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	29.057.803,86
Pendapatan Denda Pajak	4.151.147.084,00	618.882.522,00	14,91	4.447.818.122,00
Pendapatan Dari Pengembalian	201.018.041,00	258.427.665,00	0,00	1.704.901.689,77
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	143.500.500,00	514.768.500,00	358,72	309.585.934,00
Pendapatan BLUD	135.605.166.666,00	138.966.457.061,10	102,48	160.489.896.751,26
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.274.852.965,55
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	100,00	2.772.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>155.589.728.621,00</b>	<b>155.525.269.561,29</b>	<b>99,96</b>	<b>179.628.559.731,72</b>

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp2.432.359.773,03 mengalami kenaikan senilai Rp990.229.058,03 atau sebesar 68,66% dari Tahun 2020 senilai Rp1.442.130.715,00. Rincian Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.10 Hasil Penjualan/Lelang Aset 2021**

<b>Nama OPD</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga Lelang</b>	<b>KIB</b>
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai	11.855.464,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Barat	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai	3.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Kevamatan Sungai Sembilan	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai	3.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai	8.521.463,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai	3.799.818,00	Peralatan dan Mesin
Badan Pendapatan Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai	2.500.000,00	Peralatan dan Mesin
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	117.399.998,00	Peralatan dan Mesin
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	53.333.333,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat DPRD	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	57.525.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perikanan	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	89.971.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	53.103.999,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	295.973.989,00	Peralatan dan Mesin
RSUD	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	231.999.999,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	174.413.888,00	Peralatan dan Mesin

<b>Nama OPD</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga Lelang</b>	<b>KIB</b>
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	55.950.000,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Dumai Barat	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	24.000.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	112.198.999,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Sosial	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	28.890.900,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	35.525.000,00	Peralatan dan Mesin
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	40.525.000,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satpol PP	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai dalam bentuk Scraf	155.555.555,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kecamatan Sungai Sembilan, dan Dinas Lingkungan Hidup	Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga Milik Pemerintah Kota Dumai dalam bentuk Scraf	6.500.989,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	40.070.389,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat DPRD	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	81.088.888,00	Peralatan dan Mesin
Sekretariat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	129.855.655,00	Peralatan dan Mesin
Kecamatan Bukit Kapur	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	39.789.900,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Milik Pemerintah Kota Dumai	25.156.500,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kecamatan	Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga Milik Pemerintah Kota Dumai	16.099.899,00	Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Sungai	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai dalam bentuk Scraf	10.000.000,00	Peralatan dan Mesin
BPKAD	Hasil Penjualan Aset Daerah Berupa Bongkaran Bangunan	7.749.599,03	Gedung dan Bangunan

Nama OPD	Uraian	Harga Lelang	KIB
RSUD	Hasil Penjualan Aset Daerah Berupa Bongkaran Bangunan	57.895.000,00	Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan	Hasil Penjualan Aset Daerah Berupa Bongkaran Bangunan	55.822.000,00	Gedung dan Bangunan
Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penjualan Aset Daerah Berupa Bongkaran Bangunan	88.000.999,00	Gedung dan Bangunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penjualan Aset Daerah Berupa Bongkaran Bangunan	31.675.550,00	Gedung dan Bangunan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Milik Pemerintah Kota Dumai Berdasarkan Akte Jual Beli	280.159.000,00	Peralatan dan Mesin
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penjualan Langsung Bongkaran Bangunan Musholla Al- Khoir dan Bongkar Gedung Poskeskel Laksamana	3.452.000,00	Gedung dan Bangunan
<b>Jumlah</b>		<b>2.432.359.773,03</b>	

Pendapatan BLUD senilai Rp138.966.457.061,10 yang terdiri dari BLUD-RSUD senilai Rp125.404.856.116,15, BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A senilai Rp170.239.299,00 dan BLUD-Puskesmas senilai Rp13.391.361.645,95 yang digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 untuk BLUD-RSUD dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 tanggal 5 Desember 2014 untuk BLUD-Puskesmas.

**Tabe 5.1.11 Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2021**

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	1.521.482.394,22
BLUD Puskesmas Dumai Barat	932.253.728,69
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1.168.847.302,33
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2.267.072.384,26
BLUD Puskesmas Medang Kampai	879.779.667,25
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1.113.649.062,44
BLUD Puskesmas Bukit Timah	586.206.462,10
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2.335.302.037,59
BLUD Puskesmas Purnama	1.023.403.557,20
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.563.365.049,87
<b>Jumlah</b>	<b>13.391.361.645,95</b>

### 5.1.b Pendapatan Transfer

Anggaran	Tahun 2021		Tahun 2020
	Realisasi	(%)	Realisasi
<b>880.924.310.039,00</b>	<b>879.612.437.425,39</b>	<b>99,85</b>	<b>1.044.567.327.839,61</b>

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai.

Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp879.612.437.425,39 atau sebesar 99,85% dari anggaran senilai Rp880.924.310.039,00, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp164.954.890.414,22 atau sebesar 15,79% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.044.567.327.839,61.

**Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	740.446.118.425,00	731.422.367.681,00	98,78	871.455.522.631,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	31.603.245.000,00	31.603.245.000,00	100,00	45.719.565.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	95.223.946.614,00	108.598.824.744,39	114,05	88.124.940.208,61
Bantuan Keuangan Provinsi	13.651.000.000,00	7.988.000.000,00	58,52	39.267.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>880.924.310.039,00</b>	<b>879.612.437.425,39</b>	<b>99,85</b>	<b>1.044.567.327.839,61</b>

**5.1.b.1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>740.446.118.425,00</b>	<b>731.422.367.681,00</b>	<b>98,78</b>	<b>871.455.522.631,00</b>

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

**Tabel 5.1.13 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Pajak	62.673.426.709,00	61.856.297.144,00	98,70	47.181.306.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	74.635.036.911,00	83.612.659.443,00	112,03	196.815.267.029,00
Dana Alokasi Umum	429.427.931.000,00	429.427.931.000,00	100,00	424.090.440.000,00
Dana Alokasi Khusus	173.709.723.805,00	156.525.480.094,00	90,11	203.368.509.602,00
<b>Jumlah</b>	<b>740.446.118.425,00</b>	<b>731.422.367.681,00</b>	<b>98,78</b>	<b>871.455.522.631,00</b>

Tahun 2021 realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah senilai Rp731.422.367.681,00 atau sebesar 98,78% dari anggaran senilai Rp740.446.118.425,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2020 senilai Rp871.455.522.631,00 terdapat penurunan senilai Rp140.033.154.950,00 atau sebesar 16,07%, dengan rincian sebagai berikut:

**a. Dana Bagi Hasil Pajak**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>62.673.426.709,00</b>	<b>61.856.297.144,00</b>	<b>98,70</b>	<b>47.181.306.000,00</b>

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2021 senilai Rp61.856.297.144,00 atau sebesar 98,70% dari anggaran senilai Rp62.673.426.709,00 dan jika dibandingkan per 31 Desember 2020 senilai Rp47.181.306.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp14.674.991.144,00 atau sebesar 31,10%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, serta PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.14 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	34.435.206.905,00	32.489.986.139,00	94,35	1.117.609.512,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	7.105,00	100,00	124.200,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi kepada seluruh Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	2.711.491.934,00
Bagi Hasil Pph ps1 25 dan 29 WPOPDN dan Pph Pasal 21	28.238.219.804,00	29.366.303.900,00	0,00	29.449.500.701,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Migas	0,00	0,00	0,00	13.843.279.417,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	59.300.236,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.673.426.709,00</b>	<b>61.856.297.144,00</b>	<b>98,70</b>	<b>47.181.306.000,00</b>

Penganggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

**b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>74.635.036.911,00</b>	<b>83.612.659.443,00</b>	<b>112,03</b>	<b>196.815.267.029,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2021 adalah senilai Rp83.612.659.443,00 atau sebesar 112,03% dari anggaran senilai Rp74.635.036.911,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp196.815.267.029,00 mengalami penurunan senilai Rp113.2021.607.586,00 atau sebesar 57,52%.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.15 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	10.096.880.410,00	13.157.244.713,00	130,31	5.554.504.452,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.770.606.475,00	2.011.059.867,00	113,58	1.418.038.691,00

Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.674.500.150,00	1.674.500.150,00	100,00	788.276.289,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	61.082.636.276,00	65.037.087.400,00	106,47	186.241.780.185,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	10.413.600,00	1.732.767.313,00	16.639,46	2.812.667.412,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.635.036.911,00</b>	<b>83.612.659.443,00</b>	<b>112,03</b>	<b>196.815.267.029,00</b>

Penganggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

**c. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
<b>429.427.931.000,00</b>	<b>429.427.931.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>424.090.440.000,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp429.427.931.000,00 dengan realisasi senilai Rp429.427.931.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp5.337.491.000,00 atau sebesar 1,26% dari realisasi tahun lalu senilai Rp424.090.440.000,00.

**d. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
<b>173.709.723.805,00</b>	<b>156.525.480.094,00</b>	<b>90,11</b>	<b>203.368.509.602,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp173.709.723.805,00 dengan realisasi senilai Rp156.525.480.094,00 atau sebesar 90,11%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp46.843.029.508,00 atau sebesar 23,03% dari realisasi tahun lalu senilai Rp203.368.509.602,00.

Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.16 Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	2.385.570.435,00	2.221.395.747,00	93,12	25.544.528.500,00
DAK Bidang Kesehatan	50.320.296.700,00	46.168.483.881,00	91,75	29.461.950.829,00
DAK Bidang Pendidikan	25.099.122.000,00	23.055.982.062,00	91,86	26.231.818.913,00
Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	2.385.162.036,00
DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	4.806.526.999,00	4.569.233.064,00	95,06	15.261.000.977,00
DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Penugasan	1.571.315.000,00	1.571.315.000,00	100,00	4.003.104.000,00
DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Reguler	4.300.000.000,00	4.121.535.315,00	0,00	0,00
Affirmasi Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	2.014.523.000,00

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.116.595.970,00	3.994.119.110,00	97,02	0,00
Afirmasi Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.535.100.000,00
DAK Non Fisik TPG PNSD	55.565.896.000,00	55.565.896.000,00	100,00	51.539.157.000,00
DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	528.000.000,00	528.000.000,00	100,00	516.000.000,00
DAK Non Fisik BOKKB BOK	7.228.283.441,00	0,00	0,00	9.830.341.150,00
DAK Akreditasi PUSKESMAS	316.278.400,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik BOKKB Jaminan Persalinan	1.022.258.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik BOKKB-BOKB	1.852.956.000,00	1.812.823.476,00	0,00	0,00
DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	0,00	0,00	0,00	409.991.950,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.527.405.000,00	1.514.289.842,00	99,14	1.175.475.100,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	100.000.000,00	99.692.000,00	99,69	377.930.000,00
DAK Non Fisik BOP PAUD	3.174.600.000,00	2.761.200.000,00	86,98	2.871.000.000,00
DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	319.200.000,00	248.850.000,00	77,96	159.600.000,00
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	740.000.000,00	684.582.499,00	92,51	140.825.000,00
DAK Penugasan Cadangan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	549.654.000,00
Afirmasi Bidang Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	17.142.719.702,00
DAK Reguler Cadangan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	979.099.500,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan	1.660.233.500,00	1.660.233.500,00	100,00	1.144.219.300,00
DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	5.177.994.000,00	4.556.055.598,00	87,99	2.944.006.079,00
DAK Penugasan Cadangan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.076.586.688,00
DAK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAMBAHAN	0,00	0,00	0,00	4.074.715.878,00
DAK Non Fisik BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.756.370,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	325.860.645,00	326.122.000,00	100,08	0,00
DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	575.575.345,00	575.671.000,00	100,02	0,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>173.709.723.805,00</b>	<b>156.525.480.094,00</b>	<b>90,11</b>	<b>203.368.509.602,00</b>

**1. Khusus (DAK) Fisik**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
<b>100.177.654.604,00</b>	<b>92.602.935.776,00</b>	<b>92,44</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp100.177.654.604,00 dengan realisasi senilai Rp92.602.935.776,00 atau sebesar 92,44%.

Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.17 Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.265.568.000,00	1.164.180.030,00	91,99	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.564.789.003,00	13.973.518.877,00	95,94	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.768.814.997,00	7.420.333.655,00	84,62	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	499.950.000,00	497.949.500,00	99,60	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.237.110.745,00	6.961.322.360,00	96,19	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	3.000.000.000,00	2.612.930.185,00	87,10	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.472.952.325,00	2.604.123.885,00	74,98	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	35.476.159.630,00	33.250.090.451,00	93,73	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.134.074.000,00	740.017.000,00	65,25	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	740.000.000,00	684.582.499,00	92,51	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	2.385.570.435,00	2.221.395.747,00	93,12	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.806.526.999,00	4.569.233.064,00	95,06	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.177.994.000,00	4.556.055.598,00	87,99	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.660.233.500,00	1.660.233.500,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.116.595.970,00	3.994.119.110,00	97,02	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	4.300.000.000,00	4.121.535.315,00	95,85	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.571.315.000,00	1.571.315.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100.177.654.604,00</b>	<b>92.602.935.776,00</b>	<b>92,44</b>	<b>0,00</b>

**2. Khusus (DAK)  
Non Fisik**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
73.532.069.201,00	63.922.544.318,00	86,93	0,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp73.532.069.201,00 dengan realisasi senilai Rp63.922.544.318,00 atau sebesar 86,93%.

Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.18 Rincian Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-TPG PNSD	55.565.896.000,00	55.565.896.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	528.000.000,00	528.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.174.600.000,00	2.761.200.000,00	86,98	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	319.200.000,00	248.850.000,00	77,96	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.228.283.441,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.756.370,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	316.278.400,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.022.258.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.852.956.000,00	1.812.823.476,00	97,83	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.527.405.000,00	1.514.289.842,00	99,14	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	100.000.000,00	99.692.000,00	99,69	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	325.860.645,00	326.122.000,00	100,08	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	575.575.345,00	575.671.000,00	100,02	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.532.069.201,00</b>	<b>63.922.544.318,00</b>	<b>86,93</b>	<b>0,00</b>

**5.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
31.603.245.000,00	31.603.245.000,00	100,00	45.719.565.000,00

**a. Dana Penyesuaian**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
31.603.245.000,00	31.603.245.000,00	100,00	45.719.565.000,00

Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah

tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

**5.1.b.3) Transfer Pemerintah Provinsi**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
95.223.946.614,00	108.598.824.744,39	114,05	88.124.940.208,61

**a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
95.223.946.614,00	108.598.824.744,39	114,05	88.124.940.208,61

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun 2021 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan senilai Rp95.223.946.614,00 dengan realisasi senilai Rp108.598.824.744,39 atau sebesar 114,05%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan senilai Rp.20.473.884.535,78 atau sebesar 23,23% dari realisasi tahun lalu senilai Rp88.124.940.208,61.

Berikut ini adalah rincian Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi:

**Tabel 5.1.19 Rincian dana transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan Tahun 2019**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	28.728.335.600,00	29.992.973.539,39	104,40	20.776.442.047,61
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.343.371.000,00	17.354.434.978,00	113,11	12.653.250.233,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.091.059.100,00	40.254.549.943,00	125,44	33.216.754.525,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	6.758.057.000,00	1.063.038.420,00	15,73	930.997.310,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	12.303.123.914,00	19.933.827.864,00	162,02	20.547.496.093,00
<b>Jumlah</b>	<b>95.223.946.614,00</b>	<b>108.598.824.744,39</b>	<b>114,05</b>	<b>88.124.940.208,61</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil dari Tahun 2021 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 572 /V / 2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 833/VIII / 2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang

Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1141 /XI / 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1382 /XII / 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 753 /XII / 2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2020) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 524 /V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 523 /V / 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 834 VIII / 2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1167 /XI / 2021 tanggal 09 November 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1417 /XII / 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober - November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

**5.1.b.4) Bantuan Keuangan**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
13.651.000.000,00	7.988.000.000,00	58,52	39.267.300.000,00

**a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
13.651.000.000,00	7.988.000.000,00	58,52	39.267.300.000,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp13.651.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp7.988.000.000,00, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp31.279.300.000,00 atau sebesar 79,66% dari realisasi tahun lalu senilai Rp39.267.300.000,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari Tahun 2021 dicatat berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.74/I/2021 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.

**5.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55	40.900.800.000,00

**5.1.c.1) Pendapatan Lainnya**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
40.879.460.000,00	40.695.763.000,00	99,55	40.900.800.000,00

Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat dianggarkan senilai Rp40.879.460.000,00 terealisasi senilai Rp40.695.763.000,00 atau sebesar 99,55 % mengalami penurunan dari Tahun 2020 senilai Rp205.037.000,00 atau sebesar 0,50%. Pendapatan Hibah ini terdiri dari Pendapatan BOS Reguler senilai Rp40.155.763.000,00 dan Bos Kinerja senilai Rp540.000.000,00.

**5.2 BELANJA**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.454.362.356.872,00	1.314.289.659.257,23	90,37	1.423.234.916.633,85

Belanja Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.454.362.356.872,00 dengan realisasi senilai Rp1.314.289.659.257,23 atau sebesar 90,37%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp108.945.257.376,62 atau sebesar 7,65% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.423.234.916.633,85. Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2020 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.2 Rincian Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.208.461.786.509,00	1.105.414.852.748,84	91,47	1.061.632.401.624,52
Belanja Modal	234.465.493.304,00	199.818.329.751,39	85,22	244.706.629.874,33
Belanja Tidak Terduga	11.435.077.059,00	9.056.476.757,00	79,20	116.895.885.135,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.454.362.356.872,00</b>	<b>1.314.289.659.257,23</b>	<b>90,37</b>	<b>1.423.234.916.633,85</b>

### 5.2.a Belanja Operasi

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1.208.461.786.509,00	1.105.414.852.748,84	91,47	1.061.632.401.624,52

Belanja Operasi Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp1.208.461.786.509,00 dengan realisasi senilai Rp1.105.414.852.748,84 atau sebesar 91,47%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan senilai Rp43.782.451.124,32 atau sebesar 4,12% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.061.632.401.624,52 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2.3 Rincian Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	640.785.007.944,00	587.860.841.072,00	91,74	516.330.812.752,00
Belanja Barang	528.591.009.121,00	481.698.811.775,84	91,13	505.749.913.372,52
Belanja Hibah	39.085.769.444,00	35.855.199.901,00	91,73	35.706.875.500,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	3.844.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.208.461.786.509,00</b>	<b>1.105.414.852.748,84</b>	<b>91,47</b>	<b>1.061.632.401.624,52</b>

#### 5.2.a.1) Belanja Pegawai

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
640.785.007.944,00	587.860.841.072,00	91,74	516.330.812.752,00

Belanja Pegawai Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp640.785.007.944,00 dengan realisasi senilai Rp587.860.841.072,00 atau sebesar 91,74, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan senilai Rp71.530.028.320,00 atau ,sebesar 13,85% dari realisasi tahun lalu senilai Rp516.330.812.752,00.

**Tabel 5.2.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	287.395.943.783,00	264.398.713.084,00	92,00	273.225.650.758,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	249.059.103.200,00	239.317.900.430,00	96,09	230.063.026.990,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	29.146.886.935,00	17.604.332.188,00	60,40	5.096.100.000,00
Belanja insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.457.823.100,00	7.308.313.486,00	98,00	7.344.337.254,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.919.585.830,00	162.527.844,00	8,47	601.697.750,00
Belanja Pegawai BLUD	65.805.665.096,00	59.069.054.040,00	89,76	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>640.785.007.944,00</b>	<b>587.860.841.072,00</b>	<b>91,74</b>	<b>516.330.812.752,00</b>

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut:

**a. Belanja Gaji dan Tunjangan**

**Tabel 5.2.5 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115.802.185.730,00	109.607.991.163,00	94,65	109.209.596.900,00
Dinas Kesehatan + RSUD	46.130.553.023,00	44.338.165.658,00	96,11	25.271.276.456,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	18.173.015.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.848.997.398,00	4.332.922.594,00	89,36	4.365.550.559,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.854.135.584,00	1.539.293.883,00	83,02	1.513.741.152,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.309.404.679,00	3.057.993.720,00	92,40	2.964.811.636,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.249.858.560,00	1.831.923.658,00	81,42	1.776.570.917,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.708.257.310,00	1.489.105.874,00	87,17	1.537.924.200,00
Dinas Sosial	1.573.759.550,00	1.276.703.727,00	81,12	1.372.378.268,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.139.099.860,00	1.755.111.248,00	82,05	1.702.944.995,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.602.961.100,00	2.199.000.089,00	84,48	2.144.810.431,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.825.937.983,00	2.525.572.039,00	89,37	2.762.549.019,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.194.017.294,00	1.982.126.556,00	90,34	1.949.211.489,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.972.646.940,00	1.672.198.906,00	84,77	1.638.185.190,00
Dinas Perhubungan	5.443.872.176,00	4.409.864.372,00	81,01	4.548.285.992,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.170.552.039,00	1.965.311.344,00	90,54	1.899.521.744,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.591.103.522,00	2.315.892.455,00	89,38	2.288.789.841,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.181.149.604,00	2.757.633.258,00	86,69	2.720.258.845,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.213.160.754,00	1.773.535.646,00	80,14	1.850.981.857,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.911.376.710,00	1.681.981.117,00	88,00	1.731.595.594,00
Dinas Perikanan	2.227.110.043,00	1.762.800.790,00	79,15	1.869.019.539,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.972.173.250,00	4.487.359.422,00	90,25	4.622.526.652,00
Dinas Perdagangan	3.031.104.090,00	2.494.326.642,00	82,29	2.698.184.162,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	143.527.756,00
Sekretariat Daerah	8.998.542.900,00	8.115.674.803,00	90,19	8.123.972.828,00
Sekretariat DPRD	2.883.842.468,00	2.452.828.454,00	85,05	12.273.875.348,00
Kecamatan Dumai Barat	2.847.581.289,00	2.556.412.091,00	89,77	2.623.469.548,00
Kecamatan Dumai Timur	2.935.697.325,00	2.538.532.411,00	86,47	2.570.782.225,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.562.341.250,00	3.341.266.560,00	93,79	3.196.082.845,00

Kecamatan Medang Kampai	2.946.711.825,00	2.553.140.323,00	86,64	2.665.721.584,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.311.061.386,00	3.014.707.947,00	91,05	2.958.463.874,00
Kecamatan Dumai Kota	3.488.920.664,00	2.880.320.396,00	82,56	2.933.433.386,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.171.236.665,00	2.780.155.618,00	87,67	2.925.580.646,00
Inspektorat	3.760.782.865,00	3.465.354.799,00	92,14	3.436.777.670,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.108.281.787,00	2.428.129.130,00	78,12	2.279.971.060,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.797.838.464,00	21.111.876.690,00	92,60	20.714.471.671,00
Badan Pendapatan Daerah	4.525.230.892,00	3.993.847.702,00	88,26	3.970.616.522,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.104.456.804,00	1.909.651.999,00	90,74	1.797.173.107,00
<b>Jumlah</b>	<b>287.395.943.783,00</b>	<b>264.398.713.084,00</b>	<b>92,00</b>	<b>273.225.650.758,00</b>

## b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 5.2.6 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.794.222.464,00	118.145.040.853,00	97,00	111.577.072.440,00
Dinas Kesehatan + RSUD	32.531.677.431,00	32.156.122.796,00	98,85	14.199.025.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	13.680.450.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.393.433.218,00	4.182.646.392,00	95,20	3.400.600.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.516.957.498,00	1.374.301.901,00	90,60	1.358.450.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.837.752.740,00	2.731.630.080,00	96,26	2.970.027.050,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.620.838.889,00	1.514.466.781,00	93,44	1.604.100.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.464.769.111,00	1.429.024.836,00	97,56	1.506.800.000,00
Dinas Sosial	1.268.983.512,00	1.167.749.006,00	92,02	1.246.150.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.592.237.089,00	1.565.615.077,00	98,33	1.609.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.136.013.734,00	2.002.731.639,00	93,76	2.067.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.295.857.592,00	2.185.818.583,00	95,21	2.385.300.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.243.168.880,00	2.153.767.374,00	96,01	1.878.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.694.415.072,00	1.541.254.960,00	90,96	1.582.800.000,00
Dinas Perhubungan	3.596.639.467,00	3.395.359.305,00	94,40	3.370.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.993.851.108,00	1.976.491.729,00	99,13	1.801.300.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.899.233.581,00	1.866.196.729,00	98,26	1.973.975.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.939.179.412,00	2.837.097.326,00	96,53	3.164.100.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.642.456.396,00	1.570.942.978,00	95,65	1.693.125.000,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.426.109.248,00	1.362.842.734,00	95,56	1.375.375.000,00
Dinas Perikanan	1.612.809.568,00	1.488.879.761,00	92,32	1.637.650.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.857.333.389,00	3.659.313.148,00	94,87	3.568.400.000,00
Dinas Perdagangan	1.965.739.870,00	1.889.201.058,00	96,11	2.192.350.000,00
Sekretariat Daerah	10.674.829.811,00	10.186.909.719,00	95,43	7.205.050.000,00
Sekretariat DPRD	2.040.288.304,00	1.952.402.435,00	95,69	2.024.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	2.176.709.208,00	2.106.600.547,00	96,78	2.137.125.000,00
Kecamatan Dumai Timur	2.426.655.160,00	2.269.552.040,00	93,53	2.313.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	3.050.177.012,00	2.853.423.709,00	93,55	2.558.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	2.234.686.884,00	2.107.984.500,00	94,33	2.160.337.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.762.561.405,00	2.439.684.758,00	88,31	2.485.800.000,00
Kecamatan Dumai Kota	3.211.774.552,00	2.381.973.805,00	74,16	2.386.342.500,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.544.923.036,00	2.408.411.417,00	94,64	2.464.000.000,00
Inspektorat	5.407.125.000,00	5.195.405.117,00	96,08	6.806.350.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.029.430.000,00	2.664.281.026,00	87,95	2.932.450.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.801.040.274,00	5.439.477.278,00	93,77	8.044.172.500,00
Badan Pendapatan Daerah	3.122.444.592,00	2.992.700.340,00	95,84	3.023.950.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.252.778.693,00	2.122.598.693,00	94,22	1.679.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>249.059.103.200,00</b>	<b>239.317.900.430,00</b>	<b>96,09</b>	<b>230.063.026.990,00</b>

### c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.2.7 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.073.929.340,00	1.599.276.247,00	52,03	495.000.000,00
Sekretariat DPRD	26.072.957.595,00	16.005.055.941,00	61,39	4.601.100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.146.886.935,00</b>	<b>17.604.332.188,00</b>	<b>60,40</b>	<b>5.096.100.000,00</b>

### d. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Tabel 5.2.8 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	7.457.823.100,00	7.308.313.486,00	98,00	7.344.337.254,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.457.823.100,00</b>	<b>7.308.313.486,00</b>	<b>98,00</b>	<b>7.344.337.254,00</b>

### e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Tabel 5.2.9 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000,00	24.503.983,00	98,02	20.004.000,00
Dinas Perhubungan	1.253.051.230,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	24.000.600,00	24.000.600,00	100,00	0,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	588.250.000,00	87.195.711,00	14,82	552.718.750,00
Dinas Perikanan	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.224.000,00	1.224.000,00	100,00	0,00
Dinas Perdagangan	26.810.000,00	25.603.550,00	95,50	28.975.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.919.585.830,00</b>	<b>162.527.844,00</b>	<b>8,47</b>	<b>601.697.750,00</b>

#### f. Belanja Pegawai BLUD

**Tabel 5.2.10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan+RSUD	65.805.665.096,00	59.069.054.040,00	89,76	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>65.805.665.096,00</b>	<b>59.069.054.040,00</b>	<b>89,76</b>	<b>0,00</b>

Rincian Belanja Pegawai per OPD sebagai berikut:

**Tabel 5.2.11 Rincian Belanja Pegawai per OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237.596.408.194,00	227.753.032.016,00	95,86	220.786.669.340,00
Dinas Kesehatan + RSUD	144.467.895.550,00	135.563.342.494,00	93,84	39.470.301.456,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	31.853.465.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.242.430.616,00	8.515.568.986,00	92,14	7.766.150.559,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.371.093.082,00	2.913.595.784,00	86,43	2.872.191.152,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.147.157.419,00	5.789.623.800,00	94,18	5.934.838.686,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.870.697.449,00	3.346.390.439,00	86,45	3.380.670.917,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	3.173.026.421,00	2.918.130.710,00	91,97	3.044.724.200,00
Dinas Sosial	2.842.743.062,00	2.444.452.733,00	85,99	2.618.528.268,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.731.336.949,00	3.320.726.325,00	89,00	3.312.444.995,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.738.974.834,00	4.201.731.728,00	88,66	4.212.210.431,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.146.795.575,00	4.735.894.605,00	92,02	5.167.853.019,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.437.186.174,00	4.135.893.930,00	93,21	3.827.711.489,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.667.062.012,00	3.213.453.866,00	87,63	3.220.985.190,00
Dinas Perhubungan	10.293.562.873,00	7.805.223.677,00	75,83	7.918.285.992,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.190.923.147,00	3.967.129.673,00	94,66	3.700.821.744,00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.490.337.103,00	4.182.089.184,00	93,14	4.262.764.841,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.770.329.016,00	5.681.926.295,00	83,92	6.437.077.595,00

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.855.617.150,00	3.344.478.624,00	86,74	3.544.106.857,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.337.485.958,00	3.044.823.851,00	91,23	3.106.970.594,00
Dinas Perikanan	3.841.169.611,00	3.251.680.551,00	84,65	3.506.669.539,00
Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	8.830.730.639,00	8.147.896.570,00	92,27	8.190.926.652,00
Dinas Perdagangan	5.023.653.960,00	4.409.131.250,00	87,77	4.919.509.162,00
KDH-WKDH	0,00	0,00	0,00	638.527.756,00
Sekretariat Daerah	21.580.885.751,00	18.968.627.929,00	87,90	15.329.022.828,00
Sekretariat DPRD	31.361.648.367,00	20.611.886.830,00	65,72	18.898.975.348,00
Kecamatan Dumai Barat	5.024.290.497,00	4.663.012.638,00	92,81	4.760.594.548,00
Kecamatan Dumai Timur	5.362.352.485,00	4.808.084.451,00	89,66	4.884.282.225,00
Kecamatan Bukit Kapur	6.612.518.262,00	6.194.690.269,00	93,68	5.754.082.845,00
Kecamatan Medang Kampai	5.181.398.709,00	4.661.124.823,00	89,96	4.826.059.084,00
Kecamatan Sungai Sembilan	6.073.622.791,00	5.454.392.705,00	89,80	5.444.263.874,00
Kecamatan Dumai Kota	6.700.695.216,00	5.262.294.201,00	78,53	5.319.775.886,00
Kecamatan Dumai Selatan	5.716.159.701,00	5.188.567.035,00	90,77	5.389.580.646,00
Inspektorat	9.167.907.865,00	8.660.759.916,00	94,47	10.243.127.670,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.137.711.787,00	5.092.410.156,00	82,97	5.212.421.060,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.598.878.738,00	26.551.353.968,00	92,84	28.758.644.171,00
Badan Pendapatan Daerah	15.843.085.484,00	15.025.168.368,00	94,84	14.338.903.776,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.357.235.497,00	4.032.250.692,00	92,54	3.476.673.107,00
<b>Jumlah</b>	<b>640.785.007.944,00</b>	<b>587.860.841.072,00</b>	<b>91,74</b>	<b>516.330.812.752,00</b>

**5.2.a.2) Belanja Barang Dan Jasa**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
<b>528.591.009.121,00</b>	<b>481.698.811.775,84</b>	<b>91,13</b>	<b>505.749.913.372,52</b>

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp528.591.009.121,00 dengan realisasi senilai Rp481.698.811.775,84 atau sebesar 91,13%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp24.051.101.596,68 atau sebesar 4,76% dari realisasi tahun lalu senilai Rp505.749.913.372,52.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat beberapa perbedaan kode akun belanja sehingga realisasi antara Tahun 2021 dan 2020 tidak dapat disandingkan. Pada tahun 2020, kode akun menggunakan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

**Tabel 5.2.12 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	92.374.680.856,00	71.587.059.821,76	77,50	17.576.822.404,00
Belanja Bahan/Material	73.949.190,00	71.905.800,00	97,24	40.357.288.607,00
Belanja Jasa Kantor	178.928.330.663,00	170.331.365.223,00	95,20	138.784.534.981,00
Belanja Premi Asuransi	20.726.479.026,00	20.482.319.490,00	98,82	18.421.096.820,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.500.222.377,50
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	7.341.388.561,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	758.447.092,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.607.208.773,00	2.954.888.260,00	81,92	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.090.349.312,00	2.215.125.012,00	71,68	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	200.850.000,00	150.650.000,00	75,01	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	424.841.684,00
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	7.249.980.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	393.001.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	11.655.022.981,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	448.174.200,00
Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	2.478.882.800,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	666.779.250,00
Belanja Perjalanan Dinas	62.279.520.816,00	45.083.480.276,00	72,39	48.673.247.074,50
Belanja Pemeliharaan	63.661.775.823,00	57.923.284.043,08	90,99	15.968.124.526,00
Belanja Jasa Konsultansi	9.078.578.112,00	8.617.386.632,00	94,92	5.831.509.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.227.217.800,00	6.088.260.000,00	97,77	6.638.857.150,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.692.820.000,00	3.178.450.764,00	86,07	1.247.140.157,00
Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	72.029.056.854,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	20.897.660.000,00	29.942.171.389,00	143,28	30.446.605.070,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.740.588.750,00	63.061.465.065,00	98,93	67.347.723.466,52
Belanja Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	1.472.167.317,00
<b>Jumlah</b>	<b>528.591.009.121,00</b>	<b>481.698.811.775,84</b>	<b>91,13</b>	<b>505.749.913.372,52</b>

Rincian Belanja Barang dan jasa per Akun Belanja dapat dilihat pada:

**a. Belanja Bahan Pakai Habis**

**Tabel 5.2.13 Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.408.920.258,00	2.798.937.108,00	82,11	1.605.419.440,00
Dinas Kesehatan + RSUD	24.718.213.285,00	19.842.753.466,00	80,28	803.661.847,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	1.258.770.187,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.806.673.321,00	14.720.780.794,00	87,59	1.105.507.790,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.870.512.598,00	197.772.773,00	3,37	465.610.050,00
Satuan Polisi Pamong Praja	441.261.781,00	434.704.788,00	98,51	195.305.700,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.116.912.785,00	1.637.702.342,76	52,54	94.771.100,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	242.202.542,00	194.649.638,00	80,37	122.141.700,00
Dinas Sosial	611.959.994,00	566.314.995,00	92,54	163.779.081,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.964.746,00	176.587.260,00	82,15	117.778.400,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	902.101.435,00	777.316.908,00	86,17	188.289.488,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.866.449.120,00	1.725.580.055,00	92,45	3.208.699.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.593.197.281,00	1.566.242.594,00	98,31	959.337.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.511.126.785,00	1.504.640.320,00	99,57	175.509.373,00
Dinas Perhubungan	897.325.387,00	777.808.620,00	86,68	294.322.495,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.128.687.476,00	5.059.091.547,00	98,64	102.781.300,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	819.911.126,00	776.964.335,00	94,76	84.761.700,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.856.837,00	340.698.616,00	80,95	155.415.900,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	976.987.910,00	941.854.808,00	96,40	97.389.450,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	209.085.313,00	192.393.103,00	92,02	75.849.300,00
Dinas Perikanan	998.653.083,00	887.886.835,00	88,91	142.226.025,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	158.409.144,00	129.876.689,00	81,99	392.520.750,00
Dinas Perdagangan	379.502.927,00	170.178.700,00	44,84	81.681.375,00
Sekretariat Daerah	4.633.592.685,00	3.704.754.480,00	79,95	1.051.807.443,00
Sekretariat DPRD	5.121.365.172,00	3.792.626.620,00	74,05	504.577.950,00
Kecamatan Dumai Barat	423.932.874,00	355.369.546,00	83,83	372.665.600,00
Kecamatan Dumai Timur	919.117.016,00	550.573.157,00	59,90	146.868.512,00
Kecamatan Bukit Kapur	938.350.259,00	710.150.387,00	75,68	505.043.020,00
Kecamatan Medang Kampai	876.463.815,00	740.580.585,00	84,50	366.122.010,00
Kecamatan Sungai Sembilan	716.164.337,00	510.342.700,00	71,26	424.223.000,00
Kecamatan Dumai Kota	1.143.996.759,00	1.040.445.808,00	90,95	224.750.050,00
Kecamatan Dumai Selatan	818.783.086,00	650.341.315,00	79,43	253.289.312,00

Inspektorat	414.072.495,00	357.877.554,00	86,43	254.170.300,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	941.476.499,00	602.412.427,00	63,99	280.901.881,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.020.365.737,00	1.426.842.705,00	70,62	521.347.025,00
Badan Pendapatan Daerah	1.647.782.858,00	1.273.729.135,00	77,30	510.839.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	465.302.130,00	450.277.108,00	96,77	268.687.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.374.680.856,00</b>	<b>71.587.059.821,76</b>	<b>77,50</b>	<b>17.576.822.404,00</b>

## b. Belanja Barang Tak Pakai Habis

Tabel 5.2.14 Belanja Barang Tak Pakai Habis Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	188.055.799,00
Dinas Kesehatan + RSUD	105.000,00	105.000,00	100,00	10.247.916.425,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	12.515.356.270,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	11.067.095.600,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	165.900,00	0,00	0,00	482.750,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.000,00	210.000,00	100,00	47.365.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Dinas Sosial	210.000,00	210.000,00	100,00	117.610.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	820.035.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	112.500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	49.472.000,00
Dinas Perhubungan	29.148.000,00	29.148.000,00	100,00	703.381.800,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	49.947.500,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Dinas Perikanan	816.900,00	816.900,00	100,00	176.273.900,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.214.131.375,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	11.486.000,00
Sekretariat Daerah	13.299.300,00	13.272.000,00	99,79	53.500.000,00
Sekretariat DPRD	9.061.920,00	8.879.200,00	97,98	1.160.556.750,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	117.382.000,00
Kecamatan Dumai Timur	447.300,00	0,00	0,00	156.048.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00

Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	47.994.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	622.650,00	543.600,00	87,30	89.606.688,00
Kecamatan Dumai Selatan	19.534.620,00	18.721.100,00	95,84	184.098.750,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	22.443.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	327.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.949.190,00</b>	<b>71.905.800,00</b>	<b>97,24</b>	<b>40.357.288.607,00</b>

### c. Belanja Jasa Kantor

**Tabel 5.2.15 Belanja Jasa Kantor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.932.962.097,00	25.390.635.924,00	97,91	24.820.269.678,00
Dinas Kesehatan + RSUD	53.681.898.804,00	51.308.932.666,00	95,58	9.546.409.925,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	17.027.743.613,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.291.425.179,00	7.937.152.003,00	95,73	5.887.258.735,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.408.101.525,00	940.384.638,00	66,78	9.718.788.909,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.339.086.200,00	1.299.643.923,00	97,05	1.014.758.585,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.373.641.600,00	968.350.957,00	70,50	1.048.806.048,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1.236.359.020,00	1.171.695.933,00	94,77	396.409.920,00
Dinas Sosial	1.510.357.750,00	1.469.127.379,00	97,27	1.644.802.226,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	673.350.435,00	660.728.685,00	98,13	570.347.329,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.053.551.025,00	999.181.300,00	94,84	716.375.493,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.760.499.415,00	2.730.167.533,00	98,90	7.845.467.454,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.155.490.075,00	8.084.282.543,00	99,13	776.937.098,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.211.327.800,00	1.132.069.207,00	93,46	1.784.614.841,00
Dinas Perhubungan	1.747.756.632,00	1.206.633.533,00	69,04	8.285.434.464,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	16.709.535.679,00	16.490.966.299,00	98,69	6.051.573.431,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.174.718.336,00	5.114.736.732,00	98,84	893.801.957,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	839.159.425,00	772.193.313,00	92,02	730.718.234,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.370.354.625,00	1.297.106.171,00	94,65	1.334.516.702,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	559.627.200,00	532.010.963,00	95,07	631.575.512,00
Dinas Perikanan	1.099.943.025,00	1.085.048.554,00	98,65	949.719.532,00

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.690.375.950,00	1.640.850.177,00	97,07	3.892.109.263,00
Dinas Perdagangan	1.095.668.120,00	954.886.313,00	87,15	1.623.522.233,00
Sekretariat Daerah	11.521.599.875,00	10.780.719.889,00	93,57	9.455.637.547,00
Sekretariat DPRD	3.145.161.969,00	2.511.768.720,00	79,86	2.386.257.557,00
Kecamatan Dumai Barat	2.080.270.000,00	2.042.859.014,00	98,20	1.932.257.277,00
Kecamatan Dumai Timur	2.819.780.600,00	2.788.872.360,00	98,90	2.600.247.844,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.183.876.000,00	2.083.116.823,00	95,39	1.868.415.276,00
Kecamatan Medang Kampai	1.296.655.500,00	1.264.210.531,00	97,50	1.115.330.540,00
Kecamatan Sungai Sembilan	2.172.550.300,00	2.124.401.309,00	97,78	2.049.612.712,00
Kecamatan Dumai Kota	2.522.952.007,00	2.485.057.139,00	98,50	2.347.346.154,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.428.755.080,00	2.347.698.116,00	96,66	2.205.524.099,00
Inspektorat	635.431.400,00	546.577.000,00	86,02	298.135.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.460.713.000,00	1.288.533.000,00	88,21	1.069.828.850,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.774.333.415,00	3.510.825.500,00	93,02	1.427.303.400,00
Badan Pendapatan Daerah	2.565.660.980,00	2.090.293.076,00	81,47	2.046.226.343,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.405.400.620,00	1.279.648.000,00	91,05	790.451.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>178.928.330.663,00</b>	<b>170.331.365.223,00</b>	<b>95,20</b>	<b>138.784.534.981,00</b>

#### d. Belanja Premi Asuransi

Tabel 5.2.16 Belanja Premi Asuransi Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	20.608.380.822,00	20.410.623.927,00	99,04	14.782.393.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	3.434.661.079,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.562.640,00	1.146.960,00	8,46	2.293.930,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.931.520,00	6.432.739,00	81,10	9.493.200,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.636.260,00	1.636.260,00	100,00	8.332.356,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	3.342.222,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.411.200,00	1.411.200,00	100,00	2.721.600,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.676.160,00	1.676.160,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	19.948.680,00	14.752.530,00	73,95	147.160.350,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	28.396.668,00
Kecamatan Dumai Barat	4.050.000,00	3.675.780,00	90,76	305.640,00
Kecamatan Dumai Kota	1.995.840,00	1.995.840,00	100,00	1.995.840,00
Kecamatan Medang Kampai	1.039.680,00	941.760,00	90,58	0,00
Dinas Sosial	4.938.300,00	1.624.332,00	32,89	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	50.135.040,00	30.683.402,00	61,20	0,00
Dinas Perhubungan	1.414.260,00	1.379.700,00	97,56	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.840.560,00	4.338.900,00	89,64	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.946.304,00	0,00	0,00	0,00

Kecamatan Dumai Selatan	1.571.760,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.726.479.026,00</b>	<b>20.482.319.490,00</b>	<b>98,82</b>	<b>18.421.096.820,00</b>

#### e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

**Tabel 5.2.17 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	60.561.220,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	223.447.855,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	118.190.825,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.992.826.374,50
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	270.271.154,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	69.612.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	244.238.285,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	99.348.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	186.299.562,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	56.224.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	82.064.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	841.781.090,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	41.341.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	103.617.500,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	363.253.526,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	93.038.140,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	84.173.310,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	135.034.479,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	153.299.239,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	128.753.140,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	140.622.475,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	193.650.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	97.226.730,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.125.610.804,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	666.401.373,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	23.427.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	89.606.120,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	30.029.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	97.929.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	27.458.375,00

Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	136.745.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	96.489.200,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	164.918.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	396.665.400,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	287.609.696,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	386.924.735,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	191.534.770,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.222.377,50</b>

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### f. Belanja Cetak dan Pengandaan

Tabel 5.2.18 Belanja Cetak dan Pengandaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	943.250.250,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	360.693.325,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	19.740.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	328.228.100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	17.039.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	20.617.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	38.475.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	58.381.400,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	108.437.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	64.076.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	204.167.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	130.714.900,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	191.230.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	208.879.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	557.509.562,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	346.376.300,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	26.186.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	209.885.000,00

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	87.985.800,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	38.047.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	32.630.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	109.590.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	51.883.050,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	461.622.900,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	476.986.486,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	126.151.500,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	95.311.100,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	151.413.488,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	121.143.850,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	71.634.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	111.842.850,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	163.465.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	87.693.100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	186.256.800,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	559.100.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	464.375.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	110.371.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341.388.561,00</b>

Belanja Cetak dan Penggandaan Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Bahan Pakai Habis sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

**Tabel 5.2.19 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	19.955.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	89.360.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	8.939.092,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	12.630.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	16.960.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	6.760.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	134.640.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	231.985.000,00

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	3.101.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	43.920.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	151.057.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	15.040.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.447.092,00</b>

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### h. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

**Tabel 5.2.20 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.601.260,00	60.121.260,00	80,59	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	161.771.000,00	157.150.000,00	97,14	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.264.893.000,00	1.968.464.000,00	86,91	0,00
Dinas Sosial	110.450.000,00	61.450.000,00	55,64	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70.765.113,00	70.675.000,00	99,87	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.756.000,00	3.645.000,00	53,95	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	585.000,00	390.000,00	66,67	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	34.965.000,00	26.900.000,00	76,93	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	47.100.000,00	47.100.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	632.540.000,00	423.075.000,00	66,89	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.300.000,00	8.288.000,00	57,96	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37.682.400,00	32.530.000,00	86,33	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.300.000,00	54.000.000,00	89,55	0,00
Kecamatan Dumai Timur	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	13.200.000,00	7.600.000,00	57,58	0,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.607.208.773,00</b>	<b>2.954.888.260,00</b>	<b>81,92</b>	<b>0,00</b>

#### i. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

**Tabel 5.2.21 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	435.820.000,00	422.010.000,00	96,83	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	2.017.349.312,00	1.374.670.012,00	68,14	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.000.000,00	14.900.000,00	93,13	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.000.000,00	41.050.000,00	97,74	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.200.000,00	4.880.000,00	78,71	0,00
Dinas Perhubungan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.200.000,00	3.600.000,00	85,71	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.000.000,00	2.400.000,00	30,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.000.000,00	1.400.000,00	70,00	0,00
Dinas Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	178.580.000,00	115.615.000,00	64,74	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.000.000,00	106.700.000,00	88,92	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	40.000.000,00	26.900.000,00	67,25	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat DPRD	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.090.349.312,00</b>	<b>2.215.125.012,00</b>	<b>71,68</b>	<b>0,00</b>

#### j. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

**Tabel 5.2.22 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	20.500.000,00	10.500.000,00	51,22	0,00

Dinas Sosial	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	156.600.000,00	122.400.000,00	78,16	0,00
Kecamatan Dumai Timur	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>200.850.000,00</b>	<b>150.650.000,00</b>	<b>75,01</b>	<b>0,00</b>

#### k. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Tabel 5.2.23 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	39.487.500,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	89.100.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	16.846.300,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	13.992.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	14.545.084,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	110.850.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	71.180.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.841.684,00</b>

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### l. Belanja Sewa Alat Berat

Tabel 5.2.24 Belanja Sewa Alat Berat Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	7.249.980.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.980.000,00</b>

Belanja Sewa Alat Berat Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

**m. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**

**Tabel 5.2.25 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	212.389.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	67.672.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.001.000,00</b>

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

**n. Belanja Makanan dan Minuman**

**Tabel 5.2.26 Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	1.101.182.730,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	896.948.120,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	2.014.143.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	403.515.400,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	28.033.420,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	109.446.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	427.991.500,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	74.254.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	41.265.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	29.363.000,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	109.105.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	185.320.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	25.692.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	331.010.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	159.050.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	72.495.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	15.535.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	44.097.500,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	110.712.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	37.269.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	162.363.250,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.974.754.600,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	491.072.890,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	329.550.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	173.262.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	196.904.091,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	347.855.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	246.185.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	302.513.480,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	316.731.500,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	97.390.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	222.205.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	269.475.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	180.495.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	112.986.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655.022.981,00</b>

Belanja Makanan dan Minuman Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Bahan Pakai Habis sesuai dengan kodifikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### **o. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**

**Tabel 5.2.27 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	105.936.000,00

Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	281.160.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	34.610.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	26.468.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.174.200,00</b>

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Bahan Pakai Habis sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

**p. Belanja Pakaian Kerja**

**Tabel 5.2.28 Belanja Pakaian Kerja Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	188.919.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	174.406.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	20.790.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	347.348.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	1.161.311.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	32.975.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	35.150.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	64.495.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	68.505.800,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	128.560.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	34.421.200,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	37.825.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	44.476.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	20.730.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	21.710.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	66.810.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.882.800,00</b>

Belanja Pakaian Kerja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Bahan Pakai Habis sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

**q. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**

**Tabel 5.2.29 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	144.150.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	57.125.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	102.395.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	103.500.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	113.730.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	9.545.250,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	15.984.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.779.250,00</b>

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Bahan Pakai Habis sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

**r. Belanja Perjalanan Dinas**

**Tabel 5.2.30 Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.475.551.560,00	1.437.340.205,00	97,41	2.172.516.609,00
Dinas Kesehatan + RSUD	10.902.130.497,00	6.737.967.219,00	61,80	2.549.081.454,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	555.315.512,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.134.352.680,00	1.800.708.626,00	57,45	2.460.293.095,50
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	474.983.805,00	385.279.335,00	81,11	535.021.752,00
Satuan Polisi Pamong Praja	415.481.500,00	411.540.794,00	99,05	348.239.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.775.774.600,00	553.785.645,00	31,19	425.526.837,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	669.563.180,00	551.225.800,00	82,33	253.306.659,00
Dinas Sosial	535.634.125,00	501.394.967,00	93,61	732.496.181,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	228.536.000,00	228.307.125,00	99,90	252.877.109,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	734.874.520,00	505.368.785,00	68,77	454.038.108,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.750.497.522,00	2.590.769.463,00	94,19	753.162.558,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	711.645.000,00	666.656.919,00	93,68	532.307.022,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	442.498.358,00	414.917.360,00	93,77	508.845.683,00
Dinas Perhubungan	1.154.246.030,00	1.054.855.934,00	91,39	736.129.834,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.477.465.680,00	1.427.920.198,00	96,65	728.554.687,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	976.888.707,00	889.103.131,00	91,01	379.521.644,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	502.810.000,00	267.676.280,00	53,24	549.759.699,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	429.860.620,00	420.102.488,00	97,73	480.745.095,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	444.364.000,00	438.219.060,00	98,62	314.281.177,00
Dinas Perikanan	371.860.800,00	368.278.720,00	99,04	168.688.405,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	459.592.483,00	421.823.101,00	91,78	2.136.273.626,00
Dinas Perdagangan	455.994.940,00	309.075.610,00	67,78	357.741.502,00
Sekretariat Daerah	6.413.321.045,00	5.166.005.977,00	80,55	6.947.339.133,00
Sekretariat DPRD	12.052.694.346,00	7.809.911.425,00	64,80	11.933.158.831,00
Kecamatan Dumai Barat	120.129.000,00	119.304.948,00	99,31	176.494.807,00
Kecamatan Dumai Timur	127.909.000,00	118.211.000,00	92,42	168.840.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	287.628.000,00	222.635.037,00	77,40	213.725.003,00
Kecamatan Medang Kampai	158.053.000,00	119.511.227,00	75,61	146.479.197,00
Kecamatan Sungai Sembilan	84.922.000,00	67.805.476,00	79,84	146.875.847,00
Kecamatan Dumai Kota	210.021.830,00	196.940.680,00	93,77	219.262.849,00
Kecamatan Dumai Selatan	283.066.600,00	240.824.700,00	85,08	246.625.800,00
Inspektorat	2.199.108.000,00	2.105.963.560,00	95,76	2.542.615.300,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.999.250.237,00	1.295.820.908,00	64,82	2.130.220.486,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.616.517.000,00	3.004.366.337,00	65,08	2.876.050.862,00
Badan Pendapatan Daerah	1.940.280.700,00	1.254.022.886,00	64,63	1.876.747.311,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.262.013.451,00	979.839.350,00	77,64	664.087.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.279.520.816,00</b>	<b>45.083.480.276,00</b>	<b>72,39</b>	<b>48.673.247.074,50</b>

#### s. Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.2.31 Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.633.753.169,00	13.235.901.529,09	90,45	147.075.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	2.630.409.250,00	2.374.556.984,00	90,27	874.279.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	396.710.299,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.897.983.370,00	13.600.818.363,00	97,86	3.324.983.500,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	342.280.400,00	187.751.613,00	54,85	6.000.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja	409.811.973,00	409.231.400,00	99,86	31.050.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	753.885.950,00	417.135.063,00	55,33	6.012.300,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	128.712.850,00	125.120.779,00	97,21	8.000.000,00
Dinas Sosial	237.144.951,00	234.855.000,00	99,03	445.100.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	174.530.540,00	160.390.300,00	91,90	155.750.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	186.624.632,00	176.262.900,00	94,45	95.565.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.450.233.156,00	1.445.801.420,00	99,69	62.020.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.024.195.313,00	4.013.673.107,00	99,74	174.050.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	241.380.775,00	241.062.350,00	99,87	22.200.000,00
Dinas Perhubungan	144.404.625,00	138.900.044,00	96,19	3.957.595.675,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.586.157.497,00	4.571.835.659,00	99,69	15.845.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	291.524.400,00	286.279.678,00	98,20	12.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	195.588.850,00	170.599.681,00	87,22	4.269.730,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.782.987.772,00	2.688.647.696,99	96,61	358.858.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	350.790.028,00	322.287.600,00	91,87	111.260.000,00
Dinas Perikanan	207.034.888,00	203.188.099,00	98,14	443.701.469,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	759.725.449,00	307.073.780,00	40,42	1.671.905.000,00
Dinas Perdagangan	175.459.000,00	168.241.500,00	95,89	38.915.000,00
Sekretariat Daerah	3.063.950.563,00	2.422.257.320,00	79,06	1.640.995.999,00
Sekretariat DPRD	681.306.429,00	556.173.497,00	81,63	313.800.835,00
Kecamatan Dumai Barat	1.396.083.050,00	1.372.841.800,00	98,34	24.900.000,00
Kecamatan Dumai Timur	1.022.263.802,00	581.930.880,00	56,93	131.955.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.411.195.100,00	1.888.823.850,00	78,34	36.793.811,00
Kecamatan Medang Kampai	646.550.746,00	609.544.690,00	94,28	40.940.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	338.741.150,00	216.430.110,00	63,89	4.250.000,00
Kecamatan Dumai Kota	2.537.273.385,00	2.349.821.310,00	92,61	181.588.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	534.723.800,00	413.047.925,00	77,25	229.580.000,00
Inspektorat	259.339.250,00	195.241.550,00	75,28	78.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	388.285.550,00	321.064.058,00	82,69	215.806.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	951.959.510,00	854.315.350,00	89,74	222.340.000,00
Badan Pendapatan Daerah	570.102.050,00	413.535.357,00	72,54	434.790.908,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	255.382.600,00	248.641.800,00	97,36	48.989.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>63.661.775.823,00</b>	<b>57.923.284.043,08</b>	<b>90,99</b>	<b>15.968.124.526,00</b>

**t. Belanja Jasa Konsultansi**

**Tabel 5.2.32 Belanja Jasa Konsultansi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.732.641.173,00	1.643.849.700,00	94,88	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	2.771.297.310,00	2.672.350.932,00	96,43	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.489.581.324,00	1.456.011.000,00	97,75	4.009.610.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	50.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	67.001.500,00
Dinas Sosial	5.577.696,00	5.550.000,00	99,50	35.640.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	215.815.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Perhubungan	1.606.947.880,00	1.598.552.000,00	99,48	701.823.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	305.892.717,00	305.513.100,00	99,88	252.228.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	300.192.160,00	300.135.000,00	99,98	25.800.000,00
Dinas Perikanan	18.000.000,00	13.783.000,00	76,57	79.548.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	91.282.500,00
Sekretariat Daerah	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24	197.347.000,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	24.830.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	11.484.000,00
Badan Pendapatan Daerah	260.452.195,00	216.763.000,00	83,23	38.700.000,00
Dinas Perdagangan	47.495.657,00	29.478.900,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00	265.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.078.578.112,00</b>	<b>8.617.386.632,00</b>	<b>94,92</b>	<b>5.831.509.000,00</b>

**u. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**

**Tabel 5.2.33 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.400.000,00	106.400.000,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.441.173.500,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	100,00	3.381.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	298.125.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.980.000,00	10.480.000,00	80,74	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.530.000,00	7.530.000,00	100,00	939.881.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	855.000.000,00	855.000.000,00	100,00	0,00
Sekretariat Daerah	704.500.000,00	576.500.000,00	81,83	539.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	4.400.000,00	0,00	0,00	29.376.750,00
Dinas Sosial	344.100.000,00	344.100.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	17.057.800,00	17.000.000,00	99,66	0,00
Kecamatan Dumai Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.227.217.800,00</b>	<b>6.088.260.000,00</b>	<b>97,77</b>	<b>6.638.857.150,00</b>

#### v. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

**Tabel 5.2.34 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	39.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39.000.000,00</b>

#### w. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

**Tabel 5.2.35 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2021 dan**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.500.000,00	99.405.739,00	99,91	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	539.675.000,00	439.120.025,00	81,37	10.250.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Dinas Perhubungan	192.498.000,00	182.500.000,00	94,81	141.430.157,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	67.000.000,00	95,71	83.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	371.638.000,00	361.600.000,00	97,30	20.500.000,00
Sekretariat Daerah	126.105.000,00	125.985.000,00	99,90	133.200.000,00
Sekretariat DPRD	1.066.480.000,00	796.780.000,00	74,71	3.000.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	684.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	314.000.000,00	259.915.000,00	82,78	58.760.000,00
Badan Pendapatan Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	59.500.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	797.424.000,00	753.270.000,00	94,46	35.500.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	27.500.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
Inspektorat	33.000.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.692.820.000,00</b>	<b>3.178.450.764,00</b>	<b>86,07</b>	<b>1.247.140.157,00</b>

#### x. Belanja Honorarium PNS

Tabel 5.2.36 Belanja Honorarium PNS Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	532.300.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	5.881.547.979,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	59.532.408.875,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	424.900.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	0,00	0,00	697.600.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	275.600.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	27.320.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	22.900.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	365.440.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	91.900.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	794.520.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	2.308.900.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	927.000.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	100.950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.029.056.854,00</b>

Belanja Honorarium PNS Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. akun tersebut masuk ke dalam Belanja Jasa Kantor sesuai dengan kodefikasi akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

**y. Belanja Barang dan Jasa Dana Bos**

**Tabel 5.2.37 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.897.660.000,00	29.942.171.389,00	143,28	30.446.605.070,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.897.660.000,00</b>	<b>29.942.171.389,00</b>	<b>143,28</b>	<b>30.446.605.070,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2021 senilai Rp29.942.171.389,00 melebihi dari anggarannya senilai Rp20.897.660.000,00 atau sebesar 143,28% dikarenakan tidak dilakukannya penyesuaian angka Pendapatan dan Belanja BOS sesuai dengan angka definitif disalurkan ke sekolah pada APBD Perubahan sehingga Belanja BOS riil melampaui anggarannya. Selain itu, Belanja BOS yang dianggarkan tidak termasuk BOS Kinerja, dan BOS Afiriasi.

**z. Belanja Barang dan Jasa BLUD**

**Tabel 5.2.38 Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	63.740.588.750,00	63.039.440.065,00	98,90	5.878.919.667,00
RSUD-BLUD	0,00	0,00	0,00	61.468.803.799,52
<b>Jumlah</b>	<b>63.740.588.750,00</b>	<b>63.039.440.065,00</b>	<b>98,90</b>	<b>67.347.723.466,52</b>

**aa. Belanja Jaminan Persalinan**

**Tabel 5.2.39 Belanja Jaminan Persalinan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	1.472.167.317,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.167.317,00</b>

**5.2.a.3) Belanja Hibah**

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>39.085.769.444,00</b>	<b>35.855.199.901,00</b>	<b>91,73</b>	<b>35.706.875.500,00</b>

Belanja Hibah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp39.085.769.444,00 dengan realisasi senilai Rp35.855.199.901,00 atau sebesar 91,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi kenaikan senilai Rp148.324.401,00 atau sebesar 0,42% dari realisasi tahun lalu senilai Rp35.706.875.500,00.

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.40 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	100,00	2.319.562.800,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	33.387.312.700,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.380.024.156,00	23.088.088.951,00	90,97	0,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.809.100.000,00	4.961.450.000,00	85,41	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.827.082.220,00	4.736.098.150,00	98,12	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	400.000.268,00	400.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.085.769.444,00</b>	<b>35.855.199.901,00</b>	<b>91,73</b>	<b>35.706.875.500,00</b>

Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp2.319.562.800,00 dengan realisasi senilai Rp2.319.562.800,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.41 Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Penerima	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Partai Nasdem	257.014.800,00	257.014.800,00	100,00	257.014.800,00
Partai Amanat Nasional	303.950.880,00	303.950.880,00	100,00	303.950.880,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	320.126.400,00	320.126.400,00	100,00	320.126.400,00
Partai Gerindra	256.405.680,00	256.405.680,00	100,00	256.405.680,00
Partai Persatuan Pembangunan	157.914.360,00	157.914.360,00	100,00	157.914.360,00
Partai Golongan Karya	216.931.320,00	216.931.320,00	100,00	216.931.320,00
Partai Hanura	131.840.640,00	131.840.640,00	100,00	131.840.640,00
Partai Keadilan Sejahtera	333.036.360,00	333.036.360,00	100,00	333.036.360,00
Partai Demokrat	342.342.360,00	342.342.360,00	100,00	342.342.360,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.319.562.800,00</b>	<b>2.319.562.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.319.562.800,00</b>

Tidak ada Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021

Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.42 Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2020
1.	Organisasi Kemasyarakatan	0,00	30.324.012.700,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	2.744.400.000,00
3.	Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.	0,00	318.900.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387.312.700,00</b>

Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.43 Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2020
Masjid Al Falah	Jl. Prof. M. Yamin Kel. Laksamana	0,00	4.000.000.000,00
Masjid Al-Mu'Minun	Jl. Bangun Jinawi, Rt 02 Kel.Mekar Sari	0,00	15.000.000,00
Lptq Kota Dumai	Jl. Soekarno Hatta (Masjid Agung Al-Mannan) Kel. Bagan Besar	0,00	2.000.000.000,00
Musholla Miftahul Jannah	Jl. Meranti li, Gg. Mulia Patra Kel. Ratu Sima	0,00	10.000.000,00
Masjid At - Taubah	Jl. Bukit Datuk Lama, Kel. Bukit Datuk	0,00	15.000.000,00
Musholla Al-Hidayah	Jl. Sukaramai Baru, Rt 05 Kel. Bukit Kayu Kapur	0,00	10.000.000,00
Musholla Nurul Amal	Jl. Koperasi Putri Tujuh Rt. 26 Kel. Bagan Besar	0,00	10.000.000,00
Masjid Hidayatul Awam	Jl. Pangeran Diponegoro, Gg. Hidayat, Kel. Rimba Sekampung	0,00	15.000.000,00
Baznas Kota Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No 170 Kel. Teluk Binjai	0,00	300.000.000,00
Musholla Al-Muhajirin	Jl. Nelayan Rt 002 Kel. Bangsal Aceh	0,00	10.000.000,00
Masjid Baitul Muttaqin	Jl. Belimbing Kel. Rimba Sekampung	0,00	15.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Muslim, Rt 01 Kel. Mundam	0,00	15.000.000,00
Musholla As Sajadah	Jl. Ali Akbar No 1, Rt 19 Kel. Teluk Binjai	0,00	10.000.000,00
Masjid Nurul Islam	Jl. Pangeran Diponegoro (Pasar Pulau Payung), Kel. Bukit Datuk	0,00	15.000.000,00
Musholla Darul Iman	Jl. Arifin Ahmad, Rt 03 Km.10 Kel. Teluk Makmur	0,00	10.000.000,00
Masjid Bustanul Abidin	Jl. Natuna No 7 Kel. Sukajadi	0,00	15.000.000,00
Masjid Al Iman Nerbit Kecil	Jl. Raya Pu Nerbit Kecil Kel. Lubuk Gaung	0,00	15.000.000,00
Musholla Al-Anshor	Jl. Nerbit Kecil, Rt 012, Kel. Lubuk Gaung	0,00	10.000.000,00
Musholla Nurul Ikhlas	Jl. Sukaramai Rt. 006 Kel. Bukit Kayu Kapur	0,00	10.000.000,00
Masjid Raudhatul Jannah	Jl. Leppin Kel. Sukajadi	0,00	15.000.000,00
Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Ri Kota Dumai	Jl. Tanjung Jati, Kel. Buluh Kasap	0,00	100.000.000,00
Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kota Dumai	Jl. H. R Soebrantas Kota Dumai	0,00	1.000.000.000,00
Masjid Al-Huda	Jl. Arifin Ahmad, Rt 02 Kel. Guntung	0,00	15.000.000,00
Masjid Nurul Yaqin	Jl.Paus Kel. Pangkalan Sesai	0,00	15.000.000,00
Masjid Jamiatul Husnul Khotimah	Jl. Gatot Subroto, Km 8, Rt 06 Kel. Mekar Sari	0,00	15.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Teladan Kel. Jaya Mukti	0,00	15.000.000,00
Masjid Nurul Iman	Jl. Pembangunan, Rt 01 Kel. Pelintung	0,00	15.000.000,00

Penerima	Alamat Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2020
Gerakan Pramuka Kwartil Cabang Kota Dumai	Jl. Kesehatan, Kel. Teluk Binjai	0,00	175.000.000,00
Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Dumai	Jl. Kesehatan Kel. Teluk Binjai	0,00	400.000.000,00
Masjid Al Hijriyah	Jl. Gunung Merapi, Kel. Bumi Ayu	0,00	15.000.000,00
Masjid Nurul Islam	Jl. Budi Dharma, Dock Yard Kel. Stdi	0,00	15.000.000,00
Musholla Al-Muallimin	Jl. Husni Thamrin Gg. Kunyit, Kel. Stdi	0,00	10.000.000,00
Musholla Al- Mustawa	Jl. Tunas Mulia No 31, Rt 12 Kel. Bukit Datuk	0,00	10.000.000,00
Masjid Nurul As'Ad	Jl. Garuda No 12 Kel. Bukit Nenas	0,00	15.000.000,00
Masjid Baitut Taiyibin	Jl. Wisma Haji-Pattimura Kel. Laksamana	0,00	15.000.000,00
Lembaga Adat Melayu Riau (Lamr) Kota Dumai	Jl. Putri Tujuh Kel. Teluk Binjai	0,00	350.000.000,00
Musholla Hidayatus Shibyan	Jl. Jenderal Sudirman No 170 Kel. Teluk Binjai	0,00	10.000.000,00
Masjid Al-Mujtahidin	Jl. Inpres, Rt 04 Kel. Purnama	0,00	15.000.000,00
Masjid Al Huda	Jl. Baru, Gg. Barokah Kel. Jaya Mukti	0,00	15.000.000,00
Musholla Al Ridho	Jl. Sejati Gg. Ridho, Rt 07 Kel. Bukit Batrem	0,00	10.000.000,00
Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Jl. H. R Soebrantas Kota Dumai	0,00	75.000.000,00
Masjid Baitur Rahman	Jl. Marlan Jaya No 6, Rt 10 Kel. Bukit Datuk	0,00	15.000.000,00
Musholla Nurul Huda	Jl. Sidorejo Gg. Fajar Sari No 6 Kel. Stdi	0,00	10.000.000,00
Musholla Jami'Atul Muslimin	Jl. Ahmad Yani Gg. Bakti Rt 27 Kel. Bukit Datuk	0,00	10.000.000,00
Masjid Assa'Dah	Jl. Asri Rt 008 Kel. Stdi	0,00	15.000.000,00
Palang Merah Indonesia (Pmi) Kota Dumai	Jl. Tanjung Jati, Kel. Buluh Kasap	0,00	125.000.000,00
Masjid Darunnafis	Jl. Pelajar, Gg. Masjid Kel. Jaya Mukti	0,00	15.000.000,00
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Dumai	Jl. Utama Karya No 3 Bukit Batrem	0,00	75.000.000,00
Gereja Pantekosta Pusat Surabaya	Jl. Air Bersih, Gg. Mujahir Kel. Teluk Binjai	0,00	10.000.000,00
Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Bagan Besar	0,00	75.000.000,00
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Dumai	Jl. Budi Utomo (Gedung Dakwah) Kel. Bumi Ayu	0,00	125.000.000,00
Gereja Hkbp Bukit Datuk	Jl. Melur No 4 Kel. Ratu Sima	0,00	10.000.000,00
Musholla Al-Ikhlis	Jl. Cendrawasih Gg. Jawa, Rt 06 Kel. Laksamana	0,00	10.000.000,00
Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai	Jl. Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar	0,00	10.800.000.000,00
Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai	Jl. Putri Tujuh No.7 Kel. Teluk Binjai	0,00	5.233.219.200,00
Polres Dumai	Jl. Jend. Sudirman No 1, Kel. Buluh Kasap	0,00	3.265.793.500,00
Korem 031/Pam Pengamanan Pilkada	Jl. Sultan Syarif Kasim No 11 Kel. Tel. Binjai	0,00	1.700.000.000,00
Persatuan Rebana Parit Pisang Mas	Jl. Utama Parit Pisang Mas, Kel. Bagan Keladi	0,00	5.000.000,00

Orkes Melayu Aneka Ria	Jl. Dermaga, Simpang Melayu Kel. Purnama	0,00	5.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>30.324.012.700,00</b>

Rincian Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.44 Rincian Belanja Hibah kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2021 dan Tahun 2020**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2020
1.	Bantuan Operasional Paud Tahap I	0,00	1.561.800.000,00
2.	Bantuan Operasional Paud Tahap II	0,00	1.182.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>2.744.400.000,00</b>

Rincian Belanja Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.45 Rincian Belanja Hibah kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2020
1.	Bantuan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahap I	0,00	159.600.000,00
2.	Bantuan Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahap II	0,00	159.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>318.900.000,00</b>

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesetaraan untuk Tahun 2021 tidak dianggarkan.

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.2.46 Rincian Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021**

No	Penerima	Besaran Barang Yang Dihilangkan 2021
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.088.088.951,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.088.088.951,00</b>

Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.2.47 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	250.000.000,00
2.	Dinas Sosial	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>350.000.000,00</b>

Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5.2.48 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2021**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.691.450.000,00
2.	Dinas Kesehatan + RSUD	200.000.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70.000.000,00
4.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.961.450.000,00</b>

Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagai berikut :

**Tabel 5.2.49 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000,00
2.	Dinas Sosial	55.000.000,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.216.098.150,00
4.	Sekretariat Daerah	2.865.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.736.098.150,00</b>

Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Dumai senilai 400.000.000,00 untuk Bantuan Dana Operasional dan Kegiatan BNNK RI Kota Dumai Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 226 Tahun 2021 Tanggal 25 Maret 2021, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 440/699/DINKES dan Nomor : B/91/V/KA/KU.04.04/2021/BNNK tanggal 5 Mei 2021.

Rincian Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagai berikut:

**Tabel 5.2.50 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021**

No	Penerima	Besaran Uang Yang Dihilangkan 2021
1.	Dinas Kesehatan + RSUD	400.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>400.000.000,00</b>

**5.2.a.4) Belanja Bantuan Sosial**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	3.844.800.000,00

Untuk Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 tidak dianggarkan.

**5.2.b Belanja Modal**

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
234.465.493.304,00	199.818.329.751,39	85,22	244.706.629.874,33

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp234.465.493.304,00 dengan

realisasi senilai Rp199.818.329.751,39 atau sebesar 85,22%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 senilai Rp244.706.629.874,33 maka terjadi penurunan senilai Rp44.888.300.122,94 atau sebesar 18,34%.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

**Tabel 5.2.51 Rincian Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Tanah	19.418.340,00	17.000.000,00	87,55	417.533.120,94
Belanja Peralatan dan Mesin	104.935.417.395,00	84.487.469.177,00	80,51	79.237.744.886,87
Belanja Gedung dan Bangunan	57.160.640.419,00	52.685.031.521,31	92,17	70.743.218.181,13
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.768.399.633,00	56.397.085.845,08	89,85	78.745.131.364,39
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.581.617.517,00	6.231.743.208,00	65,04	15.563.002.321,00
<b>Jumlah</b>	<b>234.465.493.304,00</b>	<b>199.818.329.751,39</b>	<b>85,22</b>	<b>244.706.629.874,33</b>

Dari realisasi Belanja Modal senilai Rp199.818.329.751,39 tersebut di atas sudah termasuk Belanja Modal BLUD Kota Dumai senilai Rp4.170.758.451,00, dan Belanja Modal - BOS senilai Rp10.795.547.065,00.

Adapun realisasi dan rincian jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

### 5.2.b.1) Belanja Tanah

**Tabel 5.2.52 Belanja Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	240.914.120,94
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	176.619.000,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	19.418.340,00	17.000.000,00	87,55	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.418.340,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>87,55</b>	<b>417.533.120,94</b>

#### a. Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

**Tabel 5.2.53 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	240.914.120,94
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.914.120,94</b>

**b. Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung**

**Tabel 5.2.54 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	176.619.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.619.000,00</b>

**c. Pengadaan Tanah Untuk Persil Lainnya**

**Tabel 5.2.55 Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.418.340,00	17.000.000,00	87,55	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.418.340,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>87,55</b>	<b>0,00</b>

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Persil Lainnya merupakan biaya pengurusan Sertifikat Tanah Kawasan Hutan Wisata Teluk Makmur senilai Rp17.000.000,00.

**5.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**Tabel 5.2.56 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00	632.080.000,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu	3.140.428.721,00	1.224.879.550,00	39,00	1.552.072.150,00
Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.013.406.727,00	7.623.788.500,00	58,58	10.998.670.000,00
Belanja Pengadaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	589.786.065,00	568.342.600,00	96,36	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	285.000.000,00	276.430.000,00	96,99	0,00
Belanja Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	10.565.100,00	10.565.100,00	100,00	30.756.000,00
Belanja Pengadaan Alat Bengkel tak Bermesin	5.956.650,00	5.911.500,00	99,24	1.500.000,00
Belanja Pengadaan Alat Ukur	37.376.950,00	32.397.800,00	86,68	13.625.000,00
Belanja Pengadaan Alat Pengolahan	182.959.219,00	180.617.552,00	98,72	124.213.900,00
Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00
Belanja Pengadaan Alat Kantor	3.956.123.123,00	3.794.631.329,00	95,92	657.500.000,00
Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.011.422.500,00	5.327.158.676,00	66,49	6.815.007.115,00
Belanja Pengadaan Komputer	22.116.015.170,00	21.162.449.350,00	95,69	3.230.752.316,00

Belanja Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	142.138.637,00	133.960.570,00	94,25	959.749.300,00
Belanja Pengadaan Alat Studio	703.661.810,00	507.453.250,00	72,12	1.893.031.083,00
Belanja Pengadaan Alat Komunikasi	773.727.200,00	569.555.350,00	73,61	465.671.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	206.877.650,00	144.551.000,00	69,87	0,00
Belanja Pengadaan Alat Kedokteran	22.296.880.281,00	20.529.330.659,00	92,07	27.115.926.383,00
Belanja Pengadaan Alat Kesehatan	235.751.160,00	157.492.652,00	66,80	2.580.568.473,00
Belanja Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.728.362.597,00	1.226.840.800,00	70,98	1.105.315.840,00
Belanja Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	259.626.820,00	257.251.700,00	99,09	13.368.868.953,87
Belanja Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	332.584.000,00
Belanja Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	25.604.796,00	14.652.646,00	57,23	171.872.000,00
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	3.000.000.000,00	2.612.930.185,00	87,10	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5.131.995.619,00	5.124.671.500,00	99,86	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.412.000,00	1.860.000,00	54,51	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	4.910.500,00	2.800.000,00	57,02	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	11.989.080.000,00	5.608.559.365,00	46,78	7.154.481.373,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	2.134.348.100,00	2.438.387.543,00	114,25	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>104.935.417.395,00</b>	<b>84.487.469.177,00</b>	<b>80,51</b>	<b>79.237.744.886,87</b>

**a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat**

**Tabel 5.2.57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00	632.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.950.000.000,00</b>	<b>4.950.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>632.080.000,00</b>

**b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu**

**Tabel 5.2.58 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat-alat Bantu Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	720.000.000,00	718.520.000,00	99,79	166.800.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.061.781.050,00	197.175.000,00	9,56	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.311.950,00	4.000.000,00	75,30	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	339.807.600,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	745.000.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	9.943.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	58.198.500,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	59.276.800,00
Kecamatan Medang Kampai	223.025.250,00	220.000.000,00	98,64	44.220.000,00
Kecamatan Dumai Kota	35.942.400,00	0,00	0,00	70.836.750,00
Kecamatan Dumai Selatan	18.591.825,00	17.689.900,00	95,15	41.489.500,00
Dinas Perikanan	9.068.146,00	9.065.400,00	99,97	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.820.950,00	3.800.000,00	99,45	0,00
Sekretariat Daerah	9.700.000,00	9.400.000,00	96,91	0,00
Sekretariat DPRD	7.229.250,00	7.229.250,00	100,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.957.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.140.428.721,00</b>	<b>1.224.879.550,00</b>	<b>39,00</b>	<b>1.552.072.150,00</b>

**c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**

**Tabel 5.2.59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	3.642.667.640,00	2.775.862.500,00	76,20	2.009.892.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	471.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	32.875.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.090.000,00	1.842.500.000,00	30,71	4.830.325.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	541.200.000,00	537.075.000,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	636.658.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	654.720.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	194.360.000,00	193.900.000,00	99,76	1.333.200.000,00
Sekretariat Daerah	920.000.000,00	874.320.000,00	0,00	973.000.000,00
Sekretariat DPRD	259.112.500,00	251.500.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	77.600.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	270.000.000,00	269.700.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	0,00

Kecamatan Medang Kampai	307.915.107,00	298.905.000,00	97,07	57.000.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	32.600.000,00		0,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	395.947.520,00	347.867.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	293.952.300,00	112.458.000,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	77.961.660,00	74.751.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.013.406.727,00</b>	<b>7.623.788.500,00</b>	<b>58,58</b>	<b>10.998.670.000,00</b>

**d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**

**Tabel 5.2.60 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	45.000.000,00	34.500.000,00	76,67	0,00
Kecamatan Dumai Barat	135.000.000,00	134.890.600,00	99,92	0,00
Kecamatan Dumai Timur	142.323.765,00	134.890.800,00	94,78	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	176.952.300,00	174.134.000,00	98,41	0,00
Kecamatan Dumai Kota	45.000.000,00	44.963.600,00	99,92	0,00
Kecamatan Medang Kampai	45.510.000,00	44.963.600,00	98,80	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>589.786.065,00</b>	<b>568.342.600,00</b>	<b>96,36</b>	<b>0,00</b>

**e. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**

**Tabel 5.2.61 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	285.000.000,00	276.430.000,00	96,99	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>276.430.000,00</b>	<b>96,99</b>	<b>0,00</b>

**f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin**

**Tabel 5.2.62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	10.565.100,00	10.565.100,00	100,00	30.756.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.565.100,00</b>	<b>10.565.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.756.000,00</b>

**g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin**

**Tabel 5.2.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	526.680,00	511.500,00	97,12	1.500.000,00

Dinas Perhubungan	5.429.970,00	5.400.000,00	99,45	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.956.650,00</b>	<b>5.911.500,00</b>	<b>99,24</b>	<b>1.500.000,00</b>

#### h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

**Tabel 5.2.64 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	1.850.100,00	1.850.100,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	7.774.600,00	2.813.000,00	36,18	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	10.846.500,00	10.834.700,00	99,89	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Kecamatan Medang Kampai	1.905.750,00	1.900.000,00	99,70	5.225.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.376.950,00</b>	<b>32.397.800,00</b>	<b>86,68</b>	<b>13.625.000,00</b>

#### i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

**Tabel 5.2.65 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	27.659.318,00	27.000.000,00	97,62	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	38.948.900,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	47.565.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.321.532,00	2.900.000,00	67,11	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.895.819,00	3.891.252,00	99,88	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.507.000,00	3.507.000,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	138.800.700,00	138.569.300,00	99,83	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.424.850,00	1.400.000,00	98,26	0,00
Sekretariat DPRD	3.350.000,00	3.350.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>182.959.219,00</b>	<b>180.617.552,00</b>	<b>98,72</b>	<b>124.213.900,00</b>

#### j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Pengadaan Alat Pemeliharaan

**Tabel 5.2.66 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500.000,00</b>

**k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor**

**Tabel 5.2.67 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259.164.962,00	249.323.000,00	96,20	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.287.038.408,00	1.266.656.639,00	98,42	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.285.000,00	17.378.000,00	44,24	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	69.858.100,00	66.945.000,00	95,83	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000,00	1.470.000,00	98,00	5.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.406.750,00	59.800.000,00	95,82	10.500.000,00
Dinas Sosial	18.962.260,00	16.600.000,00	87,54	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63.073.969,00	56.726.250,00	89,94	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.468.150,00	3.400.000,00	98,03	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	143.724.550,00	139.351.000,00	96,96	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80.875.850,00	60.360.000,00	74,63	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.061.900,00	15.061.900,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	630.000,00	630.000,00	100,00	0,00
Dinas Perdagangan	4.328.750,00	3.174.000,00	73,32	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	193.120.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	34.741.300,00	34.727.100,00	99,96	0,00
Dinas Perhubungan	653.731.791,00	650.604.000,00	99,52	301.125.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	429.793.800,00	428.577.500,00	99,72	2.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.368.050,00	16.839.400,00	96,96	59.900.000,00
Sekretariat Daerah	86.071.650,00	82.015.800,00	95,29	45.200.000,00
Sekretariat DPRD	213.063.800,00	210.265.000,00	98,69	0,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	3.355.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	8.615.250,00	8.613.000,00	99,97	6.650.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	66.312.000,00	66.110.000,00	99,70	4.950.000,00
Kecamatan Dumai Barat	25.000.000,00	23.936.000,00	95,74	0,00
Kecamatan Dumai Timur	40.167.540,00	39.204.000,00	97,60	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	15.453.400,00	15.453.400,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Kota	69.465.883,00	67.289.580,00	96,87	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	125.142.450,00	75.000.000,00	59,93	22.200.000,00
Badan Pendapatan Daerah	15.552.600,00	15.552.000,00	100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.118.760,00	42.118.760,00	100,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	64.146.200,00	61.450.000,00	95,80	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.956.123.123,00</b>	<b>3.794.631.329,00</b>	<b>95,92</b>	<b>657.500.000,00</b>

**I. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah**

**Tabel 5.2.68 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.356.294.400,00	990.897.775,00	73,06	287.406.500,00
Dinas Kesehatan + RSUD	865.501.663,00	845.505.500,00	97,69	109.710.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	99.520.850,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.413.200,00	12.731.100,00	73,11	42.950.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	112.373.560,00	110.271.000,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.180.444.090,00	327.438.750,00	15,02	2.744.175.000,00
Dinas Sosial	68.200.000,00	67.050.000,00	98,31	47.400.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.686.250,00	25.350.000,00	94,99	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	61.249.200,00	59.991.000,00	97,95	37.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	38.775.450,00	38.775.450,00	100,00	29.398.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.914.500,00	49.903.300,00	99,98	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	146.129.270,00	50.930.000,00	34,85	1.200.000,00
Dinas Perhubungan	202.295.480,00	195.038.000,00	96,41	73.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	28.242.498,00	28.180.000,00	99,78	18.860.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.031.500,00	20.980.000,00	99,76	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.883.400,00	55.000.000,00	93,40	31.988.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	84.575.400,00	84.575.400,00	100,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.624.314,00	91.790.000,00	99,10	69.110.000,00
Dinas Perikanan	40.649.900,00	40.649.900,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.310.750,00	61.970.325,00	99,45	493.620.000,00
Dinas Perdagangan	24.733.800,00	22.197.500,00	89,75	27.068.000,00
Sekretariat Daerah	627.113.650,00	593.959.650,00	94,71	458.237.315,00
Sekretariat DPRD	136.724.300,00	133.152.750,00	97,39	119.584.050,00
Kecamatan Dumai Barat	35.000.000,00	33.500.000,00	95,71	195.335.000,00
Kecamatan Dumai Timur	352.996.330,00	275.797.000,00	78,13	94.635.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	409.190.215,00	328.981.000,00	80,40	233.731.000,00
Kecamatan Medang Kampai	30.001.214,00	28.680.000,00	95,60	227.134.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	250.304.040,00	227.720.800,00	90,98	445.410.400,00
Kecamatan Dumai Kota	190.626.230,00	176.773.450,00	92,73	113.093.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	187.873.947,00	147.360.050,00	78,44	100.553.500,00

Inspektorat	27.459.600,00	27.456.000,00	99,99	437.349.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.084.600,00	46.063.600,00	99,95	8.028.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65.576.979,00	24.200.000,00	36,90	92.150.000,00
Badan Pendapatan Daerah	78.338.820,00	74.299.376,00	94,84	145.010.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.803.950,00	29.990.000,00	83,76	25.270.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.011.422.500,00</b>	<b>5.327.158.676,00</b>	<b>66,49</b>	<b>6.815.007.115,00</b>

**m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer**

**Tabel 5.2.69 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.417.819.850,00	16.244.824.700,00	98,95	277.068.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	525.142.415,00	463.138.000,00	88,19	136.270.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	449.996.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	252.568.450,00	217.537.500,00	86,13	198.364.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	33.906.956,00	23.303.300,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	57.135.000,00	57.135.000,00	100,00	29.860.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.930.500,00	17.450.000,00	15,05	19.300.000,00
Dinas Sosial	53.864.580,00	49.669.250,00	96,54	55.750.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	85.827.050,00	83.517.000,00	99,90	138.438.400,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.723.850,00	40.280.000,00	99,94	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	52.558.114,00	52.504.760,00	61,93	145.350.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	265.604.536,00	265.434.200,00	98,65	17.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	358.092.700,00	221.753.000,00	99,64	0,00
Dinas Perhubungan	957.801.637,00	944.882.000,00	99,55	108.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	167.286.112,00	166.686.941,00	99,60	66.510.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37.919.700,00	37.750.000,00	100,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.893.400,00	45.710.000,00	99,46	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	79.960.650,00	79.960.650,00	100,00	34.950.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.822.100,00	85.359.000,00	99,46	119.836.000,00
Dinas Perikanan	32.999.991,00	32.999.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53.221.241,00	53.108.750,00	99,79	144.200.000,00

Dinas Perdagangan	46.578.750,00	32.003.000,00	68,71	46.190.000,00
Sekretariat Daerah	378.596.750,00	375.449.499,00	99,17	16.310.000,00
Sekretariat DPRD	69.916.404,00	69.369.000,00	99,22	101.640.000,00
Kecamatan Dumai Barat	54.711.300,00	54.004.700,00	98,71	90.500.000,00
Kecamatan Dumai Timur	10.010.400,00	9.198.750,00	91,89	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	197.024.400,00	196.999.000,00	99,99	17.000.000,00
Kecamatan Medang Kampai	94.888.113,00	92.840.000,00	97,84	39.875.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	22.983.450,00	21.544.000,00	93,74	12.500.000,00
Kecamatan Dumai Kota	131.316.736,00	119.934.900,00	91,33	49.390.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	97.101.550,00	95.306.650,00	98,15	73.548.200,00
Inspektorat	110.487.300,00	110.463.000,00	99,98	40.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	129.000.000,00	124.499.000,00	96,51	99.052.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	593.829.117,00	274.650.000,00	46,25	242.622.000,00
Badan Pendapatan Daerah	322.210.968,00	279.056.800,00	86,61	355.438.016,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	136.281.100,00	124.128.000,00	91,08	105.793.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.116.015.170,00</b>	<b>21.162.449.350,00</b>	<b>95,69</b>	<b>3.230.752.316,00</b>

**n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**

**Tabel 5.2.70 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	83.230.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.833.680,00	3.824.000,00	99,75	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Dinas Perhubungan	14.376.300,00	14.355.000,00	99,85	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.586.280,00	36.180.000,00	84,96	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	22.984.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	131.884.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	50.045.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	60.800.000,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	8.146.570,00	8.146.570,00	0,00	0,00

Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	24.882.000,00
Kecamatan Dumai Kota	6.491.607,00	5.775.000,00	88,96	40.425.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	57.120.000,00	56.100.000,00	98,21	50.022.500,00
Badan Pendapatan Daerah	9.584.200,00	9.580.000,00	99,96	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	142.926.800,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>142.138.637,00</b>	<b>133.960.570,00</b>	<b>94,25</b>	<b>959.749.300,00</b>

**o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio**

**Tabel 5.2.71 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	97.721.445,00
Dinas Kesehatan + RSUD	31.854.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00	12.843.500,00	64,22	68.850.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	239.169.000,00	67.870.000,00	28,38	15.950.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.691.250,00	7.637.750,00	99,30	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.340.564,00	12.214.700,00	66,60	31.250.000,00
Dinas Perhubungan	91.004.550,00	90.904.000,00	99,89	560.652.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	58.950.000,00
Dinas Perikanan	4.079.100,00	4.079.100,00	100,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00
Sekretariat Daerah	209.474.950,00	204.144.000,00	97,46	327.654.518,00
Sekretariat DPRD	20.949.600,00	20.900.000,00	99,76	217.996.700,00
Kecamatan Dumai Timur	15.545.596,00	9.614.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	21.676.200,00	21.676.200,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	54.120.000,00
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	7.944.000,00
Kecamatan Dumai Kota	23.877.000,00	23.870.000,00	99,97	9.460.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	49.390.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	30.950.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	104.857.670,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	54.834.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>703.661.810,00</b>	<b>507.453.250,00</b>	<b>72,12</b>	<b>1.893.031.083,00</b>

**p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi**

**Tabel 5.2.72 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.491.950,00	142.450.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	108.944.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	274.436.400,00	126.850.000,00	46,22	220.770.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.260.750,00	7.260.000,00	99,99	0,00
Dinas Perhubungan	1.760.850,00	1.660.850,00	94,32	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	72.237.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Kecamatan Dumai Barat	14.086.800,00	13.600.000,00	96,54	11.178.000,00
Kecamatan Dumai Kota	19.615.050,00	17.434.500,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00
Sekretariat Daerah	47.616.500,00	36.500.000,00	76,65	0,00
Badan Pendapatan Daerah	32.400.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	233.058.900,00	192.000.000,00	82,38	28.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>773.727.200,00</b>	<b>569.555.350,00</b>	<b>73,61</b>	<b>465.671.000,00</b>

**q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemancar**

**Tabel 5.2.73 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemancar Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	48.189.750,00	46.851.000,00	97,22	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	74.000.000,00	73.700.000,00	99,59	0,00
Sekretariat Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.687.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>206.877.650,00</b>	<b>144.551.000,00</b>	<b>69,87</b>	<b>0,00</b>

**r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran**

**Tabel 5.2.74 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	22.288.730.281,00	20.523.180.659,00	92,08	3.682.705.011,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	23.377.750.122,00
Dinas Sosial	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Barat	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Kecamatan Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	40.565.000,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	7.906.250,00
Kecamatan Dumai Timur	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.296.880.281,00</b>	<b>20.529.330.659,00</b>	<b>92,07</b>	<b>27.115.926.383,00</b>

**s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan**

**Belanja 5.2.75 Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	132.196.910,00	98.492.652,00	74,50	2.323.048.473,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	257.520.000,00
Sekretariat Daerah	29.900.000,00	29.900.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	12.100.000,00	6.600.000,00	54,55	0,00
Kecamatan Dumai Kota	55.160.000,00	16.200.000,00	29,37	0,00
Kecamatan Medang Kampai	6.094.250,00	6.000.000,00	98,45	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>235.751.160,00</b>	<b>157.492.652,00</b>	<b>66,80</b>	<b>2.580.568.473,00</b>

**t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium**

**Tabel 5.2.76 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	170.362.597,00	43.603.000,00	25,59	590.889.840,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.558.000.000,00	1.183.237.800,00	75,95	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	514.426.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.728.362.597,00</b>	<b>1.226.840.800,00</b>	<b>70,98</b>	<b>1.105.315.840,00</b>

**u. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah**

**Tabel 5.2.77 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	254.953.920,00	254.576.700,00	99,85	13.368.868.953,87
Dinas Kesehatan + RSUD	378.000,00	378.000,00	100,00	0,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.777.000,00	1.777.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	528.000,00	520.000,00	98,48	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.989.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>259.626.820,00</b>	<b>257.251.700,00</b>	<b>99,09</b>	<b>13.368.868.953,87</b>

**v. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan**

**Tabel 5.2.78 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	332.584.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.584.000,00</b>

**w. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan**

**Tabel 5.2.79 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0,00	0,00	0,00	10.547.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	48.725.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.553.200,00	3.553.200,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.176.000,00	750.000,00	63,78	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	16.552.746,00	10.162.446,00	61,39	7.920.000,00
Kecamatan Dumai Kota	4.322.850,00	187.000,00	4,33	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.604.796,00</b>	<b>14.652.646,00</b>	<b>57,23</b>	<b>171.872.000,00</b>

**x. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Unit Peralatan Prosesi/Produksi**

**Tabel 5.2.80 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Unit Peralatan Prosesi/Produksi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	3.000.000.000,00	2.612.930.185,00	87,10	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.612.930.185,00</b>	<b>87,10</b>	<b>0,00</b>

**y. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu-rambu Lalu Lintas Darat**

**Tabel 5.2.81 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu-rambu Llau Lintas Darat Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	20.677.388,00	20.350.000,00	98,42	0,00

Dinas Perhubungan	5.011.326.559,00	5.004.571.000,00	99,87	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	99.991.672,00	99.750.500,00	99,76	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.131.995.619,00</b>	<b>5.124.671.500,00</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>

**z. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Olahraga**

**Tabel 5.2.82 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Olahraga Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.662.000,00	1.110.000,00	41,70	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>

**aa. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Bantu Produksi**

**Tabel 5.2.83 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Bantu Produksi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.110.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.910.500,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>57,02</b>	<b>0,00</b>

**ab. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS**

**Tabel 5.2.84 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.989.080.000,00	5.608.559.365,00	46,78	7.154.481.373,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.989.080.000,00</b>	<b>5.608.559.365,00</b>	<b>46,78</b>	<b>7.154.481.373,00</b>

**ac. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD**

**Tabel 5.2.85 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	2.134.348.100,00	2.438.387.543,00	114,25	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.134.348.100,00</b>	<b>2.438.387.543,00</b>	<b>114,25</b>	<b>0,00</b>

**Tabel 5.2.86 Rincian belanja modal peralatan dan mesin masing-masing OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Nama SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.591.917.679,00	23.534.984.540,00	76,93	21.185.546.271,87
Dinas Kesehatan + RSUD	36.228.516.735,00	32.999.989.478,00	91,09	9.609.390.324,00

Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	24.943.736.372,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.282.819.850,00	5.214.043.300,00	98,70	1.572.775.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	268.162.046,00	251.194.300,00	93,67	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	58.635.000,00	58.605.000,00	99,95	90.265.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.997.056.190,00	2.639.083.750,00	24,00	7.888.700.000,00
Dinas Sosial	143.026.840,00	133.319.250,00	93,21	103.150.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	183.278.519,00	173.231.000,00	94,52	138.438.400,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	108.868.200,00	106.098.000,00	97,46	48.950.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	721.839.115,00	711.187.762,00	98,52	769.681.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	466.504.336,00	461.948.500,00	99,02	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	638.642.000,00	369.223.000,00	57,81	753.095.000,00
Dinas Perhubungan	7.011.727.137,00	6.981.114.850,00	99,56	2.442.497.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	230.269.910,00	229.594.041,00	99,71	146.320.000,00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	64.197.000,00	63.930.000,00	99,58	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.776.800,00	100.710.000,00	96,12	57.372.000,00
Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	330.758.622,00	318.465.450,00	96,28	34.950.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	608.240.214,00	605.726.500,00	99,59	323.330.000,00
Dinas Perikanan	513.077.937,00	504.272.800,00	98,28	47.565.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	338.597.523,00	333.988.475,00	98,64	2.104.415.000,00
Dinas Perdagangan	75.641.300,00	57.374.500,00	75,85	83.201.000,00
Sekretariat Daerah	2.308.723.500,00	2.205.938.949,00	95,55	1.856.101.833,00
Sekretariat DPRD	706.995.854,00	692.416.000,00	97,94	500.020.750,00
Kecamatan Dumai Barat	349.172.700,00	307.694.300,00	88,12	372.211.500,00
Kecamatan Dumai Timur	836.543.631,00	743.904.550,00	88,93	115.745.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	706.650.785,00	587.456.170,00	83,13	318.407.800,00
Kecamatan Medang Kampai	709.339.684,00	693.288.600,00	97,74	455.811.500,00
Kecamatan Sungai Sembilan	314.502.740,00	257.877.800,00	82,00	472.504.400,00
Kecamatan Dumai Kota	934.705.276,00	810.695.030,00	86,73	331.269.750,00
Kecamatan Dumai Selatan	957.193.068,00	720.055.746,00	75,23	340.511.950,00
Inspektorat	137.946.900,00	137.919.000,00	99,98	480.349.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	217.203.360,00	212.681.360,00	97,92	280.957.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.095.569.106,00	640.601.000,00	58,47	633.829.670,00
Badan Pendapatan Daerah	458.086.588,00	413.288.176,00	90,22	542.948.016,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	236.231.250,00	215.568.000,00	91,25	193.698.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>104.935.417.395,00</b>	<b>84.487.469.177,00</b>	<b>80,51</b>	<b>79.237.744.886,87</b>

### 5.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.87 Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.717.115.036,00	50.961.671.221,31	93,14	66.216.495.921,33
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.914.523.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	105.000.000,00	96.000.000,00	91,43	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	795.750.663,00	794.463.300,00	99,84	0,00
Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	257.181.259,80
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	1.915.747.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	0,00	0,00	0,00	439.271.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	1.542.774.720,00	832.897.000,00	53,99	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.160.640.419,00</b>	<b>52.685.031.521,31</b>	<b>92,17</b>	<b>70.743.218.181,13</b>

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun OPD Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai

#### a. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

**Tabel 5.2.88 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.111.930.460,00	5.099.857.505,00	99,76	26.780.102.583,47
Dinas Kesehatan + RSUD	34.325.287.938,00	32.593.693.736,65	94,96	20.932.159.086,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	0,00	0,00	3.485.997.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.789.281.010,00	7.421.486.699,27	84,44	9.999.897.365,53
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	212.072.310,00	210.142.000,00	99,09	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.792.320,00	189.565.500,00	99,88	832.529.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	449.333.317,00	445.696.000,00	99,19	49.492.000,00
Dinas Lingkungan hidup	0,00	0,00	0,00	331.905.000,00
Dinas Perhubungan	26.714.904,00	26.714.000,00	100,00	236.228.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.711.594.575,00	2.656.715.498,63	97,98	1.584.524.821,85
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.281.936,00	199.178.000,00	99,95	271.228.000,00
Dinas Perikanan	215.000.000,00	214.589.000,00	99,81	74.622.000,00

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	597.845.808,00	596.843.300,00	99,83	872.683.500,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	50.484.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	355.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	99.071.591,00	99.000.000,00	99,93	0,00
Kecamatan Dumai Barat	150.000.000,00	119.940.000,00	79,96	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	199.281.936,00	198.970.000,00	99,84	338.665.564,48
Kecamatan Medang Kampai	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	120.000.000,00	60.000.000,00	50,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	179.668.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	199.865.998,00	197.000.000,00	98,57	196.310.000,00
Badan Pendapatan Daerah	575.260.933,00	572.279.981,76	99,48	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.717.115.036,00</b>	<b>50.961.671.221,31</b>	<b>93,14</b>	<b>66.216.495.921,33</b>

**b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**

**Tabel 5.2.89 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	1.914.523.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.523.000,00</b>

**c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan**

**Tabel 5.2.90 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	105.000.000,00	96.000.000,00	91,43	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>91,43</b>	<b>0,00</b>

**d. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti**

**Tabel 5.2.91 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	117.600.288,00	117.452.000,00	99,87	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	313.390.375,00	313.130.300,00	99,92	0,00
Dinas Perhubungan	149.760.000,00	149.450.000,00	99,79	0,00
Dinas Perikanan	215.000.000,00	214.431.000,00	99,74	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>795.750.663,00</b>	<b>794.463.300,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>

**e. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Menara**

**Tabel 5.2.92 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Menara Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	257.181.259,80
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.181.259,80</b>

**f. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu**

**Tabel 5.2.93 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.915.747.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.747.000,00</b>

**g. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BOS**

**Tabel 5.2.94 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BOS Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	439.271.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.271.000,00</b>

**h. Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BLUD**

**Tabel 5.2.95 Belanja Modal Bangunan dan Gedung - BLUD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.542.774.720,00	832.897.000,00	53,99	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.542.774.720,00</b>	<b>832.897.000,00</b>	<b>53,99</b>	<b>0,00</b>

Adapun rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung per OPD dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.2.96 Rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung per OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.111.930.460,00	5.099.857.505,00	99,76	29.133.896.583,47
Dinas Kesehatan + RSUD	35.985.662.946,00	33.544.042.736,65	93,22	20.932.159.086,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	3.485.997.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.789.281.010,00	7.421.486.699,27	84,44	9.999.897.365,53

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	212.072.310,00	210.142.000,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.792.320,00	189.565.500,00	99,88	832.529.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	449.333.317,00	445.696.000,00	99,19	49.492.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	331.905.000,00
Dinas Perhubungan	176.474.904,00	176.164.000,00	99,82	2.151.975.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.711.594.575,00	2.656.715.498,63	97,98	1.841.706.081,65
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	199.281.936,00	199.178.000,00	99,95	271.228.000,00
Dinas Perikanan	430.000.000,00	429.020.000,00	99,77	74.622.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	911.236.183,00	909.973.600,00	99,86	872.683.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	99.071.591,00	99.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	50.484.000,00
Sekretariat Daerah	105.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	575.260.933,00	572.279.981,76	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	338.665.564,48
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	179.668.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	199.865.998,00	197.000.000,00	98,57	196.310.000,00
Kecamatan Dumai Barat	150.000.000,00	119.940.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	199.281.936,00	198.970.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	120.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Timur	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	355.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.160.640.419,00</b>	<b>52.685.031.521,31</b>	<b>92,17</b>	<b>70.743.218.181,13</b>

#### 5.2.b.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.97 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pengadaan Jalan	36.517.284.994,00	33.048.345.462,25	90,50	64.140.628.432,06
Belanja Pengadaan Jembatan	1.889.560.000,00	1.885.149.600,00	99,77	2.422.503.983,66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.494.385.264,00	1.253.692.291,88	83,89	0,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	21.920.200,00
Belanja Pengadaan Bangunan Air Kotor	9.513.322.105,00	7.379.784.760,00	77,57	4.579.327.000,55
Belanja Pengadaan Bangunan Air Minum	6.170.148.195,00	6.094.030.954,97	98,77	1.091.222.650,00

Belanja Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.983.699.075,00	3.932.186.142,85	98,71	199.289.000,00
Belanja Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.520.000.000,00	1.458.175.633,13	95,93	176.667.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	180.000.000,00	168.210.000,00	93,45	0,00
Belanja Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	4.224.956.098,12
Belanja Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.888.617.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi - BLUD	1.500.000.000,00	1.177.511.000,00	78,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.768.399.633,00</b>	<b>56.397.085.845,08</b>	<b>89,85</b>	<b>78.745.131.364,39</b>

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun OPD Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan**

**Tabel 5.2.98 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	213.854.976,00	213.844.000,00	99,99	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.961.269.755,00	20.281.937.627,25	96,76	62.209.263.682,17
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	186.000.000,00	185.854.000,00	99,92	1.154.107.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	196.958.550,00	195.800.000,00	99,41	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	597.044.400,00	513.474.835,00	86,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.352.525,00	89.191.000,00	99,82	0,00
Dinas Perhubungan	199.146.978,00	198.650.000,00	99,75	0,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	899.157.810,00	698.414.000,00	77,67	717.257.749,89
Kecamatan Dumai Barat	1.115.500.000,00	1.090.250.000,00	97,74	60.000.000,00
Kecamatan Dumai Timur	2.175.000.000,00	1.734.570.000,00	79,75	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.478.000.000,00	1.693.000.000,00	114,55	0,00
Kecamatan Medang Kampai	1.552.000.000,00	1.552.000.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	4.580.000.000,00	2.473.000.000,00	54,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	2.274.000.000,00	2.128.360.000,00	93,60	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.517.284.994,00</b>	<b>33.048.345.462,25</b>	<b>90,50</b>	<b>64.140.628.432,06</b>

**b. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan**

**Tabel 5.2.99 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.409.560.000,00	1.406.046.000,00	99,75	1.053.619.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.192.239.983,66
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	480.000.000,00	479.103.600,00	99,81	0,00

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	176.645.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.889.560.000,00</b>	<b>1.885.149.600,00</b>	<b>99,77</b>	<b>2.422.503.983,66</b>

**c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA**

**Tabel 5.2.100 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.494.385.264,00	1.253.692.291,88	83,89	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.494.385.264,00</b>	<b>1.253.692.291,88</b>	<b>83,89</b>	<b>0,00</b>

**d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku**

**Tabel 5.2.101 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	0,00	0,00	21.920.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.920.200,00</b>

**e. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor**

**Tabel 5.2.102 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.508.038.955,00	3.137.924.760,00	89,45	4.579.327.000,55
Kecamatan Dumai Barat	967.000.000,00	883.560.000,00	91,37	0,00
Kecamatan Dumai Timur	430.000.000,00	382.500.000,00	88,95	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.110.000.000,00	940.000.000,00	84,68	0,00
Kecamatan Dumai Kota	1.126.650.000,00	216.000.000,00	19,17	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	1.417.000.000,00	1.227.000.000,00	86,59	0,00
Kecamatan Medang Kampai	603.633.150,00	592.800.000,00	98,21	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	351.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.513.322.105,00</b>	<b>7.379.784.760,00</b>	<b>77,57</b>	<b>4.579.327.000,55</b>

**f. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air**

**Tabel 5.2.103 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.040.248.195,00	5.974.030.954,97	98,90	445.472.000,00
Kecamatan Medang Kampai	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	645.750.650,00

Kecamatan Sungai Sembilan	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.170.148.195,00</b>	<b>6.094.030.954,97</b>	<b>98,77</b>	<b>1.091.222.650,00</b>

**g. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih**

**Tabel 5.2.104 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	220.000.000,00	219.567.000,00	99,80	199.289.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	600.000.000,00	598.266.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.963.699.075,00	1.915.295.142,85	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	199.937.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.000.000.000,00	999.121.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.983.699.075,00</b>	<b>3.932.186.142,85</b>	<b>98,71</b>	<b>199.289.000,00</b>

**h. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor**

**Tabel 5.2.105 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	176.667.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.520.000.000,00	1.458.175.633,13	104,24	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>1.458.175.633,13</b>	<b>95,93</b>	<b>176.667.000,00</b>

**i. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengaman**

**Tabel 5.2.106 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengaman Tahun 2021 dan 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	180.000.000,00	168.210.000,00	93,45	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>168.210.000,00</b>	<b>93,45</b>	<b>0,00</b>

**j. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum**

**Tabel 5.2.107 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	4.224.956.098,12
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.956.098,12</b>

**k. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik**

**Tabel 5.2.108 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	1.888.617.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.617.000,00</b>

**l. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD**

**Tabel 5.2.109 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1.500.000.000,00	1.177.511.000,00	78,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.177.511.000,00</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.110 Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	4.013.854.976,00	3.616.006.633,13	90,09	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.377.201.244,00	33.968.926.776,95	96,02	72.512.637.780,84
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	186.000.000,00	185.854.000,00	99,92	3.042.724.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	396.958.550,00	395.737.000,00	99,69	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.192.239.983,66
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	899.157.810,00	698.414.000,00	77,67	1.070.569.749,89
Dinas Perikanan	220.000.000,00	219.567.000,00	99,80	199.289.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.077.044.400,00	1.991.699.435,00	95,89	645.750.650,00
Kecamatan Dumai Barat	2.082.500.000,00	1.973.810.000,00	94,78	0,00
Kecamatan Dumai Timur	2.605.000.000,00	2.117.070.000,00	81,27	60.000.000,00
Kecamatan Bukit Kapur	2.895.000.000,00	2.920.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	2.275.633.150,00	2.264.800.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	4.940.900.000,00	2.473.000.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Dumai Selatan	3.384.000.000,00	3.068.360.000,00	90,67	21.920.200,00
Kecamatan Dumai Kota	1.126.650.000,00	216.000.000,00	19,17	0,00
Dinas Perhubungan	199.146.978,00	198.650.000,00	99,75	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.352.525,00	89.191.000,00	99,82	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.768.399.633,00</b>	<b>56.397.085.845,08</b>	<b>89,85</b>	<b>78.745.131.364,39</b>

**5.2.b.5) Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.111 Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pengadaan Buku	99.604.317,00	99.594.000,00	99,99	2.373.746.353,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	60.176.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	131.771.300,00	110.184.700,00	83,62	0,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	97.000.000,00	20.000.000,00	20,62	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	260.521.900,00	260.116.900,00	99,84	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya - BOS	7.992.720.000,00	5.186.987.700,00	64,90	5.015.799.144,00
Belanja Modal BLUD	1.000.000.000,00	554.859.908,00	55,49	8.113.280.824,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.581.617.517,00</b>	<b>6.231.743.208,00</b>	<b>65,04</b>	<b>15.563.002.321,00</b>

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per akun OPD Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku**

**Tabel 5.2.112 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	2.304.171.353,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	69.575.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.604.317,00	99.594.000,00	99,99	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.604.317,00</b>	<b>99.594.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>2.373.746.353,00</b>

**b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Aset Tetap Renovasi**

**Tabel 5.2.113 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	60.176.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.176.000,00</b>

**c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Barang Bercorak Kesenian**

**Tabel 5.2.114 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Medang Kampai	30.800.000,00	10.000.000,00	32,47	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	100.971.300,00	100.184.700,00	99,22	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>131.771.300,00</b>	<b>110.184.700,00</b>	<b>83,62</b>	<b>0,00</b>

**d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**

**Tabel 5.2.115 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Barat	64.000.000,00	20.000.000,00	31,25	0,00
Kecamatan Dumai Timur	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20,62</b>	<b>0,00</b>

**e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Aset Tidak Berwujud**

**Tabel 5.2.116 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.595.000,00	99,80	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	51.725.000,00	51.725.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8.796.900,00	8.796.900,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>260.521.900,00</b>	<b>260.116.900,00</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>

**f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS**

**Tabel 5.2.117 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.992.720.000,00	5.186.987.700,00	64,90	5.015.799.144,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.992.720.000,00</b>	<b>5.186.987.700,00</b>	<b>64,90</b>	<b>5.015.799.144,00</b>

**g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD**

**Tabel 5.2.118 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
BLUD-PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	1.110.514.430,00
BLUD-RSUD	0,00	0,00	0,00	7.002.766.394,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.000.000.000,00	554.859.908,00	55,49	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>554.859.908,00</b>	<b>55,49</b>	<b>8.113.280.824,00</b>

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2.119 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.992.720.000,00	5.186.987.700,00	64,90	7.319.970.497,00
BLUD-PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	1.110.514.430,00
BLUD-RSUD	0,00	0,00	0,00	7.002.766.394,00

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	60.176.000,00
Dinas Kesehatan + RSUD	1.000.000.000,00	554.859.908,00	55,49	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	69.575.000,00
Dinas Perhubungan	200.000.000,00	199.595.000,00	99,80	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	51.725.000,00	51.725.000,00	100,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8.796.900,00	8.796.900,00	100,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.604.317,00	99.594.000,00	99,99	0,00
Kecamatan Dumai Barat	64.000.000,00	20.000.000,00	31,25	0,00
Kecamatan Medang Kampai	30.800.000,00	10.000.000,00	32,47	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	100.971.300,00	100.184.700,00	99,22	0,00
Kecamatan Dumai Timur	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.581.617.517,00</b>	<b>6.231.743.208,00</b>	<b>65,04</b>	<b>15.563.002.321,00</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan terdiri dari:

**Tabel 5.2.120 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada Disdikbud Tahun 2021 dan Tahun 2021**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	2.304.171.353,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.992.720.000,00	5.186.987.700,00	64,90	5.015.799.144,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.992.720.000,00</b>	<b>5.186.987.700,00</b>	<b>64,90</b>	<b>7.319.970.497,00</b>

### 5.2.c Belanja Tak Terduga

	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	<b>11.435.077.059,00</b>	<b>9.056.476.757,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja Tak Terduga juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Tak Terduga Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp11.435.077.059,00,00 dengan realisasi senilai Rp9.056.476.757,00 atau sebesar 79,20%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp107.839.408.378,00 atau sebesar 92,25% dari realisasi tahun lalu senilai Rp116.895.885.135,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.2.121 Belanja Tak Terduga Tahun 2021 dan Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Belanja Tak Terduga COVID-19	7.952.182.555,00	113.839.989.466,00

2.	Belanja Tak Terduga yang bukan merupakan COVID-19	1.104.294.202,00	3.055.895.669,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.056.476.757,00</b>	<b>116.895.885.135,00</b>

Realisasi Belanja Tak Terduga COVID-19 per OPD Tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.2.122 Belanja Tak Terduga COVID-19 per OPD Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Dinas Kesehatan + RSUD	3.011.889.135,00	19.938.756.973,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.611.234.920,00	28.192.868.294,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.224.876.000,00	724.059.356,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	912.532.500,00	10.890.183.465,00
5.	Badan kesatuan bangsa dan politik	0,00	191.001.000,00
6.	Dinas Sosial	0,00	51.943.694.998,00
7.	Dinas Perhubungan	0,00	879.646.380,00
8.	Inspektorat	191.650.000,00	1.079.779.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.952.182.555,00</b>	<b>113.839.989.466,00</b>

Realisasi Belanja Tak Terduga yang bukan merupakan COVID-19 Tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5.2.123 Belanja Tak Terduga yang bukan**

No	Uraian	Realisasi
1.	Pengembalian Bankeu Tahun Anggaran 2019	56.000.000,00
2.	Pengembalian Bankeu Tahun Anggaran 2020	1.048.294.202,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.104.294.202,00</b>

#### 5.2.d Transfer

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.2.d.1) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	0,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tidak ada realisasi pada Tahun 2021.

#### Surplus/(Defisit)

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
(158.093.283.522,00)	(27.284.574.632,09)	17,26	41.037.018.350,48

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pada Tahun 2021 Kota Dumai menganggarkan defisit senilai

Rp158.093.283.522,00 dengan realisasi defisit senilai Rp27.284.574.632,09 jika dibandingkan dengan realisasi surplus Tahun 2020 maka terjadi penurunan senilai Rp68.321.592.982,57 atau sebesar 166,49% dari realisasi tahun lalu senilai surplus Rp41.037.018.350,48.

### 5.3 PEMBIAYAAN

#### 5.3.a Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
195.481.309.973,17	195.481.309.973,34	100,00	154.444.291.622,69

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp195.481.309.973,17 yang terealisasi senilai Rp195.481.309.973,34 merupakan penggunaan SiLPA. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 terdapat kenaikan senilai Rp41.037.018.350,65 atau sebesar 26,57% dari realisasi tahun lalu senilai Rp154.444.291.622,69.

#### 5.3.a.1) Penggunaan SiLPA

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
195.481.309.973,17	195.481.309.973,34	100,00	154.444.291.622,69

Penggunaan SiLPA Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp195.481.309.973,17 yang terealisasi senilai Rp195.481.309.973,34 atau sebesar 100,00% Dibandingkan dengan Tahun 2020 penggunaan SiLPA mengalami kenaikan senilai Rp41.037.018.350,65 atau sebesar 26,57% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp154.444.291.622,69.

#### 5.3.a.2) Penerimaan Kembali Investasi Non

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0,00	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tidak ada realisasi pada Tahun 2021.

#### Pembiayaan Neto

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
195.481.309.973,17	195.481.309.973,34	100,00	154.444.291.622,69

Pembiayaan Netto Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp195.481.309.973,17 yang terealisasi senilai Rp195.481.309.973,34 atau 100,00% Dibandingkan dengan Tahun 2020 Pembiayaan Netto naik senilai Rp41.037.018.350,65 atau senilai 26,57%, jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp154.444.291.622,69.

#### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2021			Tahun 2020
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
37.388.026.451,17	168.196.735.341,25	449,87	195.481.309.973,17

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp37.388.026.451,17 yang terealisasi senilai Rp168.196.735.341,25 atau sebesar 449,87%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi penurunan senilai Rp27.284.574.631,92 atau sebesar 13,96%. Rincian SiLPA terikat Tahun 2021 sebagai berikut:

Rincian SiLPA terikat Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.124 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2021**

Uraian	Jumlah
Tunjungan Profesi Guru 2021	2.125.786.230,00
Tambahan Penghasilan 2021	25.500.000,00
Sisa Dana Insentif Daerah 2021	2.434.216.439,00
Sisa Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021	2.000.000,00
Sisa Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020	33.680.898,00
Dana Alokasi Khusus 2021	425.495.656,00
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi	24.528.408.561,37
Dana Insentif Daerah Tambahan	564.723.627,00
Bantuan Operasional PAUD	801.600.000,00
Kesetaraan	4.050.000,00
Usaha Kecil Menengah	390.304.000,00
Bantuan Operasional	1.011.542.393,00
Bantuan Keluarga Berencana	519.476.600,00
Sisa Dana Insentif Daerah 2019	746.153.853,43
Usaha Kecil Menengah	417.358.000,00
Dana Alokasi Khusus 2020	3.401.007,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.033.697.264,80</b>

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.125 Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2021**

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	107.404.490.529,58
Kas di Bendahara Pengeluaran	334.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	26.691.058.326,87
Kas BOS	67.155.220,00
<b>Jumlah</b>	<b>134.163.038.076,45</b>

Berdasarkan KMK Nomor 10/KM.7/2022, Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 yang semula senilai Rp1.253.489.518,00 telah dikurangi sebesar Rp827.993.862,00 merupakan bentuk pengembalian sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang telah direkonsiliasi dan dikonfirmasi dengan mekanisme Pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Mei 2022, sehingga besaran sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) secara keseluruhan disajikan senilai Rp425.495.656,00. Pengurang Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp827.993.862,00 direklasifikasi sebagai penambah SiLPA Tidak Terikat Tahun 2021.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.4.a SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL**

Realisasi 2021	Realisasi 2020
195.481.309.973,17	151.195.171.725,69

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 adalah senilai Rp195.481.309.973,17.

**5.4.a.1) PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN**

Realisasi 2021	Realisasi 2020
195.481.309.973,34	154.444.291.622,69

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, yaitu senilai Rp195.481.309.973,34.

**5.4.a.2) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)**

Realisasi 2021	Realisasi 2020
168.196.735.341,25	195.481.309.973,17

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp168.196.735.341,25 yang diperoleh dari :

Uraian	Jumlah
Pendapatan	1.287.005.084.625,14
Belanja	1.314.289.659.257,23
<b>Surplus/defisit</b>	<b>(27.284.574.632,09)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>195.481.309.973,34</b>
Penggunaan SAL	195.481.309.973,34
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
<b>Pengeluaran Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>195.481.309.973,34</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>168.196.735.341,25</b>

Rincian SiLPA terikat Tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Tunjungan Profesi Guru 2021	2.125.786.230,00
Tambahan Penghasilan 2021	25.500.000,00
Sisa Dana Insentif Daerah 2021	2.434.216.439,00
Sisa Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021	2.000.000,00

Sisa Bantuan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020	33.680.898,00
Dana Alokasi Khusus 2021	425.495.656,00
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi	24.528.408.561,37
Dana Insentif Daerah Tambahan	564.723.627,00
Bantuan Operasional PAUD	801.600.000,00
Kesetaraan	4.050.000,00
Usaha Kecil Menengah	390.304.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	1.011.542.393,00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	519.476.600,00
Sisa Dana Insentif Daerah 2019	746.153.853,43
Usaha Kecil Menengah	417.358.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan 2020	3.401.007,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.033.697.264,80</b>

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2021

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	107.404.490.529,58
Kas di Bendahara Pengeluaran	334.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	26.691.058.326,87
Kas BOS	67.155.220,00
<b>Jumlah</b>	<b>134.163.038.076,45</b>

**5.4.a.3) KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA**

Realisasi 2021	Realisasi 2020
0,17	0,00

Penyesuaian SiLPA tahun lalu pada BLUD RSUD merupakan hasil dari rekonsiliasi Bank tahun sebelumnya

**5.4.a.4) LAIN-LAIN**

Realisasi 2021	Realisasi 2020
0,00	3.249.119.897,00

Tidak ada Koreksi Lain-lain Tahun 2021.

**5.4.b SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR**

Realisasi 2021	Realisasi 2020
168.196.735.341,25	195.481.309.973,17

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp168.196.735.341,25 Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp195.481.309.973,17 maka mengalami penurunan senilai Rp27.284.574.631,92 atau sebesar 13,96%.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

**5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA**

**1. Aset**

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>3.089.664.538.438,08</b>	<b>3.005.693.796.788,24</b>	<b>83.970.741.649,84</b>	<b>2,79</b>

Aset pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp3.089.664.538.438,08, mengalami kenaikan senilai Rp83.970.741.649,84 atau sebesar 2,79% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp3.005.693.796.788,24. Aset pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.1 Rincian Aset**

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Aset lancar	331.951.342.135,39	298.375.137.399,87	33.576.204.735,52	11,25
2	Investasi Jangka Panjang	58.002.848.837,39	71.346.217.241,69	(13.343.368.404,30)	(18,70)
3	Aset Tetap	2.679.041.994.881,42	2.620.303.716.016,14	58.738.278.865,28	2,24
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	20.668.352.583,88	15.668.726.130,54	4.999.626.453,34	31,91
<b>TOTAL</b>		<b>3.089.664.538.438,08</b>	<b>3.005.693.796.788,24</b>	<b>83.970.741.649,84</b>	<b>2,79</b>

**a. Aset Lancar**

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>331.951.342.135,39</b>	<b>298.375.137.399,87</b>	<b>33.576.204.735,52</b>	<b>11,25</b>

Aset Lancar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp331.951.342.135,39, mengalami kenaikan senilai Rp33.576.204.735,52 atau sebesar 11,25% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp298.375.137.399,87. Aset Lancar Kota Dumai Tahun 2021 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD - RSUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Persediaan, dan Beban dibayar dimuka dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.2 Rincian Aset Lancar**

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas Di Kas Daerah	141.438.187.794,38	180.523.375.691,57	(39.085.187.897,19)	(21,65)
2	Kas Di Bendahara Pengeluaran	334.000,00	0,00	334.000,00	100,00
3	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	6.754,00	(6.754,00)	100,00
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	26.691.058.326,87	14.858.775.821,60	11.832.282.505,27	79,63
5	Kas Di Bendahara BOS	68.938.982,00	111.096.469,33	(42.157.487,33)	(37,95)
6	Kas Lainnya	168.578.067,00	0,00	0,00	0,00

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
7	Piutang Pajak Daerah	119.990.864.839,45	109.841.111.109,45	10.149.753.730,00	9,24
8	Piutang Retribusi	1.906.918.879,09	1.995.132.229,09	(88.213.350,00)	(4,42)
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	71.374.492.248,15	418.563.386,64	70.955.928.861,51	16.952,25
10	Piutang Transfer - DBH Provinsi	9.656.723.625,00	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Lainnya	291.428.679,64	30.563.991.102,55	(30.272.562.422,91)	(99,05)
12	Penyisihan Piutang	(90.643.237.451,68)	(69.718.264.795,67)	(20.924.972.656,01)	30,01
13	Persediaan	50.892.554.145,49	29.624.460.779,82	21.268.093.365,67	71,79
14	Beban Dibayar Dimuka	114.500.000,00	156.888.851,49	(42.388.851,49)	(27,02)
<b>Total</b>		<b>331.951.342.135,39</b>	<b>298.375.137.399,87</b>	<b>23.750.903.043,52</b>	<b>7,96</b>

1) **Kas Di Kas Daerah**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>141.438.187.794,38</b>	<b>180.523.375.691,57</b>	<b>(39.085.187.897,19)</b>	<b>(21,65)</b>

Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 disajikan senilai Rp141.438.187.794,38, mengalami penurunan senilai Rp39.085.187.897,19 atau sebesar 21,65% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp180.523.375.691,57. Untuk rincian nilai pada Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.3 Rincian Kas di Kas Daerah**

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>1</b>	<b>GIRO</b>				
	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110.92	141.438.187.794,38	177.207.472.409,80	(35.769.284.615,42)
	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.111.09	0,00	0,00	0,00
	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.000.90	0,00	1.020.690,00	(1.020.690,00)
	Bank Syariah Mandiri	7038923522	0,00	16,77	(16,77)
	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	015901001396302	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>DEPOSITO</b>				
	Deposito Bank Riau Kepri	Nomor 0001/BPKAD-PERBEND/2021 dan Nomor 01/PKS/BRK-DMI/2021 Tanggal 14 Januari 2021.	0,00	0,00	0,00
	Deposito BNI	Nomor 0004/BPKAD-PERBEND/2021 dan Nomor DMI/5/674/2021 Tanggal 22 Maret 2021	0,00	0,00	0,00
	Deposito BSI	Nomor 0001/BPKD-PERBEND/2021 dan Nomor 01/171-PKS/DIR Tanggal 22 Maret 2021	0,00	0,00	0,00
	Deposito BRI	Nomor 0002/BPKAD-PERBEND/2021 dan Nomor B.420-KC.XVII/DJS/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Dana CD Pertamina</b>				
	Bank Riau Kepri	104.02.000.75	0,00	3.314.882.575,00	(3.314.882.575,00)
<b>Jumlah</b>			<b>141.438.187.794,38</b>	<b>180.523.375.691,57</b>	<b>(39.085.187.897,19)</b>

Saldo Deposito Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00, seluruh Deposito telah dicairkan ke kas Daerah pada tahun berjalan. Rincian saldo Deposito adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.4 Rincian Deposito**

No	Nama Bank	Saldo 2020	Saldo 2021		Saldo Akhir 2021
			Tambah	Kurang	
1	Deposito Bank Riau Kepri	0,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
2	Deposito Bank BRI	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
3	Deposito BSM	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
4	Deposito BNI	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000.000.000,00</b>	<b>60.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dalam rangka manajemen kas pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 membuka beberapa deposito terhadap uang yang siap digunakan (idle money) pada bank yang berbeda untuk meningkatkan PAD Kota Dumai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. Pemerintah Kota Dumai telah mencairkan seluruh Deposito ke Rekening Kas Daerah.

Untuk perhitungan nilai bunga deposito, ketentuan perjanjian antara Kuasa BUD dan pihak Bank adalah setara RUPS dengan masa berlakunya setiap 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis, kecuali perjanjian akan diberhentikan. Adapun rincian redaksi nomor perjanjian deposito per Bank yaitu:

1. Bank Riau Kepri Cabang Dumai  
Bank Riau Kepri Cabang Dumai Nomor 0001/BPKAD-PERBEND/2021 dan Nomor 01/PKS/BRK-DMI/2021 Tanggal 14 Januari 2021.
2. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai  
Bank Negara Indonesia Nomor 0004/BPKAD-PERBEND/2021 dan Nomor DMI/5/674/2021 Tanggal 22 Maret 2021
3. Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai  
Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai Nomor 0001/BPKD-PERBEND/2021 dan Nomor 01/171-PKS/DIR Tanggal 22 Maret 2021.
4. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai  
Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Dumai Nomor 0002/BPKAD-PERBEND/2021 dan Nomor B.420-KC.XVII/DJS/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021

**2) Kas Di Bendahara Pengeluaran**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>100,00</b>

Akun ini merupakan saldo Kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan pada Tahun 2021, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2021 senilai Rp334.000,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Dumai Selatan. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, maka mengalami kenaikan senilai Rp334.000,00 atau sebesar 100%.

**3) Kas Di Bendahara Penerimaan**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan (Penurunan)	
		Rp	%
<b>0,00</b>	<b>6.754,00</b>	<b>(6.754,00)</b>	<b>100,00</b>

Saldo Kas di Kas Di Bendahara Penerimaan Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp0,00, mengalami penurunan senilai Rp6.754,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp6.754,00.

4) **Kas Di Badan Layanan Umum**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
26.691.058.326,87	14.858.775.821,60	11.832.282.505,27	79,63

Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp26.691.058.326,87, mengalami kenaikan senilai Rp11.832.282.505,27 atau sebesar 79,63% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp14.858.775.821,60.

Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD - RSUD dan BLUD - Puskesmas Kota Dumai tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 30 Desember 2009.

Kebijakan akuntansi untuk BLUD pada RSUD maupun Puskesmas mengacu pada Perwako Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai, sedangkan Perwako Dumai Nomor 18 Tahun 2016 tidak digunakan. Rincian saldo Kas di masing-masing BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.5.5 Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya**

No	Rekening Bank		Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
<b>A.</b>	<b>BLUD RSUD</b>				
1	Bank Riau Kepri (Bend.Pengeluaran BLUD)	10-40-20014-3	23.906.808.068,76	12.484.788.861,34	11.422.019.207,42
2	Bank Riau Kepri (Bend.Penerimaan BLUD)	10-4020013-9	35.766.653,67	332.762.383,67	(296.995.730,00)
3	BRI Bend. Penerimaan BLUD	015901001671304	69.015,00	0,00	69.015,00
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD	05.700.72227/9009048787	0,00	0,00	0,00
5	BSM Bend. Penerimaan BLUD	05.700.68663/7009045796	41.561.048,65	90.800.360,78	(49.239.312,13)
6	BSM Bend.Penerimaan BLUD	05.700.69950/7009046849	405.628.624,01	405.307.452,98	321.171,03
7	Kas Bendahara Penerimaan BLUD		17.736.409,00	4.619.170,00	13.117.239,00
	<b>Kas BLUD RSUD</b>		<b>24.407.569.819,09</b>	<b>13.318.278.228,77</b>	<b>11.089.291.590,32</b>
<b>B</b>	<b>BLUD PUSKESMAS</b>				
	<b>Kas di Bank</b>				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	172-00-0018560-5	253.850.408,04	118.495.893,82	135.354.514,22
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	172-00-0018559-7	110.288.663,34	91.020.865,65	19.267.797,69

No	Rekening Bank		Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	172-00-0018567-0	236.041.280,94	161.017.705,61	75.023.575,33

4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	172-00-0018565-4	197.753.644,27	206.805.400,01	(9.051.755,74)
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	172-00-0018566-2	84.861.847,65	31.582.064,40	53.279.783,25
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	172-00-0018562-1	372.706.909,63	227.046.534,19	145.660.375,44
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	172-00-0018563-9	62.390.972,75	25.950.940,65	36.440.032,10
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	172-00-0018561-3	243.204.164,81	89.310.521,22	153.893.643,59
9	BLUD Puskesmas Purnama	172-00-0018564-7	112.072.170,16	81.558.063,96	30.514.106,20
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	172-00-0027962-2	489.594.996,19	328.773.452,32	160.821.543,87
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A	10-40-20117-7	120.723.450,00	177.695.151,00	(56.971.701,00)
	<b>Kas Tunai :</b>				
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota		0,00	0,00	0,00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat		0,00	0,00	0,00
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur		0,00	0,00	0,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan		0,00	566.000,00	(566.000,00)
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai		0,00	320.000,00	(320.000,00)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu		0,00	0,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah		0,00	0,00	0,00
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti		0,00	355.000,00	(355.000,00)
9	BLUD Puskesmas Purnama		0,00	0,00	0,00
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur		0,00	0,00	0,00
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A		0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kas BLUD Puskesmas</b>		<b>2.283.488.507,78</b>	<b>1.540.497.592,83</b>	<b>742.990.914,95</b>
	<b>JUMLAH KAS BLUD</b>		<b>26.691.058.326,87</b>	<b>14.858.775.821,60</b>	<b>11.832.282.505,27</b>

**5) Kas Di Bendahara BOS**

	Tahun 2021	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>68.938.982,00</b>	<b>111.096.469,33</b>	<b>(42.157.487,33)</b>	<b>(37,95)</b>

Nilai akhir Kas di Bendahara BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp68.938.982,00 yang merupakan sisa Kas yang berada pada Bendahara Pengelola Dana BOS pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS dari masing-masing sekolah negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Nilai Kas di Bendahara BOS mengalami penurunan senilai Rp42.157.487,33 atau sebesar 37,95% dibandingkan Tahun 2020 yaitu senilai Rp111.096.469,33.

- a. Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 menerima Dana BOS dengan 2 (dua) jenis yaitu BOS Reguler dan BOS Kinerja. Penerimaan dana BOS Reguler berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Besaran alokasi Dana BOS Reguler yang diterima sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-

masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik yang disebutkan Bab III Pasal 5:

1. Tingkat SD senilai Rp910.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan

2. Tingkat SMP senilai Rp1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Sedangkan, untuk BOS Kinerja berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi tanggal 02 September 2021. Untuk SD yang mendapat BOS Kinerja adalah 4 sekolah dan SMP adalah 3 sekolah. Alokasi dana untuk SD yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja masing- masing senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan total Penerimaan Rp280.000.000,00. Sedangkan Alokasi Dana BOS Kinerja untuk SMP senilai Rp260.000.000,00. Sehingga total alokasi Dana BOS yang terima Tahun 2021 adalah Rp540.000.000,00.

- b. Dalam mengelola Dana BOS, tiap sekolah tidak menggunakan sistem panjar, karena uang masuk per tahap dari Pusat ke rekening sekolah.

Adapun penjelasan atas rincian saldo Kas Bendahara BOS senilai Rp68.938.982,00 sebagai berikut:

**Tabel 5.5.6 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS**

No	Keterangan	Saldo Kas Dari Penerimaan BOS	Utang PFK	Saldo Kas BOS + Utang PFK
1	BOS SD	61.319.069,00	1.783.762,00	63.102.831,00
2	BOS SMP	5.836.151,00	0,00	5.836.151,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.155.220,00</b>	<b>1.783.762,00</b>	<b>68.938.982,00</b>

Saldo Kas di Bendahara BOS senilai Rp68.938.982,00, yang terdiri dari saldo Kas tunai senilai Rp1.783.762,00 dan saldo Kas di Bank senilai Rp67.155.220,00. Saldo Kas Tunai Senilai Rp1.783.762,00 merupakan Pajak pada BOS Sekolah Dasar yang disetor di Tahun Anggaran 2022. Saldo Kas di Bendahara BOS di Bank terdiri dari Saldo Bos Reguler senilai Rp67.155.220,00.

**Tabel 5.5.7 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2021**

NO	Keterangan	Saldo Kas			Total
		Tunai	Bank		
			Bos Reguler	Bos Kinerja	
1	BOS SD	1.783.762,00	61.319.069,00	0,00	63.102.831,00
2	BOS SMP	0,00	5.836.151,00	0,00	5.836.151,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.783.762,00</b>	<b>67.155.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.938.982,00</b>

Untuk rincian Kas di Bendahara BOS SD dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 untuk Kas di Bendahara BOS SMP.

**6) Kas lainnya**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>168.578.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.578.067,00</b>	<b>100,00</b>

Saldo Kas Lainnya Tahun 2021 senilai Rp168.578.067,00 merupakan saldo per 31 Desember 2021 pada rekening Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai dengan

Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 834 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang digunakan sebagai uang jaminan bongkar atas pajak reklame. Uang jaminan bongkar tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2020 akan menjadi hak Pemerintah Kota Dumai jika penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan pembongkaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

7) Piutang Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	119.990.864.839,45	109.841.111.109,45	10.149.753.730,00	9,24

Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp119.990.864.839,45, mengalami kenaikan senilai Rp10.149.753.730,00 atau sebesar 9,24% dibandingkan Tahun 2020 yaitu senilai Rp109.841.111.109,45. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 terdapat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6.

Akun Piutang Pajak Daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk atas tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.8 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020**

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	426.474.376,00	534.001.971,00	(107.527.595,00)	(20,14)
2	Piutang Pajak Restoran	1.939.590.078,26	1.666.702.688,26	272.887.390,00	16,37
3	Piutang Pajak Hiburan	1.108.745.939,00	955.073.616,00	153.672.323,00	16,09
4	Piutang Pajak Reklame	673.674.710,00	784.226.617,00	(110.551.907,00)	(14,10)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	648.294.656,00	641.715.021,00	6.579.635,00	1,03
6	Piutang Pajak Air Tanah	1.612.751.046,00	434.556.342,00	1.178.194.704,00	271,13

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99.244.672,00	99.244.672,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	113.475.195.762,19	104.712.462.782,19	8.762.732.980,00	8,37
9	Piutang Pajak Parkir	3.921.600,00	9.278.400,00	(5.356.800,00)	(57,73)
10	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	2.972.000,00	3.849.000,00	(877.000,00)	(22,79)
	<b>Jumlah</b>	<b>119.990.864.839,45</b>	<b>109.841.111.109,45</b>	<b>10.149.753.730,00</b>	<b>9,24</b>

#### a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp426.474.376,00, mengalami penurunan senilai Rp107.527.595,00 atau sebesar 20,14% dari Tahun 2020 yaitu senilai

Rp534.001.971,00. Akun Piutang Pajak Hotel merupakan selisih antara nilai pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hotel Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.9 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2008	36.635.000,00	0,00	0,00	36.635.000,00
2	Tahun 2009	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
3	Tahun 2010	103.162.900,00	0,00	0,00	103.162.900,00
4	Tahun 2011	28.353.056,00	0,00	0,00	28.353.056,00
5	Tahun 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tahun 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tahun 2016	9.278.235,00	0,00	0,00	9.278.235,00
10	Tahun 2017	12.400.094,00	0,00	10.201.000,00	2.199.094,00
11	Tahun 2018	190.106.630,00	0,00	52.628.225,00	137.478.405,00
12	Tahun 2019	25.469.457,00	0,00	0,00	25.469.457,00
13	Tahun 2020	118.996.599,00	0,00	118.831.599,00	165.000,00
14	Tahun 2021	0,00	4.254.274.288,00	4.180.141.059,00	74.133.229,00
	<b>Jumlah</b>	<b>534.001.971,00</b>	<b>4.254.274.288,00</b>	<b>4.361.801.883,00</b>	<b>426.474.376,00</b>

#### **b. Piutang Pajak Restoran**

Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 Rp1.939.590.078,26, mengalami kenaikan senilai Rp272.887.390,00 atau sebesar 16,37% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp1.666.702.688,26,00. Piutang Pajak Restoran merupakan selisih antara nilai pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.10 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00
2	Tahun 2010	32.063.963,00	0,00	0,00	32.063.963,00
3	Tahun 2011	18.120.796,00	0,00	0,00	18.120.796,00
4	Tahun 2012	2.063.500,00	0,00	0,00	2.063.500,00
5	Tahun 2013	4.507.800,00	0,00	399.900,00	4.107.900,00
6	Tahun 2014	32.055.995,00	0,00	258.000,00	31.797.995,00
7	Tahun 2015	9.963.799,00	0,00	0,00	9.963.799,00
8	Tahun 2016	428.157.444,00	0,00	0,00	428.157.444,00
9	Tahun 2017	50.078.467,26	0,00	0,00	50.078.467,26
10	Tahun 2018	157.141.234,00	0,00	2.849.716,00	154.291.518,00
11	Tahun 2019	519.884.413,00	0,00	5.000.000,00	514.884.413,00
12	Tahun 2020	410.952.277,00	0,00	194.213.726,00	216.738.551,00
13	Tahun 2021	0,00	9.321.190.860,00	8.845.582.128,00	475.608.732,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.666.702.688,26</b>	<b>9.321.190.860,00</b>	<b>9.048.303.470,00</b>	<b>1.939.590.078,26</b>

### c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp1.108.745.939,00, mengalami kenaikan senilai Rp153.672.323,00 atau sebesar 16,09% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp955.073.616,00. Akun Piutang Pajak Hiburan merupakan selisih antara nilai pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hiburan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.11 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Hiburan	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2010	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	Tahun 2011	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00
3	Tahun 2012	4.862.400,00	0,00	0,00	4.862.400,00
4	Tahun 2013	1.773.200,00	0,00	0,00	1.773.200,00
5	Tahun 2014	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	Tahun 2015	19.319.000,00	0,00	0,00	19.319.000,00
7	Tahun 2016	100.194.786,00	0,00	0,00	100.194.786,00
8	Tahun 2017	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
9	Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2019	799.506.063,00	0,00	20.000.000,00	779.506.063,00
11	Tahun 2020	19.142.167,00	0,00	12.023.104,00	7.119.063,00
12	Tahun 2021	0,00	952.102.028,00	766.406.601,00	185.695.427,00
	<b>Jumlah</b>	<b>955.073.616,00</b>	<b>952.102.028,00</b>	<b>798.429.705,00</b>	<b>1.108.745.939,00</b>

### d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp673.674.710,00, mengalami penurunan senilai Rp110.551.907,00 atau sebesar 14,10% dari Tahun 2020 senilai Rp784.226.617,00. Akun Piutang Pajak Reklame merupakan selisih antara nilai pajak reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Reklame Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.12 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
2	Tahun 2006	2.667.205,00	0,00	0,00	2.667.205,00
3	Tahun 2007	2.556.000,00	0,00	0,00	2.556.000,00
4	Tahun 2008	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00
5	Tahun 2009	2.992.720,00	0,00	0,00	2.992.720,00
6	Tahun 2010	3.768.000,00	0,00	0,00	3.768.000,00
7	Tahun 2011	15.923.530,00	0,00	0,00	15.923.530,00
8	Tahun 2012	25.095.875,00	0,00	0,00	25.095.875,00
9	Tahun 2013	69.644.900,00	0,00	0,00	69.644.900,00
10	Tahun 2014	161.517.990,00	0,00	0,00	161.517.990,00
11	Tahun 2015	44.420.003,00	0,00	0,00	44.420.003,00
12	Tahun 2016	110.436.972,00	0,00	0,00	110.436.972,00
13	Tahun 2017	42.429.403,00	0,00	0,00	42.429.403,00

14	Tahun 2018	22.064.094,00	0,00	0,00	22.064.094,00
15	Tahun 2019	23.129.875,00	0,00	0,00	23.129.875,00
16	Tahun 2020	255.750.050,00	0,00	155.376.488,00	100.373.562,00
17	Tahun 2021	0,00	2.454.187.711,00	2.409.363.130,00	44.824.581,00
<b>Jumlah</b>		<b>784.226.617,00</b>	<b>2.454.187.711,00</b>	<b>2.564.739.618,00</b>	<b>673.674.710,00</b>

#### e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Dumai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp648.294.656,00, mengalami kenaikan senilai Rp6.579.635,00 atau sebesar 1,03% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp641.715.021,00. Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan selisih antara nilai Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.13 Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak PPJ - Non PLN	95.428.263,00	12.594.918.908,00	12.588.339.273,00	102.007.898,00
2	Piutang Pajak PPJ - PLN	546.286.758,00	36.872.627.693,00	36.872.627.693,00	546.286.758,00
<b>Jumlah</b>		<b>641.715.021,00</b>	<b>49.467.546.601,00</b>	<b>49.460.966.966,00</b>	<b>648.294.656,00</b>

#### 1. Piutang PPJ Non PLN

**Tabel 5.5.14 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2012	5.423.400,00	0,00	0,00	5.423.400,00
2	Tahun 2018	2.104.259,00	0,00	0,00	2.104.259,00
3	Tahun 2020	87.900.604,00	0,00	76.756.846,00	11.143.758,00
4	Tahun 2021	0,00	12.594.918.908,00	12.511.582.427,00	83.336.481,00
<b>Jumlah</b>		<b>95.428.263,00</b>	<b>12.594.918.908,00</b>	<b>12.588.339.273,00</b>	<b>102.007.898,00</b>

#### 2. Piutang PPJ - PLN

**Tabel 5.5.15 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2018	546.286.758,00	0,00	0,00	546.286.758,00
2	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2021	0,00	36.872.627.693,00	36.872.627.693,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>546.286.758,00</b>	<b>36.872.627.693,00</b>	<b>36.872.627.693,00</b>	<b>546.286.758,00</b>

#### f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp1.612.751.046,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.178.194.704,00 atau sebesar 271,13% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp434.556.342,00. Akun Piutang Pajak Air Tanah merupakan selisih antara nilai pajak air tanah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Air Tanah Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.16 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2011	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
2	Tahun 2012	2.291.400,00	0,00	0,00	2.291.400,00
3	Tahun 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tahun 2014	2.902.500,00	0,00	0,00	2.902.500,00
5	Tahun 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tahun 2016	6.063.000,00	0,00	0,00	6.063.000,00
7	Tahun 2017	325.148.976,00	0,00	48.117.131,00	277.031.845,00
8	Tahun 2018	62.293.425,00	0,00	57.564.764,00	4.728.661,00
9	Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tahun 2020	34.534.041,00	0,00	8.194.472,00	26.339.569,00
11	Tahun 2021	0,00	2.271.126.489,00	979.055.418,00	1.292.071.071,00
<b>Jumlah</b>		<b>434.556.342,00</b>	<b>2.271.126.489,00</b>	<b>1.092.931.785,00</b>	<b>1.612.751.046,00</b>

#### **g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dan Tahun 2020 senilai Rp99.244.672,00, Tahun 2021 tidak ada penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun sebelumnya.

#### **h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp113.475.195.762,19, mengalami kenaikan senilai Rp8.762.732.980,00 atau sebesar 8,37% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp104.712.462.782,19. Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan PBB - P2 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 terdapat dalam Lampiran 6.

Akun Piutang PBB – P2 merupakan selisih antara nilai PBB - P2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak PBB – P2 termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.17 Rincian Piutang PBB Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 1994	191.636,00	0,00	0,00	191.636,00
2	Tahun 1995	289.915,00	0,00	0,00	289.915,00
3	Tahun 1996	39.502.677,00	0,00	0,00	39.502.677,00
4	Tahun 1997	57.833.757,00	0,00	429.263,00	57.404.494,00
5	Tahun 1998	103.794.493,00	0,00	1.494.735,00	102.299.758,00
6	Tahun 1999	97.543.379,00	0,00	602.787,00	96.940.592,00
7	Tahun 2000	86.159.824,00	0,00	535.583,00	85.624.241,00
8	Tahun 2001	920.156.856,72	0,00	1.041.663,00	919.115.193,72
9	Tahun 2002	950.586.928,78	0,00	3.927.057,00	946.659.871,78
10	Tahun 2003	201.836.905,54	0,00	1.539.375,00	200.297.530,54

11	Tahun 2004	235.810.740,74	0,00	2.029.526,00	233.781.214,74
12	Tahun 2005	940.424.520,82	0,00	7.264.930,00	933.159.590,82
13	Tahun 2006	1.611.715.813,69	0,00	11.654.865,00	1.600.060.948,69
14	Tahun 2007	2.631.174.481,64	0,00	25.913.618,00	2.605.260.863,64
15	Tahun 2008	2.831.077.135,73	0,00	24.074.061,00	2.807.003.074,73
16	Tahun 2009	4.337.583.258,18	0,00	34.969.161,00	4.302.614.097,18
17	Tahun 2010	7.433.086.513,04	0,00	37.154.862,00	7.395.931.651,04
18	Tahun 2011	7.729.512.253,40	0,00	52.826.929,00	7.676.685.324,40
19	Tahun 2012	7.615.567.403,71	0,00	41.416.543,00	7.574.150.860,71
20	Tahun 2013	7.468.337.552,24	0,00	40.594.426,00	7.427.743.126,24
21	Tahun 2014	5.687.775.935,11	0,00	40.842.219,00	5.646.933.716,11
22	Tahun 2015	5.759.179.952,24	0,00	49.068.538,00	5.710.111.414,24
23	Tahun 2016	2.912.974.982,61	0,00	64.263.102,00	2.848.711.880,61
24	Tahun 2017	7.916.344.338,00	0,00	673.649.998,00	7.242.694.340,00
25	Tahun 2018	11.965.428.129,00	0,00	882.716.414,00	11.082.711.715,00
26	Tahun 2019	11.892.825.029,00	0,00	921.256.476,00	10.971.568.553,00
27	Tahun 2020	13.285.748.371,00	0,00	1.546.995.834,00	11.738.752.537,00
28	Tahun 2021	0,00	106.124.903.919,00	92.895.908.974,00	13.228.994.945,00
	<b>Jumlah</b>	<b>104.712.462.782,19</b>	<b>106.124.903.919,00</b>	<b>97.362.170.939,00</b>	<b>113.475.195.762,19</b>

#### i. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp3.921.600,00, mengalami penurunan senilai Rp5.356.8000,00 atau sebesar 57,73% dari Tahun 2020 senilai Rp9.278.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.18 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	9.278.400,00	0,00	8.074.200,00	1.204.200,00
2	Tahun 2021	0,00	691.186.812,00	688.469.412,00	2.717.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.278.400,00</b>	<b>691.186.812,00</b>	<b>696.543.612,00</b>	<b>3.921.600,00</b>

#### j. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp2.972.000,00, mengalami penurunan senilai Rp877.000,00 atau sebesar 22,79% dari Tahun 2020 senilai Rp3.849.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.19 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	3.849.000,00	0,00	3.849.000,00	0,00
2	Tahun 2021	0,00	90.270.560,00	87.298.560,00	2.972.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.849.000,00</b>	<b>90.270.560,00</b>	<b>91.147.560,00</b>	<b>2.972.000,00</b>

#### 8) Piutang Retribusi

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.906.918.879,09	1.995.132.229,09	(88.213.350,00)	(4,42)

Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp1.906.918.879,09, mengalami penurunan senilai Rp88.213.350,00 atau sebesar 4,42% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp1.995.132.229,09. Akun Piutang Retribusi Daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan Piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pengakuan saldo Piutang Retribusi tersebut hanya berdasarkan pengakuan tahun-tahun sebelumnya. Piutang Retribusi daerah ini terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah yaitu:

**Tabel 5.5.20 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Lingkungan Hidup	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	33.555.750,00	121.769.100,00	(88.213.350,00)	(72,44)
3	Badan Pendapatan Daerah	1.822.723.129,09	1.822.723.129,09	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.906.918.879,09</b>	<b>1.995.132.229,09</b>	<b>(88.213.350,00)</b>	<b>(4,42)</b>

Rincian Piutang Retribusi berdasarkan jenis Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.21 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2021 dan 2020**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.640.000,00	50.640.000,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	22.200.000,00	53.820.000,00	(31.620.000,00)	(58,75)
3	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	100,00

No	Jenis Retribusi	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
4	Piutang Retribusi Terminal	0,00	65.100.000,00	(65.100.000,00)	(100,00)
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	605.000,00	110.000,00	495.000,00	450,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.610.750,00	2.739.100,00	871.650,00	31,82
7	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1.765.420.215,09	1.765.420.215,09	0,00	0,00
8	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57.302.914,00	57.302.914,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.906.918.879,09</b>	<b>1.995.132.229,09</b>	<b>(88.213.350,00)</b>	<b>(4,42)</b>

#### a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dan Tahun 2020 senilai Rp50.640.000,00, tidak terdapat penambahan nilai dari tahun sebelumnya.

#### b. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp22.200.000,00, mengalami penurunan senilai Rp31.620.000,00 atau sebesar 58,75% dari sebesar Tahun 2020 yaitu senilai Rp53.820.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.22 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	53.820.000,00	0,00	0,00	53.820.000,00
2	Tahun 2021	0,00	22.200.000,00	53.820.000,00	(31.620.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>53.820.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>53.820.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>

#### c. Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha

Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp7.140.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp7.140.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.23 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan tempat kegiatan usaha Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2021	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140.000,00</b>

#### d. Piutang Retribusi Terminal

Piutang Retribusi terminal pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00, mengalami penurunan senilai Rp65.100.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp65.100.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.24 Rincian Piutang Retribusi Terminal Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Terminal	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	65.100.000,00	0,00	0,00	65.100.000,00
2	Tahun 2021	0,00	0,00	65.100.000,00	(65.100.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### e. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp605.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp495.000,00 atau sebesar 450,00% dari Tahun 2020 senilai Rp110.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.25 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2	Tahun 2021	0,00	605.000,00	110.000,00	495.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>110.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>605.000,00</b>

**f. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Piutang Retribusi Pelayanan kepelabuhan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp3.610.750,00, mengalami kenaikan senilai Rp871.650,00 atau sebesar 31,82% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp2.739.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.26 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	2.739.100,00	0,00	0,00	2.739.100,00
2	Tahun 2021	0,00	3.610.750,00	2.739.100,00	871.650,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.739.100,00</b>	<b>3.610.750,00</b>	<b>2.739.100,00</b>	<b>3.610.750,00</b>

**g. Piutang Retribusi Izin Gangguan**

Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp1.765.420.215,09, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.27 Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	3.115.500,00	0,00	0,00	3.115.500,00
2	Tahun 2006	51.200.120,00	0,00	0,00	51.200.120,00
3	Tahun 2007	45.426.325,00	0,00	0,00	45.426.325,00
4	Tahun 2008	20.451.240,00	0,00	0,00	20.451.240,00
5	Tahun 2009	45.987.975,00	0,00	0,00	45.987.975,00
6	Tahun 2010	266.966.496,00	0,00	0,00	266.966.496,00
7	Tahun 2011	72.529.436,00	0,00	0,00	72.529.436,00
8	Tahun 2012	121.473.850,00	0,00	0,00	121.473.850,00
9	Tahun 2013	183.255.576,00	0,00	0,00	183.255.576,00
10	Tahun 2014	129.629.925,00	0,00	0,00	129.629.925,00
11	Tahun 2015	116.484.514,00	0,00	0,00	116.484.514,00
12	Tahun 2016	223.163.849,00	0,00	0,00	223.163.849,00
13	Tahun 2017	484.151.529,09	0,00	0,00	484.151.529,09
14	Tahun 2018	1.205.640,00	0,00	0,00	1.205.640,00
15	Tahun 2019	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00
16	Tahun 2020	141.840,00	0,00	0,00	141.840,00
17	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.765.420.215,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.420.215,09</b>

### i. Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp57.302.914,00, nilai tersebut tidak terdapat penambahan mutasi di Tahun 2021.

**Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	26.832.482,00	0,00	0,00	26.832.482,00
2	Tahun 2010	30.470.432,00	0,00	0,00	30.470.432,00
3	Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.302.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.302.914,00</b>

### 9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>71.374.492.248,15</b>	<b>418.563.386,64</b>	<b>70.955.928.861,51</b>	<b>16.952,25</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 senilai Rp71.374.492.248,15, mengalami kenaikan senilai Rp70.955.928.861,51 atau sebesar 16.952,25% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp418.563.386,64 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.29 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Jenis Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	68.027.364.818,00	72.400.000,00	67.954.964.818,00	93.860,45
2	Badan Pendapatan Daerah	3.347.127.430,15	346.163.386,64	3.000.964.043,51	866,92
	<b>Jumlah</b>	<b>71.374.492.248,15</b>	<b>418.563.386,64</b>	<b>70.955.928.861,51</b>	<b>16.952,25</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

**Tabel 5.5.30 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	72.400.000,00	20.735.000,00	8.675.000,00	84.460.000,00
2	Piutang Pendapatan BLUD - RSUD	0,00	96.512.675.154,00	28.660.501.186,00	67.852.173.968,00
3	Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas	0,00	237.940.850,00	147.210.000,00	90.730.850,00
4	Piutang Denda Pajak (Bapenda)	94.375.088,00	3.371.330.242,51	370.366.199,00	3.095.339.131,51
5	Piutang Denda Retribusi (Bapenda)	251.788.298,64	0,00	0,00	251.788.298,64
	<b>Jumlah</b>	<b>418.563.386,64</b>	<b>100.142.681.246,51</b>	<b>29.186.752.385,00</b>	<b>71.374.492.248,15</b>

Besarnya perbandingan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2020 dikarenakan reklasifikasi akun dari Piutang Lainnya yaitu Piutang Pendapatan BLUD senilai Rp28.891.761.871,00.

Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada Lampiran 5, 9, 10, 11

**a. Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)**

Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp84.460.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp12.060.000,00 atau sebesar 16,66% dari Tahun 2020 senilai Rp72.400.000,00

**b. Piutang Pendapatan BLUD-RSUD**

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp67.852.173.968,00, mengalami kenaikan senilai Rp39.107.622.097 atau sebesar 136,05% dari Tahun 2020 senilai Rp28.744.551.871,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.31 Rincian Pendapatan BLUD-RSUD Tahun 2021**

No	Nama Perusahaan	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)	8.097.792.933,00	12.498.198.629,00	(4.400.405.696,00)	(35,21)
2	Kemenkes RI	57.483.515.550,00	10.793.558.000,00	46.689.957.550,00	432,57
3	BKR ( PT. Wilmar Group )	129.107.105,00	99.618.504,00	29.488.601,00	29,60
4	JAMPERSAL ( Jaminan Persalinan )	20.457.576,00	154.093.137,00	(133.635.561,00)	(86,72)
5	JAMKESDA BENGKALIS	35.538.078,00	29.214.359,00	6.323.719,00	21,65
6	CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)	52.750.000,00	22.500.000,00	30.250.000,00	134,44
7	OBAT KRONIS	423.775.158,00	1.045.469.214,00	(621.694.056,00)	(59,47)
8	JAMKESKO (Jaminan Kesehatan Kota )	143.117.390,00	1.623.360.427,00	(1.480.243.037,00)	(91,18)
9	INHEALTH	1.622.828,00	13.788.141,00	(12.165.313,00)	(88,23)
10	AMBULANCE BPJS	82.258.800,00	71.338.800,00	10.920.000,00	15,31
11	SDS (Sari Dumai Sejati)	0,00	102.843.475,00	(102.843.475,00)	(100,00)
12	PELINDO PEGAWAI (Pelabuhan Indonesia)	18.359.094,00	253.878.989,00	(235.519.895,00)	(92,77)
13	PELINDO PENSIUNA	28.820.877,00	654.670.164,00	(625.849.287,00)	(95,60)
14	PLN ( Perusahaan Listrik Negara )	40.589.405,00	15.889.075,00	24.700.330,00	155,45
15	Pertamina Bina Medika	200.530.737,00	90.936.254,00	109.594.483,00	120,52
16	PT. Kreasi Jaya Adhikarya	0,00	364.095,00	(364.095,00)	(100,00)
17	PT. Nira Murni Konstruksi	79.552.900,00	79.552.900,00	0,00	0,00
18	PT. OWLEXA / HEALTCARE	1.724.083,00	1.724.083,00	0,00	0,00
19	PT. KLK (Kuala Lumpur Kepong)	4.051.352,00	1.985.857,00	2.065.495,00	104,01
20	PT. SURYA MADISTRINDO	782.400,00	782.400,00	0,00	0,00

21	PT. Margie Andalan	19.060.829,00	37.878.147,00	(18.817.318,00)	(49,68)
22	Trauma Center (Jamsostek /Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	15.161.649,00	0,00	15.161.649,00	100,00
23	PT.Murini Wood Indah Industry	1.588.193,00	1.588.193,00	0,00	0,00
24	CV. Akbar 77	48.589.615,00	21.953.545,00	26.636.070,00	121,33
25	PT. BANK BRI	74.469.021,00	37.541.785,00	36.927.236,00	98,36
26	PT. BANK RIAU KEPRI	10.446.932,00	2.919.952,00	7.526.980,00	257,78
27	PT. TASPEN (PERSERO) CAB. PEKANBARU	0,00	640.261,00	(640.261,00)	(100,00)
28	Pendapatan Kerjasama (Sewa Kios)	42.100.000,00	49.400.000,00	(7.300.000,00)	(14,78)
29	SEWA KANTIN (RUANGAN)	10.320.000,00	15.920.000,00	(5.600.000,00)	(35,18)
30	PT. Arafah Alam Sejahtera	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00
31	Bumida	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00
32	Intibenua	6.229.450,00	6.229.450,00	0,00	0,00
33	PT. AAB	15.941.217,00	23.577.515,00	(7.636.298,00)	(32,39)
34	PT. APICAL KAO CHEMICALS	0,00	12.867.308,00	(12.867.308,00)	(100,00)
35	PT. Admedika ( PATRA SK )	50.000,00	15.551.579,00	(15.501.579,00)	(99,68)
36	PT. Admedika ( PLN )	3.037.312,00	3.188.815,00	(151.503,00)	(4,75)
37	PT. SARANA AGRO NUSANTARA ( SAN )	2.607.262,00	2.607.262,00	0,00	0,00
38	PT. SDS ( Sari Dumai Sejati )	19.175.391,00	0,00	19.175.391,00	100,00
39	PT. SARI DUMAI OLEO	13.662.463,00	0,00	13.662.463,00	100,00
40	PT. APICAL	283.863,00	0,00	283.863,00	100,00
41	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	205.962,00	0,00	205.962,00	100,00
42	PT. MANDIRI INHEALTH	6.635.591,00	0,00	6.635.591,00	100,00
43	Pasien Umum	81.635.750,00	7.451.837,00	74.183.913,00	995,51
44	Pasien Perusahaan ( PT. PLN )	20.278.746,00	0,00	20.278.746,00	100,00
45	Pasien Kerjasama	0,00	5.253.905,00	(5.253.905,00)	(100,00)
46	Pasien BPJS	231.861.838,00	229.763.962,00	2.097.876,00	0,91
47	Pasien Non BPJS	278.779.487,00	124.522.754,00	154.256.733,00	123,88
48	Pasien Jamkesko	84.372.934,00	41.238.917,00	43.134.017,00	104,60
49	Kemenkes	20.245.197,00	549.601.181,00	(529.355.984,00)	(96,32)
	<b>TOTAL</b>	<b>67.852.173.968,00</b>	<b>28.744.551.871,00</b>	<b>39.107.622.097,00</b>	<b>136,05</b>

**Sebagai Tambahan informasi untuk perbedaan antara Jamkesko dengan Jampersal:**

- 1 Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota) merupakan Suatu Penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2 Jampersal (Jaminan Persalinan ) merupakan Program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai yang mengelola dana kesehatan untuk menjamin persalinan bagi masyarakat dan tidak mampu di Kota Dumai dalam anggaran dan kurun waktu tertentu.

**Tabel 5.5.32 Rincian Item Perbedaan Jamkesko dan Jampersal**

No	Item Perbedaan	Jamkesko	Jampersal
1	Sumber Dana	APBD	APBN
2	Peserta	Masyarakat Kota Dumai yang tidak mampu (miskin) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.	Ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Rekapitulasi Piutang Pendapatan BLUD - RSUD beserta Penyisihan Piutang Tak tertagih dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.

**c. Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas**

Piutang Pendapatan pada BLUD - Puskesmas telah sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Piutang pada BLUD - Puskesmas Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp90.730.850,00 atau mengalami penurunan senilai Rp56.479.150,00 atau sebesar 37,26% dari Tahun 2020 senilai RpRp147.210.000,00.

**Tabel Rincian 5.5.33 Rincian Piutang Pendapatan pada BLUD-Puskesmas Tahun 2021 dan 2020**

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
<b>1</b>	<b>Piutang BPJS 2020:</b>				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	27.490.000,00	0,00	27.490.000,00	0,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	11.635.000,00	0,00	11.635.000,00	0,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	48.920.000,00	0,00	48.920.000,00	0,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	0,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	0,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00	0,00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Piutang BPJS 2021:</b>				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	0,00	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	32.435.000,00	0,00	32.435.000,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	10.065.000,00	0,00	10.065.000,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	14.417.850,00	0,00	14.417.850,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	15.533.000,00	0,00	15.533.000,00

i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>147.210.000,00</b>	<b>90.730.850,00</b>	<b>147.210.000,00</b>	<b>90.730.850,00</b>

#### d. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp3.095.339.131,51, mengalami kenaikan senilai Rp3.000.964.043,51 atau sebesar 3.179,83% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp94.375.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.34 Rincian Piutang Denda Pajak Tahun 2021 dan 2020**

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Denda Pajak Hotel Tahun 2020	13.341.596,00	67.742.734,32	76.105.231,00	4.979.099,32
2	Denda Pajak Restoran Tahun 2020	46.036.520,00	276.089.957,20	80.889.805,00	241.236.672,20
3	Denda Pajak Hiburan Tahun 2020	8.742.887,00	126.248.425,59	17.612.429,00	117.378.883,59
4	Denda Pajak Reklame Tahun 2020	14.308.966,00	2.028.165,96	7.680.986,00	8.656.145,96
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2018	9.532.932,00	2.888.406.344,44	178.691.012,00	2.719.248.264,44

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
6	Denda Pajak Parkir tahun 2020	234.084,00	4.535.265,00	4.704.438,00	64.911,00
7	Denda Pajak Air Tanah Tahun 2020	2.178.103,00	4.786.320,00	3.189.268,00	3.775.155,00
8	Denda Pajak Walet 2020	0,00	1.493.030,00	1.493.030,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.375.088,00</b>	<b>3.371.330.242,51</b>	<b>370.366.199,00</b>	<b>3.095.339.131,51</b>

#### e. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dan 2020 senilai Rp251.788.298,64. Selama Tahun 2021 tidak ada penambahan Piutang Denda Retribusi.

#### 10) Piutang Transfer - DBH Provinsi

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>9.656.723.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.656.723.625,00</b>	<b>100,00</b>

Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi pada Pemerintah Kota Dumai berdasarkan SK Gubernur Nomor : Kpts. 756/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV ( Desember 2021) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 per 31 Desember 2021 senilai Rp9.656.723.625,00, mengalami kenaikan senilai Rp9.656.723.625,00 atau sebesar 100,00% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.35 Rincian Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2021 dan 2020

No	BAGI HASIL	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.690.492.585,00	0,00	2.690.492.585,00	100,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.004.702.813,00	0,00	2.004.702.813,00	100,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.867.170.924,00	0,00	4.867.170.924,00	100,00
4	Pajak Air Permukaan	94.357.303,00	0,00	94.357.303,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.656.723.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.656.723.625,00</b>	<b>100,00</b>

11) Piutang Lainnya

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>291.428.679,64</b>	<b>30.563.991.102,55</b>	<b>(30.272.562.422,91)</b>	<b>(99,05)</b>

Piutang Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp291.428.679,64, mengalami penurunan senilai Rp30.272.562.422,91 atau sebesar 99,05% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp30.563.991.102,55. Penurunan ini disebabkan adanya reklas ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah yaitu Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas senilai Rp147.210.000,00 dan Piutang Pendapatan BLUD RSUD senilai Rp28.744.551.871,00. Piutang Lainnya ini terdapat pada PPKD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.36 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No	Nama OPD	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PPKD	291.428.679,64	1.672.229.231,55	(1.380.800.551,91)	(82,57)
2	BLUD - RSUD	0,00	28.744.551.871,00	(28.744.551.871,00)	(100,00)
3	BLUD - Puskesmas	0,00	147.210.000,00	(147.210.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>291.428.679,64</b>	<b>30.563.991.102,55</b>	<b>(30.272.562.422,91)</b>	<b>(99,05)</b>

a. Piutang Lainnya pada PPKD

Piutang Lainnya pada PPKD Kota Dumai per 31 Desember 2020 senilai Rp291.428.679,64, mengalami penurunan senilai Rp1.380.800.551,91 atau sebesar 82,57% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp1.672.229.231,55, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Lainnya pada PPKD Tahun 2021 dan 2020

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Piutang pengembalian penyertaan PT Air Bersih	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00

2	Piutang bunga Koperasi Putri Tujuh	7.653.399,37	0,00	0,00	7.653.399,37
3	Piutang PT Pembangunan Dumai	2.306.000,00	0,00	0,00	2.306.000,00
4	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	579.047.282,18	0,00	351.664.801,91	227.382.480,27
5	Piutang Gaji PNS	83.222.550,00	0,00	29.135.750,00	54.086.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.672.229.231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.800.551,91</b>	<b>291.428.679,64</b>

### 1. Piutang Pengembalian Penyertaan PT Air Bersih

Piutang Pengembalian Penyertaan PT Riau Mineralindo Perkasa senilai Rp1.000.000.000,00 timbul dari gagalnya Investasi Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Mineralindo Perkasa. PT Riau Mineralindo Perkasa tidak pernah beroperasi dan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Hal tersebut lebih dipertegas dengan status Badan Hukum PT Riau Mineralindo Perkasa yang bermasalah (sedang dalam proses hukum) di Badan Arbitrase Nasional (BANI) dan Pengadilan Negeri Kota Dumai (Perdata), meliputi Putusan Badan Arbitrase Tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 277/III/ARB-BANI/2008 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 41/Pdt.P/2008/PN.DUM, Tanggal 02 Februari 2008. Dalam putusan tersebut Pemerintah Kota Dumai menang atas perkara yang berkonsekuensi terhadap nilai investasi yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai. Selain itu, mengacu pada Keputusan Banding Makamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Tanggal 22 Oktober 2009, Register Nomor 515 K/Pdt.Sus/2009 yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pdt.P/2008/PN.DUM, Tanggal 02 Februari 2008.

PT Riau Mineralindo Perkasa sesuai dengan keputusan tersebut wajib mengembalikan investasi Pemerintah Kota Dumai ke Kas Daerah. Selanjutnya berdasarkan putusan Perkara Nomor 130/PID.SUS/2011/PTR Tanggal 08 Agustus 2011 yang salah satu bunyinya menyatakan Menghukum Terdakwa (Direktur PT. Riau Mineralindo Perkasa untuk membayar uang pengganti senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada negara dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pada Tahun 2021, sesuai dengan Surat Walikota Dumai Nomor 760/648/INSP-S.2 tanggal 06 Desember 2021 Piutang Pengembalian Penyertaan PT Air Bersih diusulkan statusnya menjadi tidak dapat ditindaklanjuti karena Direktur PT Riau Mineralindo Perkasa telah mengganti piutang tersebut dengan Pidana penjara dan berdasarkan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada Pemerintah Kota Dumai Semester II Tahun 2021 telah menyatakan temuan tersebut sesuai rekomendasi, sehingga terhadap piutang tersebut dilakukan penghapusan dari pembukuan Pemerintah Kota Dumai.

### 2. Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman Koperasi Puteri Tujuh per Tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp7.653.399,37. Piutang ini merupakan Piutang yang timbul atas Bunga Pinjaman kepada Koperasi Puteri Tujuh, yaitu sebesar 0,5% dari pokok pinjaman senilai Rp500.000.000,00 selama 10 Tahun (sejak Nopember 2001 hingga Desember 2011) senilai Rp25.570.066,02.

### 3. Piutang PT Pembangunan Dumai

Piutang PT Pembangunan Dumai senilai Rp2.306.000,00 merupakan sisa sewa gedung yang belum disetor ke Kas Daerah. Pendapatan sewa senilai Rp9.160.000,00, merupakan pendapatan sewa gedung Tahun 2012 s.d 2015 yang disetor ke Kas Daerah pada Tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp9.070.000,00. Pendapatan sewa gedung Tahun 2016 s.d 2017 senilai Rp9.920.000,00 telah disetor pada tanggal 24 Januari 2018 senilai Rp7.704.000,00. Atas kedua penyeteroran tersebut, terdapat kekurangan setor senilai Rp2.306.000,00 yang baru diketahui Tahun 2020, sehingga sisa sewa gedung yang belum disetor per 31 Desember 2021 ke Kas Daerah senilai Rp2.306.000,00.

### 4. Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2021 senilai Rp227.382.480,27, mengalami penurunan senilai Rp351.664.801,91 atau sebesar 60,73% dari Tahun 2020 senilai Rp579.047.282,18. Piutang ini merupakan klaim tuntutan ganti kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak ketiga. Rincian Piutang Tuntutan Ganti Rugi – Piutang Lainnya Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 terdapat dalam Lampiran 7.

### 5. Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp54.086.800,00, mengalami penurunan senilai Rp29.135.750,00 atau sebesar 53,87% dari Tahun 2020 senilai Rp83.222.550,00.

**Tabel 5.5.38 Rincian Piutang Gaji PNS Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	Keterangan
1	D F	54.086.800,00	78.086.800,00	(24.000.000,00)	Gaji, THR dan gaji 13 Maret 2019 s/d November 2020 Atas Nama D F.
2	Y E G	0,00	5.135.750,00	(5.135.750,00)	Tunjangan beban kerja Mei 2019 s/d Agustus 2019, THR dan Gaji 13 2019 Atas Nama Y E G.
	<b>Jumlah</b>	<b>54.086.800,00</b>	<b>83.222.550,00</b>	<b>(29.135.750,00)</b>	

Rekapitulasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi – Piutang Gaji PNS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 terdapat dalam Lampiran 8.

#### 12) Penyisihan Piutang

2021	2020	(Peningkatan)/Penurunan	
		Rp	%
<b>(90.643.237.451,68)</b>	<b>(69.718.264.795,67)</b>	<b>(20.924.972.656,01)</b>	<b>30,01</b>

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 senilai minus Rp90.643.237.451,68, mengalami kenaikan senilai Rp20.924.972.656,01 atau sebesar 30,01% dari Tahun 2020 yaitu senilai minus Rp69.718.264.795,67. Penyisihan tersebut muncul akibat penerapan SAP berbasis akrual. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

**Tabel 5.5.39 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	(18.804.500,00)	(11.339.000,00)	(7.465.500,00)	65,84
2	BLUD RSUD	(16.155.543.705,00)	(2.118.869.209,50)	(14.036.674.495,50)	662,46
3	Dinas Lingkungan Hidup	(50.640.000,00)	(50.640.000,00)	0,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	(74.418.249.246,68)	(67.537.416.586,17)	(6.880.832.660,51)	10,19
	<b>Jumlah</b>	<b>(90.643.237.451,68)</b>	<b>(69.718.264.795,67)</b>	<b>(20.924.972.656,01)</b>	<b>30,01</b>

**13) Persediaan**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>50.892.554.145,49</b>	<b>29.624.460.779,82</b>	<b>21.268.093.365,67</b>	<b>71,79</b>

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp50.892.554.145,49, mengalami kenaikan senilai Rp21.268.093.365,67 atau sebesar 71,79% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp29.624.460.779,82. Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 terdapat dalam Lampiran 12. Adapun rincian persediaan per OPD di Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.40 Rincian Persediaan per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.318.620,00	10.956.700,00	(5.638.080,00)	(51,46)
2	Dinas Kesehatan	27.344.768.287,87	13.600.186.254,82	13.744.582.033,05	101,06

No	Nama OPD	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		14.381.526.357,00	(14.381.526.357,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.641.163.018,62	318.192.500,00	22.322.970.518,62	7.015,56
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	45.157.500,00	(45.157.500,00)	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.053.990,00	1.132.310,00	(78.320,00)	(6,92)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.295.650,00	543.031.300,00	(533.735.650,00)	(98,29)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	311.850,00	604.900,00	(293.050,00)	(48,45)
9	Dinas Sosial	70.183.780,00	2.278.500,00	67.905.280,00	2.980,26
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.958.803,00	1.212.100,00	746.703,00	61,60
11	Dinas Lingkungan Hidup	61.314.478,00	16.878.600,00	44.435.878,00	263,27
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	252.571.766,00	131.765.928,00	120.805.838,00	91,68
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	187.839.061,00	227.372.497,00	(39.533.436,00)	(17,39)

14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.657.900,00	979.700,00	1.678.200,00	171,30
15	Dinas Perhubungan	147.053.788,00	103.362.221,00	43.691.567,00	42,27
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	334.500,00	1.442.060,00	(1.107.560,00)	(76,80)
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.398.000,00	2.752.000,00	(354.000,00)	(12,86)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.332.800,00	13.080.800,00	(5.748.000,00)	(43,94)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	277.200,00	483.000,00	(205.800,00)	(42,61)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.055.250,00	1.040.000,00	15.250,00	1,47
21	Dinas Perikanan	3.712.900,00	2.890.400,00	822.500,00	28,46
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	789.800,00	1.285.400,00	(495.600,00)	(38,56)
23	Dinas Perdagangan	2.040.780,00	276.000,00	1.764.780,00	639,41
24	Sekretariat Daerah	60.243.080,00	54.541.667,00	5.701.413,00	10,45
25	Sekretariat DPRD	15.389.500,00	18.172.329,00	(2.782.829,00)	(15,31)
26	Kecamatan Dumai Barat	2.745.985,00	2.921.500,00	(175.515,00)	(6,01)
27	Kecamatan Dumai Timur	160.650,00	139.606,00	21.044,00	15,07
28	Kecamatan Bukit Kapur	1.098.000,00	1.130.000,00	(32.000,00)	(2,83)
29	Kecamatan Medang Kampai	1.047.710,00	1.330.600,00	(282.890,00)	(21,26)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	436.825,00	412.000,00	24.825,00	6,03

No	Nama OPD	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
31	Kecamatan Dumai Kota	1.021.300,00	5.808.000,00	(4.786.700,00)	(82,42)
32	Kecamatan Dumai Selatan	1.582.047,00	912.200,00	669.847,00	73,43
33	Inspektorat	4.498.500,00	3.325.050,00	1.173.450,00	35,29
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.418.100,00	12.538.800,00	(7.120.700,00)	(56,79)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.502.370,00	10.301.000,00	3.201.370,00	31,08
36	Badan Pendapatan Daerah	41.195.550,00	104.291.000,00	(63.095.450,00)	(60,50)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	782.306,00	750.000,00	32.306,00	4,31
	<b>Jumlah</b>	<b>50.892.558.187,49</b>	<b>29.624.464.819,82</b>	<b>21.268.093.365,67</b>	<b>71,79</b>

Tabel 5.5.41 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2021 dan 2020

No	Rincian Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	332.905.941,00	369.230.722,00	(36.324.781,00)	(9,84)

2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	38.453.533,35	76.386.080,00	(37.932.546,65)	(49,66)
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	42.919.000,00	21.977.000,00	20.942.000,00	95,29
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	165.952.580,00	548.853.340,00	(382.900.760,00)	(69,76)
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	135.866.500,00	156.882.500,00	(21.016.000,00)	(13,40)
6	Persediaan Isi tabung gas	92.795.600,00	156.238.600,00	(63.443.000,00)	(40,61)
7	Persediaan Barang Cetakan	569.656.379,00	411.680.399,00	157.975.980,00	38,37
8	Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan	19.079.020.341,45	15.879.062.674,36	3.199.957.667,09	20,15
9	Persediaan Bahan/bibit tanaman	58.200.078,00	2.100.000,00	56.100.078,00	2.671,43
10	Persediaan Bahan obat-obatan	6.824.773.219,79	10.161.483.057,07	(3.336.709.837,28)	(32,84)
11	Persediaan Bahan kimia	1.167.081.704,28	1.837.299.407,39	(670.217.703,11)	(36,48)
12	NATURA (Makanan & Minuman )	5.561.000,00	0,00	5.561.000,00	100,00
13	Persediaan Suku Cadang Sarana	0,00	3.267.000,00	(3.267.000,00)	(100,00)
14	Persediaan Barang untuk diserahkan Pada Masyarakat	22.379.368.268,62	0,00	22.379.368.268,62	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.892.554.145,49</b>	<b>29.624.460.779,82</b>	<b>21.268.093.365,67</b>	<b>71,79</b>

#### a. Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp332.905.941,00, mengalami penurunan senilai Rp36.324.781,00 atau sebesar 9,84% dari Tahun 2020 senilai Rp369.230.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.42 Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor Per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.335.800,00	10.956.700,00	(7.620.900,00)	(69,55)
2	Dinas Kesehatan	188.840.570,00	223.536.900,00	(34.696.330,00)	(15,52)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	9.899.950,00	2.234.900,00	7.665.050,00	342,97
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.270.000,00	655.500,00	614.500,00	93,75
6	Satuan Polisi Pamong Praja	703.500,00	613.560,00	89.940,00	14,66
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.295.650,00	0,00	9.295.650,00	100,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	277.200,00	604.900,00	(327.700,00)	(54,17)
9	Dinas Sosial	1.646.280,00	1.070.500,00	575.780,00	100,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	351.900,00	932.200,00	(580.300,00)	(62,25)

12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.027.886,00	1.330.000,00	697.886,00	52,47
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	426.000,00	315.000,00	111.000,00	35,24
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.561.900,00	305.700,00	1.256.200,00	410,93
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	147.000,00	922.060,00	(775.060,00)	(84,06)
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.731.000,00	2.752.000,00	(1.021.000,00)	(37,10)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.009.000,00	3.035.600,00	(1.026.600,00)	(33,82)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	144.900,00	413.000,00	(268.100,00)	(64,92)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.055.250,00	1.040.000,00	15.250,00	1,47
20	Dinas Perikanan	1.669.000,00	1.737.000,00	(68.000,00)	(3,91)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	220.800,00	452.400,00	(231.600,00)	(51,19)
22	Dinas Perdagangan	1.532.790,00	276.000,00	1.256.790,00	455,36
23	Sekretariat Daerah	53.451.800,00	17.006.667,00	36.445.133,00	214,30
24	Sekretariat DPRD	6.035.000,00	9.082.179,00	(3.047.179,00)	(33,55)
25	Kecamatan Dumai Barat	1.407.000,00	2.266.500,00	(859.500,00)	(37,92)
26	Kecamatan Dumai Timur	160.650,00	139.606,00	21.044,00	15,07
27	Kecamatan Bukit Kapur	458.000,00	769.000,00	(311.000,00)	(40,44)
28	Kecamatan Medang Kampai	492.240,00	581.000,00	(88.760,00)	(15,28)
29	Kecamatan Sungai Sembilan	100.075,00	310.000,00	(209.925,00)	(67,72)
30	Kecamatan Dumai Kota	1.021.300,00	4.263.000,00	(3.241.700,00)	(76,04)
31	Kecamatan Dumai Selatan	790.650,00	520.200,00	270.450,00	51,99
32	Inspektorat	153.300,00	2.280.450,00	(2.127.150,00)	(93,28)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.006.500,00	7.788.000,00	(2.781.500,00)	(35,72)
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.113.300,00	6.521.000,00	592.300,00	9,08
35	Badan Pendapatan Daerah	28.569.750,00	63.769.200,00	(35.199.450,00)	(55,20)
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>332.905.941,00</b>	<b>369.230.722,00</b>	<b>(36.324.781,00)</b>	<b>(9,84)</b>

#### b. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp38.453.533,35, mengalami penurunan senilai Rp37.932.546,65 atau sebesar 49,66% dari Tahun 2020 senilai Rp76.386.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.43 Rincian Persediaan Alat Listrik dan Elektronik per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	21.044.083,35	7.671.000,00	13.373.083,35	174,33
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	10.771.000,00	16.717.980,00	(5.946.980,00)	(35,57)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.000,00	840.000,00	(512.000,00)	(60,95)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	45.157.500,00	(45.157.500,00)	(100,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.181.150,00	0,00	1.181.150,00	(100,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	670.800,00	3.119.200,00	(2.448.400,00)	100,00
7	Sekretariat DPRD	4.458.500,00	1.823.000,00	2.635.500,00	144,57
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	1.057.400,00	(1.057.400,00)	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.453.533,35</b>	<b>76.386.080,00</b>	<b>(37.932.546,65)</b>	<b>(49,66)</b>

**c. Persediaan Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya**

Persediaan Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp42.919.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp20.942.000,00 atau sebesar 95,29% dari Tahun 2020 senilai Rp21.977.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.44 Rincian Persediaan Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	42.119.000,00	18.252.000,00	23.867.000,00	130,76
2	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	3.725.000,00	(3.725.000,00)	(100,00)
4	Inspektorat	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.919.000,00</b>	<b>21.977.000,00</b>	<b>20.942.000,00</b>	<b>95,29</b>

**d. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih**

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp165.952.580,00, mengalami penurunan senilai Rp382.900.760,00 atau sebesar 69,76% dari Tahun 2020 senilai Rp548.853.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.45 Rincian Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.629.380,00	0,00	18.629.380,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	125.365.250,00	8.837.500,00	116.527.750,00	1.318,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	15.810.050,00	292.754.690,00	(276.944.640,00)	(94,60)

4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.750,00	300.000,00	(63.250,00)	(21,08)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	318.150,00	184.450,00	133.700,00	72,49
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	226.290.700,00	(226.290.700,00)	(100,00)
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	34.650,00	0,00	34.650,00	100,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.114.400,00	14.778.600,00	(11.664.200,00)	(78,93)
9	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	367.000,00	0,00	367.000,00	100,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	273.000,00	276.000,00	(3.000,00)	(1,09)
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	132.300,00	70.000,00	62.300,00	89,00
12	Dinas Perikanan	743.900,00	1.153.400,00	(409.500,00)	(35,50)
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Medang Kampai	381.150,00	379.600,00	1.550,00	0,41
15	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	0,00	0,00	100,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	411.600,00	3.693.400,00	(3.281.800,00)	(88,86)
	<b>Jumlah</b>	<b>165.952.580,00</b>	<b>548.853.340,00</b>	<b>(382.900.760,00)</b>	<b>(69,76)</b>

#### e. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp135.866.500,00 atau mengalami penurunan senilai Rp21.016.000,00 atau sebesar 13,40% dari Tahun 2020 senilai Rp156.882.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.46 Rincian Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	114.155.000,00	127.500.000,00	(13.345.000,00)	(10,47)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.206.500,00	6.982.500,00	(3.776.000,00)	(54,08)
3	Dinas Pekerjaan Umum	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	22.400.000,00	(22.400.000,00)	(100,00)
5	Inspektorat	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>135.866.500,00</b>	<b>156.882.500,00</b>	<b>(21.016.000,00)</b>	<b>(13,40)</b>

#### f. Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Isi Tabung Gas Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp92.795.600,00, mengalami penurunan senilai Rp63.443.000,00 atau sebesar 40,61% dari Tahun 2020 senilai Rp156.238.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.47 Rincian Persediaan Isi Tabung Gas per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	92.795.600,00	156.238.600,00	(63.443.000,00)	(40,61)
	<b>Jumlah</b>	<b>92.795.600,00</b>	<b>156.238.600,00</b>	<b>(63.443.000,00)</b>	<b>(40,61)</b>

**g. Persediaan Barang Cetak**

Persediaan Barang Cetak Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp569.656.379,00, mengalami kenaikan senilai Rp157.975.980,00 atau sebesar 38,37% dari Tahun 2020 senilai Rp411.680.399,00, dengan rincian berikut:

**Tabel 5.5.48 Rincian Persediaan Barang Cetak per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.982.820,00	0,00	1.982.820,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	32.965.300,00	29.334.000,00	3.631.300,00	12,38
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	91.773.400,00	69.235.500,00	22.537.900,00	32,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.000,00	1.500.000,00	(1.120.000,00)	(74,67)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	32.340,00	334.300,00	(301.960,00)	(90,33)
7	Dinas Sosial	1.487.500,00	1.208.000,00	279.500,00	23,14
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	425.753,00	279.900,00	145.853,00	52,11
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.543.880,00	130.435.928,00	120.107.952,00	92,08
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.096.000,00	674.000,00	422.000,00	62,61
11	Dinas Perhubungan	147.053.788,00	103.362.221,00	43.691.567,00	42,27
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	187.500,00	0,00	187.500,00	100,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.380.000,00	6.650.000,00	(2.270.000,00)	(34,14)
14	Dinas Perikanan	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	434.000,00	698.000,00	(264.000,00)	(37,82)
16	Dinas Perdagangan	507.990,00	0,00	507.990,00	100,00
17	Sekretariat Daerah	6.791.280,00	11.410.000,00	(4.618.720,00)	(40,48)
18	Sekretariat DPRD	4.896.000,00	7.267.150,00	(2.371.150,00)	(32,63)
19	Kecamatan Dumai Barat	1.338.985,00	655.000,00	683.985,00	104,43
20	Kecamatan Bukit Kapur	640.000,00	361.000,00	279.000,00	77,29
21	Kecamatan Medang Kampai	174.320,00	370.000,00	(195.680,00)	(52,89)
22	Kecamatan Sungai Sembilan	336.750,00	102.000,00	234.750,00	230,15
23	Kecamatan Dumai Kota	0,00	1.545.000,00	(1.545.000,00)	(100,00)

24	Kecamatan Dumai Selatan	791.397,00	392.000,00	399.397,00	101,89
25	Inspektorat	340.200,00	1.044.600,00	(704.400,00)	(67,43)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.389.070,00	3.780.000,00	2.609.070,00	69,02
27	Badan Pendapatan Daerah	12.625.800,00	40.521.800,00	(27.896.000,00)	(68,84)
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	782.306,00	520.000,00	262.306,00	50,44
	<b>Jumlah</b>	<b>569.656.379,00</b>	<b>411.680.399,00</b>	<b>157.975.980,00</b>	<b>38,37</b>

#### h. Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan

Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp19.079.020.341,45, mengalami kenaikan senilai Rp3.199.957.667,09 atau sebesar 20,15% dari Tahun 2020 senilai Rp15.879.062.674,36 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.49 Rincian Persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	19.079.020.341,45	15.879.062.674,36	3.199.957.667,09	20,15
	<b>Jumlah</b>	<b>19.079.020.341,45</b>	<b>15.879.062.674,36</b>	<b>3.199.957.667,09</b>	<b>20,15</b>

#### i. Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah senilai Rp58.200.078,00, mengalami kenaikan senilai Rp56.100.078,00 atau sebesar 2.671,43% dari Tahun 2020 senilai Rp2.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.50 Rincian Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Lingkungan Hidup	58.200.078,00	2.100.000,00	56.100.078,00	2.671,43
	<b>Jumlah</b>	<b>58.200.078,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>56.100.078,00</b>	<b>2.671,43</b>

#### j. Persediaan Bahan Obat-obatan

Persediaan Bahan Obat-obatan Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp6.824.773.219,79, mengalami penurunan senilai Rp3.336.709.837,28 atau sebesar 32,84% dari Tahun 2020 senilai Rp10.161.483.057,07 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.51 Rincian Persediaan Bahan Obat-obatan per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	2.851.037.770,79	5.418.195.388,07	(2.567.157.617,28)	(47,38)
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3.786.322.388,00	4.199.489.572,00	(413.167.184,00)	(9,84)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	316.740.600,00	(316.740.600,00)	100,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	187.413.061,00	227.057.497,00	(39.644.436,00)	(17,46)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.824.773.219,79</b>	<b>10.161.483.057,07</b>	<b>(3.336.709.837,28)</b>	<b>(32,84)</b>

#### k. Persediaan Bahan Kimia

Persediaan Bahan Kimia Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp1.167.081.704,28, mengalami penurunan senilai Rp670.217.703,11 atau sebesar 36,48% dari Tahun 2020 senilai Rp1.837.299.407,39 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.52 Rincian Persediaan Bahan Kimia per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	855.451.704,28	1.525.669.407,39	(670.217.703,11)	(43,93)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311.630.000,00	311.630.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.167.081.704,28</b>	<b>1.837.299.407,39</b>	<b>(670.217.703,11)</b>	<b>(36,48)</b>

#### l. Persediaan Natura (Makanan dan Minuman)

Persediaan Natura (Makanan dan Minuman) pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp5.561.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp5.561.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.53 Rincian Persediaan Natura (Makanan dan Minuman) per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	5.561.000,00	0,00	5.561.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### m. Persediaan Suku Cadang Sarana

Persediaan Suku Cadang Sarana pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp0,00, mengalami penurunan senilai Rp3.267.000,00 atau sebesar 100% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp3.267.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.54 Rincian Persediaan Suku Cadang Sarana per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	3.267.000,00	(3.267.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.000,00</b>	<b>(3.267.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

#### n. Persediaan Barang untuk diserahkan Pada Masyarakat

Persediaan Barang untuk diserahkan Pada Masyarakat pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp22.379.368.268,62, mengalami kenaikan senilai Rp22.379.368.268,62 atau sebesar 100% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.55 Rincian Persediaan Barang untuk diserahkan Pada Masyarakat per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.312.318.268,62	0,00	22.312.318.268,62	100,00
2	Dinas Sosial	67.050.000,00	0,00	67.050.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.379.368.268,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.379.368.268,62</b>	<b>100,00</b>

Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 12.

**14) Beban Dibayar Dimuka**

	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	114.500.000,00	156.888.851,49	(42.388.851,49)	(27,02)

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum dibebankan seluruhnya pada akhir tahun berjalan. Asuransi Dibayar Dimuka pada Tahun 2021 senilai Rp114.500.000,00, mengalami penurunan senilai Rp42.388.851,49 atau sebesar 27,02% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp156.888.851,49, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.56 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	694.363,00	(694.363,00)	100,00
2	Sekretariat Daerah	114.500.000,00	134.896.987,49	(20.396.987,49)	(15,12)
3	Sekretariat DPRD	0,00	21.297.501,00	(21.297.501,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>114.500.000,00</b>	<b>156.888.851,49</b>	<b>(42.388.851,49)</b>	<b>(27,02)</b>

**b. Investasi Jangka Panjang**

	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	58.002.848.837,39	71.346.217.241,69	(13.343.368.404,30)	(18,70)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp58.002.848.837,39 mengalami penurunan senilai Rp13.343.368.404,30 atau sebesar 18,70% dari Tahun 2020 senilai Rp71.346.217.241,69. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.57 Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 dan 2020**

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Investasi Non Permanen Lainnya	8.623.980.000,00	8.888.580.000,00	(264.600.000,00)	(2,98)
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(8.390.980.000,00)	(8.655.580.000,00)	264.600.000,00	(3,06)
Investasi Permanen	57.769.848.837,39	71.113.217.241,69	(13.343.368.404,30)	(18,76)
<b>Jumlah</b>	<b>58.002.848.837,39</b>	<b>71.346.217.241,69</b>	<b>(13.343.368.404,30)</b>	<b>(18,70)</b>

**1) Investasi Non Permanen Lainnya**

	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	8.623.980.000,00	8.888.580.000,00	(264.600.000,00)	(2,98)

Investasi Non Permanen Lainnya Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp8.623.980.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.58 Rincian Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama Peminjam	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/ Penurunan	
				Rp.	%
1	Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi				

	- Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pinjaman Kepada lembaga lainnya				
	- Koperasi Putri Tujuh	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00
	- Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan	305.100.000,00	569.700.000,00	(264.600.000,00)	(46,45)
	- Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	1.085.880.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.623.980.000,00</b>	<b>8.888.580.000,00</b>	<b>(264.600.000,00)</b>	<b>(2,98)</b>

#### a. Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi

Pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) berlangsung sejak Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang digunakan dalam rangka penyaluran dana bergulir kepada masyarakat/kelompok masyarakat. LEK merupakan lembaga penyalur dana bergulir kepada masyarakat. LEK berhak untuk menilai kelayakan peminjam dalam mengelola dana.

Nilai yang disajikan per 31 Desember 2011 adalah senilai Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dumai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Toha, CPA tertanggal 29 Maret 2010.

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.329.738.833,00, yang berada pada rekening penampung yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.59 Rincian Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2020	Pengembalian dari Nasabah	Jasa Giro/Bunga Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2021
1	LEK Dumai qq Zulfika 104-2-000279	30.280,00	0,00	0,00	30.280,00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	670.474.762,00	0,00	5.383.498,00	675.858.260,00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1.587.722.125,00	30.102.400,00	25.752.261,00	1.643.576.786,00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10.257.161,00	0,00	16.346,00	10.273.507,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.268.484.328,00</b>	<b>30.102.400,00</b>	<b>31.152.105,00</b>	<b>2.329.738.833,00</b>

Adapun sepanjang Tahun 2021 terdapat penyetoran dari nasabah senilai Rp30.102.400,00 pada Rekening 10-40-70003-8, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.60 Rincian Penyetoran Nasabah Tahun 2021**

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
1	04 Maret 2021	Ari Kuswanto	18.000.000,00
2	18 Juni 2021	Rusdi	8.419.200,00
3	18 Juni 2021	Syamsul Hilal	3.157.200,00

4	30 September 2021	Yusuf	526.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>30.102.400,00</b>

**b. Pinjaman Kepada lembaga lainnya**

**1. Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh**

Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Putri Tujuh adalah senilai Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada Nopember 2001. Dana tersebut digunakan oleh Koperasi Putri Tujuh untuk membeli sebidang tanah yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Nilai Pinjaman Koperasi Putri tujuh sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 senilai Rp233.000.000,00.

**Tabel 5.5.61 Rincian Penyetoran Nilai Pinjaman Koperasi Putri Tujuh Tahun 2021**

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Pemberian Pinjaman Bulan November 2001	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
2	Pembayaran Tahun 2015	0,00	0,00	100.000.000,00	400.000.000,00

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
3	Pembayaran Tahun 2016	0,00	0,00	90.000.000,00	310.000.000,00
4	Pembayaran Tahun 2017	0,00	0,00	50.000.000,00	260.000.000,00
5	Pembayaran Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00
6	Pembayaran Tahun 2019	0,00	0,00	27.000.000,00	233.000.000,00
7	Pembayaran Tahun 2020	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00
8	Pembayaran Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	233.000.000,00

Pada Tanggal 09 Maret 2022, terdapat penyetoran ke kas daerah untuk pembayaran pinjaman Koperasi Putri Tujuh senilai Rp3.500.000,00.

**2. Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima - Dinas Perdagangan**

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perdagangan merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp1.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh, Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan Tahun 2021 senilai Rp305.100.000,00, mengalami penurunan senilai Rp264.600.000,00 atau sebesar 46,45% dari Tahun 2020 senilai Rp569.700.000,00. Penurunan ini dikarenakan adanya penghapusan berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 611 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021.

### 3. Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Usaha Kecil. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp2.250.000.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2021 masih terdapat tunggakan senilai Rp1.085.880.000,00.

#### 2) Penyisihan Investasi Non Permanen

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(8.390.980.000,00)	(8.655.580.000,00)	264.600.000,00	(3,06)

Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai minus Rp8.390.980.000,00. Nilai tersebut merupakan penyisihan dana bergulir senilai 100% atas dana bergulir yang jatuh tempo mulai lima tahun ke atas, yang terdiri dari penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK senilai Rp7.000.000.000,00, penyisihan pinjaman usaha kecil dan koperasi pada Dinas Perdagangan senilai Rp305.100.000,00 dan penyisihan investasi non permanen pada Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp1.085.880.000,00.

Tabel 5.5.62 Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

No	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00

No	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
2	Penyisihan Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi Pada Dinas Perdagangan	569.700.000,00	0,00	264.600.000,00	305.100.000,00
3	Penyisihan Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM	1.085.880.000,00	0,00	0,00	1.085.880.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.655.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390.980.000,00</b>

Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 dan Daftar Pinjaman dan Tunggakan Fasilitas Pengembangan UKM Keluarga Miskin Tahun 2007 terdapat dalam Lampiran 13 dan Lampiran 14.

#### 3) Investasi Permanen

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
57.769.848.837,39	71.113.217.241,69	(13.343.368.404,30)	(18,76)

Investasi Permanen Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp57.769.848.837,39 mengalami penurunan senilai Rp13.343.368.404,30 atau sebesar 18,76% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp71.113.217.241,69 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
57.769.848.837,39	71.113.217.241,69	(13.343.368.404,30)	(18,76)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp57.769.848.837,39 mengalami penurunan senilai Rp13.343.368.404,30 atau sebesar 18,76% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp71.113.217.241,69 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.5.63 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan 2020**

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PT. Bank Riau	5.203.000.000,00	5.203.000.000,00	0,00	0,00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	3.536.009.301,90	4.168.536.710,99	(632.527.409,09)	(15,17)
3	PT. Pembangunan Dumai	25.791.022.076,49	32.162.565.991,70	(6.371.543.915,21)	(19,81)
4	PT. Riau Air Line	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	17.839.817.459,00	24.179.114.539,00	(6.339.297.080,00)	(26,22)
<b>Jumlah</b>		<b>57.769.848.837,39</b>	<b>71.113.217.241,69</b>	<b>(13.343.368.404,30)</b>	<b>(18,76)</b>

**1. PT Bank Riau Kepri**

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per Tahun 2021 senilai Rp5.203.000.000,00, yang terdiri dari 52.030 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 0,47%. Terjadi Perubahan Komposisi kepemilikan Saham Pemerintah Kota Dumai yang sebelumnya sebesar 0,50% dikarenakan pada tahun 2020 terdapat setoran penambahan Modal dari Pemerintah Kabupaten lain sebagai Pemegang Saham. penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (Cost Method).

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun 2021, PT. Bank Riau Kepri telah membagikan dividen senilai Rp1.316.194.590,00 untuk tahun buku 2020 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Riau Kepri pada Tanggal 18 Juni 2021.

**2. PT Pelabuhan Dumai Berseri**

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai Berseri Tahun 2021 senilai Rp3.536.009.301,90 turun senilai Rp632.527.409,09 atau sebesar 15,17% dari Tahun 2020 senilai Rp4.168.536.710,99 dengan persentase kepemilikan sebesar 99,95% yang disajikan dengan menggunakan Metode Ekuitas (*Equity Method*).

**Tabel 5.5.64 Rincian Penyertaan Modal PT Pelabuhan Dumai Tahun 2021**

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	<b>Modal dan Cadangan:</b>		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 8.217.600.000,00	Modal Saham
2	Laba/Rugi Ditahan	Rp (4.206.705.726,00)	Saldo Awal Laba (rugi) Ditahan
3	Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp (533.523.809,00)	Rugi Tahun Berjalan
4	Deviden	0,00	Saldo Awal Deviden
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp 60.407.726,00	Saldo Koreksi Beban Laba (Rugi) Tahun lalu

6	Sharing Pendapatan BSJ		0,00	Sharing Pendapatan BSJ
	<b>Jumlah a</b>	<b>Rp</b>	<b>3.537.778.191,00</b>	Ekuitas Akhir 100%
<b>b</b>	<b>Kepemilikan saham</b>		99,95%	
<b>c</b>	<b>Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)</b>	<b>Rp</b>	<b>3.536.009.301,90</b>	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

### 3. PT Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp25.791.022.076,49 turun senilai Rp6.371.543.915,21 atau sebesar 19,81% dari Tahun 2020 senilai Rp32.162.565.991,70 dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97%.

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Pembangunan Dumai untuk Tahun 2021, PT Pembangunan Dumai telah membagikan dividen senilai Rp98.930.665,00 untuk tahun buku 2020 dari total yang harus dibayarkan senilai Rp889.514.089,00 sesuai dengan hasil RUPS PT Pembangunan Dumai Nomor 25 pada Tanggal 29 Maret 2021 yang disahkan dengan Akta Notaris Firman, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kota Dumai. Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pada PT Pembangunan Dumai dengan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 (Unaudited) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.65 Rincian Penyertaan Modal PT Pembangunan Dumai Tahun**

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
<b>a</b>	<b>Modal dan Cadangan:</b>		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 31.182.264.000,00	Modal Saham
2	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp 989.953.657,00	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Labanya / (Rugi) Periode Berjalan	Rp (2.278.084.003,00)	Rugi Tahun Berjalan

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
4	Dividen	Rp (98.930.665,00)	Dividen yang sudah disetor
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp (3.996.441.284,00)	Koreksi Laba/Rugi Ditahan
	<b>Jumlah a</b>	<b>Rp 25.798.761.705,00</b>	Ekuitas Akhir 100%
<b>b</b>	<b>Kepemilikan saham</b>		<b>99,97%</b>
<b>c</b>	<b>Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)</b>	<b>Rp 25.791.022.076,49</b>	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

### 4. PT Riau Air Line

Nilai penyertaan modal pertama Pemerintah Kota Dumai pada Riau Airline dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2015 senilai Rp1.500.000.000,00 yang terdiri dari 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,00 perlembar saham melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline nomor 27501/20000/PAI/2005

penyertaan saham melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline Nomor: 2/501-29000/RAL/2005. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 Pemerintah Kota Dumai kembali menambah penyertaan modal kepada Riau Airline senilai Rp3.900.000.000,00 yang terdiri dari 3.900 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline Nomor: 51151-55050/RAL/2006. Persentase kepemilikan Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Airline per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,42% menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Pada tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Airline dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. Riau Airline sehingga status pailit PT Riau Airline berakhir.

**Tabel 5.5.66 Penyertaan Modal Pada Riau Airline**

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	Rp 1.500.000.000,00
2	2006	Rp 3.900.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 5.400.000.000,00</b>

## 5. PDAM Tirta Dumai Bersemai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2021 senilai Rp17.839.817.459,00, mengalami penurunan senilai Rp6.339.297.080,00 atau sebesar 26,22% dari Tahun 2020 senilai Rp24.179.114.539,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dengan menggunakan metode ekuitas dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.67 Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Dumai Bersemai**

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
<b>a</b>	<b>Modal dan Cadangan:</b>		
1	Modal Awal (Aset)	Rp 53.303.392.000,00	
2	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 10.320.520.000,00	
	<b>Jumlah Modal</b>	<b>Rp 63.623.912.000,00</b>	
3	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (39.444.797.461,00)	Saldo laba (rugi) Ditahan

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
4	Koreksi Laba Ditahan	Rp (108.797.239,00)	Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu
5	Laba / (Rugi) Berjalan	Rp (6.230.499.841,00)	Rugi Tahun Berjalan
	<b>Jumlah a</b>	<b>Rp 17.839.817.459,00</b>	Ekuitas Akhir 100%
<b>b</b>	<b>Kepemilikan saham</b>	<b>100,00%</b>	
<b>c</b>	<b>Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)</b>	<b>Rp 17.839.817.459,00</b>	

### c. Aset Tetap

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.679.041.994.881,42	2.620.303.716.016,14	58.738.278.865,28	2,24

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp2.679.041.994.881,42 mengalami kenaikan senilai Rp58.738.278.865,28 atau sebesar 2,24% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp2.620.303.716.016,14 dengan rincian per jenis adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.68 Rincian Aset Tetap per Jenis Tahun 2021 dan Tahun 2020**

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	661.486.214.865,96	653.472.484.715,03	8.013.730.150,93	1,23
2	Peralatan dan Mesin	776.533.030.032,11	699.978.979.229,79	76.554.050.802,32	10,94
3	Gedung dan Bangunan	1.014.947.165.081,88	936.675.745.669,98	78.271.419.411,90	8,36
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.390.039.096.680,91	2.331.528.624.882,91	58.510.471.798,00	2,51
5	Aset Tetap Lainnya	56.223.639.963,74	50.807.956.455,74	5.415.683.508,00	10,66
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	217.661.117.431,33	211.542.081.250,59	6.119.036.180,74	2,89
7	Akumulasi Penyusutan	(2.437.848.269.174,51)	(2.263.702.156.187,90)	(174.146.112.986,61)	7,69
	<b>Jumlah</b>	<b>2.679.041.994.881,42</b>	<b>2.620.303.716.016,14</b>	<b>58.738.278.865,28</b>	<b>2,24</b>

Peningkatan Aset Tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
<b>Penambahan ( a )</b>		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	225.842.995.358,55
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	159.364.886.274,05
	Reklasifikasi Masuk	16.060.338.033,26
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	15.367.372.161,20
	Hasil Inventarisasi	17.040.488.000,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah ( a )</b>	<b>433.676.079.827,06</b>
<b>Pengurangan ( b )</b>		
	Penghapusan	15.183.455.309,86
	Transfer ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	159.364.886.274,05

URAIAN		NILAI
	Reklasifikasi Keluar	24.815.721.491,24
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	1.426.900.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	724.900,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah ( b )</b>	<b>200.791.687.975,16</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan ( c )</b>		<b>(174.146.112.986,61)</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) = ( a ) - ( b ) + ( c )</b>		<b>58.738.278.865,28</b>

**Keterangan:**

	Pengadaan adalah penambahan Aset Tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam APBD
--	---

1	Manajemen perolehan, sedangkan penghapusan adalah karena dihapuskan.
2	Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan Aset Tetap akibat Aset Tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan, sedangkan transfer ke Aset Tetapnya adalah pengurangan Aset Tetap akibat telah selesai Tahun pelaporan.
3	<b>Transfer Masuk</b> adalah penambahan Aset Tetap dari OPD lain dalam satu entitas pelaporan, sedangkan <b>Transfer Keluar</b> adalah pengurangan Aset Tetap akibat penyerahan Aset Tetap ke OPD lain dalam satu entitas pelaporan.
4	<b>Reklasifikasi Masuk</b> adalah penambahan Aset Tetap dari jenis Aset Tetap yang lain atau Aset lainnya dalam satu OPD, sedangkan <b>Reklasifikasi Keluar</b> adalah pengurangan Aset Tetap kepada jenis Aset Tetap yang lain atau Aset Lainnya dalam satu OPD.
5	<b>Penerimaan Hibah</b> adalah penambahan Aset Tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun, sedangkan <b>Pemberian Hibah</b> adalah pengurangan Aset Tetap akibat memberikan Aset Tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.
6	<b>Koreksi pencatatan</b> adalah mengoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam Laporan Keuangan (akun Aset Tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	<b>199.818.329.751,39</b>
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	34.364.697.231,47
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	1.220.297.750,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	25.092.607.566,00
	Masuk dari BM JIJ	3.421.900.633,14
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	355.089.908,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>264.272.922.840,00</b>
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(4.745.230.893,13)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(2.884.886.750,00)
	Keluar ke aset JIJ	(1.052.845.400,00)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	(21.406.932.814,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	(461.336.900,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(4.034.895.829,11)
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(3.843.798.895,21)
	<b>Jumlah ---2</b>	<b>(38.429.927.481,45)</b>
3	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>225.842.995.358,55</b>

Rekapitulasi Daftar Aset Tetap dan daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2021 terdapat pada Lampiran 15 dan 16. Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) Tanah

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>661.486.214.865,96</b>	<b>653.472.484.715,03</b>	<b>8.013.730.150,93</b>	<b>1,23</b>

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp661.486.214.865,96 mengalami kenaikan senilai Rp8.013.730.150,93 atau sebesar 1,23% dibandingkan Tahun 2020 yaitu senilai Rp653.472.484.715,03. Rincian aset tetap per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.69 Rincian Aset Tetap Tanah per OPD Tahun 2021 dan 2020

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.135.980.050,00	23.524.280.650,00	1.611.699.400,00	6,85

2	Dinas Kesehatan	5.006.237.150,00	4.806.237.150,00	200.000.000,00	4,16
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.573.894.720,00	4.573.894.720,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	426.385.572.744,03	425.770.418.791,03	615.153.953,00	0,14
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.788.000,00	0,00	100.788.000,00	100,00
6	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	1.323.700.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	739.200.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	1.444.800.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	9.650.306.000,00	8.120.695.000,00	1.529.611.000,00	18,84
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.796.592.000,00	22.273.409.191,00	(9.476.817.191,00)	(42,55)
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	106.624.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	6.759.158.571,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	13.048.562.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Perdagangan	7.952.693.840,00	7.521.146.640,00	431.547.200,00	5,74
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	270.480.000,00	0,00	270.480.000,00	100,00
18	Sekretariat Daerah	69.940.887.020,00	103.261.271.220,00	(33.320.384.200,00)	(32,27)
19	Sekretariat DPRD	920.372.500,00	0,00	920.372.500,00	100,00
20	Kecamatan Dumai Barat	2.435.396.492,00	2.285.396.492,00	150.000.000,00	6,56
21	Kecamatan Dumai Timur	2.520.278.280,00	2.480.278.280,00	40.000.000,00	1,61
22	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	818.462.650,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Medang Kampai	492.320.000,00	342.320.000,00	150.000.000,00	43,82
24	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	928.530.250,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Kota	1.999.567.000,00	1.999.567.000,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	3.088.853.550,00	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60.087.658.048,93	15.296.378.560,00	44.791.279.488,93	292,82
<b>Jumlah</b>		<b>661.486.214.865,96</b>	<b>653.472.484.715,03</b>	<b>8.013.730.150,93</b>	<b>1,23</b>

Peningkatan aset tetap tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
<b>Penambahan (a)</b>		
Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)		17.000.000,00
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu		0,00
Transfer Masuk		42.049.201.391,00
Reklasifikasi Masuk		0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)		0,00
Hasil Inventarisasi		17.040.488.000,00

	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (a)</b>	<b>59.106.689.391,00</b>
<b>Pengurangan (b)</b>		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	42.049.201.391,00
	Reklasifikasi Keluar	7.812.357.849,07
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	1.231.400.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (b)</b>	<b>51.092.959.240,07</b>
	<b>Kenaikan/(Penurunan) --2</b>	<b>8.013.730.150,93</b>
<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI</b>
<b>1</b>	<b>Penambahan dari:</b>	
	Belanja Modal	<b>17.000.000,00</b>
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0,00
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Pengurangan karena:</b>	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung dan Bagunan	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ektrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	<b>Jumlah ---2</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>17.000.000,00</b>

**Tabel 5.5.70 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2021 dan 2020**

NO	OPD	Tahun 2020	MUTASI		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.524.280.650,00	1.611.699.400,00	0,00	25.135.980.050,00
2	Dinas Kesehatan	4.806.237.150,00	200.000.000,00	0,00	5.006.237.150,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4.573.894.720,00	0,00	0,00	4.573.894.720,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.770.418.791,03	615.153.953,00	0,00	426.385.572.744,03
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	100.788.000,00	0,00	100.788.000,00
6	Dinas Sosial	1.323.700.000,00	0,00	0,00	1.323.700.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	739.200.000,00	0,00	0,00	739.200.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.905.000.000,00	0,00	0,00	2.905.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.444.800.000,00	0,00	0,00	1.444.800.000,00

10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00
11	Dinas Perhubungan	8.120.695.000,00	1.996.011.000,00	466.400.000,00	9.650.306.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.273.409.191,00	0,00	9.476.817.191,00	12.796.592.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.624.000,00	0,00	0,00	106.624.000,00
14	Dinas Perikanan	6.759.158.571,00	0,00	0,00	6.759.158.571,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.048.562.000,00	0,00	0,00	13.048.562.000,00
16	Dinas Perdagangan	7.521.146.640,00	431.547.200,00	0,00	7.952.693.840,00
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	270.480.000,00	0,00	270.480.000,00
18	Sekretariat Daerah	103.261.271.220,00	0,00	33.320.384.200,00	69.940.887.020,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	920.372.500,00	0,00	920.372.500,00
20	Kecamatan Dumai Barat	2.285.396.492,00	150.000.000,00	0,00	2.435.396.492,00
21	Kecamatan Dumai Timur	2.480.278.280,00	40.000.000,00	0,00	2.520.278.280,00
22	Kecamatan Bukit Kapur	818.462.650,00	0,00	0,00	818.462.650,00
23	Kecamatan Medang Kampai	342.320.000,00	150.000.000,00	0,00	492.320.000,00
24	Kecamatan Sungai Sembilan	928.530.250,00	0,00	0,00	928.530.250,00
25	Kecamatan Dumai Kota	1.999.567.000,00	0,00	0,00	1.999.567.000,00
26	Kecamatan Dumai Selatan	3.088.853.550,00	0,00	0,00	3.088.853.550,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.296.378.560,00	52.603.637.338,00	7.812.357.849,07	60.087.658.048,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>653.472.484.715,03</b>	<b>59.089.689.391,00</b>	<b>51.075.959.240,07</b>	<b>661.486.214.865,96</b>

Hibah Tanah dari Sekretariat Daerah ke Provinsi Riau senilai Rp765.000.000,00 berdasarkan SK Hibah No.214/BPKAD/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan SK Penghapusan No.866 Tahun 2021 tanggal 08 November 2021. Hibah Tanah dari Dinas Perhubungan ke Kementerian Dirjen Perhubungan Darat senilai Rp172.110.000,00 berdasarkan SK Hibah No.336/BPKAD/2021 tanggal 03 Mei 2021 dan SK penghapusan No.742 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021, dan Hibah ke Bidang Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan senilai Rp294.290.000,00 berdasarkan SK Hibah No.553 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 dan SK penghapusan No.799 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021.

## 2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>776.533.030.032,11</b>	<b>699.978.979.229,79</b>	<b>76.554.050.802,32</b>	<b>10,94</b>

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp776.533.030.032,11, mengalami kenaikan senilai Rp76.554.050.802,32 atau sebesar 10,94% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp699.978.979.229,79, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.71 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.799.578.273,60	86.340.849.288,71	20.458.728.984,89	23,70

2	Dinas Kesehatan	72.509.313.862,96	64.680.371.804,83	7.828.942.058,13	12,10
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	245.190.112.242,17	214.040.689.011,17	31.149.423.231,00	14,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.213.440.540,08	38.770.194.940,08	4.443.245.600,00	11,46
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.618.396.046,00	4.142.226.746,00	(1.523.830.700,00)	(36,79)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.423.377.528,00	3.560.714.074,00	(137.336.546,00)	(3,86)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.312.687.460,00	22.541.951.260,00	1.770.736.200,00	7,86
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.025.086.884,00	2.215.586.884,00	(190.500.000,00)	(8,60)
9	Dinas Sosial	2.897.745.550,00	3.307.576.300,00	(409.830.750,00)	(12,39)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.045.506.318,00	4.358.003.500,00	687.502.818,00	15,78
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.193.888.792,00	2.274.652.792,00	(80.764.000,00)	(3,55)
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.916.778.376,20	18.375.414.127,00	1.541.364.249,20	8,39
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.381.894.330,00	5.029.725.830,00	352.168.500,00	7,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.106.638.698,00	3.746.117.898,00	360.520.800,00	9,62
15	Dinas Perhubungan	52.828.821.642,36	47.423.218.420,26	5.405.603.222,10	11,40
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.764.271.642,16	8.122.447.601,16	641.824.041,00	7,90
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.398.130.755,00	3.494.200.755,00	(96.070.000,00)	(2,75)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.087.325.809,00	6.534.360.409,00	(447.034.600,00)	(6,84)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.391.655.444,00	2.436.657.144,00	(45.001.700,00)	(1,85)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.486.282.473,00	4.163.761.472,00	322.521.001,00	7,75
21	Dinas Perikanan	5.348.286.193,20	5.288.020.793,20	60.265.400,00	1,14
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.671.003.468,20	13.414.573.043,20	256.430.425,00	1,91
23	Dinas Perdagangan	4.915.093.797,8600	4.866.535.797,860	48.558.000,00	1,00
24	Sekretariat Daerah	59.202.605.676,00	60.461.781.139,00	(1.259.175.463,00)	(2,08)
25	Sekretariat DPRD	12.266.639.120,00	14.500.675.370,00	(2.234.036.250,00)	(15,41)
26	Kecamatan Dumai Barat	2.394.947.300,00	2.125.113.000,00	269.834.300,00	12,70
27	Kecamatan Dumai Timur	3.327.922.520,00	2.521.611.970,00	806.310.550,00	31,98
28	Kecamatan Bukit Kapur	2.772.876.585,00	2.178.078.885,00	594.797.700,00	27,31
29	Kecamatan Medang Kampai	4.221.142.136,00	3.424.801.346,00	796.340.790,00	23,25
30	Kecamatan Sungai Sembilan	3.164.994.820,00	2.533.867.385,00	631.127.435,00	24,91

31	Kecamatan Dumai Kota	2.877.979.637,34	2.114.964.457,34	763.015.180,00	36,08
32	Kecamatan Dumai Selatan	3.206.557.388,00	2.392.620.188,00	813.937.200,00	34,02
33	Inspektorat	4.200.648.209,00	4.052.673.209,00	147.975.000,00	3,65
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.283.165.395,00	8.486.521.195,00	(1.203.355.800,00)	(14,18)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.240.903.857,00	8.027.802.857,00	213.101.000,00	2,65
	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	3.808.096.250,00	0,00	3.808.096.250,00	100,00
36	Badan Pendapatan Daerah	13.590.958.596,98	13.685.409.920,98	(94.451.324,00)	(0,69)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.448.276.416,00	4.345.208.416,00	103.068.000,00	2,37
<b>Jumlah</b>		<b>776.533.030.032,11</b>	<b>699.978.979.229,79</b>	<b>76.554.050.802,32</b>	<b>10,94</b>

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
<b>Penambahan (a)</b>		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	84.009.036.402,03
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	34.395.435.169,00
	Reklasifikasi Masuk	23.302.400,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	1.590.475.526,20
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (a)</b>	<b>120.018.249.497,23</b>

<b>Pengurangan (b)</b>		
	Penghapusan	8.054.707.417,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	34.395.435.169,00
	Reklasifikasi Keluar	817.831.208,91
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	195.500.000,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	724.900,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (b)</b>	<b>43.464.198.694,91</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) --2</b>		<b>76.554.050.802,32</b>

No	URAIAN	Nilai
1	<b>Penambahan dari:</b>	
	Belanja Modal	84.487.469.177,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	2.759.075.325,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	2.931.965.352,00

	Masuk dari BM JIJ	1.458.175.633,14
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	355.089.908,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>91.991.775.395,14</b>
<b>2</b>	<b>Pengurangan karena:</b>	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0,00
	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(921.161.750,00)
	Keluar ke Aset JIJ	(299.136.000,00)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ektrakomptabel	(4.034.895.829,11)
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT dan pembayaran utang Tahun 2020	(2.727.545.414,00)
	<b>Jumlah ---2</b>	<b>(7.982.738.993,11)</b>
<b>3</b>	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>84.009.036.402,03</b>

Adapun rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pada tabel berikut:

**Tabel 5.5.72 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.340.849.288,71	20.458.728.984,90	0,00	106.799.578.273,61
2	Dinas Kesehatan	64.680.371.804,83	8.668.260.063,14	839.318.005,00	72.509.313.862,97
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	214.040.689.011,17	31.302.923.231,00	153.500.000,00	245.190.112.242,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.770.194.940,08	5.199.590.100,00	756.344.500,00	43.213.440.540,08

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.142.226.746,00	206.495.300,00	1.730.326.000,00	2.618.396.046,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.560.714.074,00	57.135.000,00	194.471.546,00	3.423.377.528,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.541.951.260,00	2.603.458.750,00	832.722.550,00	24.312.687.460,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2.215.586.884,00		190.500.000,00	2.025.086.884,00
9	Dinas Sosial	3.307.576.300,00	71.769.250,00	481.600.000,00	2.897.745.550,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.358.003.500,00	687.502.818,00	0,00	5.045.506.318,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.274.652.792,00	254.886.000,00	335.650.000,00	2.193.888.792,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	18.375.414.127,00	2.163.014.249,20	621.650.000,00	19.916.778.376,20
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.029.725.830,00	749.268.500,00	397.100.000,00	5.381.894.330,00

14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.746.117.898,00	535.860.800,00	175.340.000,00	4.106.638.698,00
15	Dinas Perhubungan	47.423.218.420,25	7.177.553.704,00	1.771.950.481,91	52.828.821.642,34
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.122.447.601,16	968.664.041,00	326.840.000,00	8.764.271.642,16
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.494.200.755,00	63.930.000,00	160.000.000,00	3.398.130.755,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.534.360.409,00	451.730.300,00	898.764.900,00	6.087.325.809,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.436.657.144,00	205.768.300,00	250.770.000,00	2.391.655.444,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.163.761.472,00	567.552.000,00	245.030.999,00	4.486.282.473,00
21	Dinas Perikanan	5.288.020.793,20	280.265.400,00	220.000.000,00	5.348.286.193,20
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.414.573.043,20	395.506.525,00	139.076.100,00	13.671.003.468,20
23	Dinas Perdagangan	4.866.535.797,86	48.558.000,00	0,00	4.915.093.797,86
24	Sekretariat Daerah	60.461.781.139,00	8.858.919.699,00	10.118.095.162,00	59.202.605.676,00
25	Sekretariat DPRD	14.500.675.370,00	689.116.000,00	2.923.152.250,00	12.266.639.120,00
26	Kecamatan Dumai Barat	2.125.113.000,00	625.626.300,00	355.792.000,00	2.394.947.300,00
27	Kecamatan Dumai Timur	2.521.611.970,00	806.310.550,00	0,00	3.327.922.520,00
28	Kecamatan Bukit Kapur	2.178.078.885,00	1.063.197.700,00	468.400.000,00	2.772.876.585,00
29	Kecamatan Medang Kampai	3.424.801.346,00	991.840.790,00	195.500.000,00	4.221.142.136,00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	2.533.867.385,00	631.127.435,00	0,00	3.164.994.820,00
31	Kecamatan Dumai Kota	2.114.964.457,35	842.215.180,00	79.200.000,00	2.877.979.637,35
32	Kecamatan Dumai Selatan	2.392.620.188,00	840.337.200,00	26.400.000,00	3.206.557.388,00
33	Inspektorat	4.052.673.209,00	473.569.000,00	325.594.000,00	4.200.648.209,00

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.486.521.195,00	199.479.600,00	1.402.835.400,00	7.283.165.395,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.027.802.857,00	640.601.000,00	427.500.000,00	8.240.903.857,00
35B	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	0,00	19.618.211.551,00	15.810.115.301,00	3.808.096.250,00
36	Badan Pendapatan Daerah	13.685.409.920,98	403.708.176,00	498.159.500,00	13.590.958.596,98
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.345.208.416,00	215.568.000,00	112.500.000,00	4.448.276.416,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>699.978.979.229,79</b>	<b>120.018.249.497,23</b>	<b>43.464.198.694,91</b>	<b>776.533.030.032,11</b>

## 3) Gedung dan Bangunan

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.014.947.165.081,88	936.675.745.669,98	78.271.419.411,90	8,36

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp1.014.947.165.081,88 mengalami kenaikan senilai Rp78.271.419.411,90 atau sebesar 8,36% dari Tahun 2020 senilai Rp936.675.745.669,98. Adapun penjelasan atas peningkatan Aset Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.73 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2021 dan 2020

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	427.029.801.760,87	394.153.361.224,78	32.876.440.536,09	8,34
2	Dinas Kesehatan	104.352.343.722,63	93.543.033.169,30	10.809.310.553,33	11,56
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	143.407.954.259,31	122.683.479.652,23	20.724.474.607,08	16,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.625.612.944,62	32.856.262.617,86	(4.230.649.673,24)	(12,88)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.310.425.605,51	2.735.109.000,00	6.575.316.605,51	240,40
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.388.686.311,88	1.289.086.311,88	99.600.000,00	7,73
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.682.837.160,00	1.170.496.600,00	1.512.340.560,00	129,21
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	3.538.625.847,00	3.451.101.163,00	87.524.684,00	2,54
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.554.139.406,00	4.554.139.406,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.285.460.003,60	839.764.003,60	445.696.000,00	53,07
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.944.832.475,00	8.420.250.475,00	(1.475.418.000,00)	(17,52)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899.370.000,00	899.370.000,00	0,00	0,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.399.771.000,00	2.310.580.000,00	89.191.000,00	3,86
15	Dinas Perhubungan	26.984.673.730,07	26.279.523.462,01	705.150.268,06	2,68
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.155.754.317,76	1.056.754.317,76	99.000.000,00	9,37
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.826.415.845,83	4.826.415.845,83	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.431.180.000,00	3.431.180.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	27.066.893.018,21	22.726.621.403,87	4.340.271.614,34	19,10
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.530.870.362,36	4.331.692.362,36	199.178.000,00	4,60
21	Dinas Perikanan	5.848.164.810,00	5.465.644.810,00	382.520.000,00	7,00

22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.885.278.507,00	10.928.804.907,00	956.473.600,00	8,75
23	Dinas Perdagangan	21.256.152.834,46	20.379.604.559,46	876.548.275,00	4,30
24	Sekretariat Daerah	73.385.707.023,49	72.652.554.023,49	733.153.000,00	1,01
25	Sekretariat DPRD	23.065.137.240,00	23.065.137.240,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Dumai Barat	5.713.990.544,17	5.394.292.544,17	319.698.000,00	5,93
27	Kecamatan Dumai Timur	7.116.941.779,38	6.979.605.779,38	137.336.000,00	1,97
28	Kecamatan Bukit Kapur	5.702.641.963,61	5.702.641.963,61	0,00	0,00
29	Kecamatan Medang Kampai	3.373.348.540,54	3.313.348.540,54	60.000.000,00	1,81
30	Kecamatan Sungai Sembilan	4.470.742.409,46	4.041.226.109,46	429.516.300,00	10,63
31	Kecamatan Dumai Kota	3.693.281.331,17	3.693.281.331,17	0,00	0,00
32	Kecamatan Dumai Selatan	7.879.202.616,08	7.680.232.616,08	198.970.000,00	2,59
33	Inspektorat	5.469.278.827,07	5.269.479.327,07	199.799.500,00	3,79
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.683.731.972,26	7.683.731.972,26	(0,00)	(0,00)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.758.942.039,60	6.265.474.039,60	493.468.000,00	7,88
35B	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	5.572.136.400,00	5.572.136.400,00	0,00	100,00
36	Badan Pendapatan Daerah	6.992.090.872,94	6.365.580.891,18	626.509.981,76	9,84
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	4.664.747.600,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.014.947.165.081,88</b>	<b>936.675.745.669,98</b>	<b>78.271.419.411,91</b>	<b>8,36</b>

Peningkatan aset Tetap gedung dan bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
<b>Penambahan (a)</b>		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	56.243.206.944,52
	Transfer dari KDP Tahun2 Lalu	0,00
	Transfer Masuk	11.102.293.664,05

URAIAN		NILAI
<b>Penambahan (a)</b>		
	Reklasifikasi Masuk	15.837.291.633,26
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	13.664.019.527,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (a)</b>	<b>96.846.811.768,83</b>
<b>Pengurangan (b)</b>		
	Penghapusan	7.124.857.892,86
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	11.102.293.664,05
	Reklasifikasi Keluar	348.240.800,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00

	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (b)</b>	<b>18.575.392.356,92</b>
	<b>Kenaikan/(Penurunan) --2</b>	<b>78.271.419.411,91</b>

No	URAIAN	NILAI
<b>1</b>	<b>Penambahan dari:</b>	
	Belanja Modal	52.685.031.521,31
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	26.683.499.720,42
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	921.161.750,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bangunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	1.963.725.000,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>82.253.417.991,73</b>
<b>2</b>	<b>Pengurangan karena:</b>	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(2.931.965.352,00)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	0,00
	Keluar ke Aset JIJ	(753.709.400,00)
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	(21.406.932.814,00)
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(917.603.481,21)
	<b>Jumlah ---2</b>	<b>(26.010.211.047,21)</b>
<b>3</b>	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>56.243.206.944,52</b>

**Tabel 5.5.74 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	394.153.361.224,78	32.876.440.536,09		427.029.801.760,87
2	Dinas Kesehatan	93.543.033.169,30	13.880.550.047,65	3.071.239.494,32	104.352.343.722,63
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	122.683.479.652,24	20.724.474.607,08	0,00	143.407.954.259,32
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.856.262.617,86	5.254.181.692,27	9.484.831.365,51	28.625.612.944,62
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.735.109.000,00	6.575.316.605,51	0,00	9.310.425.605,51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.289.086.311,88	106.800.000,00	7.200.000,00	1.388.686.311,88
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.170.496.600,00	2.555.183.460,00	1.042.842.900,00	2.682.837.160,00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	3.451.101.163,00	87.524.684,00	0,00	3.538.625.847,00

10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.554.139.406,00	0,00	0,00	4.554.139.406,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	839.764.003,60	445.696.000,00	0,00	1.285.460.003,60
12	Dinas Lingkungan Hidup	8.420.250.475,00	0,00	1.475.418.000,00	6.944.832.475,00
13	Dinas Kependudukan	899.370.000,00	0,00	0,00	899.370.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.310.580.000,00	89.191.000,00	0,00	2.399.771.000,00
15	Dinas Perhubungan	26.279.523.462,01	828.644.668,05	123.494.400,00	26.984.673.730,06
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.056.754.317,76	116.802.400,00	17.802.400,00	1.155.754.317,76
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.826.415.845,83	0,00	0,00	4.826.415.845,83
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.431.180.000,00	0,00	0,00	3.431.180.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.726.621.403,87	5.893.431.512,88	1.553.159.898,54	27.066.893.018,21
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.331.692.362,36	199.178.000,00	0,00	4.530.870.362,36
21	Dinas Perikanan	5.465.644.810,00	429.020.000,00	46.500.000,00	5.848.164.810,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.928.804.907,00	956.473.600,00	0,00	11.885.278.507,00
23	Dinas Perdagangan	20.379.604.559,46	876.548.275,00	0,00	21.256.152.834,46
24	Sekretariat Daerah	72.652.554.023,49	733.153.000,00	0,00	73.385.707.023,49
25	Sekretariat DPRD	23.065.137.240,00	0,00	0,00	23.065.137.240,00
26	Kecamatan Dumai Barat	5.394.292.544,17	319.698.000,00	0,00	5.713.990.544,17
27	Kecamatan Dumai Timur	6.979.605.779,38	137.336.000,00	0,00	7.116.941.779,38
28	Kecamatan Bukit Kapur	5.702.641.963,61	0,00	0,00	5.702.641.963,61
29	Kecamatan Medang Kampai	3.313.348.540,54	60.000.000,00	0,00	3.373.348.540,54
30	Kecamatan Sungai Sembilan	4.041.226.109,46	429.516.300,00	0,00	4.470.742.409,46
31	Kecamatan Dumai Kota	3.693.281.331,17	0,00	0,00	3.693.281.331,17
32	Kecamatan Dumai Selatan	7.680.232.616,08	198.970.000,00	0,00	7.879.202.616,08
33	Inspektorat	5.269.479.327,07	399.543.500,00	199.744.000,00	5.469.278.827,07
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.683.731.972,26	0,00	0,00	7.683.731.972,26
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.265.474.039,60	493.468.000,00	0,00	6.758.942.039,60
35B	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	5.572.136.400,00	1.553.159.898,54	1.553.159.898,54	5.572.136.400,00
36	Badan Pendapatan Daerah	6.365.580.891,18	626.509.981,76	0,00	6.992.090.872,94
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.664.747.600,00	0,00	0,00	4.664.747.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>936.675.745.669,98</b>	<b>96.846.811.768,81</b>	<b>18.575.392.356,91</b>	<b>1.014.947.165.081,88</b>

Di dalam Aset Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp1.014.947.165.081,88 terdapat 32 item Gedung Bangunan yang berada diatas Tanah Pinjam Pakai. Daftar Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 yang terdapat dalam Lampiran 17.

4) **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>2.390.039.096.680,91</b>	<b>2.331.528.624.882,91</b>	<b>58.510.471.798,00</b>	<b>2,51</b>

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp2.390.039.096.680,91, mengalami kenaikan senilai Rp58.510.471.798,00 atau sebesar 2,51% dari tahun 2020 senilai Rp2.331.528.624.882,91. Peningkatan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5.75 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2.943.657.210,93	1.000.610.875,88	1.943.046.335,05	194,19
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.234.190.695.151,71	2.200.221.768.374,76	33.968.926.776,95	1,54
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22.341.413.500,00	93.890.127.550,00	(71.548.714.050,00)	(76,20)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364.787.000,00	168.740.000,00	196.047.000,00	116,18
5	Dinas Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.910.000,00	869.910.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.548.123.000,00	6.548.123.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	79.468.485.068,78	6.410.485.267,78	73.057.999.801,00	1.139,66
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.451.167.145,89	5.153.561.645,89	297.605.500,00	5,77
12	Dinas Perikanan	1.878.389.186,00	1.658.822.186,00	219.567.000,00	13,24
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.013.352.627,00	3.021.653.192,00	1.991.699.435,00	65,91
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,60	122.152.598,60	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	5.540.271.000,00	0,00	0,00
16	Kecamatan Dumai Barat	3.919.772.272,00	667.902.272,00	3.251.870.000,00	486,88
17	Kecamatan Dumai Timur	2.615.530.000,00	212.520.000,00	2.403.010.000,00	1.130,72
18	Kecamatan Bukit Kapur	5.181.176.650,00	786.176.650,00	4.395.000.000,00	559,03
19	Kecamatan Medang Kampai	2.923.684.000,00	658.884.000,00	2.264.800.000,00	343,73
20	Kecamatan Sungai Sembilan	3.259.250.500,00	786.250.500,00	2.473.000.000,00	314,53

21	Kecamatan Dumai Kota	216.000.000,00	0,00	216.000.000,00	100,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	3.538.166.770,00	469.806.770,00	3.068.360.000,00	653,11
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.122.546.000,00	3.010.036.000,00	112.510.000,00	3,74
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	291.433.000,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	199.744.000,00		199.744.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.390.039.096.680,91</b>	<b>2.331.528.624.882,91</b>	<b>58.510.471.798,00</b>	<b>2,51</b>

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
<b>Penambahan (a)</b>	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	58.202.107.798,00
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	71.748.381.050,00
Reklasifikasi Masuk	199.744.000,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	112.510.000,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
<b>Jumlah (a)</b>	<b>130.262.742.848,00</b>

<b>Pengurangan (b)</b>	
Penghapusan	3.890.000,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	71.748.381.050,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
<b>Jumlah (b)</b>	<b>71.752.271.050,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) --2</b>	<b>58.510.471.798,00</b>

No	URAIAN	NILAI
<b>1</b>	<b>Penambahan dari:</b>	
	Belanja Modal	56.397.085.845,08
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	4.372.727.186,05
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	299.136.000,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	753.709.400,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>61.822.658.431,13</b>
<b>2</b>	<b>Pengurangan karena:</b>	
	Keluar ke Aset Tanah	0,00

	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(1.458.175.633,13)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	(1.963.725.000,00)
	Keluar ke Aset JIJ	0,00
	Keluar ke Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke Aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(198.650.000,00)
	<b>Jumlah ---2</b>	<b>(3.620.550.633,13)</b>
<b>3</b>	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>58.202.107.798,00</b>

**Tabel 5.5.76 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1.000.610.875,88	1.943.046.335,05	0,00	2.943.657.210,93
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.200.221.768.374,76	33.968.926.776,95	0,00	2.234.190.695.151,71
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	93.890.127.550,00	199.667.000,00	71.748.381.050,00	22.341.413.500,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	168.740.000,00	199.937.000,00	3.890.000,00	364.787.000,00
5	Dinas Sosial	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	869.910.000,00	0,00	0,00	869.910.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.548.123.000,00	0,00	0,00	6.548.123.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	6.410.485.267,78	73.057.999.801,00	0,00	79.468.485.068,78
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.890.000,00	0,00	0,00	14.890.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.153.561.645,89	297.605.500,00	0,00	5.451.167.145,89
12	Dinas Perikanan	1.658.822.186,00	219.567.000,00	0,00	1.878.389.186,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.021.653.192,00	1.991.699.435,00	0,00	5.013.352.627,00
14	Dinas Perdagangan	122.152.598,61	0,00	0,00	122.152.598,61
15	Sekretariat Daerah	5.540.271.000,00	0,00	0,00	5.540.271.000,00
16	Kecamatan Dumai Barat	667.902.272,00	3.251.870.000,00	0,00	3.919.772.272,00
17	Kecamatan Dumai Timur	212.520.000,00	2.403.010.000,00	0,00	2.615.530.000,00
18	Kecamatan Bukit Kapur	786.176.650,00	4.395.000.000,00	0,00	5.181.176.650,00
19	Kecamatan Medang Kampai	658.884.000,00	2.264.800.000,00	0,00	2.923.684.000,00

20	Kecamatan Sungai Sembilan	786.250.500,00	2.473.000.000,00	0,00	3.259.250.500,00
21	Kecamatan Dumai Kota	0,00	216.000.000,00	0,00	216.000.000,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	469.806.770,00	3.068.360.000,00	0,00	3.538.166.770,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.010.036.000,00	112.510.000,00	0,00	3.122.546.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	291.433.000,00	0,00	0,00	291.433.000,00
26	Inspektorat	0,00	199.744.000,00	0,00	199.744.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.331.528.624.882,91</b>	<b>130.262.742.848,00</b>	<b>71.752.271.050,00</b>	<b>2.390.039.096.680,91</b>

Penambahan mutasi aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang berasal dari hibah merupakan Fasos/Fasum Perum Althaf Regency berupa jalan perumahan Althaf Regency (PT. Dua Bintang Bangun Karya) berdasarkan BAST No.11/BAST/BPKAD/2021 dan No.8.01-DBBK/10/2021 dengan nilai Rp112.510.000,00.

#### 5) Aset Tetap Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>56.223.639.963,74</b>	<b>50.807.956.455,74</b>	<b>5.415.683.508,00</b>	<b>10,66</b>

Aset tetap lainnya Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp56.223.639.963,74, mengalami kenaikan senilai Rp5.415.683.508,00 atau sebesar 10,66% dari tahun 2020 senilai Rp50.807.956.455,74, kenaikan Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5.77 Rincian Aset Tetap lainnya per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.223.464.560,09	42.039.109.752,09	5.184.354.808,00	12,33
2	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	70.915.000,00	69.365.000,00	1.550.000,00	2,23
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	12.527.500,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	250.018.000,00	250.018.000,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.915.000,00	0,00	13.915.000,00	100,00
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	3.579.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.120.000,00	34.120.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.084.216.000,00	1.153.791.000,00	(69.575.000,00)	(6,03)
12	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	2.768.700,00	0,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	1.298.620.270,00	0,00	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.141.247.633,65	4.027.738.633,65	113.509.000,00	2,82
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.154.901.000,00	1.140.986.000,00	13.915.000,00	1,22
17	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	280.779.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	302.562.600,00	0,00	0,00
19	Kecamatan Dumai Barat	32.752.000,00	12.752.000,00	20.000.000,00	156,84
20	Kecamatan Dumai Timur	39.149.500,00	32.192.000,00	6.957.500,00	21,61
21	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Medang Kampai	54.552.000,00	44.552.000,00	10.000.000,00	22,45
23	Kecamatan Sungai Sembilan	123.651.700,00	9.552.000,00	114.099.700,00	1.194,51
24	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	62.805.000,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Dumai Selatan	6.957.500,00	0,00	6.957.500,00	100,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
27	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.223.639.963,74</b>	<b>50.807.956.455,74</b>	<b>5.415.683.508,00</b>	<b>10,66</b>

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
<b>Penambahan (a)</b>		
	Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	5.415.316.400,00
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0,00
	Transfer Masuk	69.575.000,00
	Reklasifikasi Masuk	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	367.108,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (a)</b>	<b>5.485.258.508,00</b>
<b>Pengurangan (b)</b>		
	Penghapusan	0,00
	Transfer Ke Asetnya	0,00
	Transfer Keluar	69.575.000,00
	Reklasifikasi Keluar	0,00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	0,00
	Hasil Inventarisasi	0,00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomptabel)	0,00
	Koreksi Pencatatan	0,00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
	<b>Jumlah (b)</b>	<b>69.575.000,00</b>

Kenaikan/(Penurunan) --2		5.415.683.508,00
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	6.231.743.208,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>6.231.743.208,00</b>
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(355.089.908,00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	(461.336.900,00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0,00
	Keluar ke Pembayaran Hutang BLUD Tahun 2018	0,00
	<b>Jumlah ---2</b>	<b>(816.426.808,00)</b>
<b>3</b>	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>5.415.316.400,00</b>

Tabel 5.5.78 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.039.109.752,09	5.184.354.808,00	0,00	47.223.464.560,09
2	Dinas Kesehatan	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	69.365.000,00	1.550.000,00	0,00	70.915.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.527.500,00	0,00	0,00	12.527.500,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	250.018.000,00	0,00	0,00	250.018.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	13.915.000,00	0,00	13.915.000,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3.579.000,00	0,00	0,00	3.579.000,00
7	Dinas Sosial	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.120.000,00	0,00	0,00	34.120.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.153.791.000,00	0,00	69.575.000,00	1.084.216.000,00
11	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.768.700,00	0,00	0,00	2.768.700,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.298.620.270,00	0,00	0,00	1.298.620.270,00

14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.027.738.633,65	113.509.000,00	0,00	4.141.247.633,65
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.140.986.000,00	13.915.000,00	0,00	1.154.901.000,00
16	Sekretariat Daerah	280.779.000,00	0,00	0,00	280.779.000,00
17	Sekretariat DPRD	302.562.600,00	0,00	0,00	302.562.600,00
18	Kecamatan Dumai Barat	12.752.000,00	20.000.000,00	0,00	32.752.000,00
19	Kecamatan Dumai Timur	32.192.000,00	6.957.500,00	0,00	39.149.500,00
20	Kecamatan Bukit Kapur	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00
21	Kecamatan Medang Kampai	44.552.000,00	10.000.000,00	0,00	54.552.000,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	9.552.000,00	114.099.700,00	0,00	123.651.700,00
23	Kecamatan Dumai Kota	62.805.000,00	0,00	0,00	62.805.000,00
	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	6.957.500,00	0,00	6.957.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.807.956.455,74</b>	<b>5.485.258.508,00</b>	<b>69.575.000,00</b>	<b>56.223.639.963,74</b>

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>217.661.117.431,33</b>	<b>211.542.081.250,59</b>	<b>6.119.036.180,74</b>	<b>2,89</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan atau belum memiliki nilai manfaat hingga tahun anggaran berakhir. Per 31 Desember 2021, KDP Pemerintah Kota Dumai senilai Rp217.661.117.431,33, mengalami kenaikan senilai Rp6.119.036.180,74 atau sebesar 2,89% jika dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp211.542.081.250,59.

**Tabel 5.5.79 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.336.821.563,33	10.307.148.563,33	29.673.000,00	0,29
2	Dinas Kesehatan	158.207.761,00	348.412.761,00	(190.205.000,00)	(54,59)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19.209.954.807,00	15.282.647.466,00	3.927.307.341,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.130.776.240,00	181.963.471.233,00	2.167.305.007,00	1,19
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	290.679.500,00	290.679.500,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		48.979.000,00	(48.979.000,00)	100,00
7	Dinas Sosial	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00

8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00	288.685.000,00	0,00	100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	543.274.000,00	373.599.000,00	169.675.000,00	100,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	100,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170.394.560,00	406.269.727,26	(235.875.167,26)	(58,06)
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.561.475.000,00	1.261.340.000,00	300.135.000,00	23,79
14	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	147.970.000,00	0,00	0,00
15	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	626.149.000,00	0,00	0,00
16	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>217.661.117.431,33</b>	<b>211.542.081.250,59</b>	<b>6.119.036.180,74</b>	<b>2,89</b>

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 terdapat dalam Lampiran 18. Adapun, penjelasan atas penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
<b>Penambahan (a)</b>	
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	21.956.327.814,00
Transfer dari KDP Tahun-Tahun Lalu	0,00
Transfer Masuk	0,00

URAIAN	NILAI
<b>Penambahan (a)</b>	
Reklasifikasi Masuk	0,00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
<b>Jumlah (a)</b>	<b>21.956.327.814,00</b>
<b>Pengurangan (b)</b>	
Penghapusan	0,00
Transfer Ke Asetnya	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	15.837.291.633,26
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0,00
<b>Jumlah (b)</b>	<b>15.837.291.633,26</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) --2</b>	<b>6.119.036.180,74</b>

No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	0,00
	Belanja Pegawai	0,00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	549.395.000,00
	Masuk dari BM Tanah	0,00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	0,00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	21.406.932.814,00
	Masuk dari BM JIJ	0,00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0,00
	<b>Jumlah ---1</b>	<b>21.956.327.814,00</b>
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0,00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0,00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0,00
	Keluar ke aset JIJ	0,00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0,00
	Keluar ke aset KDP	0,00
	Keluar ke Aset Lainnya	0,00
	Keluar ke Ektra Comptabel	0,00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	0,00
	<b>Jumlah ---2</b>	
3	<b>Selisih lebih/(kurang)</b>	<b>21.956.327.814,00</b>

**Tabel 5.5.80 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Nama OPD	Tahun 2020	Mutasi		Tahun 2021
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.307.148.563,34	29.673.000,00	0,00	10.336.821.563,34
2	Dinas Kesehatan	348.412.761,00	-	190.205.000,00	158.207.761,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	15.282.647.466,00	19.209.954.807,00	15.282.647.466,00	19.209.954.807,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.963.471.232,99	2.167.305.007,00	0,00	184.130.776.239,99
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	290.679.500,00	0,00	0,00	290.679.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.979.000,00	0,00	48.979.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	288.685.000,00	0,00	0,00	288.685.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
10	Dinas Perhubungan	373.599.000,00	199.375.000,00	29.700.000,00	543.274.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	406.269.727,26	49.885.000,00	285.760.167,26	170.394.560,00

13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.261.340.000,00	300.135.000,00	0,00	1.561.475.000,00
14	Sekretariat Daerah	147.970.000,00	0,00	0,00	147.970.000,00
15	Sekretariat DPRD	626.149.000,00	0,00	0,00	626.149.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	49.900.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>211.542.081.250,59</b>	<b>21.956.327.814,00</b>	<b>15.837.291.633,26</b>	<b>217.661.117.431,33</b>

Perbandingan Aset Tetap Menurut Neraca dan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2020 terdapat pada Lampiran 19.

7) <b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Peningkatan/(Penurunan)</b>	
			<b>Rp</b>	<b>%</b>
	<b>(2.437.848.269.174,51)</b>	<b>(2.263.702.156.187,90)</b>	<b>(174.146.112.986,61)</b>	<b>7,69</b>

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan dan tercatat sebagai lawan Akun Aset Tetap (Contra Account). Hingga 31 Desember 2021 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap senilai Rp2.437.848.269.174,51, mengalami kenaikan senilai Rp174.146.112.986,61 atau sebesar 7,69% jika dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp2.263.702.156.187,90, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2021	(2.263.702.156.187,90)
Beban Penyusutan Per 31 Desember 2021	(180.968.639.535,86)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	6.822.526.549,28
<b>Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020</b>	<b>(2.437.848.269.174,51)</b>

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.437.848.269.174,51 terdiri dari akumulasi penyusutan per 1 Januari 2021 senilai Rp2.263.702.156.187,90, Beban Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp180.968.639.535,86 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp6.822.526.549,28.

**Tabel 5.5.81 Rincian Akumulasi Penyusutan**

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(157.611.797.937,01)	(134.681.349.008,68)	(22.930.448.928,32)	17,03
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	(245.753.540.666,13)	(48.830.131.934,94)	(196.923.408.731,19)	403,28
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		(157.905.030.707,84)	157.905.030.707,84	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.668.383.164.502,85)	(1.582.995.334.539,70)	(85.387.829.963,15)	5,39
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(9.543.520.561,35)	(24.616.557.090,83)	15.073.036.529,48	(61,23)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.378.579.606,40)	(3.355.181.291,37)	(23.398.315,02)	0,70
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12.729.733.455,72)	(10.495.062.873,72)	(2.234.670.582,00)	21,29
8	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	(1.978.553.312,57)	(2.080.234.462,74)	101.681.150,18	(4,89)
9	Dinas Sosial	(3.123.098.135,38)	(3.397.955.287,23)	274.857.151,85	(8,09)

10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.518.599.269,48)	(5.850.100.748,97)	(668.498.520,51)	11,43
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.188.109.562,50)	(2.129.709.836,85)	(58.399.725,65)	2,74
12	Dinas Lingkungan Hidup	(22.377.813.777,72)	(19.953.903.797,75)	(2.423.909.979,96)	12,15
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.043.640.520,93)	(4.934.676.471,81)	(108.964.049,11)	2,21
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.231.081.207,80)	(2.712.603.662,29)	(518.477.545,51)	19,11
15	Dinas Perhubungan	(69.237.771.765,64)	(45.906.451.817,85)	(23.331.319.947,79)	50,82
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.350.271.530,98)	(6.388.345.174,45)	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.360.841.246,27)	(4.284.837.303,23)	(76.003.943,04)	1,77
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.284.067.019,50)	(6.208.075.321,58)	(75.991.697,92)	1,22
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(7.363.413.700,86)	(6.842.180.287,60)	(521.233.413,25)	7,62
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.142.393.679,99)	(3.923.818.620,39)	(218.575.059,60)	5,57
21	Dinas Perikanan	(7.377.170.280,31)	(7.154.548.341,83)	(222.621.938,48)	3,11
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(15.084.072.236,86)	(14.233.094.987,06)	(850.977.249,80)	5,98
23	Dinas Perdagangan	(10.432.645.589,35)	(9.454.777.463,11)	(977.868.126,24)	10,34

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
24	Sekretariat Daerah	(76.708.948.864,20)	(75.463.165.945,37)	(1.245.782.918,83)	1,65
25	Sekretariat DPRD	(17.768.374.071,67)	(18.236.166.663,33)	467.792.591,66	(2,57)
26	Kecamatan Dumai Barat	(3.025.701.622,11)	(2.700.898.426,67)	(324.803.195,44)	12,03
27	Kecamatan Dumai Timur	(4.213.981.121,77)	(3.809.248.270,39)	(404.732.851,38)	10,63
28	Kecamatan Bukit Kapur	(4.259.885.676,83)	(3.714.148.143,40)	(545.737.533,43)	14,69
29	Kecamatan Medang Kampai	(4.199.270.361,88)	(3.755.665.600,96)	(443.604.760,92)	11,81
30	Kecamatan Sungai Sembilan	(3.371.042.984,75)	(2.690.621.895,52)	(680.421.089,23)	25,29
31	Kecamatan Dumai Kota	(2.513.975.204,66)	(2.189.553.920,88)	(324.421.283,78)	14,82
32	Kecamatan Dumai Selatan	(3.376.241.162,65)	(2.653.590.581,25)	(722.650.581,40)	27,23
33	Inspektorat	(4.792.794.784,63)	(4.259.217.323,04)	(533.577.461,59)	12,53
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(8.129.224.051,73)	(8.849.055.152,11)	719.831.100,39	(8,13)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(13.439.875.988,33)	(9.105.024.167,04)	(4.334.851.821,29)	47,61
36	Badan Pendapatan Daerah	(13.150.970.979,10)	(12.656.554.450,72)	(494.416.528,38)	3,91

37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.404.102.734,62)	(5.285.284.615,36)	(118.818.119,26)	2,25
<b>Jumlah</b>		<b>(2.437.848.269.174,51)</b>	<b>(2.263.702.156.187,90)</b>	<b>(174.146.112.986,61)</b>	<b>7,69</b>

d. **Aset Lainnya**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>20.668.352.583,88</b>	<b>15.668.726.130,54</b>	<b>4.999.626.453,34</b>	<b>31,91</b>

Aset Lainnya Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp20.668.352.583,88, mengalami kenaikan senilai Rp4.999.626.453,34 atau sebesar 31,91% dari tahun 2020 senilai Rp15.668.726.130,54. Aset Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Rincian Aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.5.82 Rincian Aset Lainnya**

No	Keterangan	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	846.288.500,00	846.288.500,00	0,00	0,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	16.325.594.848,86	8.683.960.421,47	7.641.634.427,39	88,00
4	Aset Tidak Berwujud	6.964.930.368,09	6.435.043.468,09	529.886.900,00	8,23
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.871.337.443,09)	(5.392.197.955,60)	(479.139.487,49)	8,89
6	Aset Lain-lain	16.550.872.161,10	20.784.237.194,01	(4.233.365.032,91)	(20,37)
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(14.217.295.851,08)	(15.757.905.497,43)	1.540.609.646,35	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.668.352.583,88</b>	<b>15.668.726.130,54</b>	<b>4.999.626.453,34</b>	<b>31,91</b>

1) **Tagihan Penjualan Angsuran**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>69.300.000,00</b>	<b>69.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tagihan Penjualan Angsuran Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp69.300.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 Tagihan Penjualan Angsuran tidak mengalami perubahan. Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp69.300.000,00 tersebut merupakan tagihan penjualan Mobil Nissan Terrano Grandroast XTR BM 1957 RS.

2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>846.288.500,00</b>	<b>846.288.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp846.288.500,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp846.288.500,00.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai Tahun 2020 senilai Rp846.288.500,00 merupakan mutasi kurang pada tahun 2019 dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2018 senilai Rp3.593.744.000,00 merupakan temuan dari Pemeriksaan BPK. Atas temuan tersebut telah ada Petikan Putusan Pengadilan Pekanbaru tanggal 12 Februari 2018 an. I.S. dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTL) BPK Perwakilan Provinsi Riau per 30 Juni 2019 yang menyatakan bahwa uang pengganti senilai Rp3.593.744.000,00 tidak dapat ditindaklanjuti sehingga harus dikeluarkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai.

3) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>16.325.594.848,86</b>	<b>8.683.960.421,47</b>	<b>7.641.634.427,39</b>	<b>88,00</b>

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp16.325.594.848,86, mengalami kenaikan senilai Rp7.641.634.427,39 atau sebesar 88,00% dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp8.683.960.421,47 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.83 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

No	Nama Mitra	Saldo 2021	Saldo 2020
1	PT. Panca Belia Primakarsa	1.218.240.000,00	1.218.240.000,00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	7.294.996.999,79	7.465.720.421,47
3	PT. Satwa Sarana Karunia	7.812.357.849,07	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.325.594.848,86</b>	<b>8.683.960.421,47</b>

**a. PT Panca Belia Primakarsa**

Sebidang tanah seluas 13.645,75 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp1.218.240.000,00 di Kelurahan Rimba Sekampung yang dikelola oleh PT Panca Belia Primakarsa dengan perubahan perjanjian terakhir Nomor 500/EK/2002/314 yang di atasnya didirikan Pasar dan Komplek Pertokoan Pasar Pulau Payung. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 20 tahun, terhitung sejak tahun 2002 hingga 2022. Dalam kontrak perjanjian menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi berupa 14 Unit Los Ikan, 11 Unit Los Daging dan 60 Unit Los Sayur serta 1 unit kantor UPTD (Lantai III) dengan total senilai Rp1.218.240.000,00 dan setelah perjanjian berakhir Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan bangunan beserta isinya.

**b. PT. Pelabuhan Dumai Berseri**

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri Nomor 13/DISHUB/2018 dan Nomor 003/PT PDB-PEMKO DUMAI/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, objek perjanjian KSP ini adalah barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

**Tabel 5.5.84 Rincian PT. Pelabuhan Dumai Berseri**

Keterangan	2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			RP	%
Harga Perolehan Aset Kemitraan Pihak Ketiga	8.974.231.084,08	8.974.231.084,08	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	(1.679.234.084,29)	(1.508.510.662,61)	(170.723.421,68)	11,32
Nilai Buku	<b>7.294.996.999,79</b>	<b>7.465.720.421,47</b>	<b>(170.723.421,68)</b>	<b>(2,29)</b>

**c. PT. Satwa Sarana Karunia**

Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Satwa Sarana Karunia berdasarkan Akta Notaris Parilliyani, S.H, M.Kn Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2021. Objek perjanjian BGS ini adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola (PPKD) Kota Dumai. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

4) **Aset Tidak Berwujud**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>6.964.930.368,09</b>	<b>6.435.043.468,09</b>	<b>529.886.900,00</b>	<b>8,23</b>

Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah senilai Rp6.964.930.368,09, mengalami kenaikan senilai Rp529.886.900,00 atau sebesar 8,23% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp6.435.043.468,09, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.85 Rincian Aset Tidak Berwujud**

No	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.710.140.939,37	3.707.140.939,37	3.000.000,00	0,08
2	Dinas Kesehatan	433.920.000,00	221.600.000,00	212.320.000,00	95,81
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Sosial	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	982.522.000,00	728.477.000,00	254.045.000,00	34,87
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	590.383.065,72	538.658.065,72	51.725.000,00	9,60
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.450.000,00	104.450.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	181.506.050,00	181.506.050,00	0,00	0,00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.796.900,00	-	8.796.900,00	100,00
11	Dinas Perikanan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00

No	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
12	Sekretariat Daerah	77.985.000,00	77.985.000,00	0,00	0,00
13	Inspektorat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	402.507.413,00	402.507.413,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235.309.000,00	235.309.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.964.930.368,09</b>	<b>6.435.043.468,09</b>	<b>529.886.900,00</b>	<b>8,23</b>

5) **Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(5.871.337.443,09)	(5.392.197.955,60)	(479.139.487,49)	8,89

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai minus Rp5.871.337.443,09 mengalami kenaikan senilai Rp479.139.487,49 atau sebesar 8,89% dari Tahun 2020 yaitu senilai minus Rp5.392.197.955,60 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.86 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

No	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.566.596.070,62)	(3.317.365.460,62)	(249.230.610,00)	7,51
2	Dinas Kesehatan	(249.902.500,00)	(221.600.000,00)	(28.302.500,00)	12,77
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.937.500,00)	(6.562.500,00)	(4.375.000,00)	66,67
4	Dinas Sosial	(44.950.000,00)	(44.950.000,00)	0,00	0,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	(26.235.000,00)	(8745000,00)	(17.490.000,00)	200,00
6	Dinas Perhubungan	(412.519.125,00)	(316.494.500,00)	(96.024.625,00)	30,34
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	(545.123.690,72)	(538.658.065,72)	(6.465.625,00)	1,20
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(85.787.500,00)	(67.125.000,00)	(18.662.500,00)	27,80
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(113.441.281,25)	(68.064.766,25)	(45.376.515,00)	66,67
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1.099.612,50)	0,00	(1.099.612,50)	100,00
11	Dinas Perikanan	(46.000.000,00)	(46.000.000,00)	0,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	(77.985.000,00)	(77.985.000,00)	0,00	0,00
13	Inspektorat	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	0,00	0,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00	0,00
15	Badan Pendapatan Daerah	(396.451.163,01)	(384.338.663,01)	(12.112.500,00)	3,15
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(235.309.000,00)	(235.309.000,00)	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>(5.871.337.443,09)</b>	<b>(5.392.197.955,60)</b>	<b>(479.139.487,49)</b>	<b>8,89</b>

6) **Aset Lain-Lain**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
16.550.872.161,10	20.784.237.194,01	(4.233.365.032,91)	(20,37)

Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp16.550.872.161,10, mengalami penurunan senilai Rp4.233.365.032,91 atau sebesar 20,37% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp20.784.237.194,01 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.87 Rincian Aset Lain-Lain**

No	Jenis Aset Lain-lain	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Rusak Berat	15.796.299.161,10	17.109.474.194,01	(1.313.175.032,91)	(7,68)

2	Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	754.573.000,00	3.674.763.000,00	(2.920.190.000,00)	(79,47)
<b>Jumlah</b>		<b>16.550.872.161,10</b>	<b>20.784.237.194,01</b>	<b>(4.233.365.032,91)</b>	<b>(20,37)</b>

#### a. Aset Rusak Berat

Jumlah aset rusak berat per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp15.796.299.161,10, mengalami penurunan senilai Rp1.313.175.032,91 atau sebesar 7,68% dari tahun 2020 senilai Rp17.109.474.194,01 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

**Tabel 5.5.88 Rincian Aset Rusak Berat**

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.617.780,00	116.617.780,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.317.273.243,19	5.270.332.339,01	(953.059.095,82)	(18,08)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.550.000,00	776.550.000,00	(80.000.000,00)	(10,30)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	424.194.000,00	1.713.525.000,00	(1.289.331.000,00)	(75,24)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	207.671.546,00	85.000.000,00	122.671.546,00	144,32
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	10.898.500,00	10.898.500,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	124.705.000,00	387.291.000,00	(262.586.000,00)	(67,80)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,00	1,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	2.428.327.963,91	530.623.900,00	1.897.704.063,91	357,64
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.102.000,00	25.102.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	36.292.856,00	36.292.856,00	0,00	0,00

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	355.380.591,00	261.849.592,00	93.530.999,00	35,72
15	Dinas Perikanan	1.029.122.750,00	1.029.122.750,00	0,00	0,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	388.750.000,00	388.750.000,00	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	87.500.000,00	107.671.000,00	(20.171.000,00)	(18,73)
18	Sekretariat DPRD	2.816.161.050,00	3.518.381.050,00	(702.220.000,00)	(19,96)
19	Kecamatan Dumai Barat	195.462.821,00	202.462.821,00	(7.000.000,00)	(3,46)

20	Kecamatan Bukit Kapur	59.479.440,00	59.479.440,00	0,00	0,00
21	Kecamatan Medang Kampai	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	400.085.960,00	507.800.506,00	(107.714.546,00)	(21,21)
23	Kecamatan Dumai Kota	27.094.000,00	27.094.000,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	107.277.944,00	107.277.944,00	0,00	0,00
25	Inspektorat	153.246.267,00	153.246.267,00	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475.394.050,00	475.394.050,00	0,00	0,00
27	Badan Pendapatan Daerah	6.800.000,00	11.800.000,00	(5.000.000,00)	(42,37)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.195.011.398,00	1.195.011.398,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.796.299.161,10</b>	<b>17.109.474.194,01</b>	<b>(1.313.175.032,91)</b>	<b>(7,68)</b>

**b. Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga**

Jumlah Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp754.573.000,00, mengalami penurunan senilai R2.920.190.000,00 atau sebesar 79,47% dari tahun 2020 senilai Rp3.674.763.000,00 yang merupakan Aset Dinas PUPR yang akan diserahkan ke masyarakat.

Untuk rincian mutasi Aset yang diserahkan kepada masyarakat lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 31.

**7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>(14.217.295.851,08)</b>	<b>(15.757.905.497,43)</b>	<b>1.540.609.646,35</b>	<b>(9,78)</b>

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per Tanggal 31 Desember 2021 senilai minus Rp14.217.295.851,08 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

**Tabel 5.5.89 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**

No	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(116.617.780,00)	(116.617.780,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(4.317.093.833,19)	(4.595.486.118,97)	278.392.285,78	(6,06)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(910.013.530,00)	(1.650.206.810,00)	740.193.280,00	(44,85)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(424.194.000,00)	(847.961.812,50)	423.767.812,50	(49,97)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(203.423.546,00)	(85.000.000,00)	(118.423.546,00)	139,32

6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	(10.898.500,00)	(10.898.500,00)	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	(124.705.000,00)	(387.291.000,00)	262.586.000,00	(67,80)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(83.000.000,00)	(83.000.000,00)	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1,00)	(1,00)	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	(1.290.618.731,98)	(524.195.328,57)	(766.423.403,41)	146,21
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(25.102.000,00)	(25.102.000,00)	0,00	0,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(36.292.856,00)	(36.292.856,00)	0,00	0,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(355.380.591,00)	(261.849.592,00)	(93.530.999,00)	35,72
15	Dinas Perikanan	(538.139.670,00)	(520.734.710,00)	(17.404.960,00)	3,34
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(328.333.333,3367)	(324.166.666,68)	(4.166.666,66)	1,29
17	Sekretariat Daerah	(87.500.000,00)	(107.671.000,00)	20.171.000,00	(18,73)
18	Sekretariat DPRD	(2.738.227.550,00)	(3.438.196.550,00)	699.969.000,00	(20,36)
19	Kecamatan Dumai Barat	(176.314.441,00)	(182.776.881,00)	6.462.440,00	(3,54)
20	Kecamatan Bukit Kapur	(59.479.440,00)	(59.479.440,00)	0,00	0,00
21	Kecamatan Medang Kampai	(27.700.000,00)	(27.700.000,00)	0,00	0,00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	(398.237.388,58)	(502.254.791,71)	104.017.403,14	(20,71)
23	Kecamatan Dumai Kota	(27.094.000,00)	(27.094.000,00)	0,00	0,00
24	Kecamatan Dumai Selatan	(107.277.944,00)	(107.277.944,00)	0,00	0,00
25	Inspektorat	(153.246.267,00)	(153.246.267,00)	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(475.394.050,00)	(475.394.050,00)	0,00	0,00
27	Badan Pendapatan Daerah	(6.800.000,00)	(11.800.000,00)	5.000.000,00	(42,37)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.195.011.398,00)	(1.195.011.398,00)	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(14.217.295.851,08)</b>	<b>(15.757.905.497,43)</b>	<b>1.540.609.646,35</b>	<b>(9,78)</b>

## 2. Kewajiban

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>115.127.076.949,31</b>	<b>48.191.615.328,66</b>	<b>66.935.461.620,65</b>	<b>138,89</b>

Kewajiban Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp115.127.076.949,31 atau mengalami kenaikan senilai Rp66.935.461.620,65 atau sebesar 138,89% dari Tahun 2020 senilai Rp48.191.615.328,66. Kewajiban tersebut seluruhnya berupa Kewajiban Jangka Pendek.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%

115.127.076.949,31	48.191.615.328,66	66.935.461.620,65	138,89
--------------------	-------------------	-------------------	--------

Kewajiban Jangka Pendek tersebut merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.5.90 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

Keterangan	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.783.762,00	11.944.763,33	(10.161.001,33)	(85,07)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	168.578.067,00	0,00	168.578.067,00	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.049.253.734,31	11.459.946.072,33	(10.410.692.338,03)	(90,84)
Utang Beban	110.527.089.088,00	35.097.760.585,00	75.429.328.503,00	214,91
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.380.372.298,00	1.621.963.908,00	1.758.408.390,00	108,41
<b>Jumlah</b>	<b>115.127.076.949,31</b>	<b>48.191.615.328,66</b>	<b>66.935.461.620,65</b>	<b>138,89</b>

**1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.783.762,00	11.944.763,33	(10.161.001,33)	(85,07)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp1.783.762,00 merupakan Pajak BOS yang belum disetor per 31 Desember 2021, namun Pajak BOS tersebut telah disetor pada bulan Januari 2022.

**2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
168.578.067,00	0,00	168.578.067,00	100,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp168.578.067,00 merupakan Saldo Kas pada Rekening penampungan Jasa Bongkar Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Dumai, sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 834 Tahun 2021 tentang Rekening Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai.

**3) Pendapatan Diterima Dimuka**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
1.049.253.734,31	11.459.946.072,33	(10.410.692.338,03)	(90,84)

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian Barang/Jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.049.253.734,31, mengalami penurunan senilai Rp10.410.692.338,03 atau sebesar 90,84% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp11.459.946.072,33.

**Tabel 5.5.91 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

Keterangan	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%

Sewa lahan atau tempat	536.808.400,00	310.591.472,33	<b>226.216.927,67</b>	<b>72,83</b>
Klaim Covid dari Kementerian Kesehatan	0,00	11.149.354.600,00	<b>(11.149.354.600,00)</b>	<b>(100,00)</b>
Pendapatan Pajak Reklame Diterima Dimuka	512.445.334,31	0,00	<b>512.445.334,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.049.253.734,31</b>	<b>11.459.946.072,33</b>	<b>(10.410.692.338,03)</b>	<b>(90,84)</b>

Untuk rincian Pendapatan Diterima Dimuka lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28.

#### 4) Utang Beban

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>110.527.089.088,00</b>	<b>35.097.760.585,00</b>	<b>75.429.328.503,00</b>	<b>214,91</b>

Utang Beban pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp110.527.089.088,00, mengalami kenaikan senilai Rp75.429.328.503,00 atau sebesar 214,91% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp35.097.760.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.92 Rincian Utang Beban**

Keterangan	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Beban Barang dan Jasa	1.203.134.981,00	1.262.624.396,00	(59.489.415,00)	(0,05)
Utang Beban Lain-lain	109.323.954.107,00	33.835.136.189,00	75.488.817.918,00	2,23
<b>JUMLAH</b>	<b>110.527.089.088,00</b>	<b>35.097.760.585,00</b>	<b>75.429.328.503,00</b>	<b>2,15</b>

##### a. Rincian Utang Beban Barang dan Jasa

Utang Beban barang dan jasa merupakan Kewajiban Akrual yang muncul akibat dari penggunaan atas Jasa Listrik, Telpon dan Air yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun.

**Tabel 5.5.93 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per OPD Tahun 2021 dan 2020**

No	Utang Beban Barang dan Jasa	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	22.754.881,00	13.115.469,00	9.639.412,00	73,50
2	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	6.141.776,00	(6.141.776,00)	(100,00)
3	BLUD Puskesmas Dumai Barat	0,00	24.547.900,00	(24.547.900,00)	(100,00)
4	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	27.028.712,00	(27.028.712,00)	(100,00)
No	Utang Beban Barang dan Jasa	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
5	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	31.331.609,00	(31.331.609,00)	(100,00)
6	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	11.398.378,00	(11.398.378,00)	(100,00)
7	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	6.425.800,00	(6.425.800,00)	(100,00)
8	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	1.660.000,00	(1.660.000,00)	(100,00)
9	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	0,00	8.606.748,00	(8.606.748,00)	(100,00)
10	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	19.080.900,00	(19.080.900,00)	(100,00)
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	23.975.819,00	(23.975.819,00)	(100,00)

12	BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	0,00	70.960.000,00	(70.960.000,00)	100,00
13	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	247.127.850,00	0,00	247.127.850,00	100,00
14	Dinas Perhubungan	812.318.693,00	727.430.004,00	84.888.689,00	11,67
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.600.000,00	89.879.512,00	(88.279.512,00)	(98,22)
16	Satuan Polisi Pamong Praja	6.182.329,00	5.512.102,00	670.227,00	12,16
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.699.351,00	(2.699.351,00)	(100,00)
18	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	11.461.988,00	(11.461.988,00)	(100,00)
19	Dinas Sosial	8.188.822,00	6.854.446,00	1.334.376,00	19,47
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.013.973,00	8.052.618,00	(38.645,00)	100,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.914.639,00	7.078.941,00	(164.302,00)	(2,32)
22	Dinas Lingkungan Hidup	6.095.974,00	10.347.922,00	(4.251.948,00)	(41,09)
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.545.844,00	14.430.471,00	(5.884.627,00)	(40,78)
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.662.390,00	6.666.762,00	(2.004.372,00)	(30,07)
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.163.712,00	9.527.350,00	3.636.362,00	38,17
26	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.689.670,00	4.966.486,00	723.184,00	14,56
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.016.396,00	11.162.174,00	(3.145.778,00)	(28,18)
28	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	10.554.075,00	(10.554.075,00)	(100,00)
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.785.864,00	6.108.742,00	677.122,00	11,08
30	Dinas Perikanan	12.409.990,00	10.076.618,00	2.333.372,00	23,16
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	6.732.382,00	(6.732.382,00)	(100,00)
No	Utang Beban Barang dan Jasa	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
32	Sekretariat DPRD	0,00	26.081.179,00	(26.081.179,00)	(100,00)
33	Kecamatan Dumai Barat	4.976.840,00	6.200.767,00	(1.223.927,00)	(19,74)
34	Kecamatan Dumai Timur	5.165.775,00	3.137.999,00	2.027.776,00	64,62
35	Kecamatan Bukit Kapur	4.691.515,00	4.834.501,00	(142.986,00)	(2,96)
36	Kecamatan Medang Kumpai	3.038.494,00	2.511.217,00	527.277,00	21,00
37	Kecamatan Dumai Selatan	6.791.330,00	6.344.254,00	447.076,00	7,05
38	Bapenda	0,00	19.699.424,00	(19.699.424,00)	100,00

	<b>Jumlah</b>	<b>1.203.134.981,00</b>	<b>1.262.624.396,00</b>	<b>(59.489.415,00)</b>	<b>(4,71)</b>
--	---------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------

**b. Rincian Utang Beban Lain-lain**

Utang Beban Lain - lain merupakan Utang yang timbul atas Belanja Barang / Jasa serta Belanja Insentif BLUD RSUD, BLUD PUSKESMAS dan Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Terminal.

**Tabel 5.5.94 Rincian Utang Beban Lain-Lain**

No	Utang Beban Lain-lain	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	BLUD PUSKESMAS	2.012.960.440,00	0,00	2.012.960.440,00	100,00
2	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	107.265.461.500,00	33.789.604.022,00	73.475.857.478,00	217,45
3	Dinas Perhubungan	45.532.167,00	45.532.167,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>109.323.954.107,00</b>	<b>33.835.136.189,00</b>	<b>75.488.817.918,00</b>	<b>223,11</b>

Adapun atas pengelompokan berdasarkan jenis Utang Beban Lain - lain BLUD PUSKESMAS dan BLUD RSUD diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.5.95 Utang Beban lain - lain BLUD PUSKESMAS Kota Dumai Tahun 2021**

No	Utang Beban	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	
				RP	%
1	Utang Jasa Pelayanan BLUD PUSKESMAS	73.662.850,00	0,00	73.662.850,00	100,00
2	Utang Listrik	62.527.434,00	0,00	62.527.434,00	100,00
3	Utang Telpon	467.989,00	0,00	467.989,00	100,00
4	Utang Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-	1.876.302.167,00	0,00	1.876.302.167,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>2.012.960.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.960.440,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.5.96 Utang Beban BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2021**

No	Utang Beban	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	
				RP	%
1	Utang Kegiatan	13.748.577.257,00	6.275.101.923,00	7.473.475.334,00	119,10
2	Utang Honorarium	3.243.695.000,00	2.097.955.000,00	1.145.740.000,00	54,61
3	Utang Obat	31.546.175.344,00	8.709.046.425,00	22.837.128.919,00	262,22
4	Utang Jasa	52.461.674.394,00	16.448.282.754,00	36.013.391.640,00	218,95
5	Utang APBD	6.265.339.505,00	259.217.920,00	6.006.121.585,00	2.317,02
	<b>Total</b>	<b>107.265.461.500,00</b>	<b>33.789.604.022,00</b>	<b>73.475.857.478,00</b>	<b>217,45</b>

Untuk Rincian Utang Beban Lain-lain dapat dilihat pada Lampiran 20 s.d. Lampiran 26

Utang Beban Lain-Lain pada Dinas Perhubungan senilai Rp45.532.167,00 merupakan Utang Beban Lain-Lain Tahun 2020 untuk pembayaran Upah Pungut/UP Pajak dan Retribusi Daerah untuk pejabat Kota Dumai (Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah). Pada Tahun 2022 atas utang tersebut telah dibayarkan berdasarkan SP2D No.00152/SP2D/LS/2.15.0.00.0.00.02.0000/2022 tanggal 14 Februari 2022.

5) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>3.380.372.298,00</b>	<b>1.621.963.908,00</b>	<b>1.758.408.390,00</b>	<b>108,41</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp3.380.372.298,00, terjadi peningkatan senilai Rp1.758.408.390,00 atau sebesar 108,41% dari Tahun 2020 senilai Rp1.621.963.908,00 Utang Jangka pendek lainnya merupakan utang jangka Pendek Lainnya pada BLUD - RSUD. Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat pada Lampiran 27.

**Tabel 5.5.97 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**

No	Utang Jangka Pendek Lainnya	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Utang Peralatan dan Mesin	2.306.369.898,00	601.005.908,00	1.705.363.990,00	283,75
2	Utang Gedung dan Bangunan	459.874.000,00	791.097.000,00	(331.223.000,00)	(41,87)
3	Utang Jalan, Irigasi dan Jaringan	614.128.400,00	229.861.000,00	384.267.400,00	167,17
	<b>Jumlah</b>	<b>3.380.372.298,00</b>	<b>1.621.963.908,00</b>	<b>1.758.408.390,00</b>	<b>108,41</b>

3. **Ekuitas**

2021	2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>2.974.537.461.488,77</b>	<b>2.957.502.181.459,58</b>	<b>17.035.280.029,19</b>	<b>0,58</b>

Ekuitas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.974.537.461.488,77 mengalami kenaikan senilai Rp17.035.280.029,19 atau 0,58% dari Tahun 2020 yaitu senilai Rp2.957.502.181.459,58 dengan uraian sebagai berikut:

<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp 2.957.502.181.459,58</b>
Surplus/Defisit LO	Rp 5.369.480.019,14
<b>Penyesuaian / Mutasi :</b>	
Penambahan	Rp 17.982.316.592,48
Pengurangan	Rp (6.316.516.582,42)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>Rp 2.974.537.461.488,78</b>

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci ada pada Catatan atas Laporan Keuangan di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

## 5.6 PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kota Dumai.

### 5.6.1 PENDAPATAN - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.372.376.641.914,38	1.375.669.349.991,58	(3.292.708.077,20)	(0,24)

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 senilai Rp1.372.376.641.914,38 mengalami penurunan senilai Rp3.292.708.077,20 atau sebesar 0,24% jika dibandingkan Tahun 2020 senilai Rp1.375.669.349.991,58 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.6.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	426.299.014.021,79	347.854.552.958,97	78.444.461.062,82	22,55
Pendapatan Transfer	889.269.161.050,39	976.281.720.566,61	(87.012.559.516,22)	(8,91)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	56.808.466.842,20	51.533.076.466,00	5.275.390.376,20	10,24
<b>Jumlah</b>	<b>1.372.376.641.914,38</b>	<b>1.375.669.349.991,58</b>	<b>(3.292.708.077,20)</b>	<b>(0,24)</b>

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
426.299.014.021,79	347.854.552.958,97	78.444.461.062,82	22,55

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2021 dan Tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2021 senilai Rp426.299.014.021,79 jika dibandingkan pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp347.854.552.958,97. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan senilai Rp78.444.461.062,82 atau sebesar 22,55%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	195.616.934.382,69	172.747.825.750,00	22.869.108.632,69	13,24

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	23.688.650.046,46	32.705.899.620,00	(9.017.249.573,54)	(27,57)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.415.125.255,00	1.440.259.326,60	(25.134.071,60)	(1,75)
Lain-lain PAD yang Sah	205.578.304.337,64	140.960.568.262,37	64.617.736.075,27	45,84
<b>Jumlah</b>	<b>426.299.014.021,79</b>	<b>347.854.552.958,97</b>	<b>78.444.461.062,82</b>	<b>22,55</b>

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>195.616.934.382,69</b>	<b>172.747.825.750,00</b>	<b>22.869.108.632,69</b>	<b>13,24</b>

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterima pada Tahun 2021 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2021.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2021 terealisasi senilai Rp195.616.934.382,69 jika dibandingkan pada Tahun 2020 terealisasi senilai Rp172.747.825.750,00, Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp22.869.108.632,69 atau sebesar 13,24% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.3 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	4.254.135.688,00	3.687.948.519,00	566.187.169,00	15,35
Pajak Restoran	9.321.329.460,00	7.457.436.875,00	1.863.892.585,00	24,99
Pajak Hiburan	952.102.028,00	752.170.622,00	199.931.406,00	26,58
Pajak Reklame	1.941.742.376,69	2.582.922.818,00	(641.180.441,31)	(24,82)
Pajak Penerangan Jalan	49.467.546.601,00	31.075.549.768,00	18.391.996.833,00	59,18
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	0,00	8.234.275.564,00	(8.234.275.564,00)	(100,00)
Pajak Parkir	691.186.812,00	566.110.348,00	125.076.464,00	22,09
Pajak Air Tanah	2.271.126.489,00	1.202.973.838,00	1.068.152.651,00	88,79
Pajak Sarang Burung Walet	90.270.560,00	73.700.660,00	16.569.900,00	22,48
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	106.124.903.919,00	98.928.537.455,00	7.196.366.464,00	7,27
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	2.550.555.480,00	(2.550.555.480,00)	(100,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.502.590.449,00	15.635.643.803,00	4.866.946.646,00	31,13
<b>Jumlah</b>	<b>195.616.934.382,69</b>	<b>172.747.825.750,00</b>	<b>22.869.108.632,69</b>	<b>13,24</b>

Realisasi Pendapatan Pajak per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pajak Hotel

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	4.254.135.688,00	3.687.948.519,00	566.187.169,00	15,35
<b>Jumlah</b>	<b>4.254.135.688,00</b>	<b>3.687.948.519,00</b>	<b>566.187.169,00</b>	<b>15,35</b>

## 2. Pajak Restoran

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	9.321.329.460,00	7.457.436.875,00	1.863.892.585,00	24,99
<b>Jumlah</b>	<b>9.321.329.460,00</b>	<b>7.457.436.875,00</b>	<b>1.863.892.585,00</b>	<b>24,99</b>

## 3. Pajak Hiburan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	952.102.028,00	752.170.622,00	199.931.406,00	26,58
<b>Jumlah</b>	<b>952.102.028,00</b>	<b>752.170.622,00</b>	<b>199.931.406,00</b>	<b>26,58</b>

## 4. Pajak Reklame

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	1.941.742.376,69	2.582.922.818,00	(641.180.441,31)	(24,82)
<b>Jumlah</b>	<b>1.941.742.376,69</b>	<b>2.582.922.818,00</b>	<b>(641.180.441,31)</b>	<b>(24,82)</b>

## 5. Pajak Penerangan Jalan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	49.467.546.601,00	31.075.549.768,00	18.391.996.833,00	59,18
<b>Jumlah</b>	<b>49.467.546.601,00</b>	<b>31.075.549.768,00</b>	<b>18.391.996.833,00</b>	<b>59,18</b>

## 6. Pajak Penerangan Jalan Non PLN

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	0,00	8.234.275.564,00	(8.234.275.564,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234.275.564,00</b>	<b>(8.234.275.564,00)</b>	<b>(100,00)</b>

## 7. Pajak Parkir

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	691.186.812,00	566.110.348,00	125.076.464,00	22,09
<b>Jumlah</b>	<b>691.186.812,00</b>	<b>566.110.348,00</b>	<b>125.076.464,00</b>	<b>22,09</b>

## 8. Pajak Air Tanah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	2.271.126.489,00	1.202.973.838,00	1.068.152.651,00	88,79
<b>Jumlah</b>	<b>2.271.126.489,00</b>	<b>1.202.973.838,00</b>	<b>1.068.152.651,00</b>	<b>88,79</b>

## 9. Pajak Sarang Burung Walet

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	90.270.560,00	73.700.660,00	16.569.900,00	22,48
<b>Jumlah</b>	<b>90.270.560,00</b>	<b>73.700.660,00</b>	<b>16.569.900,00</b>	<b>22,48</b>

## 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	106.124.903.919,00	98.928.537.455,00	7.196.366.464,00	7,27
<b>Jumlah</b>	<b>106.124.903.919,00</b>	<b>98.928.537.455,00</b>	<b>7.196.366.464,00</b>	<b>7,27</b>

### 11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	0,00	2.550.555.480,00	(2.550.555.480,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.555.480,00</b>	<b>(2.550.555.480,00)</b>	<b>(100,00)</b>

### 12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bapenda	20.502.590.449,00	15.635.643.803,00	4.866.946.646,00	31,13
<b>Jumlah</b>	<b>20.502.590.449,00</b>	<b>15.635.643.803,00</b>	<b>4.866.946.646,00</b>	<b>31,13</b>

### 2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>23.688.650.046,46</b>	<b>32.705.899.620,00</b>	<b>(9.017.249.573,54)</b>	<b>(27,57)</b>

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 11 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan retribusi daerah Pemerintah Kota Dumai didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2021 senilai Rp23.688.650.046,46, jika dibandingkan Tahun 2020 terealisasi senilai Rp32.705.899.620,00 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan senilai Rp9.017.249.573,54 atau sebesar 27,57% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	38.250.000,00	47.700.000,00	(9.450.000,00)	(19,81)
Dinas Perikanan	7.885.000,00	23.904.000,00	(16.019.000,00)	(67,01)
Dinas Lingkungan Hidup	775.275.000,00	666.100.000,00	109.175.000,00	16,39
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.680.000,00	18.420.000,00	6.260.000,00	33,98
Dinas Perhubungan	18.357.066.946,46	18.866.298.300,00	(509.231.353,54)	(2,70)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	131.250.000,00	(131.250.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.357.255.000,00	11.824.726.000,00	(8.467.471.000,00)	(71,61)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.191.320,00	(2.191.320,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	571.789.000,00	623.510.000,00	(51.721.000,00)	(8,30)
Dinas Komunikasi dan Informatika	556.449.100,00	501.800.000,00	54.649.100,00	10,89
<b>Jumlah</b>	<b>23.688.650.046,46</b>	<b>32.705.899.620,00</b>	<b>(9.017.249.573,54)</b>	<b>(27,57)</b>

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO Tahun 2021 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Retribusi Jasa Umum

**Tabel 5.6.5 Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	775.275.000,00	666.100.000,00	109.175.000,00	16,39
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113.159.000,00	159.640.000,00	(46.481.000,00)	(29,12)

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Pasar	183.991.000,00	436.133.000,00	(252.142.000,00)	(57,81)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	71.080.550,00	240.716.650,00	(169.636.100,00)	(70,47)
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	23.486.000,00	(23.486.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	203.602.000,00	187.377.000,00	16.225.000,00	8,66
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	556.449.100,00	501.800.000,00	54.649.100,00	10,89
<b>Jumlah</b>	<b>1.903.556.650,00</b>	<b>2.215.252.650,00</b>	<b>(311.696.000,00)</b>	<b>(14,07)</b>

## b. Retribusi Jasa Usaha

**Tabel 5.6.6 Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.250.000,00	184.950.000,00	(146.700.000,00)	(79,32)
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	184.196.000,00	0,00	184.196.000,00	100,00
Retribusi Terminal	48.950.000,00	18.392.355.000,00	(18.343.405.000,00)	(99,73)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.091.319.546,46	0,00	18.091.319.546,46	100,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	7.885.000,00	23.904.000,00	(16.019.000,00)	(67,01)
Retribusi Rumah Potong Hewan	24.680.000,00	18.420.000,00	6.260.000,00	33,98
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	32.557.850,00	44.060.650,00	(11.502.800,00)	(26,11)
<b>Jumlah</b>	<b>18.427.838.396,46</b>	<b>18.663.689.650,00</b>	<b>(235.851.253,54)</b>	<b>(1,26)</b>

## c. Retribusi Perizinan Tertentu

**Tabel 5.6.7 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.348.255.000,00	11.819.726.000,00	(8.471.471.000,00)	(71,67)
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	0,00	2.191.320,00	(2.191.320,00)	(100,00)
Retribusi Izin Trayek / Kartu Pengawasan (KP)	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.357.255.000,00</b>	<b>11.826.957.320,00</b>	<b>(8.469.702.320,00)</b>	<b>(71,61)</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	775.275.000,00	666.100.000,00	109.175.000,00	16,39
<b>Jumlah</b>	<b>775.275.000,00</b>	<b>666.100.000,00</b>	<b>109.175.000,00</b>	<b>16,39</b>

### 2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	113.159.000,00	159.640.000,00	(46.481.000,00)	(29,12)
<b>Jumlah</b>	<b>113.159.000,00</b>	<b>159.640.000,00</b>	<b>(46.481.000,00)</b>	<b>(29,12)</b>

### 3. Retribusi Pelayanan Pasar

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	183.991.000,00	436.133.000,00	(252.142.000,00)	(57,81)
<b>Jumlah</b>	<b>183.991.000,00</b>	<b>436.133.000,00</b>	<b>(252.142.000,00)</b>	<b>(57,81)</b>

### 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	71.080.550,00	240.716.650,00	(169.636.100,00)	(70,47)
<b>Jumlah</b>	<b>71.080.550,00</b>	<b>240.716.650,00</b>	<b>(169.636.100,00)</b>	<b>(70,47)</b>

### 5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	203.602.000,00	187.377.000,00	16.225.000,00	8,66
<b>Jumlah</b>	<b>203.602.000,00</b>	<b>187.377.000,00</b>	<b>16.225.000,00</b>	<b>8,66</b>

### 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi dan Informatika	556.449.100,00	501.800.000,00	54.649.100,00	10,89
<b>Jumlah</b>	<b>556.449.100,00</b>	<b>501.800.000,00</b>	<b>54.649.100,00</b>	<b>10,89</b>

### 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	38.250.000,00	47.700.000,00	(9.450.000,00)	(19,81)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	131.250.000,00	(131.250.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>184.950.000,00</b>	<b>(146.700.000,00)</b>	<b>(79,32)</b>

### 8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	184.196.000,00	0,00	184.196.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>184.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.196.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 9. Retribusi Terminal

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	48.950.000,00	18.392.355.000,00	(18.343.405.000,00)	(99,73)
<b>Jumlah</b>	<b>48.950.000,00</b>	<b>18.392.355.000,00</b>	<b>(18.343.405.000,00)</b>	<b>(99,73)</b>

### 10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	18.091.319.546,46	23.486.000,00	18.067.833.546,46	76.930,23
<b>Jumlah</b>	<b>18.091.319.546,46</b>	<b>23.486.000,00</b>	<b>18.067.833.546,46</b>	<b>76.930,23</b>

### 11. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	7.885.000,00	23.904.000,00	(16.019.000,00)	(67,01)
<b>Jumlah</b>	<b>7.885.000,00</b>	<b>23.904.000,00</b>	<b>(16.019.000,00)</b>	<b>(67,01)</b>

### 12. Retribusi Rumah Potong Hewan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.680.000,00	18.420.000,00	6.260.000,00	33,98
<b>Jumlah</b>	<b>24.680.000,00</b>	<b>18.420.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>33,98</b>

### 13. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	32.557.850,00	44.060.650,00	(11.502.800,00)	(26,11)
<b>Jumlah</b>	<b>32.557.850,00</b>	<b>44.060.650,00</b>	<b>(11.502.800,00)</b>	<b>(26,11)</b>

### 14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.348.255.000,00	11.819.726.000,00	(8.471.471.000,00)	(71,67)
<b>Jumlah</b>	<b>3.348.255.000,00</b>	<b>11.819.726.000,00</b>	<b>(8.471.471.000,00)</b>	<b>(71,67)</b>

### 15. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>80,00</b>

### 16. Retribusi Izin Gangguan / Keramaian

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.191.320,00	(2.191.320,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.320,00</b>	<b>(2.191.320,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-134/PK.3/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemungutan Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dan tindak lanjut Surat Edaran Walikota Dumai Nomor : 503/1348/HK-HAM tanggal 31 Agustus 2017 maka Pemerintah Daerah diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait Izin Gangguan dan tidak lagi memungut Retribusi Izin Gangguan. Adapun ketentuan baru yang ditetapkan berlaku untuk tunggakan sebelum Tahun 2017.

### 17. Retribusi Izin Trayek / Kartu Pengawasan (KP)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

### 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.415.125.255,00	1.440.259.326,60	(25.134.071,60)	(1,75)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.415.125.255,00 mengalami penurunan senilai Rp25.134.071,60 atau sebesar 1,75% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp1.440.259.326,60.

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
PT Bank Riau Kepri	1.316.194.590,00	895.097.348,00	(421.097.242,00)	(47,04)
PT Pembangunan Dumai	98.930.665,00	197.801.978,60	98.871.313,60	49,98
PT Pelabuhan Dumai Berseri	0,00	347.360.000,00	347.360.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.415.125.255,00</b>	<b>1.440.259.326,60</b>	<b>(25.134.071,60)</b>	<b>(1,75)</b>

**Tabel 5.6.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021**

Uraian	Realisasi 2021	Keterangan
PT. Bank Riau Kepri	1.316.194.590,00	Pembagian Dividen
PT. Pembangunan Dumai	98.930.665,00	Pembagian Dividen
<b>Jumlah</b>	<b>1.415.125.255,00</b>	

**4) Lain-lain PAD yang Sah - LO**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>205.578.304.337,64</b>	<b>140.960.568.262,37</b>	<b>64.617.736.075,27</b>	<b>45,84</b>

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 senilai Rp205.578.304.337,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp140.960.568.262,37 mengalami kenaikan senilai Rp64.617.736.075,27 atau sebesar 45,84%.

**Tabel 5.6.9 Perbandingan Lain – Lain PAD – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00	100,00
Penerimaan Jasa Giro	4.697.811.210,09	0,00	4.697.811.210,09	100,00
Pendapatan Bunga	1.135.241.649,19	0,00	1.135.241.649,19	100,00
Pendapatan dari BLUD	189.067.123.049,10	0,00	189.067.123.049,10	100,00
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	1.323.064.715,00	(1.323.064.715,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	15.738.000,00	(15.738.000,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	103.328.000,00	(103.328.000,00)	(100,00)
Jasa Giro Kas Daerah	0,00	4.121.459.807,95	(4.121.459.807,95)	(100,00)
Jasa Giro Kas Bendahara	0,00	592.622.095,00	(592.622.095,00)	(100,00)
Jasa Giro CD Pertamina	0,00	65.762.678,00	(65.762.678,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	0,00	2.321.041.059,00	(2.321.041.059,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito BSM	0,00	698.055.274,33	(698.055.274,33)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI	0,00	1.040.794.593,00	(1.040.794.593,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Pajak	3.619.846.565,51	4.458.680.568,00	(838.834.002,49)	(18,81)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	29.057.803,86	(29.057.803,86)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian	230.291.915,00	1.699.901.689,77	(1.469.609.774,77)	(86,45)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	432.859.972,33	86.494.461,67	346.365.510,66	400,45
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.391.677.976,42	2.232.919.027,53	4.158.758.948,89	186,25

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Fasilitas Umum	0,00	2.772.000,00	(2.772.000,00)	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	105.071.059.067,00	(105.071.059.067,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	804.601.634,00	(804.601.634,00)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	3.014.634.307,30	(3.014.634.307,30)	(100,00)
Pendapatan BLUD Puskesmas	0,00	13.132.581.329,96	(13.132.581.329,96)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>205.578.304.337,64</b>	<b>140.960.568.262,37</b>	<b>64.617.736.075,27</b>	<b>45,84</b>

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

**a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00	100,00
Jasa Giro	4.697.811.210,09	0,00	4.697.811.210,09	100,00
Pendapatan Bunga	1.135.241.649,19	0,00	1.135.241.649,19	100,00
Hasil Penjualan Peratalan dan Mesin	0,00	1.323.064.715,00	(1.323.064.715,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	15.738.000,00	(15.738.000,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	103.328.000,00	(103.328.000,00)	(100,00)
Jasa Giro Kas Daerah	0,00	4.121.459.807,95	(4.121.459.807,95)	(100,00)
Jasa Giro Kas Bendahara	0,00	592.622.095,00	(592.622.095,00)	(100,00)
Jasa Giro CD Pertamina	0,00	65.762.678,00	(65.762.678,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	0,00	2.321.041.059,00	(2.321.041.059,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito BSM	0,00	698.055.274,33	(698.055.274,33)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI	0,00	1.040.794.593,00	(1.040.794.593,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	29.057.803,86	(29.057.803,86)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian	230.291.915,00	1.699.901.689,77	(1.469.609.774,77)	(86,45)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	299.859.972,33	86.494.461,67	213.365.510,66	246,68
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.391.677.976,42	2.232.919.027,53	4.158.758.948,89	186,25
Fasilitas Umum	0,00	2.772.000,00	(2.772.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>12.758.334.723,03</b>	<b>14.333.011.205,11</b>	<b>(1.574.676.482,08)</b>	<b>(10,99)</b>

**b) Dinas Kesehatan**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan BLUD	189.067.123.049,10	0,00	189.067.123.049,10	100,00
Pendapatan BLUD - Puskesmas	0,00	13.132.581.329,96	(13.132.581.329,96)	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-Puskesmas	0,00	133.890.151,00	(133.890.151,00)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	12.110.000,00	(12.110.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>189.067.123.049,10</b>	<b>13.278.581.480,96</b>	<b>175.788.541.568,14</b>	<b>1.323,85</b>

**c) Badan Pendapatan Daerah**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak	3.619.846.565,51	4.458.680.568,00	(838.834.002,49)	(18,81)
<b>Jumlah</b>	<b>3.619.846.565,51</b>	<b>4.458.680.568,00</b>	<b>(838.834.002,49)</b>	<b>(18,81)</b>

d) RSUD

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	105.071.059.067,00	(105.071.059.067,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	804.601.634,00	(804.601.634,00)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	3.014.634.307,30	(3.014.634.307,30)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>108.890.295.008,30</b>	<b>(108.890.295.008,30)</b>	<b>(100,00)</b>

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

b. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>889.269.161.050,39</b>	<b>976.281.720.566,61</b>	<b>(87.012.559.516,22)</b>	<b>(8,91)</b>

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp889.269.161.050,39, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 senilai Rp976.281.720.566,61 mengalami penurunan senilai Rp87.012.559.516,22 atau sebesar 8,91%.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	731.422.367.681,00	803.169.915.358,00	(71.747.547.677,00)	(8,93)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31.603.245.000,00	45.719.565.000,00	(14.116.320.000,00)	(30,88)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	126.243.548.369,39	127.392.240.208,61	(1.148.691.839,22)	(0,90)
<b>Jumlah</b>	<b>889.269.161.050,39</b>	<b>976.281.720.566,61</b>	<b>(87.012.559.516,22)</b>	<b>(8,91)</b>

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>731.422.367.681,00</b>	<b>803.169.915.358,00</b>	<b>(71.747.547.677,00)</b>	<b>(8,93)</b>

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021:

Tabel 5.6.10 Perbandingan Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak	61.856.297.144,00	46.307.841.644,00	15.548.455.500,00	33,58
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	83.612.659.443,00	129.403.124.112,00	(45.790.464.669,00)	(35,39)
Dana Alokasi Umum	429.427.931.000,00	424.090.440.000,00	5.337.491.000,00	1,26

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Alokasi Khusus	156.525.480.094,00	203.368.509.602,00	(46.843.029.508,00)	(23,03)
<b>Jumlah</b>	<b>731.422.367.681,00</b>	<b>803.169.915.358,00</b>	<b>(71.747.547.677,00)</b>	<b>(8,93)</b>

Tahun 2021 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah senilai Rp731.422.367.681,00 jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp803.169.915.358,00 maka mengalami penurunan senilai Rp71.747.547.677,00 atau sebesar 8,93%.

**a) Dana Bagi Hasil Pajak**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>61.856.297.144,00</b>	<b>46.307.841.644,00</b>	<b>15.548.455.500,00</b>	<b>33,58</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2021 senilai Rp61.856.297.144,00 jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp46.307.841.644,00 mengalami kenaikan senilai 15.548.455.500,00 atau sebesar 33,58%. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai berasal dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bagi Hasil dari PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi kepada seluruh Kabupaten/Kota, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Migas, Bagi Hasil PBB Bagian Provinsi/Kota Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.11 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil PBB	32.489.986.139,00	0,00	32.489.986.139,00	100,00
Bagi Hasil PBB Sektor Migas	0,00	13.843.279.417,00	(13.843.279.417,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	0,00	0,00	0,00	100,00
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perkebunan	0,00	9.850.925,00	(9.850.925,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	0,00	1.107.758.587,00	(1.107.758.587,00)	(100,00)
Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata	0,00	1.885.209.848,00	(1.885.209.848,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	29.366.303.900,00	29.402.318.431,00	(36.014.531,00)	(0,12)
Bagi Hasil dari PBB Sektor Lainnya	0,00	59.300.236,00	(59.300.236,00)	(100,00)
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau	7.105,00	124.200,00	(117.095,00)	(94,28)
<b>Jumlah</b>	<b>61.856.297.144,00</b>	<b>46.307.841.644,00</b>	<b>15.548.455.500,00</b>	<b>33,58</b>

**b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>83.612.659.443,00</b>	<b>129.403.124.112,00</b>	<b>(45.790.464.669,00)</b>	<b>(35,39)</b>

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Tahun 2021 adalah senilai Rp83.612.659.443,00 mengalami penurunan senilai Rp45.790.464.669,00 atau sebesar 35,39% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp129.403.124.112,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, dan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6.12 Perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara (Royalti)	2.011.059.867,00	3.288.231.300,00	(1.277.171.433,00)	(38,84)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	14.831.744.863,00	0,00	11.543.513.563,00	351,06
Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	773.227.050,00	(773.227.050,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	0,00	784.599.000,00	(784.599.000,00)	(100,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	65.037.087.400,00	122.119.517.125,00	(57.082.429.725,00)	(46,74)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.732.767.313,00	2.437.549.637,00	(704.782.324,00)	(28,91)
<b>Jumlah</b>	<b>83.612.659.443,00</b>	<b>129.403.124.112,00</b>	<b>(45.790.464.669,00)</b>	<b>(35,39)</b>

**c) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>429.427.931.000,00</b>	<b>424.090.440.000,00</b>	<b>5.337.491.000,00</b>	<b>1,26</b>

Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2021 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota senilai Rp429.427.931.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.337.491.000,00 atau sebesar 1,26% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp424.090.440.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.6.13 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

DAU	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	429.427.931.000,00	424.090.440.000,00	<b>5.337.491.000,00</b>	1,26
<b>Jumlah</b>	<b>429.427.931.000,00</b>	<b>424.090.440.000,00</b>	<b>5.337.491.000,00</b>	<b>1,26</b>

**d) Dana Alokasi Khusus**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>156.525.480.094,00</b>	<b>203.368.509.602,00</b>	<b>(46.843.029.508,00)</b>	<b>(23,03)</b>

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp156.525.480.094,00 jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp203.368.509.602,00, mengalami penurunan senilai Rp46.843.029.508,00 atau sebesar 23,03%. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat beberapa perbedaan nama akun pada uraian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non-Fisik sehingga realisasi antara Tahun 2021 dan 2020 tidak dapat disandingkan. Pada tahun 2020 penamaan akun menggunakan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

**Tabel 5.6.14 Perbandingan Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Dana Alokasi Khusus	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.602.935.776,00	0,00	92.602.935.776,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.922.544.318,00	0,00	63.922.544.318,00	100,00
DAK Bidang Kesehatan	0,00	29.461.950.829,00	(29.461.950.829,00)	(100,00)
DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	25.544.528.500,00	(25.544.528.500,00)	(100,00)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Bidang Pendidikan	0,00	26.231.818.913,00	(26.231.818.913,00)	(100,00)
DAK Reguler Cadangan Bidang Sanitasi	0,00	979.099.500,00	(979.099.500,00)	(100,00)
DAK Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	9.830.341.150,00	(9.830.341.150,00)	(100,00)
DAK Pelayanan Adminitrasi Kependudukan	0,00	1.175.475.100,00	(1.175.475.100,00)	(100,00)
DAK Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	4.074.715.878,00	(4.074.715.878,00)	(100,00)
DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	0,00	409.991.950,00	(409.991.950,00)	(100,00)
DAK Pelayanan Kepariwisata	0,00	377.930.000,00	(377.930.000,00)	(100,00)
DAK Operasional Penyelenggaraan Paud	0,00	2.871.000.000,00	(2.871.000.000,00)	(100,00)
DAK Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	159.600.000,00	(159.600.000,00)	(100,00)
Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	0,00	2.385.162.036,00	(2.385.162.036,00)	(100,00)
DAK Penugasan Cadangan Bidang Air Minum	0,00	2.944.006.079,00	(2.944.006.079,00)	(100,00)
DAK Penugasan Cadangan Bidang Sanitasi	0,00	1.144.219.300,00	(1.144.219.300,00)	(100,00)
DAK Penugasan Cadangan Kelautan dan Perikanan	0,00	549.654.000,00	(549.654.000,00)	(100,00)
DAK Penugasan Cadangan Pariwisata	0,00	3.076.586.688,00	(3.076.586.688,00)	(100,00)
DAK Afirmasi Cadangan Bidang Sanitasi	0,00	1.535.100.000,00	(1.535.100.000,00)	(100,00)
DAK Afirmasi Cadangan Bidang Perumahan Dan Pemukiman	0,00	4.003.104.000,00	(4.003.104.000,00)	(100,00)
Penugasan Bidang Jalan	0,00	15.261.000.977,00	(15.261.000.977,00)	(100,00)
Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	140.825.000,00	(140.825.000,00)	(100,00)
Afirmasi Bidang Pendidikan	0,00	2.014.523.000,00	(2.014.523.000,00)	(100,00)
Afirmasi Bidang Kesehatan	0,00	17.142.719.702,00	(17.142.719.702,00)	(100,00)
Tunjangan Profesi Guru	0,00	51.539.157.000,00	(51.539.157.000,00)	(100,00)
Tambahan Penghasilan Guru	0,00	516.000.000,00	(516.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>156.525.480.094,00</b>	<b>203.368.509.602,00</b>	<b>(46.843.029.508,00)</b>	<b>(23,03)</b>

**Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>92.602.935.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.602.935.776,00</b>	<b>100,00</b>

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp92.602.935.776,00 memiliki rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.164.180.030,00	0,00	1.164.180.030,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	13.973.518.877,00	0,00	13.973.518.877,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.420.333.655,00	0,00	7.420.333.655,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	497.949.500,00	0,00	497.949.500,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	6.961.322.360,00	0,00	6.961.322.360,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	2.612.930.185,00	0,00	2.612.930.185,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	2.604.123.885,00	0,00	2.604.123.885,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	33.250.090.451,00	0,00	33.250.090.451,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	740.017.000,00	0,00	740.017.000,00	100,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	684.582.499,00	0,00	684.582.499,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	2.221.395.747,00	0,00	2.221.395.747,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	4.569.233.064,00	0,00	4.569.233.064,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	4.556.055.598,00	0,00	4.556.055.598,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	1.660.233.500,00	0,00	1.660.233.500,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	3.994.119.110,00	0,00	3.994.119.110,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler-LO	4.121.535.315,00	0,00	4.121.535.315,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan-LO	1.571.315.000,00	0,00	1.571.315.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.602.935.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.602.935.776,00</b>	<b>100,00</b>

**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>63.922.544.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.922.544.318,00</b>	<b>100,00</b>

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp63.922.544.318,00 memiliki rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	55.565.896.000,00	0,00	55.565.896.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	528.000.000,00	0,00	528.000.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.761.200.000,00	0,00	2.761.200.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	248.850.000,00	0,00	248.850.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.812.823.476,00	0,00	1.812.823.476,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan AdministrasiKependudukan-LO	1.514.289.842,00	0,00	1.514.289.842,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	99.692.000,00	0,00	99.692.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	326.122.000,00	0,00	326.122.000,00	100,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	575.671.000,00	0,00	575.671.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>63.922.544.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.922.544.318,00</b>	<b>100,00</b>

2) **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>31.603.245.000,00</b>	<b>45.719.565.000,00</b>	<b>(14.116.320.000,00)</b>	<b>(30,88)</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp31.603.245.000,00 mengalami penurunan senilai Rp14.116.320.000,00 atau sebesar 30,88%, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp45.719.565.000,00.

Dana Insentif Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Penyesuaian	31.603.245.000,00	45.719.565.000,00	(14.116.320.000,00)	(30,88)
<b>Jumlah</b>	<b>31.603.245.000,00</b>	<b>45.719.565.000,00</b>	<b>(14.116.320.000,00)</b>	<b>(30,88)</b>

Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria dan katagori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 adalah senilai Rp31.603.245.000,00.

### 3) Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
126.243.548.369,39	127.392.240.208,61	(1.148.691.839,22)	(0,90)

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp126.243.548.369,39 mengalami penurunan senilai Rp1.148.691.839,22 atau sebesar 0,90% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp127.392.240.208,61 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.15 Rincian Perbandingan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	118.255.548.369,39	88.124.940.208,61	30.130.608.160,78	34,19
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.988.000.000,00	39.267.300.000,00	(31.279.300.000,00)	(79,66)
<b>Jumlah</b>	<b>126.243.548.369,39</b>	<b>127.392.240.208,61</b>	<b>(1.148.691.839,22)</b>	<b>(0,90)</b>

#### a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
118.255.548.369,39	88.124.940.208,61	30.130.608.160,78	34,19

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 senilai Rp118.255.548.369,39 mengalami penurunan senilai Rp30.130.608.160,78 atau sebesar 34,19%, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp88.124.940.208,61 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.16 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	32.683.466.124,39	20.776.442.047,61	11.907.024.076,78	57,31
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.359.137.791,00	12.653.250.233,00	6.705.887.558,00	53,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.121.720.867,00	33.216.754.525,00	11.904.966.342,00	35,84
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.157.395.723,00	930.997.310,00	226.398.413,00	24,32
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19.933.827.864,00	20.547.496.093,00	(613.668.229,00)	(2,99)
<b>Jumlah</b>	<b>118.255.548.369,39</b>	<b>88.124.940.208,61</b>	<b>30.130.608.160,78</b>	<b>34,19</b>

#### b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
7.988.000.000,00	39.267.300.000,00	(31.279.300.000,00)	(79,66)

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO dari Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 terealisasi senilai Rp7.988.000.000,00 jika di bandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp39.267.300.000,00 mengalami penurunan senilai Rp31.279.300.000,00 atau sebesar 79,66%.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
56.808.466.842,20	51.533.076.466,00	5.275.390.376,20	10,24

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2021 adalah senilai Rp56.808.466.842,20 mengalami kenaikan senilai Rp5.275.390.376,20 atau sebesar 10,24% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp51.533.076.466,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Hibah dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah	16.112.703.842,20	51.533.076.466,00	(35.420.372.623,80)	(68,73)
Pendapatan Lainnya	40.695.763.000,00	0,00	40.695.763.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.808.466.842,20</b>	<b>51.533.076.466,00</b>	<b>5.275.390.376,20</b>	<b>10,24</b>

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 adalah senilai Rp16.112.703.842,20 mengalami penurunan senilai Rp35.420.372.623,80 atau sebesar 68,73% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp51.533.076.466,00. Berikut rincian dari Pendapatan Hibah:

Tabel 5.6.17 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	13.312.730.660,00	6.961.025.500,00	6.351.705.160,00	91,25
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	2.687.463.182,20	780.810.966,00	1.906.652.216,20	244,19
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	2.890.440.000,00	(2.890.440.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	112.510.000,00	0,00	112.510.000,00	100,00
Pendapatan Hibah Dana BOS		40.900.800.000,00	(40.900.800.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>16.112.703.842,20</b>	<b>51.533.076.466,00</b>	<b>(35.420.372.623,80)</b>	<b>(68,73)</b>

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Berikut adalah SKPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan aset yang diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.18 Pendapatan Hibah

SKPD	Realisasi 2021	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.902.621.752,00	Hibah Masuk Dari Kementerian PUPR
	93.465.108,00	Hibah Masuk Dari Kemenristek
Dinas Kesehatan	381.299.233,00	Hibah Alat Kesehatan dari Provinsi
Dinas Lingkungan Hidup	833.337.639,20	Hibah Dari Prov.Riau Berupa Kendaraan Angkutan Barang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	301.273.500,00	Hibah Persediaan Blanko KTP Elektronik
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	444.058.181,00	Pendapatan Hibah Obat Dari BKKBN
Dinas Perhubungan	267.370.354,00	Hibah Dari Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.370.300,00	Hibah Masuk dari BKPM
Dinas Perdagangan	761.397.775,00	Jurnal Penyesuaian Hibah Gedung Pasar Leppin Dari Pemerintah Provinsi Riau
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	112.510.000,00	Hibah Masuk Aset
<b>Jumlah</b>	<b>16.112.703.842,20</b>	

Daftar Pendapatan Hibah dapat dilihat pada Lampiran 29 dan Daftar Hibah Keluar dapat dilihat pada lampiran 30.

## 2) Pendapatan Lainnya

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
40.695.763.000,00	0,00	40.695.763.000,00	100,00

Pendapatan Hibah pada Tahun 2021 adalah senilai Rp40.695.763.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp40.695.763.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp0,00.

## 2. Beban - LO

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.342.545.256.777,14	1.344.583.464.143,92	(2.038.207.366,78)	(0,15)

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban - LO Kota Dumai selama Tahun 2021 adalah senilai Rp1.342.545.256.777,14, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp1.344.583.464.143,92 mengalami penurunan senilai Rp2.038.207.366,78 atau sebesar 0,15% dengan rincian sebagai berikut:

Beban	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	1.342.545.256.777,14	1.344.583.464.143,92	(2.038.207.366,78)	(0,15)

### a. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Kota Dumai selama Tahun 2021 adalah senilai Rp1.342.545.256.777,14, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp1.344.583.464.143,92, mengalami penurunan senilai Rp2.038.207.366,78, atau sebesar 0,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.19 Perbandingan Beban LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	624.362.020.295,00	516.330.812.752,00	108.031.207.543,00	20,92
Beban Persediaan	148.161.776.237,71	188.848.073.360,97	(40.686.297.123,26)	(21,54)
Beban Jasa	248.452.652.214,26	314.260.640.850,70	(65.807.988.636,44)	(20,94)
Beban Pemeliharaan	46.127.809.752,07	22.531.887.700,02	23.595.922.052,05	104,72
Beban Perjalanan Dinas	47.440.724.498,00	55.976.905.741,50	(8.536.181.243,50)	(15,25)
Beban Hibah	15.192.998.932,38	36.526.180.600,00	(21.333.181.667,62)	(58,41)
Beban Bantuan Sosial	0,00	3.844.800.000,00	(3.844.800.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	181.734.858.783,00	180.992.213.502,21	742.645.280,80	(11,79)
Beban Penyisihan Piutang	20.948.535.335,61	6.944.601.782,96	(3.844.800.000,00)	(55,36)
Beban Lain-lain	10.123.880.729,11	18.327.347.853,57	(8.203.467.124,46)	(45,31)
<b>Jumlah</b>	<b>1.342.545.256.777,14</b>	<b>1.344.583.464.143,92</b>	<b>(2.038.207.366,78)</b>	<b>(0,15)</b>

### 1. Beban Pegawai

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
624.362.020.295,00	516.330.812.752,00	108.031.207.543,00	20,92

Beban Pegawai LO disajikan dengan basis akrual. Beban Pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA, sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah diterbitkan dan diterima PPK. Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2021 senilai Rp624.362.020.295,00, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp516.330.812.752,00 mengalami kenaikan senilai Rp108.031.207.543,00 atau sebesar 20,92% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.20 Beban Pegawai LO**

Beban Pegawai	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan	264.398.713.084,00	273.225.650.758,00	(8.826.937.674,00)	(3,23)
Tambahan Penghasilan PNS	176.126.304.790,00	230.063.026.990,00	(53.936.722.200,00)	(23,44)
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.604.332.188,00	5.096.100.000,00	12.508.232.188,00	245,45
Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	100,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.308.313.486,00	7.344.337.254,00	(36.023.768,00)	(0,49)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	162.527.844,00	601.697.750,00	(439.169.906,00)	(72,99)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.984.467.040,00	0,00	55.984.467.040,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	522.500.000,00	0,00	522.500.000,00	100,00
Beban Honorarium	6.684.628.600,00	0,00	6.684.628.600,00	100,00
Beban Pegawai Blud	95.570.233.263,00	0,00	95.570.233.263,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>624.362.020.295,00</b>	<b>516.330.812.752,00</b>	<b>108.031.207.543,00</b>	<b>20,92</b>

**Tabel 5.6.21 Perbandingan Beban Pegawai LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 Menurut Jenisnya**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	1.397.676.247,00	638.527.756,00	759.148.491,00	118,89
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	227.753.032.016,00	220.786.669.340,00	6.966.362.676,00	3,16
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	31.853.465.250,00	(31.853.465.250,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	172.064.521.717,00	39.470.301.456,00	132.594.220.261,00	335,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.515.568.986,00	7.766.150.559,00	749.418.427,00	9,65
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.913.595.784,00	2.872.191.152,00	41.404.632,00	1,44
Satuan Polisi Pamong Praja	5.789.623.800,00	5.934.838.686,00	(145.214.886,00)	(2,45)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.346.390.439,00	3.380.670.917,00	(34.280.478,00)	(1,01)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.918.130.710,00	3.044.724.200,00	(126.593.490,00)	(4,16)
Dinas Sosial	2.444.452.733,00	2.618.528.268,00	(174.075.535,00)	(6,65)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.320.726.325,00	3.312.444.995,00	8.281.330,00	0,25
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.201.731.728,00	4.212.210.431,00	(10.478.703,00)	(0,25)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.147.896.570,00	8.190.926.652,00	(43.030.082,00)	(0,53)
Dinas Lingkungan Hidup	4.735.894.605,00	5.167.853.019,00	(431.958.414,00)	(8,36)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.135.893.930,00	3.827.711.489,00	308.182.441,00	8,05
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.213.453.866,00	3.220.985.190,00	(7.531.324,00)	(0,23)
Dinas Perhubungan	7.805.223.677,00	7.918.285.992,00	(113.062.315,00)	(1,43)
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.965.803.673,00	3.700.821.744,00	264.981.929,00	7,16
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.681.926.295,00	6.437.077.595,00	(755.151.300,00)	(11,73)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.344.478.624,00	3.544.106.857,00	(199.628.233,00)	(5,63)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.044.823.851,00	3.106.970.594,00	(62.146.743,00)	(2,00)
Dinas Perikanan	3.251.680.551,00	3.506.669.539,00	(254.988.988,00)	(7,27)
Dinas Perdagangan	4.409.131.250,00	4.919.509.162,00	(510.377.912,00)	(10,37)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.182.089.184,00	4.262.764.841,00	(80.675.657,00)	(1,89)
Sekretariat Daerah	18.302.584.522,00	15.329.022.828,00	2.973.561.694,00	19,40

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	20.611.886.830,00	18.898.975.348,00	1.712.911.482,00	9,06
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.092.410.156,00	5.212.421.060,00	(120.010.904,00)	(2,30)
Badan Pendapatan Daerah	14.294.861.528,00	14.338.903.776,00	(44.042.248,00)	(0,31)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.551.353.968,00	28.758.644.171,00	(2.207.290.203,00)	(7,68)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.032.250.692,00	3.476.673.107,00	555.577.585,00	15,98
Inspektorat	8.660.759.916,00	10.243.127.670,00	(1.582.367.754,00)	(15,45)
Kecamatan Dumai Barat	4.663.012.638,00	4.760.594.548,00	(97.581.910,00)	(2,05)
Kecamatan Dumai Timur	4.808.084.451,00	4.884.282.225,00	(76.197.774,00)	(1,56)
Kecamatan Dumai Selatan	5.188.567.035,00	5.389.580.646,00	(201.013.611,00)	(3,73)
Kecamatan Dumai Kota	5.262.294.201,00	5.319.775.886,00	(57.481.685,00)	(1,08)
Kecamatan Bukit Kapur	6.194.690.269,00	5.754.082.845,00	440.607.424,00	7,66
Kecamatan Medang Kampai	4.661.124.823,00	4.826.059.084,00	(164.934.261,00)	(3,42)
Kecamatan Sungai Sembilan	5.454.392.705,00	5.444.263.874,00	10.128.831,00	0,19
<b>Jumlah</b>	<b>624.362.020.295,00</b>	<b>516.330.812.752,00</b>	<b>108.031.207.543,00</b>	<b>20,92</b>

Realisasi Beban Pegawai LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Gaji dan Tunjangan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kepala dan Wakil Kepala Daerah	0,00	143.527.756,00	(143.527.756,00)	(100,00)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109.607.991.163,00	109.209.596.900,00	398.394.263,00	0,36
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	18.173.015.250,00	(18.173.015.250,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	44.338.165.658,00	25.271.276.456,00	19.066.889.202,00	75,45
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.332.922.594,00	4.365.550.559,00	(32.627.965,00)	(0,75)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.539.293.883,00	1.513.741.152,00	25.552.731,00	1,69
Satuan Polisi Pamong Praja	3.057.993.720,00	2.964.811.636,00	93.182.084,00	3,14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.831.923.658,00	1.776.570.917,00	55.352.741,00	3,12
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.489.105.874,00	1.537.924.200,00	(48.818.326,00)	(3,17)
Dinas Sosial	1.276.703.727,00	1.372.378.268,00	(95.674.541,00)	(6,97)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.755.111.248,00	1.702.944.995,00	52.166.253,00	3,06
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.199.000.089,00	2.144.810.431,00	54.189.658,00	2,53
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.487.359.422,00	4.622.526.652,00	(135.167.230,00)	(2,92)
Dinas Lingkungan Hidup	2.525.572.039,00	2.762.549.019,00	(236.976.980,00)	(8,58)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.982.126.556,00	1.949.211.489,00	32.915.067,00	1,69
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.672.198.906,00	1.638.185.190,00	34.013.716,00	2,08
Dinas Perhubungan	4.409.864.372,00	4.548.285.992,00	(138.421.620,00)	(3,04)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.965.311.344,00	1.899.521.744,00	65.789.600,00	3,46
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.757.633.258,00	2.720.258.845,00	37.374.413,00	1,37
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.773.535.646,00	1.850.981.857,00	(77.446.211,00)	(4,18)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.681.981.117,00	1.731.595.594,00	(49.614.477,00)	(2,87)
Dinas Perikanan	1.762.800.790,00	1.869.019.539,00	(106.218.749,00)	(5,68)
Dinas Perdagangan	2.494.326.642,00	2.698.184.162,00	(203.857.520,00)	(7,56)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.315.892.455,00	2.288.789.841,00	27.102.614,00	1,18

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	8.115.674.803,00	8.123.972.828,00	(8.298.025,00)	(0,10)
Sekretariat DPRD	2.452.828.454,00	12.273.875.348,00	(9.821.046.894,00)	(80,02)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.428.129.130,00	2.279.971.060,00	148.158.070,00	6,50
Badan Pendapatan Daerah	3.993.847.702,00	3.970.616.522,00	23.231.180,00	0,59
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.111.876.690,00	20.714.471.671,00	397.405.019,00	1,92
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.909.651.999,00	1.797.173.107,00	112.478.892,00	6,26
Inspektorat	3.465.354.799,00	3.436.777.670,00	28.577.129,00	0,83
Kecamatan Dumai Barat	2.556.412.091,00	2.623.469.548,00	(67.057.457,00)	(2,56)
Kecamatan Dumai Timur	2.538.532.411,00	2.570.782.225,00	(32.249.814,00)	(1,25)
Kecamatan Dumai Selatan	2.780.155.618,00	2.925.580.646,00	(145.425.028,00)	(4,97)
Kecamatan Dumai Kota	2.880.320.396,00	2.933.433.386,00	(53.112.990,00)	(1,81)
Kecamatan Bukit Kapur	3.341.266.560,00	3.196.082.845,00	145.183.715,00	4,54
Kecamatan Medang Kampai	2.553.140.323,00	2.665.721.584,00	(112.581.261,00)	(4,22)
Kecamatan Sungai Sembilan	3.014.707.947,00	2.958.463.874,00	56.244.073,00	1,90
<b>Jumlah</b>	<b>264.398.713.084,00</b>	<b>273.225.650.758,00</b>	<b>(8.826.937.674,00)</b>	<b>(3,23)</b>

## 2. Tambahan Penghasilan PNS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.565.463.813,00	111.577.072.440,00	(50.011.608.627,00)	(44,82)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	13.680.450.000,00	(13.680.450.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	31.785.722.796,00	14.199.025.000,00	17.586.697.796,00	123,86
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.173.016.392,00	3.400.600.000,00	(227.583.608,00)	(6,69)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.256.154.901,00	1.358.450.000,00	(102.295.099,00)	(7,53)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.666.440.080,00	2.970.027.050,00	(303.586.970,00)	(10,22)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.482.746.781,00	1.604.100.000,00	(121.353.219,00)	(7,57)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.357.564.836,00	1.506.800.000,00	(149.235.164,00)	(9,90)
Dinas Sosial	1.096.349.006,00	1.246.150.000,00	(149.800.994,00)	(12,02)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.499.395.077,00	1.609.500.000,00	(110.104.923,00)	(6,84)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.874.381.639,00	2.067.400.000,00	(193.018.361,00)	(9,34)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.512.733.148,00	3.568.400.000,00	(55.666.852,00)	(1,56)
Dinas Lingkungan Hidup	2.133.428.583,00	2.385.300.000,00	(251.871.417,00)	(10,56)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.121.067.374,00	1.878.500.000,00	242.567.374,00	12,91
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.421.584.960,00	1.582.800.000,00	(161.215.040,00)	(10,19)
Dinas Perhubungan	3.064.919.305,00	3.370.000.000,00	(305.080.695,00)	(9,05)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.792.451.729,00	1.801.300.000,00	(8.848.271,00)	(0,49)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.759.987.326,00	3.164.100.000,00	(404.112.674,00)	(12,77)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.519.912.978,00	1.693.125.000,00	(173.212.022,00)	(10,23)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.293.092.734,00	1.375.375.000,00	(82.282.266,00)	(5,98)
Dinas Perikanan	1.433.609.761,00	1.637.650.000,00	(204.040.239,00)	(12,46)
Dinas Perdagangan	1.814.231.058,00	2.192.350.000,00	(378.118.942,00)	(17,25)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.800.976.729,00	1.973.975.000,00	(172.998.271,00)	(8,76)
Sekretariat Daerah	9.812.849.719,00	7.205.050.000,00	2.607.799.719,00	36,19
Sekretariat DPRD	1.713.402.435,00	2.024.000.000,00	(310.597.565,00)	(15,35)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.479.161.026,00	2.932.450.000,00	(453.288.974,00)	(15,46)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	2.759.880.340,00	3.023.950.000,00	(264.069.660,00)	(8,73)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.841.043.278,00	8.044.172.500,00	(4.203.129.222,00)	(52,25)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.038.678.693,00	1.679.500.000,00	359.178.693,00	21,39
Inspektorat	5.138.905.117,00	6.806.350.000,00	(1.667.444.883,00)	(24,50)
Kecamatan Dumai Barat	1.995.780.547,00	2.137.125.000,00	(141.344.453,00)	(6,61)
Kecamatan Dumai Timur	2.180.812.040,00	2.313.500.000,00	(132.687.960,00)	(5,74)
Kecamatan Dumai Selatan	2.313.192.817,00	2.464.000.000,00	(150.807.183,00)	(6,12)
Kecamatan Dumai Kota	2.283.603.805,00	2.386.342.500,00	(102.738.695,00)	(4,31)
Kecamatan Bukit Kapur	2.728.286.709,00	2.558.000.000,00	170.286.709,00	6,66
Kecamatan Medang Kampai	2.039.364.500,00	2.160.337.500,00	(120.973.000,00)	(5,60)
Kecamatan Sungai Sembilan	2.376.112.758,00	2.485.800.000,00	(109.687.242,00)	(4,41)
<b>Jumlah</b>	<b>176.126.304.790,00</b>	<b>230.063.026.990,00</b>	<b>(53.936.722.200,00)</b>	<b>(23,44)</b>

### 3. Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.005.055.941,00	0,00	16.005.055.941,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	867.676.247,00	0,00	867.676.247,00	100,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	731.600.000,00	5.096.100.000,00	(4.364.500.000,00)	(85,64)
<b>Jumlah</b>	<b>17.604.332.188,00</b>	<b>5.096.100.000,00</b>	<b>12.508.232.188,00</b>	<b>245,45</b>

### 4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	7.308.313.486,00	7.344.337.254,00	(36.023.768,00)	(0,49)
<b>Jumlah</b>	<b>7.308.313.486,00</b>	<b>7.344.337.254,00</b>	<b>(36.023.768,00)</b>	<b>(0,49)</b>

### 5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	25.603.550,00	28.975.000,00	(3.371.450,00)	(11,64)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.195.711,00	552.718.750,00	(465.523.039,00)	(84,22)
Dinas Lingkungan Hidup	24.503.983,00	20.004.000,00	4.499.983,00	22,50
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	24.000.600,00	0,00	24.000.600,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>162.527.844,00</b>	<b>601.697.750,00</b>	<b>(439.169.906,00)</b>	<b>(72,99)</b>

### 6. Beban Tunjangan Guru (TPG) PNSD

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.984.467.040,00	0,00	55.984.467.040,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.984.467.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.984.467.040,00</b>	<b>100,00</b>

### 7. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	522.500.000,00	0,00	522.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>522.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

## 8. Beban Honorarium

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	72.610.000,00	0,00	72.610.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	370.400.000,00	0,00	370.400.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.009.630.000,00	0,00	1.009.630.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	118.147.000,00	0,00	118.147.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	65.190.000,00	0,00	65.190.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00	100,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	71.460.000,00	0,00	71.460.000,00	100,00
Dinas Sosial	71.400.000,00	0,00	71.400.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	66.220.000,00	0,00	66.220.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	128.350.000,00	0,00	128.350.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	146.580.000,00	0,00	146.580.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	52.390.000,00	0,00	52.390.000,00	100,00
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	119.670.000,00	0,00	119.670.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	330.440.000,00	0,00	330.440.000,00	100,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	184.040.000,00	0,00	184.040.000,00	100,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.110.000,00	0,00	77.110.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	51.030.000,00	0,00	51.030.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	69.750.000,00	0,00	69.750.000,00	100,00
Dinas Perikanan	55.270.000,00	0,00	55.270.000,00	100,00
Dinas Perdagangan	74.970.000,00	0,00	74.970.000,00	100,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	65.220.000,00	0,00	65.220.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	374.060.000,00	0,00	374.060.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	239.000.000,00	0,00	239.000.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	185.120.000,00	0,00	185.120.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	232.820.000,00	0,00	232.820.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.598.434.000,00	0,00	1.598.434.000,00	100,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83.920.000,00	0,00	83.920.000,00	100,00
Inspektorat	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	110.820.000,00	0,00	110.820.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	88.740.000,00	0,00	88.740.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	95.218.600,00	0,00	95.218.600,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	98.370.000,00	0,00	98.370.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	125.137.000,00	0,00	125.137.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	68.620.000,00	0,00	68.620.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	63.572.000,00	0,00	63.572.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.684.628.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684.628.600,00</b>	<b>100,00</b>

## 9. Beban Pegawai BLUD

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	95.570.233.263,00	0,00	95.570.233.263,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>95.570.233.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.570.233.263,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Beban Persediaan

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
148.161.776.237,71	188.848.073.360,97	(40.686.297.123,26)	(21,54)

Pencatatan Persediaan Kota Dumai menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai Beban Persediaan. Hingga pada akhir periode Beban Persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari Beban Operasional. Realisasi Beban Persediaan selama Tahun 2021 senilai Rp148.161.776.237,71 jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp188.848.073.360,97 mengalami penurunan senilai Rp40.686.297.123,26 atau sebesar 21,54% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.22 Beban Persediaan LO**

Beban Persediaan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bahan Pakai Habis	136.012.316.600,71	26.531.791.840,85	109.480.524.759,86	412,64
Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	72.041.783.011,62	(72.041.783.011,62)	(100,00)
Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.123.070.947,50	(7.123.070.947,50)	(100,00)
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	10.722.546.623,00	(10.722.546.623,00)	(100,00)
Beban Makan dan Minum	0,00	1.140.998.125,00	(1.140.998.125,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas	0,00	30.450.000,00	(30.450.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Lainnya	0,00	40.650.000,00	(40.650.000,00)	(100,00)
Beban Barang yang Akan Diserahkan	0,00	60.095.343.550,00	(60.095.343.550,00)	(100,00)
Beban Barang Dana BOS	12.077.553.837,00	11.121.439.263,00	956.114.574,00	8,60
Beban Barang Tak Habis Pakai	71.905.800,00	0,00	71.905.800,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>148.161.776.237,71</b>	<b>188.848.073.360,97</b>	<b>(40.686.297.123,26)</b>	<b>(21,54)</b>

Beban Persediaan pada Tahun 2021 dikelompokkan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 yaitu Beban Barang Pakai Habis, Beban Barang Tak Habis Pakai, dan Beban Barang Bekas dipakai.

**Tabel 5.6.23 Perbandingan Beban Persediaan LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.882.129.025,00	13.894.127.310,00	988.001.715,00	7,11
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	53.228.997.082,00	(53.228.997.082,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	81.238.593.928,95	14.873.803.607,47	66.364.790.321,48	446,19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.710.128.544,00	15.364.716.454,50	(654.587.910,50)	(4,26)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	242.930.273,00	4.288.323.900,00	(4.045.393.627,00)	(94,34)
Satuan Polisi Pamong Praja	434.783.108,00	406.305.840,00	28.477.268,00	7,01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.171.647.992,76	2.767.687.300,00	(596.039.307,24)	(21,54)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	194.977.338,00	287.911.300,00	(92.933.962,00)	(32,28)
Dinas Sosial	565.669.715,00	52.844.964.568,00	(52.279.294.853,00)	(98,93)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	175.840.557,00	230.863.100,00	(55.022.543,00)	(23,83)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	801.290.708,00	459.970.638,00	341.320.070,00	74,20
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.726.075.655,00	3.838.185.025,00	(2.112.109.370,00)	(55,03)
Dinas Lingkungan Hidup	1.522.618.216,00	4.777.685.290,00	(3.255.067.074,00)	(68,13)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.685.107.982,00	1.797.142.772,00	(112.034.790,00)	(6,23)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.261.400.237,00	818.531.373,00	442.868.864,00	54,11
Dinas Perhubungan	6.767.459.980,00	2.152.871.987,00	4.614.587.993,00	214,35
Dinas Komunikasi dan Informatika	778.071.895,00	596.066.145,00	182.005.750,00	30,53
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	346.446.616,00	481.119.776,00	(134.673.160,00)	(27,99)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	943.170.608,00	354.412.889,00	588.757.719,00	166,12
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	192.377.853,00	211.695.700,00	(19.317.847,00)	(9,13)
Dinas Perikanan	888.511.235,00	440.680.255,00	447.830.980,00	101,62
Dinas Perdagangan	124.805.309,00	209.241.425,00	(84.436.116,00)	(40,35)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	170.532.700,00	219.757.800,00	(49.225.100,00)	(22,40)
Sekretariat Daerah	3.725.917.067,00	2.936.574.436,00	789.342.631,00	26,88
Sekretariat DPRD	3.804.288.649,00	2.659.342.883,00	1.144.945.766,00	43,05
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	622.734.887,00	758.189.181,00	(135.454.294,00)	(17,87)
Badan Pendapatan Daerah	1.336.824.585,00	1.306.381.978,00	30.442.607,00	2,33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.423.641.335,00	1.303.101.724,00	120.539.611,00	9,25
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	450.244.802,00	561.830.400,00	(111.585.598,00)	(19,86)
Inspektorat	356.704.104,00	461.930.350,00	(105.226.246,00)	(22,78)
Kecamatan Dumai Barat	355.545.061,00	630.753.600,00	(275.208.539,00)	(43,63)
Kecamatan Dumai Timur	555.414.113,00	476.052.704,00	79.361.409,00	16,67
Kecamatan Dumai Selatan	679.155.014,00	692.719.462,00	(13.564.448,00)	(1,96)
Kecamatan Dumai Kota	1.045.963.108,00	531.917.488,00	514.045.620,00	96,64
Kecamatan Bukit Kapur	710.182.387,00	781.310.058,00	(71.127.671,00)	(9,10)
Kecamatan Medang Kampai	760.273.775,00	622.313.060,00	137.960.715,00	22,17
Kecamatan Sungai Sembilan	510.317.875,00	580.594.500,00	(70.276.625,00)	(12,10)
Jumlah	<b>148.161.776.237,71</b>	<b>188.848.073.360,97</b>	<b>(40.686.297.123,26)</b>	<b>(21,54)</b>

Untuk rincian beban persediaan Barang Pakai Habis dapat dilihat pada lampiran 32.

### 1. Beban Barang Pakai Habis

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.804.575.188,00	1.599.946.448,00	1.204.628.740,00	75,29
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	4.696.411.834,00	(4.696.411.834,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	81.238.488.928,95	3.839.764.737,85	77.398.724.191,10	2.015,72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.710.128.544,00	1.105.271.690,00	13.604.856.854,00	1.230,91
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	242.930.273,00	650.944.150,00	(408.013.877,00)	(62,68)
Satuan Polisi Pamong Praja	434.783.108,00	333.871.540,00	100.911.568,00	30,22
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.171.437.992,76	1.914.814.800,00	256.623.192,76	13,40
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	194.977.338,00	123.701.900,00	71.275.438,00	57,62
Dinas Sosial	565.459.715,00	212.208.581,00	353.251.134,00	166,46
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	175.840.557,00	119.161.200,00	56.679.357,00	47,57
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	801.290.708,00	175.283.638,00	626.007.070,00	357,14
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.726.075.655,00	416.885.750,00	1.309.189.905,00	314,04
Dinas Lingkungan Hidup	1.522.618.216,00	3.238.558.100,00	(1.715.939.884,00)	(52,98)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.685.107.982,00	959.560.200,00	725.547.782,00	75,61
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.261.400.237,00	175.485.373,00	1.085.914.864,00	618,81

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	6.738.311.980,00	576.369.875,00	6.161.942.105,00	1.069,10
Dinas Komunikasi dan Informatika	778.071.895,00	104.118.845,00	673.953.050,00	647,29
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	346.446.616,00	151.247.100,00	195.199.516,00	129,06
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	943.170.608,00	97.345.450,00	845.825.158,00	868,89
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	192.377.853,00	75.617.300,00	116.760.553,00	154,41
Dinas Perikanan	887.694.335,00	141.400.975,00	746.293.360,00	527,79
Dinas Perdagangan	124.805.309,00	82.022.375,00	42.782.934,00	52,16
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	170.532.700,00	84.574.100,00	85.958.600,00	101,64
Sekretariat Daerah	3.712.645.067,00	1.021.340.536,00	2.691.304.531,00	263,51
Sekretariat DPRD	3.795.409.449,00	501.494.891,00	3.293.914.558,00	656,82
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	622.734.887,00	278.204.581,00	344.530.306,00	123,84
Badan Pendapatan Daerah	1.336.824.585,00	526.494.950,00	810.329.635,00	153,91
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.423.641.335,00	515.081.225,00	908.560.110,00	176,39
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	450.244.802,00	268.673.400,00	181.571.402,00	67,58
Inspektorat	356.704.104,00	253.031.300,00	103.672.804,00	40,97
Kecamatan Dumai Barat	355.545.061,00	372.465.100,00	(16.920.039,00)	(4,54)
Kecamatan Dumai Timur	555.414.113,00	147.093.604,00	408.320.509,00	277,59
Kecamatan Dumai Selatan	660.433.914,00	253.102.512,00	407.331.402,00	160,94
Kecamatan Dumai Kota	1.045.419.508,00	222.639.950,00	822.779.558,00	369,56
Kecamatan Bukit Kapur	710.182.387,00	506.608.020,00	203.574.367,00	40,18
Kecamatan Medang Kampai	760.273.775,00	366.403.710,00	393.870.065,00	107,50
Kecamatan Sungai Sembilan	510.317.875,00	424.592.100,00	85.725.775,00	20,19
<b>Jumlah</b>	<b>136.012.316.600,71</b>	<b>26.531.791.840,85</b>	<b>109.480.524.759,86</b>	<b>412,64</b>

## 2. Beban Persediaan Bahan/Material

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	188.055.799,00	(188.055.799,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	45.632.926.943,00	(45.632.926.943,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	8.278.237.406,62	(8.278.237.406,62)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	11.133.695.600,00	(11.133.695.600,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	482.750,00	(482.750,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	479.879.000,00	(479.879.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	117.610.000,00	(117.610.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	2.249.291.375,00	(2.249.291.375,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	822.363.750,00	(822.363.750,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	112.500.000,00	(112.500.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	49.472.000,00	(49.472.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	703.381.800,00	(703.381.800,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	66.500.000,00	(66.500.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	34.100.000,00	(34.100.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	0,00	176.273.900,00	(176.273.900,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	11.486.000,00	(11.486.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	49.947.500,00	(49.947.500,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	53.500.000,00	(53.500.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	1.160.556.750,00	(1.160.556.750,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	22.443.000,00	(22.443.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	22.550.000,00	(22.550.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	117.382.000,00	(117.382.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	156.048.000,00	(156.048.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	184.098.750,00	(184.098.750,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	89.606.688,00	(89.606.688,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	47.994.000,00	(47.994.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>72.041.783.011,62</b>	<b>(72.041.783.011,62)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban persediaan bahan/material pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Barang Pakai Habis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 3. Beban Barang Perawatan Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	38.646.000,00	(38.646.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	64.479.905,00	(64.479.905,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	240.460.198,00	(240.460.198,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.357.315.564,50	(1.357.315.564,50)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	238.858.000,00	(238.858.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	42.837.000,00	(42.837.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	151.544.000,00	(151.544.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	102.628.000,00	(102.628.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	119.309.587,00	(119.309.587,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	47.100.000,00	(47.100.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	68.420.000,00	(68.420.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	122.800.000,00	(122.800.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	586.048.540,00	(586.048.540,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	30.060.000,00	(30.060.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	86.570.000,00	(86.570.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	325.265.000,00	(325.265.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	79.331.000,00	(79.331.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	106.251.676,00	(106.251.676,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	134.874.239,00	(134.874.239,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	97.531.400,00	(97.531.400,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	88.075.380,00	(88.075.380,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	63.850.000,00	(63.850.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	59.050.000,00	(59.050.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	868.445.000,00	(868.445.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	523.852.331,00	(523.852.331,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	271.284.800,00	(271.284.800,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	265.103.128,00	(265.103.128,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	231.191.499,00	(231.191.499,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	160.236.000,00	(160.236.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	121.264.000,00	(121.264.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	14.800.000,00	(14.800.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	77.600.000,00	(77.600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	92.134.200,00	(92.134.200,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	108.329.000,00	(108.329.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	27.219.000,00	(27.219.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	86.531.500,00	(86.531.500,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	23.775.000,00	(23.775.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123.070.947,50</b>	<b>(7.123.070.947,50)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Bahan Perawatan Kendaraan Bermotor pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 4. Beban Cetak dan Penggandaan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	946.039.800,00	(946.039.800,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	1.913.925.275,00	(1.913.925.275,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	1.186.496.265,00	(1.186.496.265,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	327.260.100,00	(327.260.100,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	17.039.000,00	(17.039.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	29.597.300,00	(29.597.300,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	80.149.500,00	(80.149.500,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	58.381.400,00	(58.381.400,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	179.426.800,00	(179.426.800,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	64.601.900,00	(64.601.900,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	204.267.000,00	(204.267.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	109.326.000,00	(109.326.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	130.714.900,00	(130.714.900,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	695.022.572,00	(695.022.572,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	208.879.000,00	(208.879.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	547.855.312,00	(547.855.312,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	346.116.300,00	(346.116.300,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	213.821.000,00	(213.821.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	88.093.200,00	(88.093.200,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	38.047.000,00	(38.047.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	34.930.000,00	(34.930.000,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	51.883.050,00	(51.883.050,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	26.186.200,00	(26.186.200,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	453.788.900,00	(453.788.900,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	473.438.911,00	(473.438.911,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	186.256.800,00	(186.256.800,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	514.783.900,00	(514.783.900,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	556.829.000,00	(556.829.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	110.371.000,00	(110.371.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	87.635.050,00	(87.635.050,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	126.106.500,00	(126.106.500,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	95.311.100,00	(95.311.100,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	163.384.000,00	(163.384.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	111.341.850,00	(111.341.850,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	151.629.488,00	(151.629.488,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	121.383.850,00	(121.383.850,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	72.227.400,00	(72.227.400,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>10.722.546.623,00</b>	<b>(10.722.546.623,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Cetak dan Penggandaan pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Barang Pakai Habis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 5. Beban Makan dan Minum

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	219.745.000,00	(219.745.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	921.253.125,00	(921.253.125,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.998.125,00</b>	<b>(1.140.998.125,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Makan dan Minum pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Barang Pakai Habis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 6. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	30.450.000,00	(30.450.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450.000,00</b>	<b>(30.450.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Barang Pakai Habis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 7. Beban Pakaian Lainnya

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	40.650.000,00	(40.650.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>(40.650.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Pakaian Lainnya pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Barang Pakai Habis sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 8. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	1.038.000.000,00	(1.038.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.441.173.500,00	(1.441.173.500,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	3.381.000.000,00	(3.381.000.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	141.300.000,00	(141.300.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	52.216.409.600,00	(52.216.409.600,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	939.881.900,00	(939.881.900,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	298.125.000,00	(298.125.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	9.800.000,00	(9.800.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	539.500.000,00	(539.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	90.153.550,00	(90.153.550,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>60.095.343.550,00</b>	<b>(60.095.343.550,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Lain-lain sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 9. Beban Persediaan Dana BOS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.077.553.837,00	11.121.439.263,00	956.114.574,00	8,60
<b>Jumlah</b>	<b>12.077.553.837,00</b>	<b>11.121.439.263,00</b>	<b>956.114.574,00</b>	<b>8,60</b>

### 10. Beban Barang Tak Habis Pakai

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Dinas Sosial	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	29.148.000,00	0,00	29.148.000,00	100,00
Dinas Perikanan	816.900,00	0,00	816.900,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	13.272.000,00	0,00	13.272.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	8.879.200,00	0,00	8.879.200,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	18.721.100,00	0,00	18.721.100,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	543.600,00	0,00	543.600,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>71.905.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.905.800,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. Beban Jasa

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
248.452.652.214,26	314.260.640.850,70	(65.807.988.636,44)	(20,94)

Beban Jasa Kota Dumai Tahun 2021 terealisasi senilai Rp248.452.652.214,26, jika dibandingkan Tahun 2020 senilai Rp314.260.640.850,70 mengalami penurunan senilai Rp65.807.988.636,44 atau sebesar 20,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.24 Rincian Beban Jasa Menurut Jenisnya**

Beban Jasa	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	199.257.390.982,76	41.501.340.073,70	157.756.050.909,06	380,12
Beban Jasa Asuransi	20.646.503.190,50	18.486.606.100,00	2.159.897.090,50	11,68
Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	2.623.435.809,00	(2.623.435.809,00)	(100,00)
Beban Jasa Sewa Gedung	2.215.125.012,00	447.879.092,00	1.767.245.920,00	394,58
Beban Jasa Sewa Kendaraan	0,00	426.041.684,00	(426.041.684,00)	(100,00)
Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat	0,00	7.249.980.000,00	(7.249.980.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor	0,00	624.646.000,00	(624.646.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultasi	5.143.326.731,00	5.314.264.500,00	(170.937.769,00)	(3,22)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	11.000.000,00	39.000.000,00	(28.000.000,00)	(71,79)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.619.925.764,00	1.339.670.904,00	2.280.254.860,00	170,21
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium PNS - LO	0,00	66.645.595.359,00	(66.645.595.359,00)	(100,00)
Beban Honorarium Non PNS - LO	0,00	12.537.565.000,00	(12.537.565.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Dana BOS	14.448.882.274,00	14.090.673.524,00	358.208.750,00	2,54
Beban Jasa Peserta dan Delegasi	0,00	387.375.000,00	(387.375.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Perangkat LPMK/ RT/Kader Pos Yandu	0,00	8.374.420.000,00	(8.374.420.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Uji Laboratorium	0,00	87.705.934,00	(87.705.934,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan/Pengamanan/Supir/Operator Alat Berat/Operator Komputer/Administrasi	0,00	52.860.798.812,00	(52.860.798.812,00)	(100,00)
Beban Jasa RT/LPMK/Kader	0,00	3.661.150.000,00	(3.661.150.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pengajar	0,00	23.109.345.000,00	(23.109.345.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Medis/Para Medis	0,00	18.793.088.000,00	(18.793.088.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Teknisi Listrik	0,00	42.835.000,00	(42.835.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Moderator/Pembawa Acara/MC	0,00	20.150.000,00	(20.150.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Penyuluh	0,00	1.151.300.000,00	(1.151.300.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh)	0,00	2.586.983.473,00	(2.586.983.473,00)	(100,00)
Beban Jasa Binatu/Laundry	0,00	56.555.000,00	(56.555.000,00)	(100,00)
Beban Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	0,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengamanan Hutan Dan Lahan	0,00	206.400.000,00	(206.400.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Kamar	0,00	2.192.000.420,00	(2.192.000.420,00)	(100,00)
Beban Jaminan Persalinan	0,00	1.472.167.317,00	(1.472.167.317,00)	(100,00)
Beban Insentif	0,00	6.785.414.871,00	(6.785.414.871,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman	0,00	17.356.272.728,00	(17.356.272.728,00)	(100,00)
Beban Pakaian	0,00	3.342.452.250,00	(3.342.452.250,00)	(100,00)

Beban Jasa	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	0,00	435.779.000,00	(435.779.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.959.848.260,00	0,00	2.959.848.260,00	100,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	150.650.000,00	0,00	150.650.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>248.452.652.214,26</b>	<b>314.260.640.850,70</b>	<b>(65.807.988.636,44)</b>	<b>(20,94)</b>

**Tabel 5.6.25 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.424.055.197,00	40.795.783.652,00	(371.728.455,00)	(0,91)
Dinas Kesehatan	105.517.336.955,76	42.872.310.661,00	62.645.026.294,76	146,12
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	97.916.953.367,70	(97.916.953.367,70)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.345.494.451,00	18.546.326.448,00	(7.200.831.997,00)	(38,83)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.026.571.638,00	9.815.491.507,00	(8.788.919.869,00)	(89,54)
Satuan Polisi Pamong Praja	1.302.644.773,00	2.041.789.739,00	(739.144.966,00)	(36,20)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	972.084.345,00	9.929.975.433,00	(8.957.891.088,00)	(90,21)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.160.233.945,00	1.335.996.608,00	(175.762.663,00)	(13,16)
Dinas Sosial	1.543.336.087,00	2.555.932.989,00	(1.012.596.902,00)	(39,62)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	662.366.200,00	623.186.947,00	39.179.253,00	6,29
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.015.416.998,00	925.763.351,00	89.653.647,00	9,68
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.198.171.351,00	4.676.905.208,00	(1.478.733.857,00)	(31,62)
Dinas Lingkungan Hidup	8.138.358.997,00	8.569.921.648,00	(431.562.651,00)	(5,04)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	1.126.184.580,00	1.099.510.098,00	26.674.482,00	2,43
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.209.899.161,00	2.181.188.237,00	(971.289.076,00)	(44,53)
Dinas Perhubungan	17.407.803.937,00	10.708.580.144,00	6.699.223.793,00	62,56
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.221.873.094,00	6.232.297.921,00	(1.010.424.827,00)	(16,21)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	772.647.535,00	844.406.619,00	(71.759.084,00)	(8,50)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.424.590.196,00	1.808.237.460,00	(383.647.264,00)	(21,22)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	535.488.085,00	724.117.059,00	(188.628.974,00)	(26,05)
Dinas Perikanan	1.158.264.926,00	1.126.361.997,00	31.902.929,00	2,83
Dinas Perdagangan	1.670.329.077,00	1.657.578.963,00	12.750.114,00	0,77
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	959.948.397,00	930.679.074,00	29.269.323,00	3,14
Sekretariat Daerah	11.727.444.406,50	13.177.375.226,00	(1.449.930.819,50)	(11,00)
Sekretariat DPRD	3.303.765.042,00	4.096.433.464,00	(792.668.422,00)	(19,35)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.296.821.000,00	2.246.848.450,00	(950.027.450,00)	(42,28)
Badan Pendapatan Daerah	2.266.126.652,00	3.436.252.374,00	(1.170.125.722,00)	(34,05)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.068.670.500,00	4.200.906.597,00	(132.236.097,00)	(3,15)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.204.618.000,00	1.170.248.870,00	1.034.369.130,00	88,39
Inspektorat	576.952.000,00	1.595.984.500,00	(1.019.032.500,00)	(63,85)
Kecamatan Dumai Barat	2.046.401.667,00	2.275.796.199,00	(229.394.532,00)	(10,08)
Kecamatan Dumai Timur	2.793.000.136,00	2.841.439.060,00	(48.438.924,00)	(1,70)
Kecamatan Dumai Selatan	2.349.645.192,00	2.630.680.941,00	(281.035.749,00)	(10,68)
Kecamatan Dumai Kota	2.500.652.979,00	2.769.519.565,00	(268.866.586,00)	(9,71)
Kecamatan Bukit Kapur	2.109.873.837,00	2.082.912.779,00	26.961.058,00	1,29
Kecamatan Medang Kampai	1.271.179.568,00	1.484.466.608,00	(213.287.040,00)	(14,37)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Sungai Sembilan	2.144.401.309,00	2.332.481.087,00	(188.079.778,00)	(8,06)
<b>Jumlah</b>	<b>248.452.652.214,26</b>	<b>314.260.640.850,70</b>	<b>(65.807.988.636,44)</b>	<b>(20,94)</b>

### 1. Beban Jasa Kantor

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.390.635.924,00	2.035.869.678,00	23.354.766.246,00	1.147,16
Dinas Kesehatan	80.267.714.660,76	1.887.926.102,00	78.379.788.558,76	4.151,63
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	9.658.427.053,70	(9.658.427.053,70)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.913.872.491,00	800.861.148,00	7.113.011.343,00	888,17
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	926.571.638,00	8.985.659.762,00	(8.059.088.124,00)	(89,69)
Satuan Polisi Pamong Praja	1.300.314.150,00	87.814.160,00	1.212.499.990,00	1.380,76
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	965.651.606,00	295.441.948,00	670.209.658,00	226,85
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.160.233.945,00	55.382.608,00	1.104.851.337,00	1.994,94
Dinas Sosial	1.470.461.755,00	217.163.014,00	1.253.298.741,00	577,12
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	660.690.040,00	141.799.947,00	518.890.093,00	365,93
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	999.016.998,00	214.712.251,00	784.304.747,00	365,28
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.723.435.151,00	237.262.058,00	2.486.173.093,00	1.047,86
Dinas Lingkungan Hidup	8.080.030.595,00	288.209.264,00	7.791.821.331,00	2.703,53
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.126.184.580,00	185.337.098,00	940.847.482,00	507,64
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.204.629.161,00	961.105.653,00	243.523.508,00	25,34
Dinas Perhubungan	16.575.854.988,00	1.857.069.618,00	14.718.785.370,00	792,58
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.118.373.094,00	5.239.900.781,00	(121.527.687,00)	(2,32)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	769.047.535,00	157.841.296,00	611.206.239,00	387,23
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.286.617.096,00	334.817.738,00	951.799.358,00	284,27
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	532.688.085,00	182.910.079,00	349.778.006,00	191,23
Dinas Perikanan	1.087.381.926,00	185.966.902,00	901.415.024,00	484,72
Dinas Perdagangan	1.640.850.177,00	287.067.281,00	1.353.782.896,00	471,59
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	955.609.497,00	135.020.764,00	820.588.733,00	607,75
Sekretariat Daerah	10.780.719.889,00	3.303.947.547,00	7.476.772.342,00	226,30
Sekretariat DPRD	2.485.687.541,00	887.806.165,00	1.597.881.376,00	179,98
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.288.533.000,00	234.428.850,00	1.054.104.150,00	449,65
Badan Pendapatan Daerah	2.070.593.652,00	551.105.767,00	1.519.487.885,00	275,72
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.510.825.500,00	716.133.400,00	2.794.692.100,00	390,25
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.279.648.000,00	60.951.200,00	1.218.696.800,00	1.999,46
Inspektorat	546.577.000,00	44.180.500,00	502.396.500,00	1.137,15
Kecamatan Dumai Barat	2.042.725.887,00	171.973.559,00	1.870.752.328,00	1.087,81
Kecamatan Dumai Timur	2.790.900.136,00	173.295.940,00	2.617.604.196,00	1.510,48
Kecamatan Dumai Selatan	2.348.145.192,00	263.620.241,00	2.084.524.951,00	790,73
Kecamatan Dumai Kota	2.485.057.139,00	212.450.245,00	2.272.606.894,00	1.069,71
Kecamatan Bukit Kapur	2.082.973.837,00	208.418.886,00	1.874.554.951,00	899,42
Kecamatan Medang Kampai	1.264.737.808,00	72.568.858,00	1.192.168.950,00	1.642,81
Kecamatan Sungai Sembilan	2.124.401.309,00	166.892.712,00	1.957.508.597,00	1.172,91
<b>Jumlah</b>	<b>199.257.390.982,76</b>	<b>41.501.340.073,70</b>	<b>157.756.050.909,06</b>	<b>380,12</b>

Beban Jasa Kantor pada Tahun 2021 dikelompokkan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021. Untuk rincian Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada lampiran 33.

## 2. Beban Jasa Asuransi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	3.514.905.009,00	(3.514.905.009,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	20.417.918.776,00	14.788.969.638,00	5.628.949.138,00	38,06
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.146.960,00	2.293.930,00	(1.146.970,00)	(50,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.330.623,00	8.311.579,00	(5.980.956,00)	(71,96)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.432.739,00	9.493.200,00	(3.060.461,00)	(32,24)
Dinas Sosial	1.624.332,00	0,00	1.624.332,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.676.160,00	0,00	1.676.160,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.411.200,00	2.721.600,00	(1.310.400,00)	(48,15)
Dinas Lingkungan Hidup	30.683.402,00	0,00	30.683.402,00	100,00
Dinas Perhubungan	1.379.700,00	0,00	1.379.700,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	3.342.222,00	(3.342.222,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.338.900,00	0,00	4.338.900,00	100,00
Sekretariat Daerah	149.649.517,50	141.178.275,00	8.471.242,50	6,00
Sekretariat DPRD	21.297.501,00	13.089.167,00	8.208.334,00	62,71
Kecamatan Dumai Barat	3.675.780,00	305.640,00	3.370.140,00	1.102,65
Kecamatan Dumai Kota	1.995.840,00	1.995.840,00	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	941.760,00	0,00	941.760,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.646.503.190,50</b>	<b>18.486.606.100,00</b>	<b>2.159.897.090,50</b>	<b>11,68</b>

## 3. Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	21.915.220,00	(21.915.220,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	181.870.876,00	(181.870.876,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	53.710.920,00	(53.710.920,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	664.831.970,00	(664.831.970,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	31.413.154,00	(31.413.154,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	26.775.000,00	(26.775.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	92.694.285,00	(92.694.285,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	14.800.000,00	(14.800.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	66.989.975,00	(66.989.975,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	9.124.000,00	(9.124.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	13.644.000,00	(13.644.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	70.850.000,00	(70.850.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	255.732.550,00	(255.732.550,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	11.281.000,00	(11.281.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	17.047.500,00	(17.047.500,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	37.988.526,00	(37.988.526,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	13.707.140,00	(13.707.140,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	28.782.803,00	(28.782.803,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	18.425.000,00	(18.425.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	31.221.740,00	(31.221.740,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	52.547.095,00	(52.547.095,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	33.376.730,00	(33.376.730,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	25.123.310,00	(25.123.310,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	257.165.804,00	(257.165.804,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	142.549.042,00	(142.549.042,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	125.380.600,00	(125.380.600,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	121.821.607,00	(121.821.607,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	56.418.197,00	(56.418.197,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	31.298.770,00	(31.298.770,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	43.654.000,00	(43.654.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	8.627.000,00	(8.627.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	12.006.120,00	(12.006.120,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	4.355.000,00	(4.355.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	28.416.000,00	(28.416.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	2.810.000,00	(2.810.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	11.397.500,00	(11.397.500,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	3.683.375,00	(3.683.375,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.435.809,00</b>	<b>(2.623.435.809,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Perawatan Kendaraan Bermotor pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 4. Beban Jasa Sewa Gedung

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	422.010.000,00	19.955.000,00	402.055.000,00	2.014,81
Dinas Kesehatan	1.374.670.012,00	60.000.000,00	1.314.670.012,00	2.191,12
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	8.939.092,00	(8.939.092,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Dinas Sosial	0,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.900.000,00	3.000.000,00	11.900.000,00	396,67
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	41.050.000,00	16.920.000,00	24.130.000,00	142,61
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	16.960.000,00	(16.960.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	60.000.000,00	134.640.000,00	(74.640.000,00)	(55,44)
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.400.000,00	123.575.000,00	(121.175.000,00)	(98,06)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	115.615.000,00	26.150.000,00	89.465.000,00	342,12
Sekretariat DPRD	0,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	106.700.000,00	15.040.000,00	91.660.000,00	609,44
Kecamatan Dumai Kota	0,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.215.125.012,00</b>	<b>447.879.092,00</b>	<b>1.767.245.920,00</b>	<b>394,58</b>

#### 5. Beban Jasa Sewa Kendaraan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	39.487.500,00	(39.487.500,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	6.440.000,00	(6.440.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	89.100.000,00	(89.100.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	16.846.300,00	(16.846.300,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	110.850.000,00	(110.850.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	13.992.800,00	(13.992.800,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	14.545.084,00	(14.545.084,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	880.000,00	(880.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.720.000,00	(2.720.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	71.180.000,00	(71.180.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>426.041.684,00</b>	<b>(426.041.684,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Sewa Kendaraan pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Sewa Peralatan dan Mesin sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 6. Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	7.249.980.000,00	(7.249.980.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.980.000,00</b>	<b>(7.249.980.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Sewa Alat-alat Berat pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Sewa Peralatan dan Mesin sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

## 7. Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	32.175.000,00	(32.175.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	199.470.000,00	(199.470.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	212.389.000,00	(212.389.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	57.600.000,00	(57.600.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	67.672.000,00	(67.672.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	3.740.000,00	(3.740.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	15.200.000,00	(15.200.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>624.646.000,00</b>	<b>(624.646.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Sewa Peralatan Kantor pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Sewa Peralatan dan Mesin sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

## 8. Beban Jasa Konsultasi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	2.403.828.482,00	0,00	2.403.828.482,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.456.011.000,00	3.651.803.500,00	(2.195.792.500,00)	(60,13)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	67.001.500,00	(67.001.500,00)	(100,00)
Dinas Sosial	5.550.000,00	14.640.000,00	(9.090.000,00)	(62,09)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	91.282.500,00	(91.282.500,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	215.815.000,00	(215.815.000,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	588.069.249,00	701.823.000,00	(113.753.751,00)	(16,21)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	108.673.100,00	0,00	108.673.100,00	100,00
Dinas Perikanan	13.783.000,00	79.548.000,00	(65.765.000,00)	(82,67)
Dinas Perdagangan	29.478.900,00	0,00	29.478.900,00	100,00
Sekretariat Daerah	10.000.000,00	237.167.000,00	(227.167.000,00)	(95,78)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	11.484.000,00	(11.484.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	162.533.000,00	38.700.000,00	123.833.000,00	319,98
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	265.400.000,00	99.770.000,00	165.630.000,00	166,01
Kecamatan Dumai Timur	0,00	20.400.000,00	(20.400.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	24.830.000,00	(24.830.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.143.326.731,00</b>	<b>5.314.264.500,00</b>	<b>(170.937.769,00)</b>	<b>(3,22)</b>

### 9. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.000.000,00	39.000.000,00	(28.000.000,00)	(71,79)
<b>Jumlah</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(71,79)</b>

### 10. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.405.739,00	10.250.000,00	89.155.739,00	869,81
Dinas Kesehatan	880.595.025,00	9.000.000,00	871.595.025,00	9.684,39
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	233.960.904,00	(233.960.904,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	361.600.000,00	133.200.000,00	228.400.000,00	171,47
Dinas Lingkungan Hidup	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	182.500.000,00	83.000.000,00	99.500.000,00	119,88
Dinas Komunikasi dan Informatika	67.000.000,00	20.500.000,00	46.500.000,00	226,83
Sekretariat Daerah	125.985.000,00	3.000.000,00	122.985.000,00	4.099,50
Sekretariat DPRD	796.780.000,00	684.000.000,00	112.780.000,00	16,49
Badan Pendapatan Daerah	33.000.000,00	35.500.000,00	(2.500.000,00)	(7,04)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	259.915.000,00	59.500.000,00	200.415.000,00	336,83
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	753.270.000,00	9.000.000,00	744.270.000,00	8.269,67
Inspektorat	30.375.000,00	58.760.000,00	(28.385.000,00)	(48,31)
Kecamatan Medang Kampai	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.619.925.764,00</b>	<b>1.339.670.904,00</b>	<b>2.280.254.860,00</b>	<b>170,21</b>

### 11. Beban Honorarium Non Pegawai

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>(3.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Honorarium Non Pegawai pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 12. Beban Honorarium PNS - LO

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	532.300.000,00	(532.300.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	6.348.636.141,00	(6.348.636.141,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	52.958.509.218,00	(52.958.509.218,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	424.900.000,00	(424.900.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	7.400.000,00	(7.400.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	146.600.000,00	(146.600.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	65.350.000,00	(65.350.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	697.600.000,00	(697.600.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	532.400.000,00	(532.400.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	275.600.000,00	(275.600.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	27.320.000,00	(27.320.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	6.540.000,00	(6.540.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	22.900.000,00	(22.900.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	5.900.000,00	(5.900.000,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	680.000,00	(680.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	365.440.000,00	(365.440.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	794.520.000,00	(794.520.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	927.000.000,00	(927.000.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.308.900.000,00	(2.308.900.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	100.950.000,00	(100.950.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	91.900.000,00	(91.900.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>66.645.595.359,00</b>	<b>(66.645.595.359,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Honorarium PNS pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 13. Beban Honorarium Non PNS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	2.400.850.000,00	(2.400.850.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	10.136.715.000,00	(10.136.715.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>12.537.565.000,00</b>	<b>(12.537.565.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Honorarium Non PNS pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 14. Beban Jasa Dana BOS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.448.882.274,00	14.090.673.524,00	358.208.750,00	2,54
<b>Jumlah</b>	<b>14.448.882.274,00</b>	<b>14.090.673.524,00</b>	<b>358.208.750,00</b>	<b>2,54</b>

### 15. Beban Jasa Peserta dan Delegasi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	56.000.000,00	(56.000.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	157.000.000,00	(157.000.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	124.425.000,00	(124.425.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	13.200.000,00	(13.200.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	11.300.000,00	(11.300.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	18.700.000,00	(18.700.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>387.375.000,00</b>	<b>(387.375.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Peserta dan Delegasi pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 16. Beban Jasa Perangkat LPMK/ RT/Kader Pos Yandu

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	0,00	204.720.000,00	(204.720.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	1.014.000.000,00	(1.014.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	1.427.700.000,00	(1.427.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	1.296.900.000,00	(1.296.900.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	1.335.700.000,00	(1.335.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	1.232.700.000,00	(1.232.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	627.600.000,00	(627.600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	1.235.100.000,00	(1.235.100.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374.420.000,00</b>	<b>(8.374.420.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Perangkat LPMK/RT/Kader Pos Yandu pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 17. Beban Jasa Uji Laboratorium

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	31.821.500,00	(31.821.500,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	8.800.000,00	(8.800.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	47.084.434,00	(47.084.434,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>87.705.934,00</b>	<b>(87.705.934,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Uji Laboratorium pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 18. Beban Jasa Tenaga Kebersihan/Pengamanan/Supir/Operator Alat Berat/Operator Komputer/Administrasi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.449.200.000,00	(1.449.200.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	1.587.690.000,00	(1.587.690.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	4.459.200.000,00	(4.459.200.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.266.782.000,00	(4.266.782.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	421.084.198,00	(421.084.198,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	927.775.000,00	(927.775.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	754.500.000,00	(754.500.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	352.100.000,00	(352.100.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	1.338.880.000,00	(1.338.880.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	417.600.000,00	(417.600.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	497.500.000,00	(497.500.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.488.350.000,00	(1.488.350.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	7.510.407.600,00	(7.510.407.600,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	591.600.000,00	(591.600.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	422.400.000,00	(422.400.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	7.125.660.000,00	(7.125.660.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	821.200.000,00	(821.200.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	573.085.020,00	(573.085.020,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	872.065.000,00	(872.065.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	443.995.240,00	(443.995.240,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	605.800.000,00	(605.800.000,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	1.336.454.952,00	(1.336.454.952,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	620.600.000,00	(620.600.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	4.154.720.000,00	(4.154.720.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	1.472.600.000,00	(1.472.600.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	824.100.000,00	(824.100.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.310.100.000,00	(1.310.100.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	611.400.000,00	(611.400.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	707.300.000,00	(707.300.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	252.200.000,00	(252.200.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	747.600.000,00	(747.600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	995.900.000,00	(995.900.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	644.550.000,00	(644.550.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	785.800.000,00	(785.800.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	408.279.802,00	(408.279.802,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	414.700.000,00	(414.700.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	647.620.000,00	(647.620.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>52.860.798.812,00</b>	<b>(52.860.798.812,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Tenaga Kebersihan/Pengamanan/Supir/Operator Alat Berat/Operator Komputer/Administrasi pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 19. Beban Jasa RT/LPMK/Kader

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.657.500.000,00	(3.657.500.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	3.650.000,00	(3.650.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661.150.000,00</b>	<b>(3.661.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa RT/LPMK/Kader pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

## 20. Beban Jasa Tenaga Pengajar

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	21.335.200.000,00	(21.335.200.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	1.774.145.000,00	(1.774.145.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>23.109.345.000,00</b>	<b>(23.109.345.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Tenaga Pengajar pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk

## 21. Beban Jasa Medis/Para Medis

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	8.631.235.000,00	(8.631.235.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	9.824.653.000,00	(9.824.653.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	337.200.000,00	(337.200.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>18.793.088.000,00</b>	<b>(18.793.088.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Medis/Para Medis pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

## 22. Beban Jasa Teknisi Listrik

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	19.835.000,00	(19.835.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>42.835.000,00</b>	<b>(42.835.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Beban Jasa Teknisi Listrik pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

## 23. Beban Jasa Tenaga Moderator/Pembawa Acara/MC

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	2.650.000,00	(2.650.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	8.650.000,00	(8.650.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>(20.150.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Tenaga Moderator/Pembawa Acara/MC pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 24. Beban Jasa Tenaga Penyuluh

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	366.500.000,00	(366.500.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	398.400.000,00	(398.400.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	156.000.000,00	(156.000.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	134.400.000,00	(134.400.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.300.000,00</b>	<b>(1.151.300.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Tenaga Penyuluh pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 25. Beban Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	39.000.000,00	(39.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	817.852.500,00	(817.852.500,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	271.110.973,00	(271.110.973,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	202.820.000,00	(202.820.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.237.200.000,00	(1.237.200.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.983.473,00</b>	<b>(2.586.983.473,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Tenaga Harian Lepas (Buruh) pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 26. Beban Jasa Binatu/Laundry

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	0,00	56.555.000,00	(56.555.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>56.555.000,00</b>	<b>(56.555.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Binatu/Laundry pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 27. Beban Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah	0,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>(8.600.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 28. Beban Jasa Pengamanan Hutan Dan Lahan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	149.000.000,00	(149.000.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	57.400.000,00	(57.400.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>206.400.000,00</b>	<b>(206.400.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Pengamanan Hutan Dan Lahan pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 29. Beban Sewa Kamar

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	1.906.892.420,00	(1.906.892.420,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	9.630.000,00	(9.630.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	6.760.000,00	(6.760.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	108.410.000,00	(108.410.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.101.000,00	(3.101.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	124.907.000,00	(124.907.000,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.000.420,00</b>	<b>(2.192.000.420,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Sewa Kamar senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 30. Beban Jaminan Persalinan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	1.472.167.317,00	(1.472.167.317,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.167.317,00</b>	<b>(1.472.167.317,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jaminan Persalinan senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 31. Beban Jasa Insentif

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0,00	1.476.200.000,00	(1.476.200.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	4.251.714.871,00	(4.251.714.871,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	50.100.000,00	(50.100.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	1.007.400.000,00	(1.007.400.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785.414.871,00</b>	<b>(6.785.414.871,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Jasa Insentif senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 32. Beban Makanan dan Minuman

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.101.182.730,00	(1.101.182.730,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	1.839.991.667,00	(1.839.991.667,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	2.511.501.000,00	(2.511.501.000,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	403.515.400,00	(403.515.400,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	28.033.420,00	(28.033.420,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	497.166.000,00	(497.166.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.519.911.000,00	(3.519.911.000,00)	(100,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	216.114.000,00	(216.114.000,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	71.265.000,00	(71.265.000,00)	(100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	29.363.000,00	(29.363.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	109.105.800,00	(109.105.800,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	162.363.250,00	(162.363.250,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	185.320.000,00	(185.320.000,00)	(100,00)
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	0,00	25.692.000,00	(25.692.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	331.010.000,00	(331.010.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	768.399.000,00	(768.399.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	72.495.000,00	(72.495.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	44.097.500,00	(44.097.500,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	110.712.500,00	(110.712.500,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	37.269.000,00	(37.269.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	14.850.000,00	(14.850.000,00)	(100,00)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	15.535.000,00	(15.535.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	1.974.754.600,00	(1.974.754.600,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	491.072.890,00	(491.072.890,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	222.205.000,00	(222.205.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	180.495.000,00	(180.495.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	269.475.000,00	(269.475.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	112.986.900,00	(112.986.900,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	97.390.000,00	(97.390.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	329.550.000,00	(329.550.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	173.262.000,00	(173.262.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	316.731.500,00	(316.731.500,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	302.513.480,00	(302.513.480,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	196.904.091,00	(196.904.091,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	347.855.000,00	(347.855.000,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	246.185.000,00	(246.185.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356.272.728,00</b>	<b>(17.356.272.728,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Makan Minum senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 33. Beban Pakaian

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	27.750.000,00	(27.750.000,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	271.542.300,00	(271.542.300,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	174.406.000,00	(174.406.000,00)	(100,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	20.790.000,00	(20.790.000,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	347.348.000,00	(347.348.000,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.263.083.500,00	(1.263.083.500,00)	(100,00)
Dinas Sosial	0,00	32.975.000,00	(32.975.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	115.755.800,00	(115.755.800,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	35.150.000,00	(35.150.000,00)	(100,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	64.495.000,00	(64.495.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	47.125.000,00	(47.125.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	273.826.000,00	(273.826.000,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	375.581.200,00	(375.581.200,00)	(100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	20.730.000,00	(20.730.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	66.810.000,00	(66.810.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	21.710.000,00	(21.710.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.850.000,00	(3.850.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	37.825.000,00	(37.825.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	70.944.200,00	(70.944.200,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	60.610.000,00	(60.610.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	9.545.250,00	(9.545.250,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.452.250,00</b>	<b>(3.342.452.250,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Pakaian senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 34. Beban Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	116.400.000,00	(116.400.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	57.125.000,00	(57.125.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	56.250.000,00	(56.250.000,00)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	40.600.000,00	(40.600.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	55.270.000,00	(55.270.000,00)	(100,00)
Dinas Perikanan	0,00	15.750.000,00	(15.750.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	74.400.000,00	(74.400.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	15.984.000,00	(15.984.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>435.779.000,00</b>	<b>(435.779.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Jasa Kantor sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

### 35. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60.121.260,00	0,00	60.121.260,00	100,00
Dinas Kesehatan	162.110.000,00	0,00	162.110.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.968.464.000,00	0,00	1.968.464.000,00	100,00
Dinas Sosial	61.450.000,00	0,00	61.450.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	70.675.000,00	0,00	70.675.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
Dinas Perikanan	47.100.000,00	0,00	47.100.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	423.075.000,00	0,00	423.075.000,00	100,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	32.530.000,00	0,00	32.530.000,00	100,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.959.848.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.848.260,00</b>	<b>100,00</b>

### 36. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Dinas Sosial	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>150.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.650.000,00</b>	<b>100,00</b>

## 4. Beban Pemeliharaan

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
46.127.809.752,07	22.531.887.700,02	23.595.922.052,05	104,72

Biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan memelihara aset Kota Dumai, baik aset sumber daya manusia maupun aset peralatan, kendaraan dan gedung. Realisasi Beban Pemeliharaan selama Tahun 2021 senilai Rp46.127.809.752,07, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp22.531.887.700,02 mengalami kenaikan senilai Rp23.595.922.052,05 atau sebesar 104,72% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.26 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	50.286.500,00	184.652.000,00	(134.365.500,00)	(72,77)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.169.445.166,00	7.506.779.459,02	12.662.665.706,98	168,68
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	9.540.075.108,07	8.221.871.254,00	1.318.203.854,07	16,03
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.273.542.000,00	3.354.359.944,00	10.919.182.056,00	325,52
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	186.785.000,00	293.425.000,00	(106.640.000,00)	(36,34)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Dana Bos	1.907.675.978,00	2.827.243.950,00	(919.567.972,00)	(32,53)
Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	143.556.093,00	(143.556.093,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>46.127.809.752,07</b>	<b>22.531.887.700,02</b>	<b>23.595.922.052,05</b>	<b>104,72</b>

**Tabel 5.6.27 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.110.885.678,00	2.971.332.749,02	(860.447.071,02)	(28,96)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	4.942.416.821,00	(4.942.416.821,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	9.495.216.418,11	1.642.490.066,00	7.852.726.352,11	478,10
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.535.818.363,00	3.324.983.500,00	10.210.834.863,00	307,09
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	187.751.613,00	6.000.000,00	181.751.613,00	3.029,19
Satuan Polisi Pamong Praja	302.431.400,00	17.150.000,00	285.281.400,00	1.663,45
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	417.135.063,00	6.012.300,00	411.122.763,00	6.838,03
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.086.129,00	8.000.000,00	117.086.129,00	1.463,58
Dinas Sosial	141.830.316,00	338.060.837,00	(196.230.521,00)	(58,05)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	160.390.300,00	155.750.000,00	4.640.300,00	2,98
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	176.262.900,00	95.565.000,00	80.697.900,00	84,44
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.445.801.420,00	1.275.182.000,00	170.619.420,00	13,38
Dinas Lingkungan Hidup	3.811.343.107,00	62.020.000,00	3.749.323.107,00	6.045,35
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	241.062.350,00	174.050.000,00	67.012.350,00	38,50
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.900.044,00	22.200.000,00	116.700.044,00	525,68
Dinas Perhubungan	3.991.037.490,96	3.957.595.675,00	33.441.815,96	0,85
Dinas Komunikasi dan Informatika	286.279.678,00	15.845.000,00	270.434.678,00	1.706,75
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.599.681,00	4.269.730,00	166.329.951,00	3.895,56
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	385.205.850,00	358.858.000,00	26.347.850,00	7,34
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	322.287.600,00	17.460.000,00	304.827.600,00	1.745,86
Dinas Perikanan	203.188.099,00	499.183.469,00	(295.995.370,00)	(59,30)
Dinas Perdagangan	204.046.380,00	38.915.000,00	165.131.380,00	424,34
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	168.241.500,00	12.250.000,00	155.991.500,00	1.273,40
Sekretariat Daerah	1.670.604.320,00	842.248.999,00	828.355.321,00	98,35
Sekretariat DPRD	556.173.497,00	313.800.835,00	242.372.662,00	77,24
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	413.535.357,00	215.806.000,00	197.729.357,00	91,62

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	321.064.058,00	285.090.908,00	35.973.150,00	12,62
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	557.847.350,00	72.840.000,00	485.007.350,00	665,85
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	248.641.800,00	48.989.000,00	199.652.800,00	407,55
Inspektorat	195.241.550,00	78.000.000,00	117.241.550,00	150,31
Kecamatan Dumai Barat	94.781.800,00	24.900.000,00	69.881.800,00	280,65
Kecamatan Dumai Timur	158.654.880,00	131.955.000,00	26.699.880,00	20,23
Kecamatan Dumai Selatan	413.047.925,00	309.095.000,00	103.952.925,00	33,63
Kecamatan Dumai Kota	2.349.821.310,00	181.588.000,00	2.168.233.310,00	1.194,04
Kecamatan Bukit Kapur	413.823.850,00	36.793.811,00	377.030.039,00	1.024,71
Kecamatan Medang Kampai	567.824.200,00	40.940.000,00	526.884.200,00	1.286,97
Kecamatan Sungai Sembilan	145.946.475,00	4.250.000,00	141.696.475,00	3.334,03
<b>Jumlah</b>	<b>46.127.809.752,07</b>	<b>22.531.887.700,02</b>	<b>23.595.922.052,05</b>	<b>104,72</b>

### 1. Beban Pemeliharaan Tanah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	184.652.000,00	(184.652.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	50.286.500,00	0,00	50.286.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.286.500,00</b>	<b>184.652.000,00</b>	<b>(134.365.500,00)</b>	<b>(72,77)</b>

### 2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203.209.700,00	144.088.799,02	59.120.900,98	41,03
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	3.332.604.346,00	(3.332.604.346,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	3.947.227.307,00	646.900.149,00	3.300.327.158,00	510,18
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.451.535.363,00	987.582.500,00	463.952.863,00	46,98
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	187.751.613,00	6.000.000,00	181.751.613,00	3.029,19
Satuan Polisi Pamong Praja	289.886.400,00	17.150.000,00	272.736.400,00	1.590,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	417.135.063,00	6.012.300,00	411.122.763,00	6.838,03
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.086.129,00	8.000.000,00	117.086.129,00	1.463,58
Dinas Sosial	137.775.000,00	0,00	137.775.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	160.390.300,00	26.000.000,00	134.390.300,00	516,89
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	143.326.900,00	12.900.000,00	130.426.900,00	1.011,06
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	291.875.000,00	0,00	291.875.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.654.538.107,00	20.020.000,00	3.634.518.107,00	18.154,44
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	241.062.350,00	174.050.000,00	67.012.350,00	38,50
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	138.900.044,00	11.700.000,00	127.200.044,00	1.087,18
Dinas Perhubungan	3.179.209.159,00	1.116.483.175,00	2.062.725.984,00	184,75
Dinas Komunikasi dan Informatika	206.779.678,00	15.845.000,00	190.934.678,00	1.205,02
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.599.681,00	0,00	170.599.681,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	190.750.350,00	15.000.000,00	175.750.350,00	1.171,67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	222.362.600,00	17.460.000,00	204.902.600,00	1.173,55
Dinas Perikanan	71.811.550,00	5.230.000,00	66.581.550,00	1.273,07
Dinas Perdagangan	166.858.600,00	14.000.000,00	152.858.600,00	1.091,85

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	161.841.500,00	12.250.000,00	149.591.500,00	1.221,16
Sekretariat Daerah	1.163.051.720,00	373.065.999,00	789.985.721,00	211,75
Sekretariat DPRD	390.512.497,00	106.241.835,00	284.270.662,00	267,57
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	321.064.058,00	28.731.000,00	292.333.058,00	1.017,48
Badan Pendapatan Daerah	413.535.357,00	74.904.545,00	338.630.812,00	452,08
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	557.847.350,00	72.840.000,00	485.007.350,00	665,85
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	248.641.800,00	39.225.000,00	209.416.800,00	533,89
Inspektorat	195.241.550,00	38.000.000,00	157.241.550,00	413,79
Kecamatan Dumai Barat	94.781.800,00	24.900.000,00	69.881.800,00	280,65
Kecamatan Dumai Timur	158.654.880,00	5.991.000,00	152.663.880,00	2.548,22
Kecamatan Dumai Selatan	243.277.925,00	39.800.000,00	203.477.925,00	511,25
Kecamatan Dumai Kota	236.199.310,00	51.660.000,00	184.539.310,00	357,22
Kecamatan Bukit Kapur	99.153.850,00	36.793.811,00	62.360.039,00	169,49
Kecamatan Medang Kampai	231.624.200,00	21.100.000,00	210.524.200,00	997,75
Kecamatan Sungai Sembilan	55.946.475,00	4.250.000,00	51.696.475,00	1.216,39
<b>Jumlah</b>	<b>20.169.445.166,00</b>	<b>7.506.779.459,02</b>	<b>12.662.665.706,98</b>	<b>168,68</b>

### 3. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	1.129.319.000,00	(1.129.319.000,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	5.063.461.611,11	995.589.917,00	4.067.871.694,11	408,59
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.134.582.500,00	2.337.401.000,00	(1.202.818.500,00)	(51,46)
Satuan Polisi Pamong Praja	12.545.000,00	0,00	12.545.000,00	100,00
Dinas Sosial	4.055.316,00	338.060.837,00	(334.005.521,00)	(98,80)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	129.750.000,00	(129.750.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.936.000,00	82.665.000,00	(49.729.000,00)	(60,16)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.153.926.420,00	162.743.000,00	991.183.420,00	609,05
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	42.000.000,00	(42.000.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	413.926.331,96	962.562.500,00	(548.636.168,04)	(57,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	144.169.000,00	343.858.000,00	(199.689.000,00)	(58,07)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.925.000,00	0,00	99.925.000,00	100,00
Dinas Perikanan	131.376.549,00	172.999.000,00	(41.622.451,00)	(24,06)
Dinas Perdagangan	37.187.780,00	24.915.000,00	12.272.780,00	49,26
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00
Sekretariat Daerah	507.552.600,00	469.183.000,00	38.369.600,00	8,18
Sekretariat DPRD	165.661.000,00	207.559.000,00	(41.898.000,00)	(20,19)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	187.075.000,00	(187.075.000,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	70.900.000,00	(70.900.000,00)	(100,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.764.000,00	(9.764.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	125.964.000,00	(125.964.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	269.295.000,00	(269.295.000,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Kota	0,00	129.928.000,00	(129.928.000,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	314.670.000,00	0,00	314.670.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	148.200.000,00	19.840.000,00	128.360.000,00	646,98
Kecamatan Sungai Sembilan	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.540.075.108,07</b>	<b>8.221.871.254,00</b>	<b>1.318.203.854,07</b>	<b>16,03</b>

#### 4. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	480.493.475,00	(480.493.475,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	451.988.000,00	0,00	451.988.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.982.240.000,00	0,00	10.982.240.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	927.787.000,00	(927.787.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	397.902.000,00	1.878.550.000,00	(1.480.648.000,00)	(78,82)
Dinas Perikanan	0,00	67.529.469,00	(67.529.469,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	169.770.000,00	0,00	169.770.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	2.083.642.000,00	0,00	2.083.642.000,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.273.542.000,00</b>	<b>3.354.359.944,00</b>	<b>10.919.182.056,00</b>	<b>325,52</b>

#### 5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	156.805.000,00	0,00	156.805.000,00	100,00
Dinas Perikanan	0,00	253.425.000,00	(253.425.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	29.980.000,00	0,00	29.980.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>186.785.000,00</b>	<b>293.425.000,00</b>	<b>(106.640.000,00)</b>	<b>(36,34)</b>

#### 6. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Dana Bos

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.907.675.978,00	2.827.243.950,00	(919.567.972,00)	(32,53)
<b>Jumlah</b>	<b>1.907.675.978,00</b>	<b>2.827.243.950,00</b>	<b>(919.567.972,00)</b>	<b>(32,53)</b>

#### 7. Beban Pemeliharaan Aset Lainnya

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.269.730,00	(4.269.730,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	139.286.363,00	(139.286.363,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>143.556.093,00</b>	<b>(143.556.093,00)</b>	<b>(100,00)</b>

#### 5. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>47.440.724.498,00</b>	<b>55.976.905.741,50</b>	<b>(8.536.181.243,50)</b>	<b>(15,25)</b>

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi senilai Rp47.440.724.498,00, jika dibandingkan pada Tahun 2020 dengan realisasi senilai Rp55.976.905.741,50 mengalami penurunan senilai Rp8.536.181.243,50 atau sebesar 15,25% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.28 Rincian Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2021**

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.942.127.100,00	9.264.223.294,00	1.677.903.806,00	18,11
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.990.538.098,00	44.305.434.114,50	(9.314.896.016,50)	(21,02)
Beban Perjalanan Dinas Dana BOS	1.508.059.300,00	2.407.248.333,00	(899.189.033,00)	(37,35)
<b>Jumlah</b>	<b>47.440.724.498,00</b>	<b>55.976.905.741,50</b>	<b>(8.536.181.243,50)</b>	<b>(15,25)</b>

**Tabel 5.6.29 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.945.399.505,00	4.579.764.942,00	(1.634.365.437,00)	(35,69)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	793.018.577,00	(793.018.577,00)	(100,00)
Dinas Kesehatan	7.587.152.141,00	6.355.619.304,00	1.231.532.837,00	19,38
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.800.708.626,00	2.460.293.095,50	(659.584.469,50)	(26,81)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	385.279.335,00	545.521.752,00	(160.242.417,00)	(29,37)
Satuan Polisi Pamong Praja	411.540.794,00	390.494.156,00	21.046.638,00	5,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	553.785.645,00	792.318.802,00	(238.533.157,00)	(30,11)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	551.225.800,00	282.367.659,00	268.858.141,00	95,22
Dinas Sosial	501.394.967,00	1.063.679.279,00	(562.284.312,00)	(52,86)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	228.307.125,00	252.877.109,00	(24.569.984,00)	(9,72)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	505.368.785,00	454.038.108,00	51.330.677,00	11,31
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.590.769.463,00	2.136.273.626,00	454.495.837,00	21,28
Dinas Lingkungan Hidup	666.656.919,00	753.162.558,00	(86.505.639,00)	(11,49)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	414.917.360,00	532.307.022,00	(117.389.662,00)	(22,05)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.054.855.934,00	508.845.683,00	546.010.251,00	107,30
Dinas Perhubungan	1.427.920.198,00	736.129.834,00	691.790.364,00	93,98
Dinas Komunikasi dan Informatika	889.103.131,00	728.554.687,00	160.548.444,00	22,04
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	267.676.280,00	549.759.699,00	(282.083.419,00)	(51,31)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	420.102.488,00	480.745.095,00	(60.642.607,00)	(12,61)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	438.219.060,00	314.281.177,00	123.937.883,00	39,44
Dinas Perikanan	368.278.720,00	168.688.405,00	199.590.315,00	118,32
Dinas Perdagangan	421.823.101,00	357.741.502,00	64.081.599,00	17,91
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	309.075.610,00	379.521.644,00	(70.446.034,00)	(18,56)
Sekretariat Daerah	5.166.005.977,00	6.947.339.133,00	(1.781.333.156,00)	(25,64)
Sekretariat DPRD	7.809.911.425,00	11.933.158.831,00	(4.123.247.406,00)	(34,55)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.295.820.908,00	2.130.220.486,00	(834.399.578,00)	(39,17)
Badan Pendapatan Daerah	1.254.022.886,00	1.876.747.311,00	(622.724.425,00)	(33,18)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.004.366.337,00	2.876.050.862,00	128.315.475,00	4,46
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	979.839.350,00	664.087.600,00	315.751.750,00	47,55
Inspektorat	2.105.963.560,00	2.614.994.300,00	(509.030.740,00)	(19,47)
Kecamatan Dumai Barat	119.304.948,00	176.494.807,00	(57.189.859,00)	(32,40)
Kecamatan Dumai Timur	118.211.000,00	168.840.000,00	(50.629.000,00)	(29,99)
Kecamatan Dumai Selatan	240.824.700,00	246.625.800,00	(5.801.100,00)	(2,35)
Kecamatan Dumai Kota	196.940.680,00	219.262.849,00	(22.322.169,00)	(10,18)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Bukit Kapur	222.635.037,00	213.725.003,00	8.910.034,00	4,17
Kecamatan Medang Kampai	119.511.227,00	146.479.197,00	(26.967.970,00)	(18,41)
Kecamatan Sungai Sembilan	67.805.476,00	146.875.847,00	(79.070.371,00)	(53,83)
<b>Jumlah</b>	<b>47.440.724.498,00</b>	<b>55.976.905.741,50</b>	<b>(8.536.181.243,50)</b>	<b>(15,25)</b>

### 1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.400.000,00	202.375.000,00	(91.975.000,00)	(45,45)
Dinas Kesehatan	5.262.819.000,00	4.677.736.295,00	585.082.705,00	12,51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	147.589.800,00	146.250.000,00	1.339.800,00	0,92
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	51.150.000,00	55.950.000,00	(4.800.000,00)	(8,58)
Satuan Polisi Pamong Praja	227.650.000,00	268.500.000,00	(40.850.000,00)	(15,21)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	173.100.000,00	74.700.000,00	98.400.000,00	131,73
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.258.500,00	33.100.000,00	57.158.500,00	172,68
Dinas Sosial	172.150.000,00	225.464.999,00	(53.314.999,00)	(23,65)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.350.000,00	10.500.000,00	(9.150.000,00)	(87,14)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	187.935.000,00	33.882.000,00	154.053.000,00	454,68
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	406.850.000,00	196.350.000,00	210.500.000,00	107,21
Dinas Lingkungan Hidup	38.250.000,00	76.200.000,00	(37.950.000,00)	(49,80)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	767.140.000,00	125.550.000,00	641.590.000,00	511,02
Dinas Perhubungan	601.350.000,00	133.800.000,00	467.550.000,00	349,44
Dinas Komunikasi dan Informatika	211.950.000,00	122.250.000,00	89.700.000,00	73,37
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.470.000,00	201.900.000,00	(159.430.000,00)	(78,96)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	85.320.000,00	21.450.000,00	63.870.000,00	297,76
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.750.000,00	46.200.000,00	(9.450.000,00)	(20,45)
Dinas Perikanan	111.900.000,00	35.365.000,00	76.535.000,00	216,41
Dinas Perdagangan	43.500.000,00	35.550.000,00	7.950.000,00	22,36
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	78.150.000,00	48.000.000,00	30.150.000,00	62,81
Sekretariat Daerah	235.650.000,00	310.050.000,00	(74.400.000,00)	(24,00)
Sekretariat DPRD	152.400.000,00	69.300.000,00	83.100.000,00	119,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	216.600.000,00	312.900.000,00	(96.300.000,00)	(30,78)
Badan Pendapatan Daerah	177.327.000,00	233.100.000,00	(55.773.000,00)	(23,93)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82.800.000,00	141.900.000,00	(59.100.000,00)	(41,65)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Inspektorat	985.350.000,00	1.343.100.000,00	(357.750.000,00)	(26,64)
Kecamatan Dumai Barat	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	21.450.000,00	7.500.000,00	13.950.000,00	186,00
Kecamatan Dumai Selatan	84.325.000,00	26.700.000,00	57.625.000,00	215,82
Kecamatan Dumai Kota	25.700.000,00	13.800.000,00	11.900.000,00	86,23
Kecamatan Bukit Kapur	47.492.800,00	0,00	47.492.800,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.942.127.100,00</b>	<b>9.264.223.294,00</b>	<b>1.677.903.806,00</b>	<b>18,11</b>

## 2. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.326.940.205,00	1.970.141.609,00	(643.201.404,00)	(32,65)
Dinas Kesehatan	2.324.333.141,00	1.677.883.009,00	646.450.132,00	38,53
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	793.018.577,00	(793.018.577,00)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.653.118.826,00	2.314.043.095,50	(660.924.269,50)	(28,56)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	334.129.335,00	489.571.752,00	(155.442.417,00)	(31,75)
Satuan Polisi Pamong Praja	183.890.794,00	121.994.156,00	61.896.638,00	50,74
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	380.685.645,00	717.618.802,00	(336.933.157,00)	(46,95)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	460.967.300,00	249.267.659,00	211.699.641,00	84,93
Dinas Sosial	329.244.967,00	838.214.280,00	(508.969.313,00)	(60,72)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	226.957.125,00	242.377.109,00	(15.419.984,00)	(6,36)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	317.433.785,00	420.156.108,00	(102.722.323,00)	(24,45)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.183.919.463,00	1.939.923.626,00	243.995.837,00	12,58
Dinas Lingkungan Hidup	628.406.919,00	676.962.558,00	(48.555.639,00)	(7,17)
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	414.917.360,00	503.507.022,00	(88.589.662,00)	(17,59)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	287.715.934,00	383.295.683,00	(95.579.749,00)	(24,94)
Dinas Perhubungan	826.570.198,00	602.329.834,00	224.240.364,00	37,23
Dinas Komunikasi Dan Informatika	677.153.131,00	606.304.687,00	70.848.444,00	11,69
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	225.206.280,00	347.859.699,00	(122.653.419,00)	(35,26)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	334.782.488,00	459.295.095,00	(124.512.607,00)	(27,11)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	401.469.060,00	268.081.177,00	133.387.883,00	49,76
Dinas Perikanan	256.378.720,00	133.323.405,00	123.055.315,00	92,30
Dinas Perdagangan	378.323.101,00	322.191.502,00	56.131.599,00	17,42
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	230.925.610,00	331.521.644,00	(100.596.034,00)	(30,34)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4.930.355.977,00	6.637.289.133,00	(1.706.933.156,00)	(25,72)
Sekretariat Dprd	7.657.511.425,00	11.863.858.831,00	(4.206.347.406,00)	(35,46)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.079.220.908,00	1.817.320.486,00	(738.099.578,00)	(40,61)
Badan Pendapatan Daerah	1.076.695.886,00	1.643.647.311,00	(566.951.425,00)	(34,49)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.921.566.337,00	2.734.150.862,00	187.415.475,00	6,85
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	979.839.350,00	658.087.600,00	321.751.750,00	48,89
Inspektorat	1.120.613.560,00	1.271.894.300,00	(151.280.740,00)	(11,89)
Kecamatan Dumai Barat	108.804.948,00	176.494.807,00	(67.689.859,00)	(38,35)
Kecamatan Dumai Timur	96.761.000,00	161.340.000,00	(64.579.000,00)	(40,03)
Kecamatan Dumai Selatan	156.499.700,00	219.925.800,00	(63.426.100,00)	(28,84)
Kecamatan Dumai Kota	171.240.680,00	205.462.849,00	(34.222.169,00)	(16,66)
Kecamatan Bukit Kapur	175.142.237,00	213.725.003,00	(38.582.766,00)	(18,05)
Kecamatan Medang Kampai	80.011.227,00	146.479.197,00	(66.467.970,00)	(45,38)
Kecamatan Sungai Sembilan	52.805.476,00	146.875.847,00	(94.070.371,00)	(64,05)
<b>Jumlah</b>	<b>34.990.538.098,00</b>	<b>44.305.434.114,50</b>	<b>(9.314.896.016,50)</b>	<b>(21,02)</b>

### 3. Beban Perjalanan Dinas Dana BOS

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.508.059.300,00	2.407.248.333,00	(899.189.033,00)	(37,35)
<b>Jumlah</b>	<b>1.508.059.300,00</b>	<b>2.407.248.333,00</b>	<b>(899.189.033,00)</b>	<b>(37,35)</b>

### 6. Beban Hibah

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>15.192.998.932,38</b>	<b>36.526.180.600,00</b>	<b>(21.333.181.667,62)</b>	<b>(58,41)</b>

Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2021 senilai Rp15.192.998.932,38, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp36.526.180.600,00 maka mengalami penurunan senilai sebesar Rp21.333.181.667,62 atau sebesar 58,41% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.30 Rincian Beban Hibah Tahun 2021**

Beban Hibah	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.446.670.682,38	0,00	1.446.670.682,38	100,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Kota	765.000.000,00	819.305.100,00	(54.305.100,00)	(6,63)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.661.765.450,00	33.387.312.700,00	(22.725.547.250,00)	(68,07)
Beban Hibah Kepada Partai Politik - LO	2.319.562.800,00	2.319.562.800,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.192.998.932,38</b>	<b>36.526.180.600,00</b>	<b>(21.333.181.667,62)</b>	<b>(58,41)</b>

**Tabel 5.6.31 Perbandingan Beban Hibah LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.291.450.000,00	0,00	3.291.450.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.242.170.682,38	0,00	1.242.170.682,38	100,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.639.562.800,00	0,00	2.639.562.800,00	100,00
Dinas Sosial	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.216.098.150,00	0,00	1.216.098.150,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	319.880.000,00	(319.880.000,00)	(100,00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,00
Dinas Perikanan	418.717.300,00	0,00	418.717.300,00	100,00
Sekretariat Daerah	3.630.000.000,00	490.230.000,00	3.139.770.000,00	640,47
PPKD-BPKAD	0,00	35.706.875.500,00	(35.706.875.500,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	9.195.100,00	(9.195.100,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>15.192.998.932,38</b>	<b>36.526.180.600,00</b>	<b>(21.333.181.667,62)</b>	<b>(58,41)</b>

### 7 Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>0,00</b>	<b>3.844.800.000,00</b>	<b>(3.844.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp3.844.800.000,00 mengalami penurunan senilai Rp3.844.800.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.32 Rincian Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2021**

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	3.844.800.000,00	(3.844.800.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.800.000,00</b>	<b>(3.844.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

**Tabel 5.6.33 Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
PPKD	0,00	3.844.800.000,00	(3.844.800.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844.800.000,00</b>	<b>(3.844.800.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

**8 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>181.734.858.783,00</b>	<b>180.992.213.502,21</b>	<b>742.645.280,80</b>	<b>0,41</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum Tahun 2021 dan Belanja Modal pada Tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada posisi per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp181.734.858.783,00 dan Tahun 2020 senilai Rp180.992.213.502,21 jika dibandingkan maka mengalami kenaikan senilai Rp742.645.280,80 atau sebesar 0,41% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6.34 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2021**

Beban Penyusutan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73.048.688.992,66	69.717.315.532,20	3.331.373.460,46	4,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.996.054.086,73	17.744.801.337,79	1.251.252.748,94	7,05
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	88.923.896.456,47	92.388.648.244,02	(3.464.751.787,55)	(3,75)
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	96.314.880,46	94.653.349,96	1.661.530,50	1,76
Beban Penyusutan Aset Lain - Lain	190.764.881,68	249.168.681,68	(58.403.800,00)	(23,44)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	479.139.485,00	797.626.356,55	(318.486.871,55)	(39,93)
<b>Jumlah</b>	<b>181.734.858.783,00</b>	<b>180.992.213.502,21</b>	<b>742.645.280,80</b>	<b>0,41</b>

**Tabel 5.6.35 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.179.679.538,32	20.664.012.039,63	2.515.667.498,69	12,17
Dinas Kesehatan	40.161.694.442,03	8.463.354.674,47	31.698.339.767,56	374,54
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	28.514.474.231,23	(28.514.474.231,23)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.069.399.572,00	89.613.820.989,99	(4.544.421.417,99)	(5,07)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.597.720.603,87	4.349.285.041,93	(1.751.564.438,06)	(40,27)
Satuan Polisi Pamong Praja	220.821.861,03	272.549.415,24	(51.727.554,21)	(18,98)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.496.646.528,22	1.991.586.291,00	505.060.237,22	25,36
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.818.849,83	118.463.413,94	(29.644.564,11)	(25,02)
Dinas Sosial	206.742.848,15	266.980.400,84	(60.237.552,69)	(22,56)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	239.581.702,51	191.853.077,51	47.728.625,00	24,88
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	146.784.725,64	217.465.953,98	(70.681.228,34)	(32,50)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	944.170.852,19	793.436.869,42	150.733.982,77	19,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.912.461.407,30	2.378.218.162,54	(465.756.755,24)	(19,58)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	214.164.049,12	267.257.453,41	(53.093.404,29)	(19,87)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	412.629.945,51	360.520.624,29	52.109.321,22	14,45

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	6.814.551.384,30	5.559.618.718,87	1.254.932.665,43	22,57
Dinas Komunikasi dan Informatika	910.447.795,80	880.703.559,83	29.744.235,97	3,38
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	436.422.769,36	508.204.701,45	(71.781.932,09)	(14,12)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	873.607.904,83	813.971.830,30	59.636.074,53	7,33
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	509.222.571,10	445.221.172,61	64.001.398,49	14,38
Dinas Perikanan	285.201.898,48	267.469.123,57	17.732.774,91	6,63
Dinas Perdagangan	741.834.815,99	787.386.046,41	(45.551.230,42)	(5,79)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	236.003.943,03	265.364.771,15	(29.360.828,12)	(11,06)
Sekretariat Daerah	4.865.304.670,04	5.572.623.973,20	(707.319.303,16)	(12,69)
Sekretariat DPRD	786.749.783,34	1.344.016.566,61	(557.266.783,27)	(41,46)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	536.332.871,04	591.140.404,97	(54.807.533,93)	(9,27)
Badan Pendapatan Daerah	1.004.688.528,38	1.245.705.314,80	(241.016.786,42)	(19,35)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.808.034.303,44	1.318.882.046,77	489.152.256,67	37,09
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	231.318.119,26	217.802.489,35	13.515.629,91	6,21
Inspektorat	503.480.416,84	459.932.423,68	43.547.993,16	9,47
Kecamatan Dumai Barat	483.179.032,59	299.892.316,17	183.286.716,42	61,12
Kecamatan Dumai Timur	369.532.208,53	307.356.528,71	62.175.679,82	20,23
Kecamatan Dumai Selatan	604.171.431,40	438.850.460,59	165.320.970,81	37,67
Kecamatan Dumai Kota	268.621.283,78	216.524.643,28	52.096.640,50	24,06
Kecamatan Bukit Kapur	559.947.533,43	323.704.960,21	236.242.573,22	72,98
Kecamatan Medang Kampai	489.991.118,07	338.766.221,22	151.224.896,85	44,64
Kecamatan Sungai Sembilan	524.897.474,25	325.796.589,05	199.100.885,20	61,11
<b>Jumlah</b>	<b>181.734.858.783,00</b>	<b>180.992.213.502,21</b>	<b>742.645.280,80</b>	<b>0,41</b>

### 1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.350.035.560,02	11.858.069.898,61	2.491.965.661,41	21,01
Dinas Kesehatan	35.656.792.973,35	6.853.204.919,30	28.803.588.054,05	420,29
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	26.286.420.032,72	(26.286.420.032,72)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.396.071.270,28	2.611.995.141,18	(215.923.870,90)	(8,27)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	222.155.671,43	359.115.817,86	(136.960.146,43)	(38,14)
Satuan Polisi Pamong Praja	200.156.232,15	252.496.832,15	(52.340.600,00)	(20,73)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.433.742.582,81	1.968.262.059,00	465.480.523,81	23,65
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	88.818.849,83	118.463.413,94	(29.644.564,11)	(25,02)
Dinas Sosial	188.588.472,15	208.676.740,90	(20.088.268,75)	(9,63)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	121.792.650,00	82.809.025,00	38.983.625,00	47,08
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	127.332.586,90	202.965.695,24	(75.633.108,34)	(37,26)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	517.338.842,04	460.757.627,38	56.581.214,66	12,28
Dinas Lingkungan Hidup	1.459.880.070,20	1.596.242.302,98	(136.362.232,78)	(8,54)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	197.494.210,00	250.587.614,29	(53.093.404,29)	(21,19)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	365.920.590,71	316.790.164,29	49.130.426,42	15,51
Dinas Perhubungan	3.575.188.469,46	4.315.087.866,26	(739.899.396,80)	(17,15)
Dinas Komunikasi dan Informatika	883.298.171,84	859.914.112,25	23.384.059,59	2,72

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	355.997.235,96	427.779.168,10	(71.781.932,14)	(16,78)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	175.972.892,50	205.536.039,29	(29.563.146,79)	(14,38)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	373.228.651,35	317.119.095,36	56.109.555,99	17,69
Dinas Perikanan	97.547.351,93	89.084.973,00	8.462.378,93	9,50
Dinas Perdagangan	314.241.388,07	368.842.306,50	(54.600.918,43)	(14,80)
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	139.344.528,84	168.705.356,96	(29.360.828,12)	(17,40)
Sekretariat Daerah	3.638.741.309,95	4.353.169.608,20	(714.428.298,25)	(16,41)
Sekretariat DPRD	402.353.355,01	959.620.138,28	(557.266.783,27)	(58,07)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	409.568.745,71	464.376.279,64	(54.807.533,93)	(11,80)
Badan Pendapatan Daerah	863.273.691,82	1.064.297.407,57	(201.023.715,75)	(18,89)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.299.028.110,56	959.344.589,89	339.683.520,67	35,41
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162.094.725,90	146.954.096,24	15.140.629,66	10,30
Inspektorat	403.588.071,43	373.358.482,14	30.229.589,29	8,10
Kecamatan Dumai Barat	197.277.556,42	134.937.100,00	62.340.456,42	46,20
Kecamatan Dumai Timur	227.930.563,03	171.727.499,29	56.203.063,74	32,73
Kecamatan Dumai Selatan	292.044.171,22	249.040.942,69	43.003.228,53	17,27
Kecamatan Dumai Kota	193.888.665,50	144.492.025,00	49.396.640,50	34,19
Kecamatan Bukit Kapur	200.201.594,65	139.196.521,43	61.005.073,22	43,83
Kecamatan Medang Kampai	281.834.611,14	213.384.714,29	68.449.896,85	32,08
Kecamatan Sungai Sembilan	235.924.568,50	164.489.925,00	71.434.643,50	43,43
<b>Jumlah</b>	<b>73.048.688.992,66</b>	<b>69.717.315.532,20</b>	<b>3.331.373.460,46</b>	<b>4,78</b>

## 2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.580.413.368,30	8.200.388.471,10	380.024.897,20	4,63
Dinas Kesehatan	4.408.489.167,24	1.605.149.755,17	2.803.339.412,07	174,65
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	2.183.169.539,09	(2.183.169.539,09)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	515.531.849,31	500.750.053,67	14.781.795,64	2,95
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	182.669.493,28	52.662.821,16	130.006.672,12	246,87
Satuan Polisi Pamong Praja	20.521.628,88	20.052.583,09	469.045,79	2,34
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.232.575,41	17.222.932,00	36.009.643,41	209,08
Dinas Sosial	17.841.876,00	57.991.159,94	(40.149.283,94)	(69,23)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81.470.552,51	81.470.552,51	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.452.138,74	14.500.258,74	4.951.880,00	34,15
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	225.702.878,18	204.430.555,16	21.272.323,02	10,41
Dinas Lingkungan Hidup	138.507.507,10	161.268.850,99	(22.761.343,89)	(14,11)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.669.839,12	16.669.839,12	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.609.354,80	43.630.460,00	2.978.894,80	6,83
Dinas Perhubungan	531.407.027,92	519.521.968,42	11.885.059,50	2,29
Dinas Komunikasi dan Informatika	20.683.998,96	20.789.447,58	(105.448,62)	(0,51)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61.390.783,40	61.390.783,35	0,05	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	452.792.416,84	411.413.317,47	41.379.099,37	10,06
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.617.407,25	82.725.567,25	7.891.840,00	9,54

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	111.644.530,27	109.121.496,20	2.523.034,07	2,31
Dinas Perdagangan	416.641.779,20	407.592.091,19	9.049.688,01	2,22
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	96.659.414,19	96.659.414,19	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	1.213.649.135,09	1.206.540.140,00	7.108.995,09	0,59
Sekretariat DPRD	382.145.428,33	382.145.428,33	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	126.430.792,00	126.430.792,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	123.203.951,56	118.939.845,60	4.264.105,96	3,59
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	211.430.542,88	212.109.306,88	(678.764,00)	(0,32)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69.223.393,36	69.223.393,36	0,00	0,00
Inspektorat	93.234.212,08	86.573.941,54	6.660.270,54	7,69
Kecamatan Dumai Barat	101.622.588,97	97.627.428,97	3.995.160,00	4,09
Kecamatan Dumai Timur	116.524.645,50	117.377.029,42	(852.383,92)	(0,73)
Kecamatan Dumai Selatan	148.622.598,18	144.746.858,40	3.875.739,78	2,68
Kecamatan Dumai Kota	72.032.618,28	72.032.618,28	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Kapur	105.890.773,78	105.890.773,78	0,00	0,00
Kecamatan Medang Kampai	60.093.106,93	59.493.106,93	600.000,00	1,01
Kecamatan Sungai Sembilan	83.000.712,89	77.098.756,91	5.901.955,98	7,66
<b>Jumlah</b>	<b>18.996.054.086,73</b>	<b>17.744.801.337,79</b>	<b>1.251.252.748,94</b>	<b>7,05</b>

### 3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	61.602.726,11	0,00	61.602.726,11	100,00
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	16.046.628,02	(16.046.628,02)	(100,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.142.704.992,41	86.427.580.535,14	(4.284.875.542,73)	(4,96)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.192.895.439,16	3.905.273.127,91	(1.712.377.688,75)	(43,85)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.296.370,00	1.726.300,00	3.570.070,00	206,80
Dinas Sosial	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.828.500,00	18.828.500,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	196.962.465,30	124.082.020,22	72.880.445,08	58,74
Dinas Lingkungan Hidup	314.073.830,00	618.926.580,00	(304.852.750,00)	(49,26)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.374.651.364,64	495.791.462,51	1.878.859.902,13	378,96
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	372.250,00	372.250,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	243.742.982,99	197.022.473,54	46.720.509,45	23,71
Dinas Perikanan	58.605.056,28	51.624.122,94	6.980.933,34	13,52
Dinas Perdagangan	10.951.648,72	10.951.648,72	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	12.914.225,00	12.914.225,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.098.385,00	6.098.385,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	297.575.650,00	147.428.150,00	150.147.500,00	101,84
Inspektorat	6.658.133,33	0,00	6.658.133,33	100,00
Kecamatan Dumai Barat	183.741.327,20	66.790.227,20	116.951.100,00	175,10
Kecamatan Dumai Timur	25.077.000,00	18.252.000,00	6.825.000,00	37,39

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Selatan	163.504.662,00	45.062.659,50	118.442.002,50	262,84
Kecamatan Dumai Kota	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	253.855.165,00	78.617.665,00	175.237.500,00	222,90
Kecamatan Medang Kampai	148.063.400,00	65.888.400,00	82.175.000,00	124,72
Kecamatan Sungai Sembilan	202.275.050,00	78.625.050,00	123.650.000,00	157,27
<b>Jumlah</b>	<b>88.923.896.456,47</b>	<b>92.388.648.244,02</b>	<b>(3.464.751.787,55)</b>	<b>(3,75)</b>

#### 4. Beban Amortisasi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249.230.610,00	605.553.669,92	(356.323.059,92)	(58,84)
Dinas Kesehatan	28.302.500,00	5.000.000,00	23.302.500,00	466,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.490.000,00	8.745.000,00	8.745.000,00	100,00
Dinas Perhubungan	96.024.625,00	53.544.000,00	42.480.625,00	79,34
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.465.625,00	0,00	6.465.625,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.662.500,00	18.662.500,00	0,00	0,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1.099.612,50	0,00	1.099.612,50	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.376.512,50	45.376.510,00	2,50	0,00
Badan Pendapatan Daerah	12.112.500,00	56.369.676,63	(44.257.176,63)	(78,51)
<b>Jumlah</b>	<b>479.139.485,00</b>	<b>797.626.356,55</b>	<b>(318.486.871,55)</b>	<b>(39,93)</b>

#### 5. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.091.460,00	73.495.260,00	(58.403.800,00)	(79,47)
Dinas Perhubungan	175.673.421,68	175.673.421,68	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>190.764.881,68</b>	<b>249.168.681,68</b>	<b>(58.403.800,00)</b>	<b>(23,44)</b>

#### 6. Beban Penyusutan Aset Rusak Berat

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	28.838.031,40	(28.838.031,40)	(100,00)
Dinas Kesehatan	6.507.075,33	0,00	6.507.075,33	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	32.233.275,00	(32.233.275,00)	(100,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	144.000,00	0,00	144.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.166.666,67	4.166.666,67	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.780.428,57	(1.780.428,57)	(100,00)
Dinas Perhubungan	61.606.475,60	0,00	61.606.475,60	100,00
Dinas Perikanan	17.404.960,00	17.638.531,43	(233.571,43)	(1,32)
Sekretariat DPRD	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.624.999,75	(1.624.999,75)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	537.560,00	537.560,00	0,00	0,00
Kecamatan Sungai Sembilan	3.697.142,86	5.582.857,14	(1.885.714,28)	(33,78)
<b>Jumlah</b>	<b>96.314.880,46</b>	<b>94.653.349,96</b>	<b>1.661.530,50</b>	<b>1,76</b>

## 9 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
20.948.535.335,61	6.944.601.782,96	14.003.933.552,66	201,65

Beban Penyisihan Piutang berasal dari piutang sebelum Tahun 2021 dan pada Tahun 2021 yang disisihkan sesuai dengan kualifikasi umur piutang sesuai Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 adalah senilai Rp20.948.535.335,61 dan Tahun 2020 adalah senilai Rp6.944.601.782,96 jika dibandingkan maka mengalami kenaikan senilai Rp14.003.933.552,66 atau sebesar 201,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.36 Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2021

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.792.259.475,61	6.675.835.704,32	116.423.771,29	1,74
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	112.078.364,50	267.502.578,64	(155.424.214,14)	(58,10)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.044.197.495,50	0,00	14.044.197.495,50	100,00
Beban Penyisihan Piutang BLUD	0,00	1.263.500,00	(1.263.500,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>20.948.535.335,61</b>	<b>6.944.601.782,96</b>	<b>14.003.933.552,66</b>	<b>201,65</b>

Tabel 5.6.37 Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	14.044.197.495,50	1.263.500,00	14.042.933.995,50	#####
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	20.587.500,00	(20.587.500,00)	(100,00)
Badan Pendapatan Daerah	6.904.337.840,11	6.922.750.782,96	(18.412.942,85)	(0,27)
<b>Jumlah</b>	<b>20.948.535.335,61</b>	<b>6.944.601.782,96</b>	<b>14.003.933.552,66</b>	<b>201,65</b>

## 10 Beban Lain-lain

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
10.123.880.729,11	18.327.347.853,57	(8.203.467.124,46)	(44,76)

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp10.123.880.729,11 dan Tahun 2020 senilai Rp18.327.347.853,57 jika dibandingkan maka mengalami penurunan senilai Rp8.203.467.124,46 atau sebesar 44,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.38 Rincian Beban Lain - Lain LO Tahun 2021

Beban Lain-lain	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	9.742.555.725,53	(9.742.555.725,53)	(100,00)
Beban Lainnya	4.035.620.729,11	375.168.976,03	3.660.451.753,08	975,68
Beban Modal yang tidak dikapitalisir	0,00	8.209.623.152,01	(8.209.623.152,01)	(100,00)
Beban Uang/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.088.260.000,00	0,00	6.088.260.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.123.880.729,11</b>	<b>18.327.347.853,57</b>	<b>(8.203.467.124,46)</b>	<b>(44,76)</b>

### 1. Beban Penurunan Nilai Investasi

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
PPKD	0,00	9.742.555.725,53	(9.742.555.725,53)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>9.742.555.725,53</b>	<b>(9.742.555.725,53)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Penurunan Nilai Investasi pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

## 2. Beban Lainnya

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.942.260.805,11	0,00	2.942.260.805,11	100,00
Dinas Kesehatan	179.770.277,00	0,00	179.770.277,00	100,00
BLUD RSUD	0,00	375.168.976,03	(375.168.976,03)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	250.265.625,00	0,00	250.265.625,00	100,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.453.200,00	0,00	14.453.200,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	44.699.000,00	0,00	44.699.000,00	100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.625.000,00	0,00	35.625.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	31.179.652,00	0,00	31.179.652,00	100,00
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.892.200,00	0,00	40.892.200,00	100,00
Dinas Perhubungan	67.760.000,00	0,00	67.760.000,00	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	15.999.900,00	0,00	15.999.900,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	724.900,00	0,00	724.900,00	100,00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	11.836.650,00	0,00	11.836.650,00	100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38.174.500,00	0,00	38.174.500,00	100,00
Dinas Perikanan	3.200.100,00	0,00	3.200.100,00	100,00
Sekretariat Daerah	90.470.000,00	0,00	90.470.000,00	100,00
Sekretariat DPRD	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
Badan Pendapatan Daerah	9.580.000,00	0,00	9.580.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Barat	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Timur	76.835.000,00	0,00	76.835.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	36.886.600,00	0,00	36.886.600,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	103.292.850,00	0,00	103.292.850,00	100,00
Kecamatan Bukit Kapur	17.758.470,00	0,00	17.758.470,00	100,00
Kecamatan Medang Kampai	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Kecamatan Sungai Sembilan	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.035.620.729,11</b>	<b>375.168.976,03</b>	<b>3.660.451.753,08</b>	<b>975,68</b>

## 3. Beban Modal Yang Tidak Dikapitalisir

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.190.423.957,26	(6.190.423.957,26)	(100,00)
Dinas Kesehatan	0,00	377.593.098,00	(377.593.098,00)	(100,00)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	1.170.696.850,00	(1.170.696.850,00)	(100,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	66.018.850,00	(66.018.850,00)	(100,00)

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Sosial	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	(100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	10.320.000,00	(10.320.000,00)	(100,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	13.454.000,00	(13.454.000,00)	(100,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
Dinas Perhubungan	0,00	7.500.013,75	(7.500.013,75)	(100,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.477.200,00	(1.477.200,00)	(100,00)
Dinas Perdagangan	0,00	7.450.000,00	(7.450.000,00)	(100,00)
Sekretariat Daerah	0,00	35.858.433,00	(35.858.433,00)	(100,00)
Sekretariat DPRD	0,00	11.300.000,00	(11.300.000,00)	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	26.000.000,00	(26.000.000,00)	(100,00)
Inspektorat	0,00	18.150.000,00	(18.150.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Barat	0,00	12.589.000,00	(12.589.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	0,00	7.910.000,00	(7.910.000,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Selatan	0,00	70.287.500,00	(70.287.500,00)	(100,00)
Kecamatan Dumai Kota	0,00	70.051.750,00	(70.051.750,00)	(100,00)
Kecamatan Bukit Kapur	0,00	2.960.000,00	(2.960.000,00)	(100,00)
Kecamatan Medang Kampai	0,00	33.632.500,00	(33.632.500,00)	(100,00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	70.400.000,00	(70.400.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.623.152,01</b>	<b>(8.209.623.152,01)</b>	<b>(100,00)</b>

Beban Modal Yang Tidak Dikapitalisir pada Tahun 2021 senilai 0 karena nilai pada akun tersebut sudah termasuk dalam nilai akun Beban Lainnya sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021.

#### 4. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	4.150.000.000,00	0,00	4.150.000.000,00	100,00
Dinas Sosial	344.100.000,00	0,00	344.100.000,00	100,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.480.000,00	0,00	10.480.000,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	7.530.000,00	0,00	7.530.000,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	855.000.000,00	0,00	855.000.000,00	100,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	576.500.000,00	0,00	576.500.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Selatan	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
Kecamatan Dumai Kota	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.088.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088.260.000,00</b>	<b>100,00</b>

3. **Surplus/(Defisit) Dari Operasi - LO**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
29.831.385.137,24	31.085.885.847,66	(1.254.500.710,42)	(4,04)

Realisasi Surplus/(Defisit) dari Operasi pada Tahun 2021 senilai Rp29.831.385.137,24, jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp31.085.885.847,66 maka mengalami penurunan senilai Rp1.254.500.710,42 atau sebesar 4,04%

4. **Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
(18.358.694.247,11)	0,00	(18.358.694.247,11)	100,00

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2021 senilai Rp18.358.694.247,11 jika dibandingkan pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.358.694.247,11 atau sebesar 100,00%.

a. **Surplus Penjualan Aset Non Lancar**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.463.468.896,94	0,00	1.463.468.896,94	100,00

b. **Defisit Penjualan Aset Non Lancar**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	926.794.300,00	0,00	926.794.300,00	100,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.255.087.484,47	0,00	1.255.087.484,47	100,00
PPKD	1.192.593.981,86	0,00	1.192.593.981,86	100,00
Dinas Kesehatan -RSUD	610.264.734,71	0,00	610.264.734,71	100,00
Dinas Kesehatan	2.494.054.238,71	0,00	2.494.054.238,71	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.478.794.739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.794.739,75</b>	<b>100,00</b>

c. **Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	13.343.368.404,30	0,00	13.343.368.404,30	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.343.368.404,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.343.368.404,30</b>	<b>100,00</b>

5. **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
11.472.690.890,14	31.085.885.847,66	(19.613.194.957,52)	(63,09)

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2021 sebesar Rp11.472.690.890,14 jika dibandingkan pada Tahun 2020 sebesar Rp31.085.885.847,66 maka mengalami penurunan senilai Rp19.613.194.957,52 atau sebesar 63,09%.

6. **Pos Luar Biasa**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
(6.103.210.871,00)	(1.587.695.669,00)	(4.515.515.202,00)	284,41

**a. Beban Luar Biasa**

SKPD	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	6.103.210.871,00	1.587.695.669,00	4.515.515.202,00	284,41
<b>Jumlah</b>	<b>6.103.210.871,00</b>	<b>1.587.695.669,00</b>	<b>4.515.515.202,00</b>	<b>284,41</b>

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Realisasi Beban Luar Biasa pada Tahun 2021 adalah senilai Rp6.103.210.871,00 sedangkan realisasi pada Tahun 2020 senilai Rp1.587.695.669,00 jika dibandingkan mengalami kenaikan sebesar Rp4.515.515.202,00 atau sebesar 284,41%.

**7. Surplus/(Defisit) - LO**

Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>5.369.480.019,14</b>	<b>29.498.190.178,66</b>	<b>(24.128.710.159,52)</b>	<b>(81,80)</b>

Jumlah Surplus senilai Rp5.369.480.019,14 tersebut merupakan (Surplus)/Defisit-LO Pemerintah Kota Dumai untuk Tahun 2021 dimana jumlah Pendapatan - LO secara keseluruhan lebih besar dari jumlah Beban. Total Pendapatan-LO selama Tahun 2021 senilai Rp1.372.376.641.914,38 sementara total Beban selama Tahun 2021 senilai Rp1.342.545.256.777,14 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama Tahun 2021 senilai Rp18.358.694.247,11 serta Beban Luar Biasa selama Tahun 2021 senilai Rp6.103.210.871,00.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

**5.7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS**

Laporan arus kas Pemerintah Kota Dumai disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi/yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendapatan serta belanja pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dana BOS telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Arus Kas ini. Laporan arus kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

5.7.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	170.101.395.346,27	284.301.517.509,81	(114.200.122.163,54)	(40,17)

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kota Dumai selama satu periode akuntansi. Mutasi antar kas tidak termasuk dalam arus kas aktivitas operasi, sehingga pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun 2021 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2021 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 senilai Rp170.101.395.346,27 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2021, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp284.301.517.509,81 mengalami penurunan senilai Rp114.200.122.163,54 atau sebesar 40,17%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

**Arus Masuk Kas**

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	185.979.625.987,00	165.259.957.085,00	20.719.668.902,00	12,54
Penerimaan Retribusi Daerah	23.776.863.396,46	32.672.832.980,00	(8.895.969.583,54)	(27,23)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.415.125.255,00	1.242.457.348,00	172.667.907,00	13,90
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	153.082.950.820,26	178.186.429.016,72	(25.103.478.196,46)	(14,09)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	61.856.297.144,00	47.181.306.000,00	14.674.991.144,00	31,10
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	83.612.659.443,00	196.815.267.029,00	(113.202.607.586,00)	(57,52)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	429.427.931.000,00	424.090.440.000,00	5.337.491.000,00	1,26

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	156.525.480.094,00	203.368.509.602,00	(46.843.029.508,00)	(23,03)
Penerimaan Dana Penyesuaian	31.603.245.000,00	45.719.565.000,00	(14.116.320.000,00)	(30,88)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.598.824.744,39	88.124.940.208,61	20.473.884.535,78	23,23
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	40.705.721.968,00	0,00	40.705.721.968,00	100,00
Penerimaan Hibah	0,00	40.900.800.000,00	(40.900.800.000,00)	(100,00)
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	7.988.000.000,00	39.267.300.000,00	(31.279.300.000,00)	(79,66)
<b>Jumlah</b>	<b>1.284.572.724.852,11</b>	<b>1.462.829.804.269,33</b>	<b>(178.257.079.417,22)</b>	<b>(12,19)</b>

#### Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	587.860.841.072,00	516.330.812.752,00	71.530.028.320,00	13,85
Pembayaran Barang	481.698.811.775,84	505.749.913.372,52	(24.051.101.596,68)	(4,76)
Pembayaran Hibah	35.855.199.901,00	35.706.875.500,00	148.324.401,00	0,42
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	3.844.800.000,00	(3.844.800.000,00)	(100,00)
Pembayaran Tak Terduga	9.056.476.757,00	116.895.885.135,00	(107.839.408.378,00)	(92,25)
<b>Jumlah</b>	<b>1.114.471.329.505,84</b>	<b>1.178.528.286.759,52</b>	<b>(64.056.957.253,68)</b>	<b>(5,44)</b>

#### 5. 7. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>(197.385.969.978,36)</b>	<b>(243.264.499.159,33)</b>	<b>45.878.529.180,97</b>	<b>(18,86)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (aset non keuangan) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan Tahun 2021 senilai minus Rp197.385.969.978,36 bila dibanding dengan Tahun 2020 senilai minus Rp243.264.499.159,33 mengalami kenaikan senilai Rp45.878.529.180,97 atau sebesar 18,86% dengan rincian:

#### Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.187.764.625,00	1.323.064.715,00	864.699.910,00	65,36
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	244.595.148,03	15.738.000,00	228.857.148,03	1.454,17
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	103.328.000,00	(103.328.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.432.359.773,03</b>	<b>1.442.130.715,00</b>	<b>990.229.058,03</b>	<b>68,66</b>

**Arus Keluar Kas**

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Perolehan Tanah	17.000.000,00	417.533.120,94	(400.533.120,94)	(95,93)
Perolehan Peralatan dan Mesin	84.262.101.427,00	79.237.744.886,87	5.024.356.540,13	6,34
Perolehan Gedung dan Bangunan	52.910.399.271,31	70.743.218.181,13	(17.832.818.909,82)	(25,21)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.397.085.845,08	78.745.131.364,39	(22.348.045.519,31)	(28,38)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.971.626.308,00	15.563.002.321,00	(9.591.376.013,00)	(61,63)
Perolehan Aset lainnya	260.116.900,00	0,00	260.116.900,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>199.818.329.751,39</b>	<b>244.706.629.874,33</b>	<b>(44.888.300.122,94)</b>	<b>(18,34)</b>

**5. 7. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 senilai Rp0,00 dan Tahun 2020 senilai Rp0,00 dengan rincian:

**Arus Masuk Kas**

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana DPPID	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. 7. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	158.417.065,84	(9.966.866.148,67)	10.125.283.214,51	(101,59)

Aktivitas keluar masuk aktivitas transitoris adalah aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2021 senilai Rp158.417.065,84 Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai minus Rp9.966.866.148,67 mengalami kenaikan senilai Rp10.125.283.214,51 atau sebesar 101,59%. Rincian dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

#### Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	64.985.014.845,00	84.752.839.025,21	(19.767.824.180,21)	(23,32)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) lainnya	168.578.067,00	0,00	168.578.067,00	100,00
Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	3.249.119.897,00	(3.249.119.897,00)	(100,00)
Penyesuaian Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD RSUD Tahun Sebelumnya	0,17	0,00	0,17	100,00
Penerimaan Bunga Tabungan Dana BOS Tahun Sebelumnya	0,00	1.568.441,00	(1.568.441,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>65.153.592.912,17</b>	<b>88.003.527.363,21</b>	<b>(22.849.934.451,04)</b>	<b>(25,96)</b>

#### Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	64.983.231.083,00	84.740.894.261,88	(19.757.663.178,88)	(23,32)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2020	11.944.763,33	90.909,00	11.853.854,33	13.039,25
Transaksi non anggaran Pihak Ketiga	0,00	13.227.839.900,00	(13.227.839.900,00)	(100,00)
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke	0,00	1.568.441,00	(1.568.441,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>64.995.175.846,33</b>	<b>97.970.393.511,88</b>	<b>(32.975.217.665,55)</b>	<b>(33,66)</b>

5. 7. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	(27.126.157.566,25)	31.070.152.201,81	(58.196.309.768,06)	(187,31)

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2021 adalah senilai minus Rp27.126.157.566,25. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp31.070.152.201,81 mengalami penurunan senilai Rp58.196.309.768,06 atau sebesar 187,31%.

5. 7. 6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	195.493.254.736,50	164.423.102.534,69	31.070.152.201,81	18,90

Saldo Awal Kas Tahun 2021 senilai Rp195.493.254.736,50. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp164.423.102.534,69 mengalami kenaikan senilai Rp31.070.152.201,81 atau sebesar 18,90%. Saldo Awal Kas terdiri dari Saldo awal kas di Kas Daerah senilai Rp180.523.375.691,00 , Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp6.754,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp14.858.775.821,60 , Kas Dana BOS sebesar Rp111.096.469,33,00

5. 7. 7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	168.367.097.170,25	195.493.254.736,50	(27.126.157.566,25)	(13,88)

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 senilai Rp168.367.097.170,25 terdiri dari kas di Kas Daerah senilai Rp141.438.187.794,38, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp334.000,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp26.691.058.326,87, Kas Dana BOS senilai Rp68.938.982 dan Kas Lainnya senilai Rp168.578.067,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp195.493.254.736,50 mengalami penurunan senilai minus Rp27.126.157.566,25 atau sebesar 13,88% dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2020
1	Kas di Kas Daerah	141.438.187.794,38	180.523.375.691,57
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	334.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.754,00
4	Kas di BLUD RSUD	24.407.569.819,09	13.318.278.228,77
5	Puskesmas Dumai Kota	253.850.408,04	118.495.893,82
6	Puskesmas Dumai Barat	110.288.663,34	91.020.865,65
7	Puskesmas Bukit Kapur	236.041.280,94	161.017.705,61
8	Puskesmas Sungai Sembilan	197.753.644,27	207.371.400,01
9	Puskesmas Medang Kampai	84.861.847,65	31.902.064,40
10	Puskesmas Bumi Ayu	372.706.909,63	227.046.534,19
11	Puskesmas Bukit Timah	62.390.972,75	25.950.940,65
12	Puskesmas Jayamukti	243.204.164,81	89.665.521,22
13	Puskesmas Purnama	112.072.170,16	81.558.063,96
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	489.594.996,19	328.773.452,32
15	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	120.723.450,00	177.695.151,00
16	Kas Dana BOS	68.938.982,00	111.096.469,33
17.	Kas Lainnya	168.578.067,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>168.367.097.170,25</b>	<b>195.493.254.736,50</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

**5. 8 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

**5. 8. 1. Ekuitas Awal**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2.957.502.181.459,58	3.201.628.359.955,59	(244.126.178.496,01)	(7,63)

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2021 adalah senilai Rp2.957.502.181.459,58 jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp3.201.628.359.955,59 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami penurunan senilai Rp244.126.178.496,01 atau sebesar 7,63%.

**5. 8. 2. Surplus/(Defisit) - LO**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(4.301.375.862,50)	29.498.190.178,66	(33.799.566.041,16)	(114,58)

Surplus/(defisit) – LO Tahun 2021 senilai minus Rp4.301.375.862,50 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp29.498.190.178,66 maka mengalami penurunan senilai Rp33.799.566.041,16 atau sebesar 114,58%. Surplus LO ini merupakan surplus atas kegiatan operasional (Basis Akrua), sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2021.

**5. 8. 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
4.417.066.394,21	(273.624.368.674,67)	278.041.435.068,88	(101,61)

Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengurangi Ekuitas Awal Tahun 2021 senilai Rp4.417.066.394,21 dan Tahun 2020 senilai minus Rp273.624.368.674,67, jika dibandingkan pada Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp278.041.435.068,88 atau sebesar 101,61%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar**

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	0,17	0,00	0,17	100,00
Koreksi Piutang	(830.438.438,45)	(39.079.869.279,07)	38.249.430.840,62	(97,88)
Koreksi Penyisihan Piutang	23.562.679,60	1.817.965.337,40	(1.794.402.657,80)	(98,70)
Koreksi Persediaan	0,00	(255.371.614,00)	255.371.614,00	(100,00)

Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(264.600.000,00)	0,00	(264.600.000,00)	(100,00)
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	264.600.000,00	0,00	264.600.000,00	100,00
Koreksi Aset Tetap	928.107.081,23	(209.697.797.772,85)	210.625.904.854,08	(100,44)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	6.822.526.549,28	824.138.609,44	5.998.387.939,84	727,84
Koreksi Aset Tidak Berwujud	0,00	(29.500.000,00)	29.500.000,00	(100,00)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2,50)	(105.024.625,00)	105.024.622,50	(100,00)
Koreksi Aset Lain-lain	(4.233.365.032,91)	(33.002.928.616,95)	28.769.563.584,04	(87,17)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.656.965.986,80	4.963.509.582,37	(3.306.543.595,57)	(66,62)
Koreksi Pendapatan diterima dimuka	(45.000.000,00)	0,00	(45.000.000,00)	100,00
Koreksi Utang	94.707.571,00	940.509.704,00	(845.802.133,00)	(89,93)
<b>Jumlah</b>	<b>4.417.066.394,21</b>	<b>(273.624.368.674,67)</b>	<b>278.041.435.068,88</b>	<b>(101,61)</b>

**1 Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>100,00</b>

Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas Tahun 2021 senilai Rp0,17 dan Tahun 2020 senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp0,17 atau sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan koreksi atas kas pada BLUD RSUD

**2 Koreksi Piutang**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>(830.438.438,45)</b>	<b>(39.079.869.279,07)</b>	<b>38.249.430.840,62</b>	<b>(97,88)</b>

Koreksi Piutang Tahun 2021 senilai minus Rp830.438.438,45 dan Tahun 2020 senilai minus Rp39.079.869.279,07. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp38.249.430.840,62 atau sebesar 97,88% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.2 Rincian Koreksi Piutang per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	(16.312.375,00)	16.312.375,00	(100,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(1.011.079.997,45)	(38.990.354.435,07)	37.979.274.437,62	(97,41)
Badan Pendapatan Daerah	0,00	(73.202.469,00)	73.202.469,00	(100,00)
Dinas Kesehatan	180.641.559,00	0,00	180.641.559,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>(830.438.438,45)</b>	<b>(39.079.869.279,07)</b>	<b>38.249.430.840,62</b>	<b>(97,88)</b>

Koreksi Piutang Tahun 2021 senilai minus Rp830.438.438,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.3 Koreksi Rincian Piutang Tahun 2021		
<b>1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>(1.011.079.997,45)</b>
Pembayaran Piutang PNS yang belum tercatat	(1.000.000,00)	
Koreksi saldo awal TGR	(79.997,45)	
Pembayaran TGR yang belum tercatat pada tahun lalu	(10.000.000,00)	

	Penghapusan Piutang PT. Air Bersih	(1.000.000.000,00)	
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>180.641.559,00</b>
	Koreksi piutang BLUD TA 2020	180.641.559,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>(830.438.438,45)</b>

### 3 Koreksi Penyisihan Piutang

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>23.562.679,60</b>	<b>1.817.965.337,40</b>	<b>(1.794.402.657,80)</b>	<b>(98,70)</b>

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2021 senilai Rp23.562.679,60 dan Tahun 2020 senilai Rp1.817.965.337,40. Jika dibandingkan dengan TA 2020 maka mengalami penurunan senilai Rp1.794.402.657,80 atau sebesar 98,70% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.4 Penyisihan Piutang per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	57.500,00	132.500,00	(75.000,00)	(56,60)
Badan Pendapatan Daerah	23.505.179,60	11.966.106,90	11.539.072,70	96,43
RSUD	0,00	1.805.866.730,50	(1.805.866.730,50)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>23.562.679,60</b>	<b>1.817.965.337,40</b>	<b>(1.794.402.657,80)</b>	<b>(98,70)</b>

**Tabel 5.8.5 Koreksi Piutang per OPD Tahun 2021**

<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Koreksi Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2021	57.500,00
<b>2</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	
	Koreksi Penyisihan Piutang air tanah Tahun 2020	23.505.179,60
	<b>Jumlah</b>	<b>23.562.679,60</b>

### 4 Koreksi Persediaan

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>0,00</b>	<b>(255.371.614,00)</b>	<b>255.371.614,00</b>	<b>(100,00)</b>

Koreksi Persediaan Tahun 2021 senilai minus Rp0,00 dan Tahun 2020 senilai minus Rp255.371.614,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp255.371.614,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.6 Koreksi Persediaan per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(255.371.614,00)	255.371.614,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>(255.371.614,00)</b>	<b>255.371.614,00</b>	<b>(100,00)</b>

### 5 Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>(264.600.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(264.600.000,00)</b>	<b>100,00</b>

Koreksi investasi jangka panjang non permanen Tahun 2021 senilai minus Rp264.600.000,00 dan Tahun 2020 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami penurunan senilai Rp264.600.000,00 atau sebesar 100,00%. Koreksi investasi jangka panjang non permanen ini merupakan penghapusan investasi non permanen pada Dinas Perdagangan.

**6 Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
264.600.000,00	0,00	264.600.000,00	100,00

Koreksi penyisihan investasi jangka panjang non permanen Tahun 2021 senilai Rp264.600.000,00 dan Tahun 2020 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp264.600.000,00 atau sebesar 100,00%. Koreksi investasi jangka panjang non permanen ini merupakan penghapusan investasi non permanen pada Dinas Perdagangan

**7 Koreksi Aset Tetap**

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
928.107.081,23	(209.697.797.772,85)	210.625.904.854,08	(100,44)

Koreksi Aset Tetap Tahun 2021 senilai Rp928.107.081,23 dan Tahun 2020 senilai minus Rp209.697.797.772,85 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp210.625.904.854,08 atau sebesar 100,44% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.7 Koreksi Aset Tetap per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(112.026.073,09)	112.026.073,09	(100,00)
2 Dinas Kesehatan	(3.084.239.494,32)	(2.681.320.346,61)	(402.919.147,71)	15,03
3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	(5.539.208.988,01)	5.539.208.988,01	(100,00)
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	(208.858.226.386,71)	208.858.226.386,71	(100,00)
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	(345.150.000,00)	345.150.000,00	(100,00)
6 Satuan Polisi Pamong Praja	(201.671.546,00)	392.384.111,88	(594.055.657,88)	(151,40)
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.092.455.500,00)	(154.866.000,00)	(937.589.500,00)	100,00
8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	63.539.600,00	(63.539.600,00)	(100,00)
9 Dinas Sosial	0,00	(722.660.850,00)	722.660.850,00	100,00
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	(95.673.000,00)	95.673.000,00	100,00
11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	42.465.000,00	(42.465.000,00)	(100,00)
12 Dinas Lingkungan Hidup	(1.569.918.000,00)	(470.641.000,00)	(1.099.277.000,00)	233,57
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	(253.314.800,00)	253.314.800,00	(100,00)
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	25.880.000,00	(25.880.000,00)	(100,00)
15 Dinas Perhubungan	(639.223.063,91)	447.766.967,02	(1.086.990.030,93)	(242,76)
17 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	112.786.546,00	(112.786.546,00)	0,00
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(165.374.600,00)	165.374.600,00	(100,00)
19 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	1.085.901.000,00	(1.085.901.000,00)	(100,00)

20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(93.530.999,00)	53.560.600,00	(147.091.599,00)	(274,63)
21	Dinas Perikanan	0,00	1.000.001,00	(1.000.001,00)	(100,00)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	(554.234.400,00)	554.234.400,00	(100,00)
23	Dinas Perdagangan	0,00	(276.540.000,00)	276.540.000,00	(100,00)
24	Sekretariat Daerah	(110.990.684,00)	1.586.397.136,49	(1.697.387.820,49)	(107,00)
25	Sekretariat DPRD	0,00	(1.667.765.000,00)	1.667.765.000,00	(100,00)
26	Kecamatan Dumai Barat	0,00	116.406.920,00	(116.406.920,00)	(100,00)
27	Kecamatan Dumai Timur	5.500.000,00	(159.127.200,00)	164.627.200,00	(103,46)
28	Kecamatan Bukit Kapur	0,00	1.236.145.180,04	(1.236.145.180,04)	(100,00)
29	Kecamatan Medang Kampai	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	(408.031.282,07)	408.031.282,07	(100,00)
31	Kecamatan Dumai Kota	0,00	(500.480.407,00)	500.480.407,00	(100,00)
32	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	231.450.601,88	(231.450.601,88)	(100,00)
33	Inspektorat	0,00	1.220.967.774,15	(1.220.967.774,15)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	(358.921.300,00)	358.921.300,00	(100,00)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.267.796.267,00	7.697.762.675,00	1.570.033.592,00	20,40
	PPKD	(1.553.159.898,54)	0,00	(1.553.159.898,54)	(100,00)
36	Badan Pendapatan Daerah	0,00	68.858.645,18	(68.858.645,18)	(100,00)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	(760.508.898,00)	760.508.898,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>928.107.081,23</b>	<b>(209.697.797.772,85)</b>	<b>210.625.904.854,08</b>	<b>(100,44)</b>

**Tabel 5.8.8 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2021**

<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>(3.084.239.494,32)</b>
	Penghapusan Aset	(3.084.239.494,32)	
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		<b>(201.671.546,00)</b>
	Koreksi Atas Reklas Aset Tetap Ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	(201.671.546,00)	
<b>2</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>(1.092.455.500,00)</b>
	Penghapusan aset	(5.800.000,00)	
	Penghapusan aset alat komunikasi	(57.725.000,00)	
	Penghapusan bangunan gedung kantor	(1.025.040.500,00)	
	Penghapusan JIJ	(3.890.000,00)	
<b>3</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		<b>(1.569.918.000,00)</b>
	Penghapusan Lelang KPKNL SK No.798 TA 2021	(94.500.000,00)	
	Penghapusan Lelang KPKNL Gedung Dan Bangunan SK 798 TA 2021	(1.475.418.000,00)	
	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>(639.223.063,91)</b>
	Koreksi Atas Reklas Aset Tetap Ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	(639.223.063,91)	
<b>4</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>(110.990.684,00)</b>
	Penghapusan /pemusnahan barang inventaris kantor peralatan dan mesin	(74.433.332,00)	
	Penghapusan (pemusnahan)aset tetap berupa barang inventaris kantor peralatan dan mesin	(36.557.352,00)	
	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>		<b>(93.530.999,00)</b>
	Koreksi Atas Reklas Aset Tetap Ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	(93.530.999,00)	
	<b>Kecamatan Dumai Timur</b>		<b>5.500.000,00</b>
	Koreksi Atas Reklas Aset Tetap Ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat)	5.500.000,00	

5	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>7.714.636.368,46</b>
	Hasil Inventarisasi	17.040.488.000,00	
	Penghapusan Aset	(7.772.691.733,00)	
	Penghapusan aset	(1.553.159.898,54)	
	<b>Jumlah</b>		<b>928.107.081,23</b>

**8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>6.822.526.549,28</b>	<b>824.138.609,44</b>	<b>5.998.387.939,84</b>	<b>727,84</b>

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 senilai Rp6.822.526.549,28 dan Tahun 2020 senilai Rp824.138.609,44 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp5.998.387.939,84 atau sebesar 727,84% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.9 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	789.336.817,65	(789.336.817,65)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	717.845.981,22	483.248.075,66	234.597.905,56	48,55
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	5.117.645.198,95	(5.117.645.198,95)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.184.714.664,81)	(5.655.038.043,48)	4.470.323.378,67	(79,05)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	1.168.490.178,37	(1.168.490.178,37)	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	197.279.546,00	(25.799.943,02)	223.079.489,02	(864,65)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	131.148.816,67	(201.567.267,86)	332.716.084,53	(165,06)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(60.289.600,00)	60.289.600,00	(100,00)
9	Dinas Sosial	0,00	485.971.547,04	(485.971.547,04)	(100,00)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	150.800.354,79	(150.800.354,79)	(100,00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	28.727.449,44	(28.727.449,44)	(100,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(590.448.572,67)	(3.804.865.632,19)	3.214.417.059,52	(84,48)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	260.454.800,00	(260.454.800,00)	(100,00)
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(73.657.600,00)	28.941.103,50	(102.598.703,50)	(354,51)
15	Dinas Perhubungan	323.150.547,02	(1.016.179.626,45)	1.339.330.173,47	(131,80)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	(15.488.088,00)	318.858.160,00	(334.346.248,00)	100,00
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	(79.999.924,47)	79.999.924,47	(100,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,08	161.220.677,31	(161.220.677,23)	(100,00)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(3.644.281,95)	(378.373.774,89)	374.729.492,94	(99,04)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93.770.999,00	(167.894.170,00)	261.665.169,00	(155,85)
21	Dinas Perikanan	0,00	113.433.764,35	(113.433.764,35)	(100,00)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	404.312.723,10	(404.312.723,10)	(100,00)
23	Dinas Perdagangan	(236.033.310,25)	1.605.565.459,99	(1.841.598.770,24)	(114,70)
24	Sekretariat Daerah	(55.061.405,36)	1.704.775.322,77	(1.759.836.728,13)	(103,23)
25	Sekretariat DPRD	-	1.132.020.257,76	(1.132.020.257,76)	(100,00)
26	Kecamatan Dumai Barat	2.822.614,29	132.565.673,60	(129.743.059,31)	(97,87)
27	Kecamatan Dumai Timur	2.967.842,86	167.973.062,87	(165.005.220,01)	(98,23)

28	Kecamatan Bukit Kapur	(2.954.285,71)	(465.722.026,05)	462.767.740,34	100,00
29	Kecamatan Medang Kampai	9.325.114,29	(6.855.014,20)	16.180.128,49	(236,03)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	3.213.162,31	620.210.351,45	(616.997.189,14)	(99,48)
31	Kecamatan Dumai Kota	0,00	87.957.145,09	(87.957.145,09)	(100,00)
32	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	35.677.163,00	(35.677.163,00)	(100,00)
33	Inspektorat	(87.970.609,75)	(311.031.800,00)	223.061.190,25	(71,72)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	357.823.492,53	(357.823.492,53)	(100,00)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.076.691.897,60	(2.870.233.021,78)	10.946.924.919,38	(381,39)
	PPKD	(485.717.153,56)	0,00	(485.717.153,56)	
36	Badan Pendapatan Daerah	0,00	(6.644.222,94)	6.644.222,94	(100,00)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	518.623.897,55	(518.623.897,55)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.822.526.549,28</b>	<b>824.138.609,44</b>	<b>5.998.387.939,84</b>	<b>727,84</b>

**Tabel 5.8.10 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021**

<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>717.845.981,22</b>
	akum.penysusutan penghapusan kendaraan BM 2263 R TA 2021	13.000.000,00	
	Jurnal Koreksi Akumulasi Penyusutan Penghapusan Gedung Tahun 2021	518.863.255,61	
	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan Blud Puskesmas Sungai Sembilan Tahun 2020	(618.750,00)	
	Jurnal Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	(768.278.901,09)	
	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Blud Puskesmas Bumi Ayu Tahun 2020	250.000,00	
	Jurnal Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	358.325.950,00	
	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Meubelair Blud Puskesmas Jayamukti Tahun 2020	420.000,00	
	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Blud Puskesmas Bukit Kayu kapur Tahun 2020	62.000,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	926.353.771,36	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(383.295.816,21)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	209.596.479,60	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(3.332.008,05)	
	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan transfer ke PPKD	(153.500.000,00)	
<b>2</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>(1.184.714.664,81)</b>
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(1.070.574.703,07)	
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	(158.153.912,55)	
	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	44.013.950,81	
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		<b>197.279.546,00</b>
	Koreksi atas Reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain	197.279.546,00	
<b>3</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>131.148.816,67</b>
	Penghapusan akumulasi penyusutan	580.000,00	
	Penghapusan akumulasi penyusutan	57.725.000,00	
	Penghapusan akumulasi penyusutan gedung kantor	75.252.750,00	
	Penghapusan Akumulasi Peny. JIJ	427.900,00	

	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat keamanan	(113.333,33)	
	Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat pelindung	(3.910.000,00)	
	Koreksi kurang akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin	3.657.500,00	
	Koreksi Pencatatan	(2.471.000,00)	
<b>4</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		<b>(590.448.572,67)</b>
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Angkutan Barang Atas Hibah Dari Prov.Riau	(833.337.639,20)	
	Akumulasi Penyusutan Atas Penghapusan Lelang Kpknl 2021	18.900.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Penghapusan Lelang Kpknl Sk 798 Thn 2021	207.929.516,53	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya s.d 2020	(1.598.300,00)	
	Akumulasi Penyusutan Atas Reklas Dari Alat Pengolahan Ke Alat Pembersih	17.657.850,00	
<b>5</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		<b>(15.488.088,00)</b>
	Akumulasi Penyusutan TF Masuk atas Reklas dari Gedung ke Alat Kantor	(15.488.088,00)	
<b>6</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>		<b>0,08</b>
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	0,08	
<b>7</b>	<b>Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</b>		<b>(3.644.281,95)</b>
	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam s.d 2020	(3.644.281,95)	
<b>8</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>		<b>93.770.999,00</b>
	koreksi akumulasi penyusutan	240.000,00	
	Koreksi Reklas ke aset lain-lain	93.530.999,00	
<b>9</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		<b>(73.657.600,00)</b>
	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor S.D 2020	(73.657.600,00)	
<b>10</b>	<b>Dinas Perdagangan</b>		<b>(236.033.310,25)</b>
	Hibah Masuk Dari Propinsi Riau Ke Pemko Dumai Gedung Dan Bangunan	(236.033.310,25)	
<b>11</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>(55.061.405,36)</b>
	Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Gedung Tempat Ibadah	(166.052.089,36)	
	Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	74.433.332,00	
	Akumulasi Penyusutan Mebel	36.557.352,00	
<b>12</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>		<b>2.822.614,29</b>
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Pompa Karena Perubahan Masa Manfaat Aset transfer Dari BPBD TA 2021	2.822.614,29	
<b>13</b>	<b>Kecamatan Dumai Timur</b>		<b>2.967.842,86</b>
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Perubahan Masa Manfaat Aset transfer Masuk Dari BPBD TA 2021	8.467.842,86	
	Koreksi reklas aset tetap ke aset lain-lain	(5.500.000,00)	
	<b>Kecamatan Bukit Kapur</b>		<b>(2.954.285,71)</b>
	Koreksi Pencatatan	(2.954.285,71)	
<b>14</b>	<b>Kecamatan Medang Kampai</b>		<b>9.325.114,29</b>
	Akumulasi Penyusutan Atas Reklas Dari KIB Jalan Ke Kib Bangunan Pelengkap Air Kotor	6.502.500,00	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Pompa Karena Perubahan Masa Manfaat Aset transfer Dari BPBD TA 2021	2.822.614,29	
<b>15</b>	<b>Kecamatan Sungai Sembilan</b>		<b>3.213.162,31</b>
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Pompa Karena Perubahan Masa Manfaat Atas transfer dari BPBD TA 2021	2.822.614,29	
	Penyesuaian Penyusutan Transfer Masuk Gedung Kantor	390.548,02	
<b>16</b>	<b>Inspektorat</b>		<b>(87.970.609,75)</b>
	Akumulasi Penyusutan Reklas Bangunan Ke JIJ	(87.887.359,96)	

	Koreksi Nilai Akum.Penyusutan Bangunan Gedung Kantor atas transfer dari PUPR	(83.249,79)	
<b>17</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>323.150.547,02</b>
	Akum.penyusutan hibah masuk kendaraan dari Provinsi TA 2021	(267.370.354,00)	
	Koreksi akumul.penyusutan transfer dari perkim	75.487.500,00	
	Reklas Aset tetap ke aset lain-lain	515.033.401,02	
<b>18</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>7.590.974.744,04</b>
	Akum.penyusutan hibah kendaraan ke pesantren	195.500.000,00	
	Akum.penyusutan atas penghapusan kendaraan sk no.505 thn 2021	4.772.430.383,57	
	Akum.penyusutan atas penghapusan sk no.673 th 2021	2.237.132.778,00	
	Penghapusan kendaraan dengan penjualan langsung	290.000.000,00	
	Akum.penyusutan penghapusan gedung tempat pendidikan	104.149.161,02	
	Koreksi akumulasi penyusutan karna koreksi pencatatan	581.628.736,03	
	Koreksi Pencatatan	(1.226.585.178,86)	
	Koreksi Pencatatan	636.718.864,28	
	<b>Jumlah</b>		<b>6.822.526.549,28</b>

### 9 Koreksi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0,00	(29.500.000,00)	29.500.000,00	(100,00)

Koreksi Aset tidak berwujud Tahun 2021 senilai Rp0,00 dan Tahun 2020 senilai minus Rp29.500.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp29.500.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.11 Koreksi Aset Tidak Berwujud per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(29.500.000,00)	29.500.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.500.000,00)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>(100,00)</b>

### 10 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(2,50)	(105.024.625,00)	105.024.622,50	(100,00)

Koreksi Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2021 senilai minus Rp2,50 dan Tahun 2020 senilai minus Rp105.024.625,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp105.024.622,50 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.12 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	29.500.000,00	(29.500.000,00)	100,00
2 Dinas Perhubungan	0,00	(149.409.000,00)	149.409.000,00	(100,00)
3 Badan Pendapatan Daerah	0,00	14.884.375,00	(14.884.375,00)	(100,00)
4 Dinas Perpustakaan dan kearsipan	(2,50)	0,00	(2,50)	100,00

<b>Jumlah</b>	<b>(2,50)</b>	<b>(105.024.625,00)</b>	<b>105.024.622,50</b>	<b>(100,00)</b>
---------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

## 11 Koreksi Aset Lain-lain

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
<b>(4.233.365.032,91)</b>	<b>(33.002.928.616,95)</b>	<b>28.769.563.584,04</b>	<b>(87,17)</b>

Koreksi Aset lain-lain Tahun 2021 senilai minus Rp4.233.365.032,91 dan Tahun 2020 senilai minus Rp33.002.928.616,95 jika dibandingkan dengan TA 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp28.769.563.584,04 atau sebesar 87,17% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.13 Koreksi Aset Lain-lain per OPD**

OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(24.225.232.958,96)	24.225.232.958,96	(100,00)
2 Dinas Kesehatan	(953.059.095,82)	(2.000.000,00)	(951.059.095,82)	100,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	5.264.832.339,01	(5.264.832.339,01)	100,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.920.190.000,00)	(6.397.180.000,00)	3.476.990.000,00	(54,35)
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	(32.370.000,00)	32.370.000,00	100,00
6 Satuan Polisi Pamong Praja	207.671.546,00	(269.220.000,00)	476.891.546,00	100,00
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(4.800.000,00)	4.800.000,00	100,00
8 Dinas Sosial	0,00	(33.443.070,00)	33.443.070,00	100,00
9 Dinas Lingkungan Hidup	0,00	205.541.000,00	(205.541.000,00)	100,00
10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(19.484.550,00)	19.484.550,00	100,00
11 Dinas Perhubungan	846.643.063,91	(279.084.000,00)	1.125.727.063,91	(403,36)
12 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	(1.818.500,00)	1.818.500,00	100,00
13 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	(515.685.827,00)	515.685.827,00	100,00
14 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93.530.999,00	(45.503.825,00)	139.034.824,00	100,00
15 Dinas Perikanan	0,00	(297.720.000,00)	297.720.000,00	(100,00)
16 Sekretariat Daerah	0,00	(429.451.000,00)	429.451.000,00	(100,00)
17 Sekretariat DPRD	0,00	696.720.000,00	(696.720.000,00)	100,00
18 Kecamatan Medang Kampai	0,00	(23.947.392,00)	23.947.392,00	(100,00)
19 Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	6.996.784,00	(6.996.784,00)	(100,00)
20 Kecamatan Dumai Selatan	0,00	(1.500.000,00)	1.500.000,00	(100,00)
Kecamatan Dumai Timur	(5.500.000,00)	0,00	(5.500.000,00)	100,00
21 Inspektorat	0,00	(228.489.615,00)	228.489.615,00	(100,00)
22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	95.660.000,00	(95.660.000,00)	100,00
23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	578.131.998,00	(578.131.998,00)	(100,00)
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(1.502.461.546,00)	(7.043.880.000,00)	5.541.418.454,00	(78,67)
<b>Jumlah</b>	<b>(4.233.365.032,91)</b>	<b>(33.002.928.616,95)</b>	<b>28.769.563.584,04</b>	<b>(87,17)</b>

**Tabel 5.8.14 Rincian Koreksi Aset Lain-lain Tahun 2021**

1 <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>(2.920.190.000,00)</b>
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(2.531.663.000,00)	

	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(388.527.000,00)	
<b>2</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		<b>207.671.546,00</b>
	Penambahan Aset rusak berat dari ekstrakomptabel tahun lalu	6.000.000,00	
	Reklas aset tetap ke aset lain-lain	201.671.546,00	
<b>3</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>(1.502.461.546,00)</b>
	Penghapusan aset rusak berat	(1.502.461.546,00)	
<b>4</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>846.643.063,91</b>
	Reklas keluar ke aset lain-lain dari ekstrakomptabel	207.420.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap ke aset lain-lain	639.223.063,91	
	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>		<b>93.530.999,00</b>
	Reklas dari Aset Tetap ke aset lain-lain	93.530.999,00	
	<b>Kecamatan Dumai Timur</b>		<b>(5.500.000,00)</b>
	Reklas dari Aset Tetap ke aset lain-lain	(5.500.000,00)	
<b>5</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>(953.059.095,82)</b>
	Penghapusan aset rusak berat RSUD	(953.059.095,82)	
	<b>Jumlah</b>		<b>(4.233.365.032,91)</b>

## 12 Koreksi Akumulasi Penyusutan

### Aset lain-lain

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>1.656.965.986,80</b>	<b>4.963.509.582,37</b>	<b>(3.306.543.595,57)</b>	<b>(66,62)</b>

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021 senilai Rp1.656.965.986,80 dan Tahun 2020 senilai Rp4.963.509.582,37 jika dibandingkan dengan TA 2020 maka mengalami penurunan senilai Rp3.306.543.595,57 atau sebesar 66,62% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.15 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per OPD**

	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Sekretariat Daerah	0,00	429.451.000,00	(429.451.000,00)	(100,00)
2	Sekretariat DPRD	0,00	(696.720.000,00)	696.720.000,00	(100,00)
3	Inspektorat	0,00	228.489.615,00	(228.489.615,00)	(100,00)
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	9.169.574.922,69	(9.169.574.922,69)	(100,00)
5	Dinas Kesehatan	284.899.361,11	2.000.000,00	282.899.361,11	14.144,97
6	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	(4.561.148.087,57)	4.561.148.087,57	100,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	675.284.740,00	1.448.294.670,00	(773.009.930,00)	(53,37)
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	32.370.000,00	(32.370.000,00)	(100,00)
9	Dinas Sosial	0,00	33.443.070,00	(33.443.070,00)	(100,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	(203.279.546,00)	269.220.000,00	(472.499.546,00)	100,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(203.760.571,43)	203.760.571,43	(100,00)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	19.484.550,00	(19.484.550,00)	(100,00)
14	Dinas Perhubungan	(514.369.115,31)	(1.043.654.669,50)	529.285.554,19	(50,71)
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(93.530.999,00)	45.503.825,00	(139.034.824,00)	(305,55)
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	0,00	130.210.577,00	(130.210.577,00)	(100,00)
17	Dinas Perikanan	0,00	297.720.000,00	(297.720.000,00)	(100,00)

18	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	1.818.500,00	(1.818.500,00)	(100,00)
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	(95.660.000,00)	95.660.000,00	(100,00)
20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	(577.506.998,25)	577.506.998,25	(100,00)
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.502.461.546,00	0,00	1.502.461.546,00	100,00
22	Kecamatan Dumai Selatan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
23	Kecamatan Medang Kampai	0,00	23.947.392,00	(23.947.392,00)	(100,00)
24	Kecamatan Dumai Timur	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
25	Kecamatan Sungai Sembilan	0,00	4.131.787,43	(4.131.787,43)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.656.965.986,80</b>	<b>4.963.509.582,37</b>	<b>(3.306.543.595,57)</b>	<b>(66,62)</b>

<b>1</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>		<b>675.284.740,00</b>
	Akum.penysusutan aset lain-lain yg dihapuskan 2021	609.235.150,00	
	Akum.penysusutan atas koreksi aset lain-lain	66.049.590,00	
<b>2</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		<b>(203.279.546,00)</b>
	Penambahan aset rusak berat dari ekstrakomtabel tahun lalu	(6.000.000,00)	
	Reklas Aset tetap ke aset lain-lain	(197.279.546,00)	
<b>3</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>(514.369.115,31)</b>
	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan (Masuk kedalam Extracom)	4.950.000,00	
	Koreksi atas amortisasi ARB tahun 2020 BM 2473 R	(4.285.714,29)	
	Reklas Aset tetap ke aset lain-lain	(515.033.401,02)	
<b>4</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>1.502.461.546,00</b>
	penghapusan akumulasi penyusutan ARB 2021	1.502.461.546,00	
	<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>		<b>(93.530.999,00)</b>
	Reklas Aset tetap ke aset lain-lain	(93.530.999,00)	
	<b>Kecamatan Dumai Timur</b>		<b>5.500.000,00</b>
	Reklas Aset tetap ke aset lain-lain	5.500.000,00	
<b>5</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>284.899.361,11</b>
	Akum.penysusutan penghapusan aset rusak berat	284.899.361,11	
	<b>Jumlah</b>		<b>1.656.965.986,80</b>

### 13 Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(45.000.000,00)	0,00	(45.000.000,00)	100,00

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 senilai minus Rp45.000.000,00 dan Tahun 2020 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami penurunan senilai Rp45.000.000,00 atau sebesar 100,00%

### 14 Koreksi Utang

Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
94.707.571,00	940.509.704,00	(845.802.133,00)	(89,93)

Koreksi Utang Beban Tahun 2021 senilai Rp94.707.571,00 dan Tahun 2020 senilai Rp940.509.704,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami penurunan senilai Rp845.802.133,00 atau sebesar 89,93% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8.17 Koreksi Utang Beban per OPD**

	OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0,00	94.202.873,00	(94.202.873,00)	(100,00)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	867.265.000,00	(867.265.000,00)	(100,00)
3	Dinas Perhubungan	0,00	(45.532.167,00)	45.532.167,00	100,00
4	Dinas Perdagangan	0,00	24.573.998,00	(24.573.998,00)	100,00
5	Dinas Kesehatan	93.551.771,00	0,00	93.551.771,00	100,00
6	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
7	Kecamatan Dumai Barat	1.090.800,00	0,00	1.090.800,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.707.571,00</b>	<b>940.509.704,00</b>	<b>(845.802.133,00)</b>	<b>(89,93)</b>

**Tabel 5.8.18 Rincian Koreksi Utang Tahun 2021**

<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>93.551.771,00</b>
	Koreksi hutang kegiatan BLUD TA 2020	6.368.133,00
	Koreksi Utang Jasa TA 2020	(292.223.117,00)
	Koreksi Utang Honorarium TA 2020	(6.400.250,00)
	Koreksi Utang OBAT BHP TA 2020	385.807.005,00
<b>2</b>	<b>Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>65.000,00</b>
	Koreksi Utang Internet TA 2020	65.000,00
<b>3</b>	<b>Kecamatan Dumai Barat</b>	<b>1.090.800,00</b>
	Koreksi Utang internet TA 2020	1.024.500,00
	Koreksi Utang Telp TA 2020	66.300,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.707.571,00</b>

**5. 8. 4. Ekuitas Akhir**

	Tahun 2021	Tahun 2020	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	<b>2.974.537.461.488,77</b>	<b>2.957.502.181.459,58</b>	<b>17.035.280.029,19</b>	<b>0,58</b>

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 adalah senilai Rp2.974.537.461.488,77 jika dibandingkan pada Tahun 2020 senilai Rp2.957.502.181.459,58 jika dibandingkan dengan Tahun 2020 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.035.280.029,19 atau sebesar 0,58%



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

---

**BAB VI**

**PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI LAINNYA**

**A. UMUM**

1. Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau. Kota Dumai dibentuk tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50.

Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.727,38 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat, Pulau Rupat dan Selat Malaka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec.Batin Solapan Kabupaten Bengkalis; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang berlaku tanggal 1 Desember 2016, Struktur Organisasi Pemerintah Kota Dumai mengalami perubahan dengan struktur baru sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat; dan
- d. Badan, yaitu:
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 3) Badan Pendapatan Daerah;
  - 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Dinas:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - 5) Dinas Sosial;
  - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 7) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 11) Dinas Perdagangan;
  - 12) Dinas Perhubungan;
  - 13) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - 14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 16) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - 17) Dinas Perikanan;
  - 18) Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - 19) Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - 20) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Kecamatan yaitu:
- 1) Kecamatan Dumai Barat;
  - 2) Kecamatan Dumai Timur;
  - 3) Kecamatan Bukit Kapur;
  - 4) Kecamatan Medang Kampai;
  - 5) Kecamatan Sungai Sembilan;
  - 6) Kecamatan Dumai Kota; dan
  - 7) Kecamatan Dumai Selatan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 Pasal 2, menyatakan RSUD sebagai organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan Kesehatan.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Kepala Daerah

Setelah masa jabatan walikota Dumai periode 2016-2021 (Drs. H. Zulkifli, A.S, M.Si sebagai Walikota dan Eko Suharjo, S.E sebagai Wakil Walikota Dumai) berakhir tanggal 17 November 2020, diangkat Dr. H. Herdi Salioso, S.E., MA sebagai Pelaksana Harian Walikota Dumai masa jabatan TMT 18 November 2020 s.d 30 Januari 2021. Kemudian setelah itu diangkat H. Jonli, S.Sos, M.Si sebagai Penjabat Walikota Dumai masa Jabatan TMT 31 Januari 2021 s.d 25 Februari 2021.

Dan Walikota dan Wakil Walikota Dumai periode Tahun 2021-2024 TMT 26 Februari 2021 s.d. saat ini adalah H. Paisal, SKM, MARS sebagai Walikota dan H. Amris, S.Sy sebagai Wakil Walikota Dumai.

**B. KEUANGAN**

1. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 161, Perubahan Anggaran dapat dilakukan bilamana terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan ansumsi kebijakan umum anggaran;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021, yang selanjutnya mengalami 4 (empat) kali perubahan penjabaran APBD sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas APBD tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2021;
2. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021;
3. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Tahun 2021;

4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021.

2. Penggunaan Nomenklatur Akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 berdasarkan hasil *mapping* antara akun Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dengan akun Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil *mapping* akun tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mapping Akun LRA

Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020		Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai
<b>PENDAPATAN</b>		<b>PENDAPATAN</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	→	Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah	→	Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	→	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD Yang Sah	→	Lain-lain PAD Yang Sah
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>		<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>
Dana Bagi Hasil	→	Bagi Hasil Pajak
	→	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum	→	Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus - Fisik	→	Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	→	
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>		<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>
Dana Insentif Daerah	→	Dana Penyesuaian
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>		<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>
Pendapatan Bagi Hasil	→	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Bantuan Keuangan	→	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>
Pendapatan Lainnya	→	Pendapatan Lainnya
<b>BELANJA</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>BELANJA OPERASI</b>
Belanja Pegawai	→	Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa	→	Belanja Barang dan Jasa
Belanja Hibah	→	Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial	→	Belanja Bantuan Sosial
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>BELANJA MODAL</b>
Belanja Modal Tanah	→	Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	→	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	→	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	→	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	→	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>
Belanja Tak Terduga	→	Belanja Tidak Terduga
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>
Penggunaan SILPA	→	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. Mapping Akun LO

Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020		Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai
<b>PENDAPATAN</b>		<b>PENDAPATAN</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
Pendapatan Pajak Daerah	→	Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah	→	Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	→	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah	→	Lain-lain PAD yang Sah
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>		<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>
Dana Bagi Hasil	→	Dana Bagi Hasil Pajak
	→	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum	→	Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus-Fisik	→	Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	→	
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	→	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>
Dana Insentif Daerah	→	Dana Penyesuaian
Dana Otonomi Khusus	→	Dana Otonomi Khusus
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>		<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>
Bantuan keuangan	→	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	→	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>
Pendapatan Hibah	→	Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat	→	Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya	→	Pendapatan Lainnya
<b>BEBAN</b>		<b>BEBAN</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>		<b>BEBAN OPERASI</b>
Beban Pegawai	→	Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa	→	Beban Persediaan
	→	Beban Jasa
	→	Beban Pemeliharaan
	→	Beban Perjalanan Dinas
Beban Bunga	→	Beban Bunga
Beban Subsidi	→	Beban Subsidi
Beban Hibah	→	Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial	→	Beban Bantuan Sosial
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	→	Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	→	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	→	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	→	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	→	
Beban Penyusutan Aset Lainnya	→	
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	→	Beban Penyisihan Piutang
<b>BEBAN TRANSFER</b>		
Beban Bagi Hasil	→	Beban Transfer
Beban Bantuan Keuangan	→	Beban Bantuan Keuangan
	→	Beban Lain-lain*
<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>		
Beban Tak Terduga	→	
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	→	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>		<b>POS LUAR BIASA</b>
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		
Beban Luar Biasa	→	Beban Luar Biasa
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	→	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Beban lain-lain berasal dari beban suku cadang alat angkutan, beban suku cadang lainnya, Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

4. Mapping Akun LPE





**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

5. Mapping Akun Neraca

Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020		Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai
<b>ASET</b>		<b>ASET</b>
<b>ASET LANCAR</b>		<b>ASET LANCAR</b>
<b>Kas dan Setara kas</b>		
Kas di Kas Daerah	→	Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran	→	Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan	→	Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD	→	Kas di Badan Layanan Umum Daerah
	→	Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya
Kas Dana BOS	→	Kas di Bendahara BOS
Investasi Jangka Pendek	→	Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak	→	Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi	→	Piutang Retribusi
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	→	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	→	Piutang Dana Bagi Hasil
	→	Piutang Dana Alokasi Umum
	→	Piutang Dana Alokasi Khusus
Piutang Transfer Antar Daerah	→	Piutang Transfer - DBH Provinsi
Piutang Lainnya	→	Piutang Lainnya
Peyisihan Piutang	→	Penyisihan Piutang
Persediaan	→	Persediaan
Beban Dibayar Dimuka	→	Beban Dibayar Dimuka
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>
<b>Investasi Non Permanen</b>		<b>Investasi Non Permanen</b>
Dana Bergulir	→	Investasi Non Permanen Lainnya
	→	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya
<b>Investasi Permanen</b>		<b>Investasi Permanen</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	→	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
<b>ASET TETAP</b>		<b>ASET TETAP</b>
Tanah	→	Tanah
Peralatan dan Mesin	→	Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan	→	Gedung dan Bangunan
Jalan,Irigasi dan Jaringan	→	Jalan,Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya	→	Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan	→	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan	→	Akumulasi Penyusutan
<b>ASET LAINNYA</b>		<b>ASET LAINNYA</b>
<b>Tagihan Jangka Panjang</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	→	Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	→	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud	→	Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	→	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain	→	Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	→	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
<b>KEWAJIBAN</b>		<b>KEWAJIBAN</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	→	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka	→	Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja	→	Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya	→	Utang Jangka Pendek Lainnya
<b>EKUITAS</b>	→	<b>EKUITAS</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

6. Mapping Akun LAK

Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>
Penerimaan Pajak Daerah	→ Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah	→ Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	→ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	→ Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil	→ Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
	→ Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum	→ Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	→ Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	
Penerimaan Dana Insentif Daerah	
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	→ Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Keistimewaan	→ Penerimaan Dana Penyesuaian
Penerimaan Dana Desa	→ Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Penerimaan Bantuan Keuangan	→ Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
Penerimaan Hibah	→ Penerimaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat	→ Penerimaan Dana Darurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	→ Penerimaan Lainnya
	→ Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>
Pembayaran Pegawai	→ Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan Jasa	→ Pembayaran Barang
Pembayaran Bunga	→ Pembayaran Bunga
Pembayaran Subsidi	→ Pembayaran Subsidi
Pembayaran Hibah	→ Pembayaran Hibah
Pembayaran Bantuan Sosial	→ Pembayaran Bantuan Sosial
	→ Pembayaran Bantuan Keuangan
Pembayaran Tak Terduga	→ Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	→ Pembayaran Bagi Hasil Pajak
Pembayaran Belanja Bantuan keuangan antar daerah provinsi	→ Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
Pembayaran Belanja Bantuan keuangan ke kabupaten/Kota	→ Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	→ Pembayaran Kejadian Luar Biasa
Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	→ Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	→ Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	→ Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap Lainnya	→ Penjualan Aset Tetap Lainnya
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>
Perolehan Tanah	→ Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin	→ Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan	→ Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	→ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya	→ Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset lainnya	→ Perolehan Aset lainnya
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	→ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	→ Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	→ <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	→ <b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	→ <b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

7. Mapping Akun LPSAL

Permendagri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020		Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	→	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	→	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SiKPA)	→	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SiKPA)
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	→	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA
LAIN-LAIN	→	LAIN-LAIN
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	→	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**BAB VII**

**PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas untuk pengakuan realisasi belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan, aset, kewajiban dan ekuitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2021 secara keseluruhan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yakni APBD, sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

**WALIKOTA DUMAI,**



**H. PAISAL, SKM, MARS**